



GOVERNOR OF EAST JAVAH
GOVERNOR OF EAST JAVAH

NUMBER 16 YEAR 2026

ABOUT

PLANNED REDUCTION OF POVERTY
REGION YEAR 2025 - 2029

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF EAST JAVAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
6. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.
7. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan Masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
9. Intervensi Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, serta Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengarusutamaan (*mainstreaming*) isu dalam penyusunan program kerja di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

- a. menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi jumlah penduduk miskin; dan
- b. melaksanakan konvergensi upaya penanggulangan kemiskinan secara sistematis, terencana, dan terukur.

BAB III RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 4

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 5

- (1) Sistematika RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. bab I yang berisi pendahuluan;
 - b. bab II yang berisi profil kemiskinan daerah;
 - c. bab III yang berisi strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan;
 - d. bab IV yang berisi rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. bab V yang berisi penutup.
- (2) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari RPJMD.
 - (3) Ketentuan mengenai dokumen RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKPK.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 16); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 60),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026
NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2025-2029

**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi, dari tahun ke tahun selalu menjadi isu utama baik di level global, nasional maupun regional, sehingga perlu perhatian banyak pihak dan menjadi prioritas pembangunan. Kemiskinan tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keberdayaan dalam memenuhi hak-hak dasar, antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, dan lainnya.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, menghadapi sejumlah tantangan dalam lima tahun terakhir 2020-2024. Meskipun kemiskinan Jawa Tengah menurun secara bertahap, persentase penduduk miskin tetap tinggi di beberapa daerah. Penyebab kemiskinan ini masih didominasi dengan tingginya faktor pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah dan keterbatasan akses kesehatan serta keterbatasan infrastruktur dasar di beberapa kantong kemiskinan di Jawa Tengah. Selain itu, pandemi COVID-19 memperburuk kondisi dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin akibat kehilangan pekerjaan dan menurunnya daya beli masyarakat. Selain kemiskinan, tantangan lain yang dihadapi adalah masih terdapat penduduk miskin ekstrem.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan berbagai program/kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Beberapa intervensi yang telah dilakukan seperti program bantuan sosial, perluasan jaminan kesehatan, dan peningkatan alokasi dana desa guna mendukung pembangunan infrastruktur lokal dan pemberdayaan ekonomi untuk menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah. Pasca Pandemi Covid-19, kondisi aktivitas masyarakat dan perekonomian semakin membaik ditandai dengan mobilitas masyarakat yang terus meningkat, sehingga perkembangan ekonomi Jawa Tengah turut membaik. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 4,95 persen, walaupun menurun dari capaian tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,97 persen. Pertumbuhan Ekonomi tersebut menjadi penyumbang perekonomian keempat di pulau Jawa dengan kontribusi 14,36% (BPS Jawa Tengah, 2025).

Sejalan dengan upaya intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin termasuk miskin ekstrem serta percepatan pemulihan ekonomi, persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada September 2024 menurun 0,89 persen poin menjadi 9,58 persen dibanding Maret 2024 yang sebesar 10,47 persen dengan jumlah penduduk miskin 3.396,34 ribu orang, turun sebesar 307,99 ribu orang terhadap Maret 2024. Walaupun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, angka kemiskinan di Jawa Tengah masih di atas nasional. Hal ini akan terus diupayakan penurunannya secara sistematis. Selain pengentasan kemiskinan secara makro, Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, sesuai amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Tantangan yang dihadapi Indonesia dan Jawa Tengah untuk lima tahun ke depan adalah terkait mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi secara cepat (Nasional hingga mencapai di atas 6%) untuk itu perlu penguatan melalui kemandirian ekonomi dengan pendekatan pemberdayaan dan graduasi guna mendukung target Indonesia Emas 2045, hanya saja saat ini kondisi global sedang dalam keadaan belum stabil. Permasalahan perubahan iklim, krisis pangan dan perang sedang terjadi serta ketidakstabilan geopolitik sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Untuk tantangan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, selama lima tahun terakhir (2020–2024) mencerminkan kompleksitas masalah sosial dan ekonomi. Salah satu kendala utama adalah ketimpangan distribusi bantuan sosial keterbatasan data yang valid sering menghambat penyaluran yang tepat sasaran. Selain itu, tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya kualitas pendidikan di beberapa wilayah terutama di daerah pedesaan.

Kendala lain yang dihadapi di Jawa Tengah adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur di daerah terpencil yang menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar, akses konektivitas antar daerah serta perekonomian dalam meningkatkan daya saing daerah. Mendasarkan kondisi tersebut maka menjadi penting integrasi kebijakan lintas sektor, seperti investasi pada pendidikan vokasi dan peningkatan akses kredit untuk usaha kecil, guna memberdayakan masyarakat miskin. Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah komitmen pemerintah daerah terhadap program penanggulangan kemiskinan turut memperlambat capaian target pengurangan kemiskinan ekstrem.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, diperlukan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang diimplementasikan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan karakteristik kemiskinan masing-masing daerah, karena kompleksitas kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Provinsi memiliki kewajiban menyusun

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), yaitu dokumen perencanaan yang bertujuan untuk mengurai persoalan kemiskinan. Selain itu, RPKD memberikan ruang fleksibilitas dalam menentukan prioritas penanganan permasalahan di setiap daerah sesuai dengan kondisi daerah yang menyangkut indikator kemiskinan dalam dimensi yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, sosial, ketenagakerjaan, ketahanan pangan dan lain-lain. Untuk itu perlu disusun RPKD sebagai pedoman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan selama 2025 – 2029 guna mewujudkan sinergitas kebijakan dan program kegiatan di Jawa Tengah.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengarusutamaan (*mainstreaming*) isu dalam penyusunan program kerja di daerah;
2. Mempertajam intervensi penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) terutama tujuan pertama terkait penanggulangan kemiskinan.
3. RPKD berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan bagi TKPK Provinsi dalam melakukan perencanaan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan antar Kabupaten/Kota di wilayahnya.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
16. Surat Edaran Nomor 900.1/9812/SJ Tentang Pedoman Penandaan Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2026
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (5-66/2025));

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (9-221/2024));
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 175);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

D. METODE DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RPKD

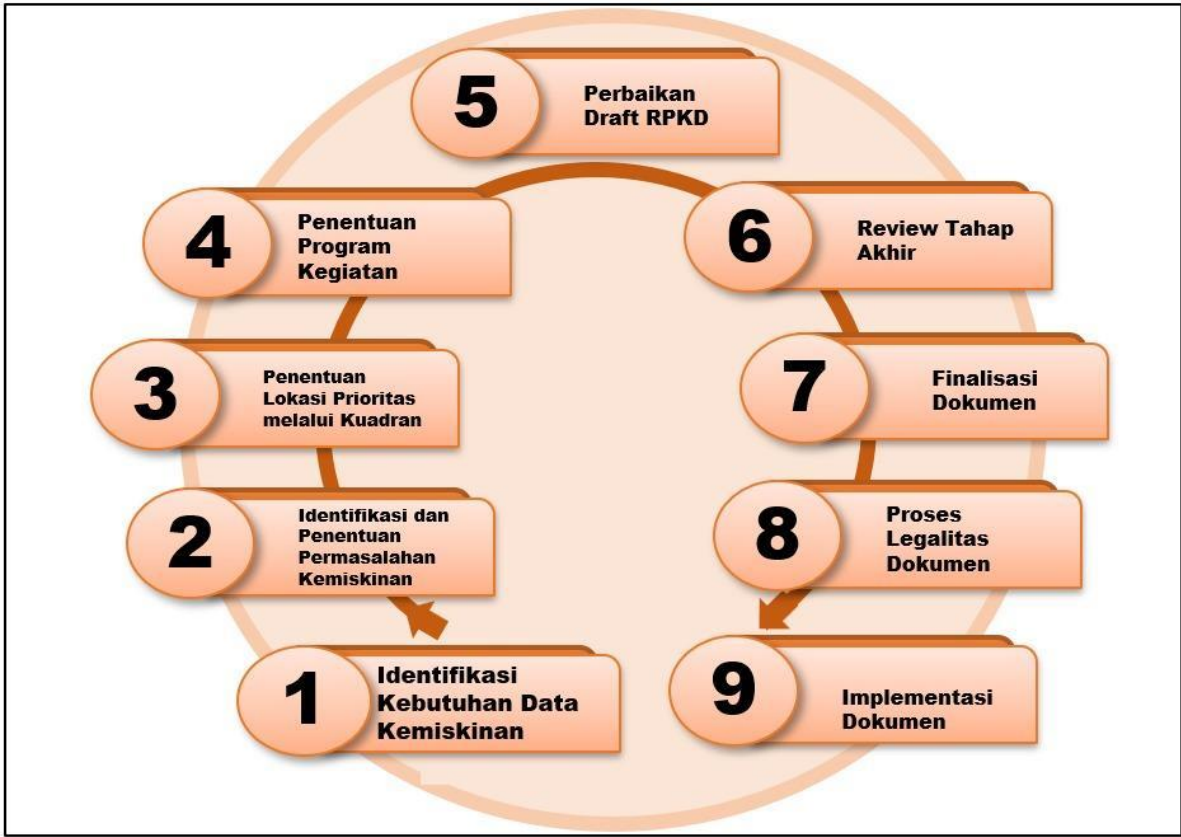
Penyusunan dokumen RPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota serta memperhatikan hasil Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dokumen/kertas hasil diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Penyusunan RPKD dilakukan untuk mempertajam dokumen RPJMD dengan metode:

- 1. Pendekatan substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah terkait penanggulangan kemiskinan.** Fokus utamanya adalah bagaimana RPKD dapat mengisi, mempertajam dan memperkaya substansi dari setiap dokumen perencanaan dan penganggaran reguler daerah dengan cara memastikan seluruh substansi dari setiap bagian dalam RPKD dapat mengisi dan mempertajam substansi terkait isu percepatan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- 2. Pendekatan substansi terhadap tahapan dan tata cara penyusunan dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.** Fokus utamanya bagaimana substansi dari setiap bagian dalam RPKD dapat mengisi, memperkaya dan mempertajam tahapan dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan dan reguler daerah (RKPD dan Renja Perangkat Daerah).

3. Pendekatan Prioritas Wilayah. Fokus utamanya adalah bagaimana RPKD dapat memetakan sasaran prioritas wilayah dan bentuk intervensi berdasarkan analisis indikator utama dan indikator pendukung.

Tahapan penyusunan RPKD dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPKD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

Tahapan penyusunan RPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 dilakukan dengan pentahapan:

1. Identifikasi Kebutuhan Data Kemiskinan

Tahap ini dilakukan dengan melakukan pemetaan kebutuhan data yang terkait dengan karakteristik dan penyebab kemiskinan yang diantaranya diperoleh dari DTSEN, sekaligus kebutuhan data indikator makro dan mikro yang menjadi parameter utama dan pendukung yang berpengaruh terhadap kemiskinan .

2. Identifikasi dan Penentuan Permasalahan Kemiskinan dan Penyusunan *Theory of Change*

Tahap identifikasi dan penentuan permasalahan/ pembedangan kemiskinan dilakukan dengan melihat karakteristik wilayah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BRIDA Provinsi Jawa Tengah yang mengkategorikan menjadi beberapa karakteristik tertentu. Hasil analisis karakteristik wilayah selanjutnya disimpulkan, apa permasalahan/pembedangan yang menyebabkan kemiskinan di Jawa Tengah. Selanjutnya dari permasalahan/pembedangan berupaya menemukan akar masalah penyebab kemiskinan yang dihadapi pada

setiap bidang. Akar masalah tersebut dapat diperoleh melalui analisis dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan (*supply side*) dan aspek pemanfaatan (*demand side*). Analisis ini dilakukan untuk mencari indikator yang lebih rinci (indikator pendukung) dari indikator utama bidang yang telah dianalisis, yaitu indikator pada level kegiatan atau intervensi.

Tujuannya adalah mendapatkan indikator yang dapat digunakan untuk menentukan intervensi prioritas dari masalah utama bidang.

3. Penentuan Lokasi Prioritas melalui Kuadran

Selanjutnya menentukan lokasi prioritas dengan cara melakukan analisis prioritas intervensi wilayah. Daerah akan terbantu dalam menetapkan lokasi prioritas intervensi kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil lebih efektif dan tepat sasaran. Penentuan lokasi prioritas dilakukan menggunakan alat analisis kuadran, yaitu menemukan kombinasi lokasi yang bermasalah menurut indikator utama dan indikator pendukung untuk kemudian ditetapkan sebagai lokasi prioritas kuadran 1, 2, 3 dan 4.

4. Penentuan Program Kegiatan

Penentuan program kegiatan dilakukan melalui tinjauan kebijakan pelaksanaan di daerah (pemetaan program kegiatan yang mendukung penanggulangan kemiskinan) menyangkut ketepatan dan komplementaritasnya. Ketepatan program dilakukan untuk melihat ketepatan sasarannya individu, kelompok, keluarga, dan rumah tangga. Selain itu ketepatan juga dapat dilihat yang menyangkut tepat jumlah, tepat waktu dan mempunyai nilai manfaat. Sementara komplementaritas program dilihat dengan tujuan utama agar masyarakat paling miskin dipastikan mendapatkan seluruh program terutama program perlindungan sosial.

5. Perbaikan Draft RPKD

Tahap ini dilakukan untuk menyempurnakan keseluruhan bab rancangan RPKD setelah memperoleh dan mangakomodir saran masukan dari berbagai sumber yaitu akademisi, perangkat daerah dan kabupaten/kota.

6. Review Tahap Akhir

Review dilakukan untuk memastikan RPKD sudah memenuhi kaidah penyusunan dan telah mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

7. Finalisasi Dokumen

Finalisasi dokumen merupakan tahapan akhir setelah dilakukan *review* dan cek secara keseluruhan untuk memastikan semua substansi sudah terintegrasi dalam RPKD.

8. Proses Legalitas Dokumen

Proses legalitas RPKD dalam bentuk Peraturan Gubernur dilakukan melalui fasilitasi Biro Hukum dan Kementerian Hukum untuk selanjutnya dilakukan review oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pengesahan oleh Kepala Daerah apabila telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

9. Implementasi Dokumen

RPKD berlaku apabila telah mendapat persetujuan pengesahan dari Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur, Selanjutnya implementasi RPKD menjadi acuan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, dasar hukum, metode dan tahapan penyusunan RPKD, sistematika penulisan serta pemanfaatan dokumen RPKD.

2. Bab II Profil Kemiskinan Daerah

Berisi uraian tentang konsep kemiskinan, kondisi kemiskinan daerah, kondisi perekonomian dan karakteristik kewilayahan, analisis kemiskinan berdasarkan karakteristik wilayah di Jawa Tengah, permasalahan kemiskinan, isu strategis penanggulangan kemiskinan, gambaran keuangan daerah serta pembiayaan non APBD untuk penanggulangan kemiskinan.

3. Bab III Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Berisi uraian tentang hubungan strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada dokumen perencanaan pusat dan daerah, strategi utama penanggulangan kemiskinan, fokus strategi penanggulangan kemiskinan, pentahapan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, program prioritas gubernur dan wakil gubernur, target kemiskinan daerah, prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan.

4. Bab IV Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan

Berisi uraian tentang matriks rencana aksi daerah meliputi strategi utama, aktivitas riil, target dan lokasi prioritas.

5. Bab V Penutup

F. PEMANFAATAN DOKUMEN RPKD

Dokumen RPKD yang telah disahkan selanjutnya akan digunakan oleh pihak pemerintah dan non pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan dokumen ini menjadi rujukan dalam pengentasan kemiskinan yang akan dilaksanakan di setiap tahunnya. Tabel 1.1 menjelaskan aktifitas untuk pemanfaatan dokumen RPKD:

Tabel 1.1
Pemanfaatan Dokumen RPKD

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	OPD	Non OPD
Identifikasi Kebutuhan Data Kemiskinan	Pemanfaatan data kemiskinan untuk sasaran intervensi yang tertuang dalam dokumen DPA untuk kegiatan dan sub kegiatan	Intervensi kegiatan menggunakan data kemiskinan sesuai publikasi dari pemerintah provinsi Jawa Tengah
Identifikasi dan Penentuan Permasalahan Kemiskinan	Aktivitas kegiatan/sub kegiatan menjadi intervensi langsung/tidak langsung/ penunjang	Berkoordinasi dengan TKPK Provinsi Jawa Tengah untuk penentuan bidang permasalahan kemiskinan yang akan diintervensi
Penentuan Lokasi Prioritas melalui Kuadran	Aktivitas kegiatan/sub kegiatan memperhatikan dari lokus sasaran apakah sesuai dengan lokus sasaran kemiskinan	Berkoordinasi dengan TKPK Provinsi Jawa Tengah untuk penentuan lokasi permasalahan kemiskinan yang akan diintervensi
Penentuan Program Kegiatan	Program/kegiatan dan sub kegiatan sudah ditandai sebagai bentuk intervensi penanggulangan kemiskinan	Menyesuaikan dengan program kegiatan yang dimiliki organisasi
Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	Hasil pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang sudah tertagging disampaikan ke TKPK	Melaporkan hasil intervensi ke TKPK atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan
Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	Mengukur outcome kegiatan/sub kegiatan kemudian dijadikan bahan perencanaan tahun berikutnya	Mendapatkan masukan dan TKPK untuk intervensi kegiatan di tahun selanjutnya

BAB II

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

A. KONSEP KEMISKINAN

Secara umum kemiskinan dipandang sebagai kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, ketidakmampuan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan.

Banyak konsep dan pengukuran yang digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan karena kemiskinan bersifat multi-dimensi dan kompleks. Konsep kemiskinan yang digunakan dalam dokumen RPKD ini adalah konsep kemiskinan menurut BPS. Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran dikonseptualisasikan dengan garis kemiskinan). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). GK merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan garis kemiskinan non makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.

Indikator kemiskinan konsumsi ditunjukkan dengan persentase penduduk di bawah GK terhadap seluruh penduduk atau persentase penduduk miskin, indikator ini disebut *head count index* (P0), karakteristik penduduk di bawah garis kemiskinan juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, artinya semakin sulit kemiskinan diturunkan. Nilai agregat dari indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program (BPS, 2003).

Selain itu kesenjangan antar penduduk miskin juga dapat dilihat dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin besar disparitas kondisi antar

rumah tangga miskin; sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan distribusi pengeluaran lebih merata. Indikator ini penting untuk memahami heterogenitas kemiskinan dan mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dari indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada penurunan jumlah penduduk miskin (P0), melainkan juga harus mempertimbangkan seberapa jauh kondisi mereka dari garis kemiskinan (P1) serta tingkat ketimpangan antar penduduk miskin (P2). Dengan memahami ketiga indikator ini secara komprehensif, kebijakan pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran, baik dalam bentuk program jangka pendek maupun strategi jangka panjang guna mengurangi disparitas dan mempercepat perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin.

B. KONDISI KEMISKINAN DAERAH

Kondisi kemiskinan Jawa Tengah menggambarkan persentase penduduk miskin (P0) dan jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

1. Garis Kemiskinan Jawa Tengah

Garis kemiskinan di Jawa Tengah periode September 2024 sebesar Rp. 521.093 per kapita per bulan, meningkat 2,78 persen dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar Rp. 507.001 per kapita per bulan.

Pada daerah perkotaan Garis Kemiskinan periode September 2024 sebesar Rp. 532.913 per kapita per bulan atau naik 3,00 persen dari kondisi Maret 2024 yang sebesar Rp. 517.415 per kapita per bulan. Sedangkan Garis Kemiskinan di perdesaan periode September 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 2,56 persen menjadi sebesar Rp. 508.298 per kapita per bulan dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar Rp. 495.627 per kapita per bulan.

Dengan memperhatikan komponen garis kemiskinan, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan adalah:

a. Komoditi Makanan

Pada Tahun 2022-2024 komoditi makanan yang memberi sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Komoditi makanan yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan tahun 2022-2024 baik di perkotaan maupun perdesaan yaitu beras, rokok kretek filter, daging ayam ras dan telur ayam ras. Untuk lebih lengkapnya ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya di Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Komoditi Makanan	2022		2023		2024	
		Kota (%)	Desa (%)	Kota (%)	Desa (%)	Kota (%)	Desa (%)
1	Beras	18,16	19,58	20,00	20,87	22,62	23,94
2	Rokok kretek filter	9,55	8,76	11,45	9,43	7,18	5,80
3	Telur ayam ras	4,01	4,12	4,28	3,86	4,54	4,37
4	Daging ayam ras	4,07	4,29	4,69	3,96	5,35	4,97
5	Gula pasir	2,65	2,44	2,43	2,39	2,31	2,26
6	Tempe	2,70	2,78	2,57	2,76	2,81	2,71
7	Kue basah	2,54	-	2,10	-	2,42	2,60
8	Mie instan	2,52	2,40	2,48	2,47	2,35	2,42
9	Cabe rawit	-	2,18	-	2,16	-	-
10	Tahu	2,55	2,54	-	2,43	2,23	2,09
11	Bawang merah	2,24	2,37	2,26	2,51	-	-
12	Roti	-	-	2,10	-	2,14	1,97
13	Komoditi makanan lainnya	23,67	24,34	20,87	23,00	21,37	22,32

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022-2024, diolah

Pada Tabel 2.1 dijelaskan bahwa kontribusi Beras sebagai penyumbang Garis Kemiskinan Makanan juga semakin meningkat di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kontribusi beras di dalam salah satu GKM cukup berperan penting, sehingga ke depan fokus terhadap Beras perlu menjadi agenda penting bagi strategi kemiskinan di Jawa Tengah.

b. Komoditi Bukan Makanan

Pada Tahun 2022-2024 komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan di daerah perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama, Komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik dan pendidikan. Untuk lebih lengkapnya ditunjukkan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya di Provinsi Jawa Tengah

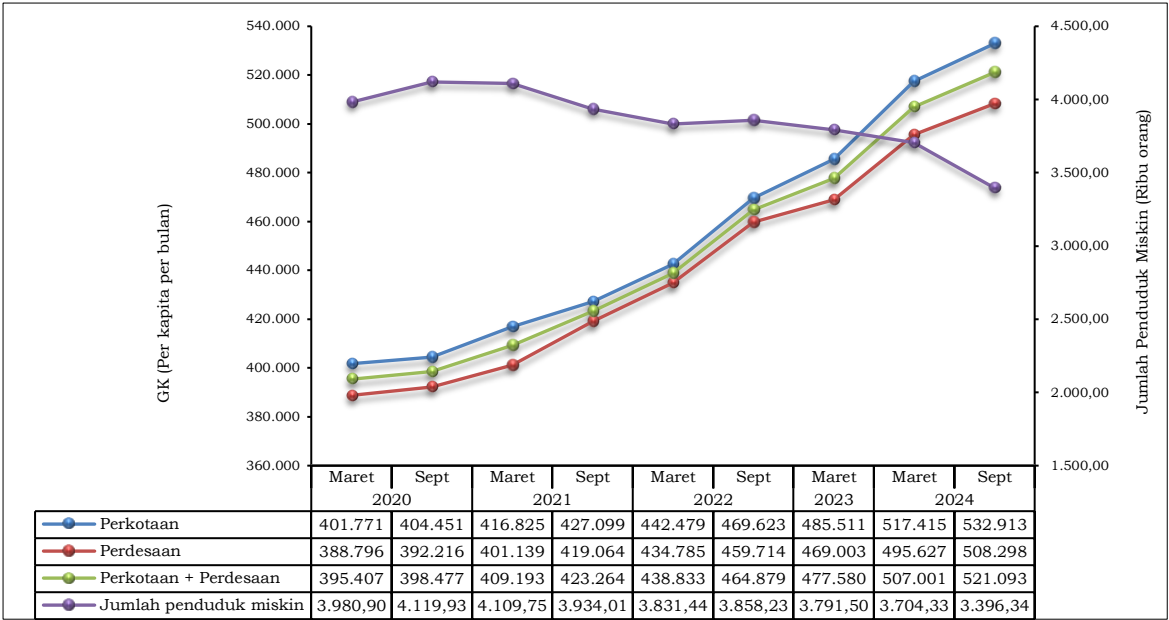
No	Jenis Komoditi Bukan Makanan	2022		2023		2024	
		Kota (%)	Desa (%)	Kota (%)	Desa (%)	Kota (%)	Desa (%)
1	Perumahan	7,18	8,31	7,28	8,02	6,58	8,08
2	Bensin	4,73	3,77	4,33	4,07	5,42	4,77
3	Listrik	2,30	1,35	2,62	1,76	2,63	1,63
4	Pendidikan	2,00	1,15	1,87	1,25	1,96	1,14
5	Kesehatan	0,65	-	0,79	0,84	0,65	0,98
6	Perlengkapan mandi	1,26	1,21	1,28	1,17	1,10	1,06

No	Jenis Komoditi Bukan Makanan	2022		2023		2024	
		Kota (%)	Desa (%)	Kota (%)	Desa (%)	Kota (%)	Desa (%)
7	Kayu bakar	-	0,78	-	-	-	-
8	Pajak kendaraan bermotor	0,68	-	0,61	-	0,61	0,70
9	Sabun cuci	-	0,77	-	0,77	-	-
10	Komoditi bukan makanan lainnya	6,55	6,87	6,01	6,27	5,71	6,19

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022-2024, diolah

Pada Tabel 2.2 untuk GKNM kebutuhan pengeluaran listrik mengalami peningkatan, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberi perhatian khusus akan kebutuhan listrik ini walaupun secara kontribusi tidak terlalu besar.

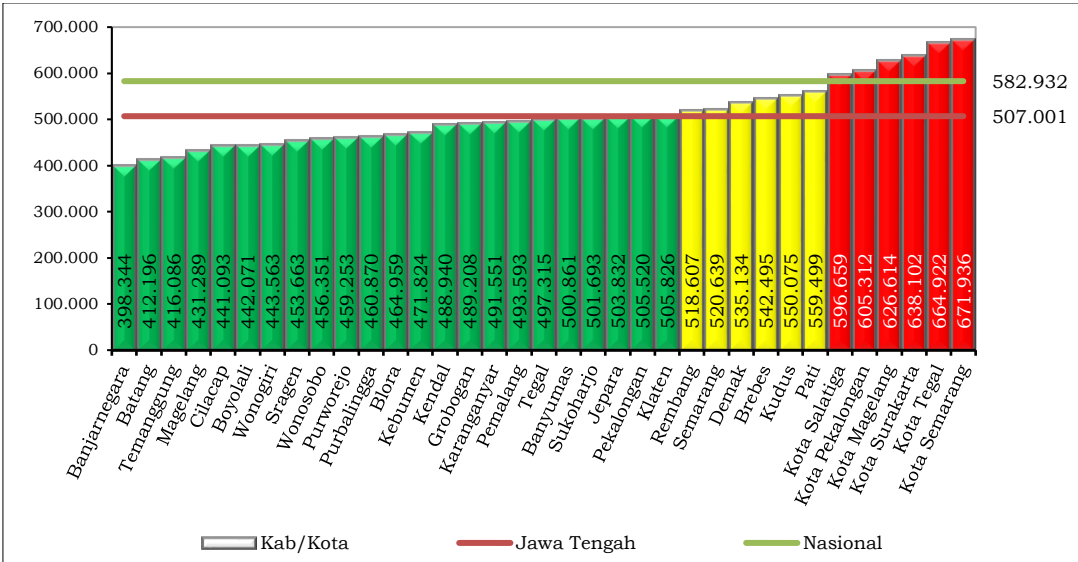
Dari kedua komoditas tersebut kemudian menjadi dasar untuk penentuan GK. GK Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) terus meningkat namun tidak memberikan pengaruh signifikan dalam penurunan penduduk miskin, sebagaimana Gambar 2.1 berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024, diolah
Catatan: Angka kemiskinan periode Sept. 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

Gambar 2.1
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) dan Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan orang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Posisi relatif persebaran Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2024, sebagaimana Gambar 2.2 berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024, diolah

Gambar 2.2
Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2024 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Berdasarkan Gambar 2.2 dapat diketahui bahwa Kabupaten/Kota dengan garis kemiskinan paling rendah adalah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 398.344,- per kapita per bulan, sedangkan garis kemiskinan paling tinggi adalah Kota Semarang sebesar Rp. 671.936,- per kapita per bulan,

Posisi relatif persebaran garis kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2024 (Maret) terhadap provinsi dan nasional dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Garis Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang berada di atas garis kemiskinan provinsi dan nasional, terdapat di 6 kota, yaitu Kota Semarang, Tegal, Surakarta, Magelang, Pekalongan dan Salatiga;
- 2) Garis Kemiskinan Sedang, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di atas garis kemiskinan provinsi dan di bawah garis kemiskinan nasional, terdapat di 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Pati, Kudus, Brebes, Demak, Semarang dan Rembang;
- 3) Garis Kemiskinan Rendah, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi dan nasional, terdapat di 23 kabupaten, yaitu Klaten, Pekalongan, Jepara, Sukoharjo, Banyumas, Tegal, Pemalang, Karanganyar, Grobogan, Kendal, Kebumen, Blora, Purbalingga, Purworejo, Wonosobo, Sragen, Wonogiri, Boyolali, Cilacap, Magelang, Temanggung, Batang dan Banjarnegara.

Garis Kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota pada Tahun 2020 - 2024, sebagaimana Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) dan Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang) Provinsi Jawa Tengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

No,	Kabupaten/Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
		Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin
1	Kab. Cilacap	351.735	198.60	363.367	201.70	384.955	190.96	419.429	191,00	441.093	186,08
2	Kab. Banyumas	406.250	225.84	417.086	232.90	441.520	220.47	479.027	216,50	500.861	207,78
3	Kab. Purbalingga	375.199	149.48	384.183	153.10	407.849	145.33	439.208	143,41	460.870	136,72
4	Kab. Banjarnegara	318.334	144.95	328.679	150.20	351.333	141.25	380.046	138,99	398.344	137,68
5	Kab. Kebumen	380.557	211.09	390.599	212.90	416.004	196.16	451.678	195,45	471.824	187,95
6	Kab. Purworejo	364.289	84.79	376.127	88.80	393.731	82.64	427.622	81,28	459.253	78,02
7	Kab. Wonosobo	362.683	137.64	373.474	139.70	399.180	128.11	425.105	123,70	456.351	121,49
8	Kab. Magelang	342.430	146.34	353.608	154.90	377.497	145.33	411.129	144,49	431.289	143,80
9	Kab. Boyolali	347.520	100.59	361.922	104.80	383.030	97.18	420.339	97,48	442.071	95,96
10	Kab. Klaten	419.510	151.83	436.896	158.20	458.872	144.87	488.102	144,43	505.826	141,84
11	Kab. Sukoharjo	393.776	68.89	410.273	73.80	434.318	68.72	476.675	68,79	501.693	68,15
12	Kab. Wonogiri	341.643	104.37	356.728	110.50	376.763	105.19	414.901	104,82	443.563	102,57
13	Kab. Karanganyar	385.563	91.72	401.542	95.40	424.677	88.56	465.703	88,64	491.551	87,37
14	Kab. Sragen	348.890	119.38	363.349	122.90	389.265	115.14	426.482	114,62	453.663	110,65
15	Kab. Grobogan	395.001	172.26	404.456	175.70	428.597	163.20	464.614	162,52	489.208	159,00
16	Kab. Blora	353.259	103.73	363.649	107.10	390.478	99.83	425.135	99,61	464.959	99,14
17	Kab. Rembang	403.932	100.08	414.977	101.40	441.482	94.56	477.514	91,97	518.607	91,45
18	Kab. Pati	445.913	127.37	458.616	128.70	486.855	118.04	532.545	118,18	559.499	116,84
19	Kab. Kudus	429.666	64.24	450.992	67.10	482.806	66.06	520.830	65,16	550.075	65,69
20	Kab. Jepara	407.056	91.14	419.028	95.20	442.618	89.08	479.131	86,75	503.832	80,84

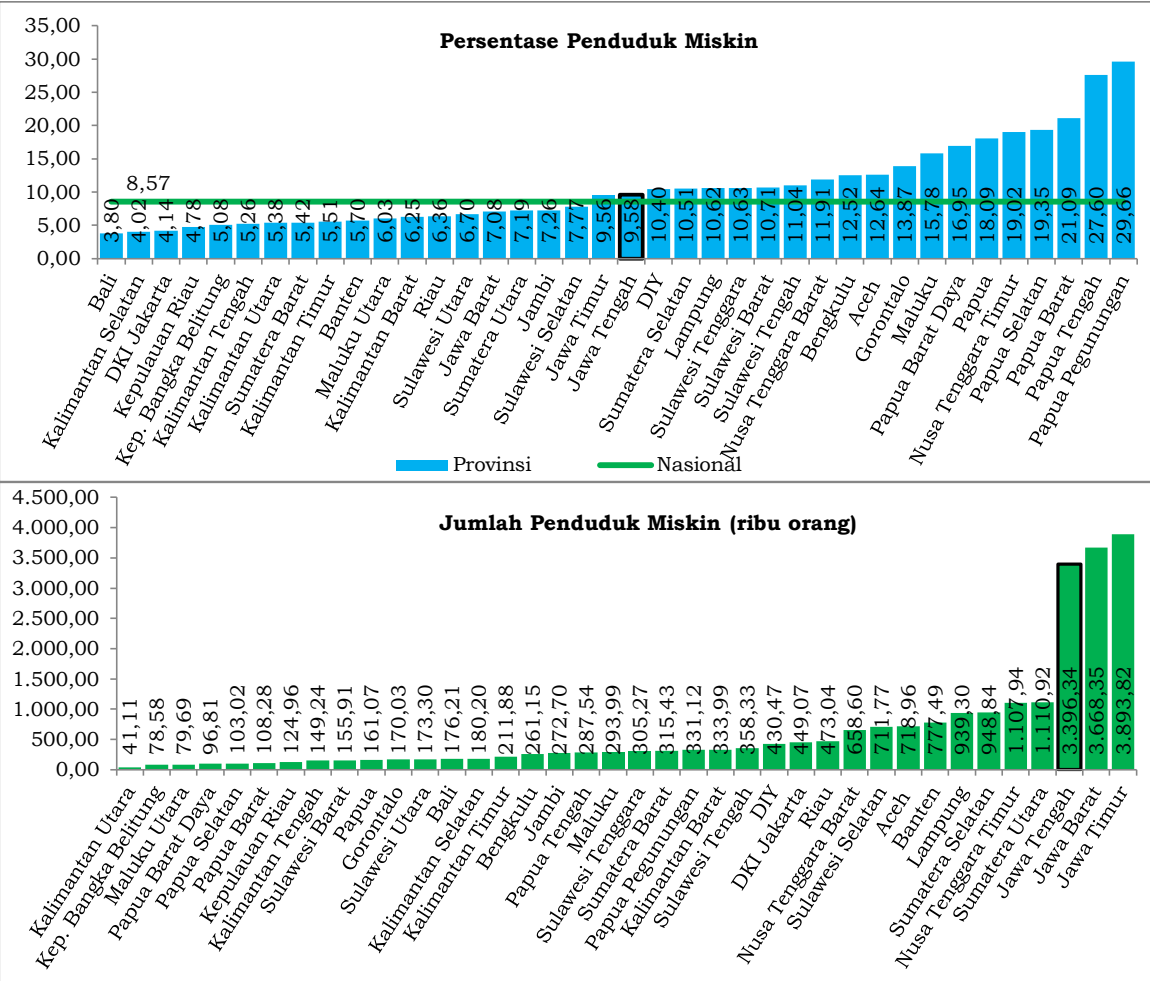
No,	Kabupaten/Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
		Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin
21	Kab. Demak	432.533	146.87	445.176	151.70	471.818	143.01	511.145	143,26	535.134	142,91
22	Kab. Semarang	404.455	79.88	416.395	83.60	459.151	78.60	498.952	78,35	520.639	76,87
23	Kab. Temanggung	323.705	77.33	336.034	79.10	354.012	73.04	388.369	72,96	416.086	68,77
24	Kab. Kendal	396.691	97.49	407.387	100.00	433.864	93.03	465.936	92,64	488.940	92,70
25	Kab. Batang	309.202	70.57	318.330	74.90	341.252	69.94	378.858	69,97	412.196	68,85
26	Kab. Pekalongan	403.662	91.86	416.779	95.30	441.765	87.53	480.934	87,93	505.520	81,72
27	Kab. Pemalang	389.209	209.03	401.857	215.10	429.549	195.84	467.204	195,57	493.593	194,20
28	Kab. Tegal	390.520	117.50	404.655	123.50	434.638	113.62	470.728	105,03	497.315	98,02
29	Kab. Brebes	431.897	308.78	445.853	314.90	472.326	290.66	513.339	286,14	542.495	283,28
30	Kota Magelang	522.099	9.27	537.783	9.40	575.130	8.65	602.794	7,45	626.614	7,25
31	Kota Surakarta	487.445	47.03	511.216	48.80	538.441	45.94	600.953	43,89	638.102	43,28
32	Kota Salatiga	454.154	9.69	480.903	10.10	518.815	9.45	565.031	9,41	596.659	9,33
33	Kota Semarang	522.691	79.58	543.929	84.40	589.598	79.87	642.456	80,53	671.936	77,79
34	Kota Pekalongan	460.789	22.16	480.415	23.50	513.243	21.81	565.998	21,36	605.312	21,16
35	Kota Tegal	502.031	19.55	523.413	20.30	565.826	19.78	623.617	19,22	664.922	19,17
Jawa Tengah		395.407	3.980.9	409.193	4.109.75	438.833	3.831.44	477.580	3.791,50	507.001	3.704,33
Indonesia		454.652	26.424.02	472.525	27.542.77	505.469	26.161.16	550.458	25.898,55	582.932	25.219,20

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2020-2024. diolah

Berdasarkan Tabel 2.3 menunjukkan angka GK di Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya. GK ini akan menjadi penentu penting dalam pengukuran kemiskinan. Peningkatan GK dapat meningkatkan kemiskinan yang ada sebagaimana tertera pada data yang terjadi di Indonesia. Hanya saja kondisi di Jawa Tengah mengalami anomali setelah tahun 2022 terjadi penurunan penduduk miskin walau GK meningkat.

2. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin

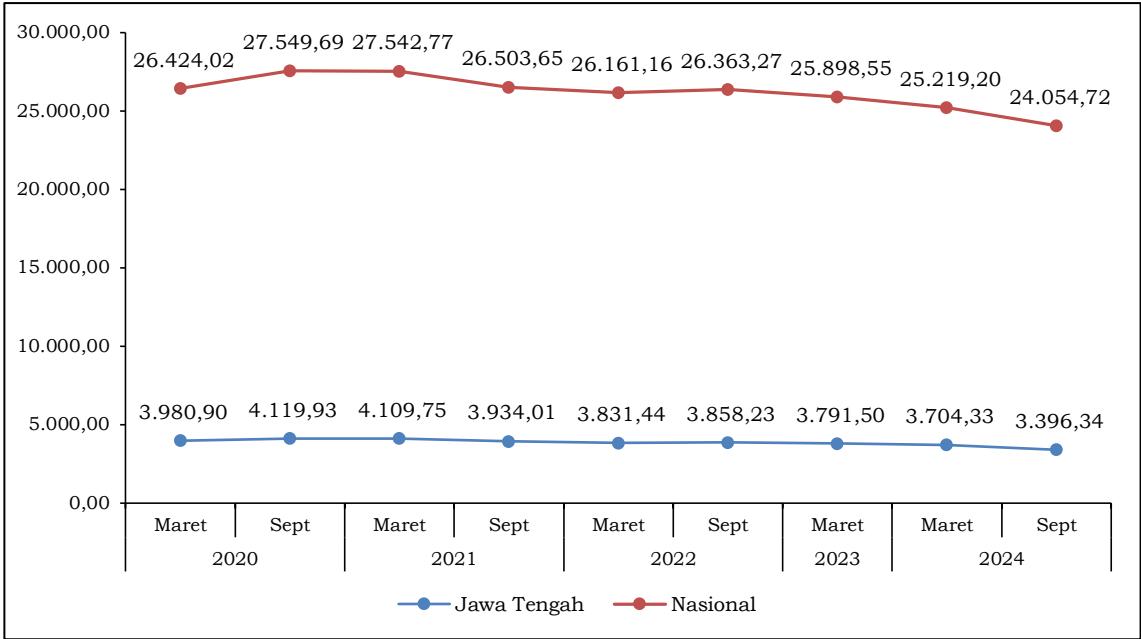
Persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Jawa Tengah pada September 2024 sebesar 9,58% lebih tinggi daripada Nasional sebesar 8,57%. Kondisi pandemi berdampak pada tingkat kemiskinan yang relatif meningkat di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat tertinggi ke 19 dari 38 provinsi. Sementara jumlah absolut penduduk miskin Jawa Tengah menempati posisi terbesar ketiga setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat yaitu sebanyak 3.396,34 ribu orang pada September 2024, sebagaimana Gambar 2.3 berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik. Tahun 2024, diolah

Gambar 2.3
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2024

Apabila dianalisis dari sisi perkembangan antar waktu jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2020 sebesar 4.119,93 ribu orang menurun menjadi 3.934,01 ribu orang pada September 2021 dan pada kurun waktu tahun 2022-2024 kondisi jumlah penduduk miskin turun sebesar 461,89 ribu orang dari 3.858,23 pada September 2022 menjadi 3.396,34 ribu orang pada September 2024. Selanjutnya dari analisis relevansi kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan nasional dan dari analisis efektifitas pada periode Maret 2020 sampai September 2024, perubahan jumlah penduduk miskin Jawa Tengah sebesar 584,56 ribu orang (17,21%) sedangkan nasional perubahan sebesar 2.369,30 ribu orang (9,85%). Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah lebih efektif berkontribusi dalam upaya penurunan kemiskinan dibandingkan nasional, sebagaimana Gambar 2.4 berikut:

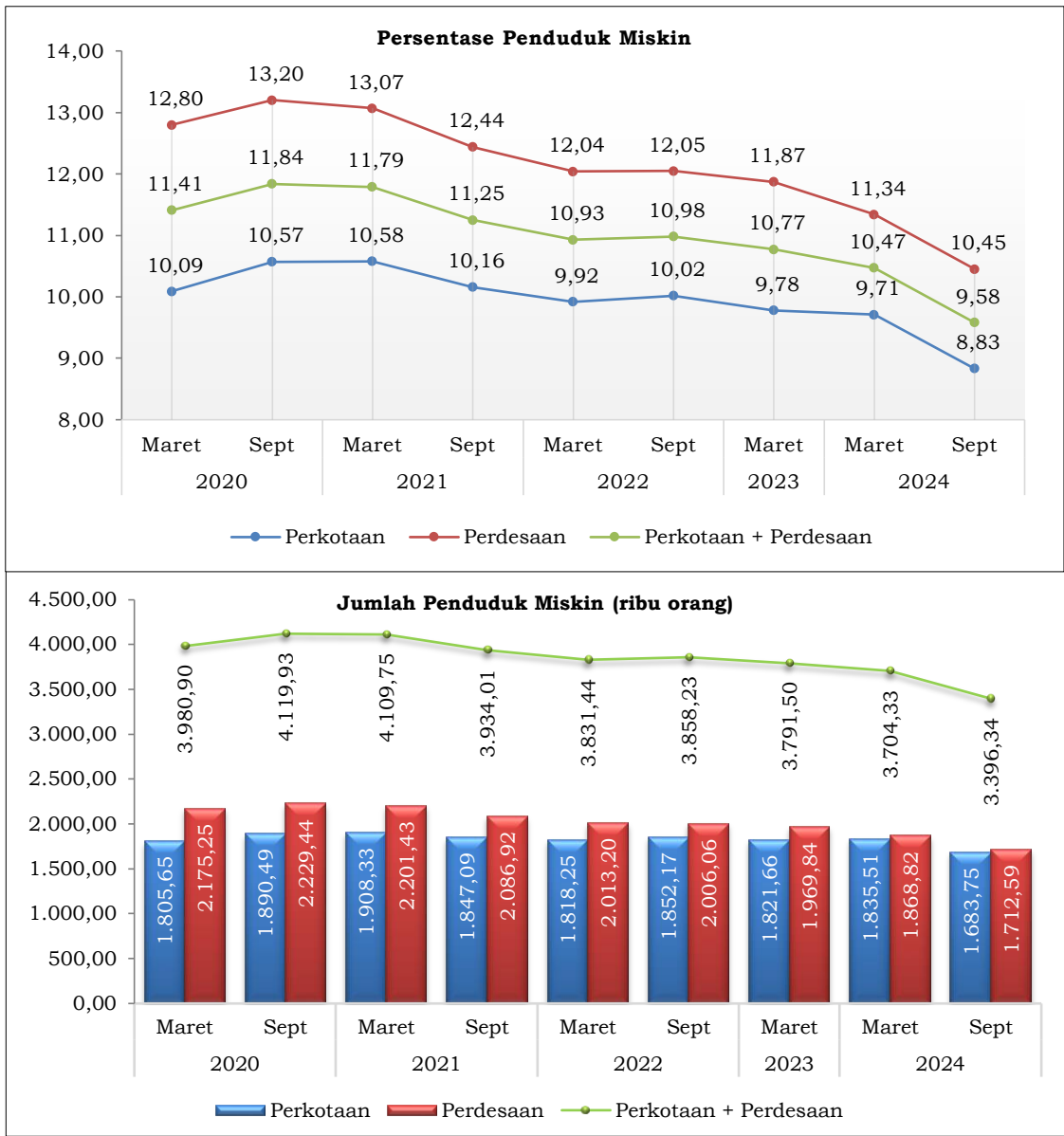


Sumber : Badan Pusat Statistik. Tahun 2024, diolah

Gambar 2.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Nasional dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 10,45% lebih tinggi daripada perkotaan sebesar 8,83%. Jumlah penduduk miskin perdesaan berkurang sebanyak 156,23 ribu orang dari sebesar 1.868,82 ribu orang pada periode Maret 2024 menjadi 1.712,59 ribu orang pada September 2024. Sedangkan penduduk miskin perkotaan berkurang sebanyak 151,76 ribu orang dari sebesar 1.835,51 ribu orang pada periode Maret 2024 menjadi 1.683,75 ribu orang pada September 2024. Hal ini karena dampak dan penyebaran Covid-19 lebih tinggi di perkotaan. Perkotaan lebih sensitif karena intensitas aktivitas perekonomian dan penduduk yang lebih tinggi terutama

UMKM dan sektor informal. Di sisi lain, kota juga tidak memproduksi bahan pangan sehingga inflasi pangan lebih tinggi dibandingkan perdesaan, sebagaimana Gambar 2.5 berikut:

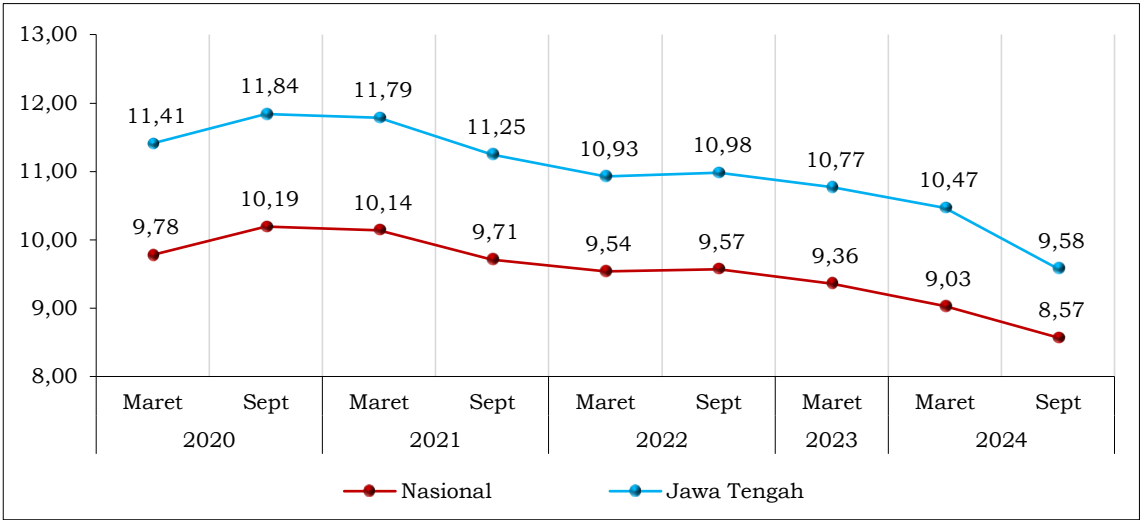


Sumber : Badan Pusat Statistik. Tahun 2020-2024, diolah
Catatan: Angka kemiskinan periode Sept. 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

Gambar 2.5
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah menurut Perkotaan/Perdesaan Tahun 2020-2024

Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah periode September 2020-September 2021 menurun dari 11,84% menjadi 11,25%. Seiring dengan upaya intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah terus mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2021-2024 dan tercatat persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada periode September 2024 menjadi 9,58%. Apabila dianalisis dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan nasional. Dengan demikian pada kurun waktu tersebut

upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional. Jika dilihat dari sisi efektivitas periode Maret 2020 sampai September 2024, perubahan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,83% sedangkan nasional sebesar 1,21%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah lebih efektif dibandingkan nasional, sebagaimana Gambar 2.6 berikut:

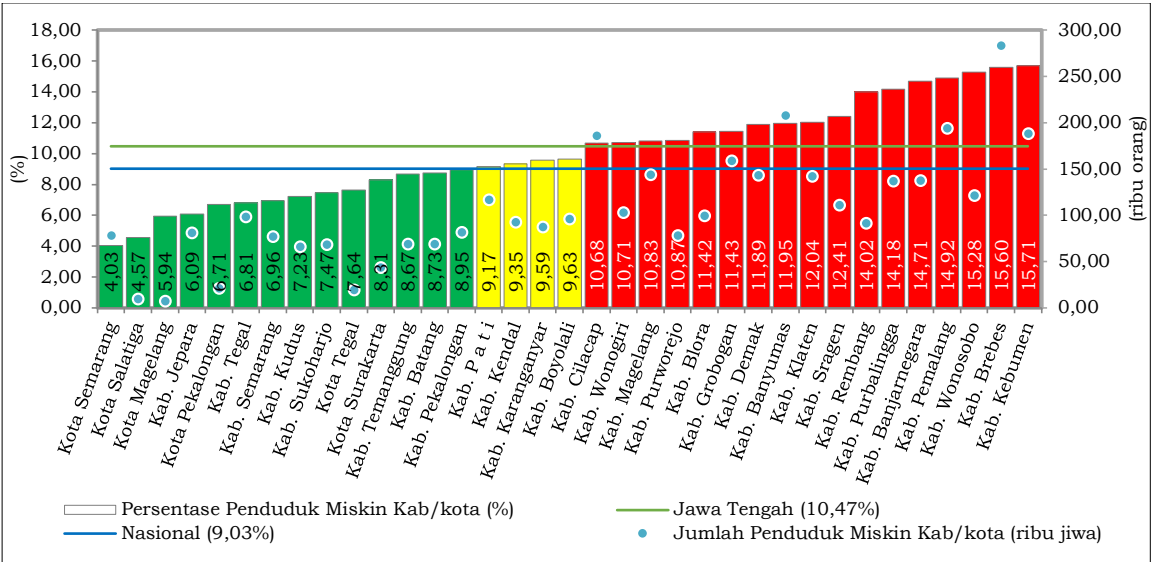


Sumber : Badan Pusat Statistik. 2020-2024. Diolah
Catatan: Angka kemiskinan periode Sept. 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

Gambar 2.6
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Posisi relatif persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam tiga kelompok yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota mendasarkan data per Maret tahun 2024 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

- 1) Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 17 kabupaten meliputi Kabupaten Kebumen, Brebes, Wonosobo, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Rembang, Sragen, Klaten, Banyumas, Demak, Grobogan, Blora, Purworejo, Magelang, Wonogiri dan Cilacap;
- 2) Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 4 kabupaten meliputi Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Kendal dan Pati;
- 3) Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 14 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang, Temanggung, Kota Surakarta, Kota Tegal, Sukoharjo, Kudus, Semarang, Tegal, Kota Pekalongan, Jepara, Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Semarang.

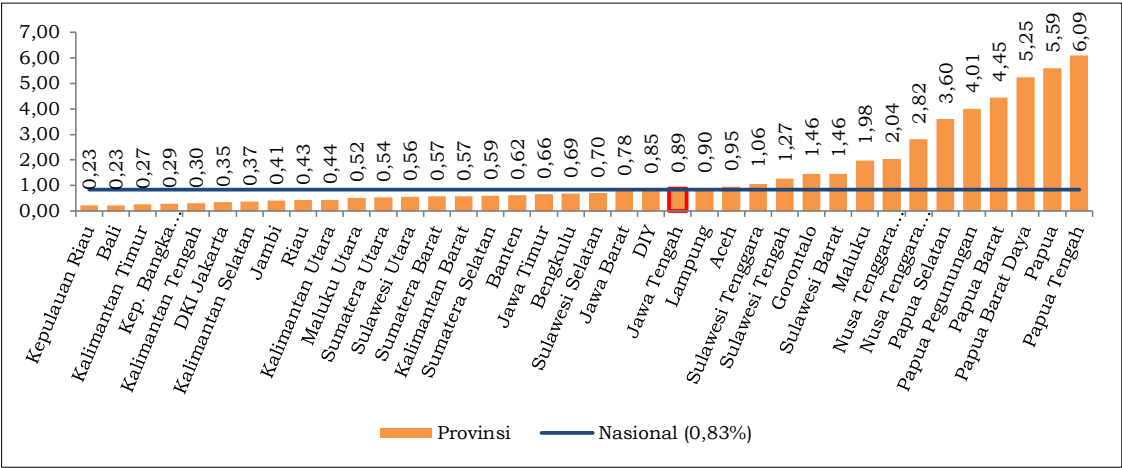


Sumber : Badan Pusat Statistik. 2024, diolah

Gambar 2.7
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota
Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Per Maret 2024 (%)

3. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai mereka yang hidup di bawah US \$ 1,9 PPP per hari (World Bank, 2011). Tahun 2024 nilai US \$ 1,9 PPP setara dengan Rp 11.924,13 per kapita per hari atau Rp 362.692,14 per kapita per bulan. Persentase penduduk miskin ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar 0,89% masih di atas Nasional sebesar 0,83%, sebagaimana Gambar 2.8 berikut:



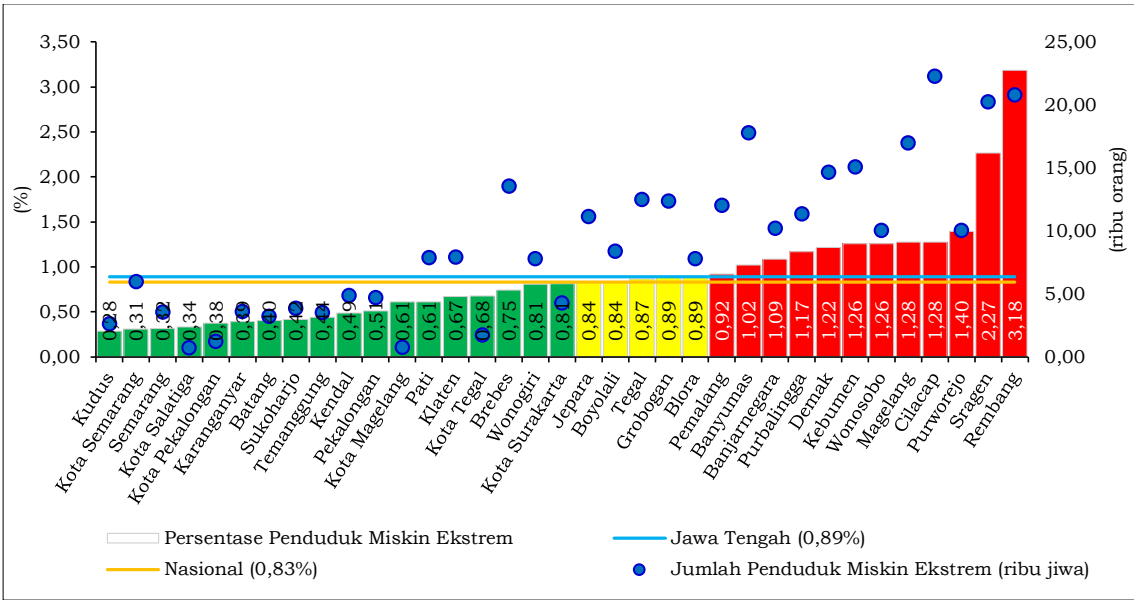
Sumber: BPS 2024, diolah

Gambar 2.8
Persentase Penduduk Miskin Ekstrem di Indonesia Menurut
Provinsi Tahun 2024 (%)

Posisi relatif persebaran penduduk miskin ekstrem kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam tiga kelompok, sebagai berikut:

- 1) Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin ekstrem di atas provinsi dan nasional sebanyak 12 kabupaten meliputi Kabupaten Rembang, Sragen, Purworejo, Cilacap, Magelang,

- Wonosobo, Kebumen, Demak, Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas dan Pemalang;
- 2) Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin ekstrem di atas nasional dan di bawah provinsi sebanyak 5 kabupaten meliputi Kabupaten Blora, Grobogan, Tegal, Boyolali dan Jepara;
 - 3) Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin ekstrem di bawah provinsi dan nasional sebanyak 18 kabupaten/kota meliputi Kota Surakarta, Wonogiri, Brebes, Kota Tegal, Klaten, Pati, Kota Magelang, Pekalongan, Kendal, Temanggung, Sukoharjo, Batang, Karanganyar, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Semarang, Kota Semarang dan Kudus.

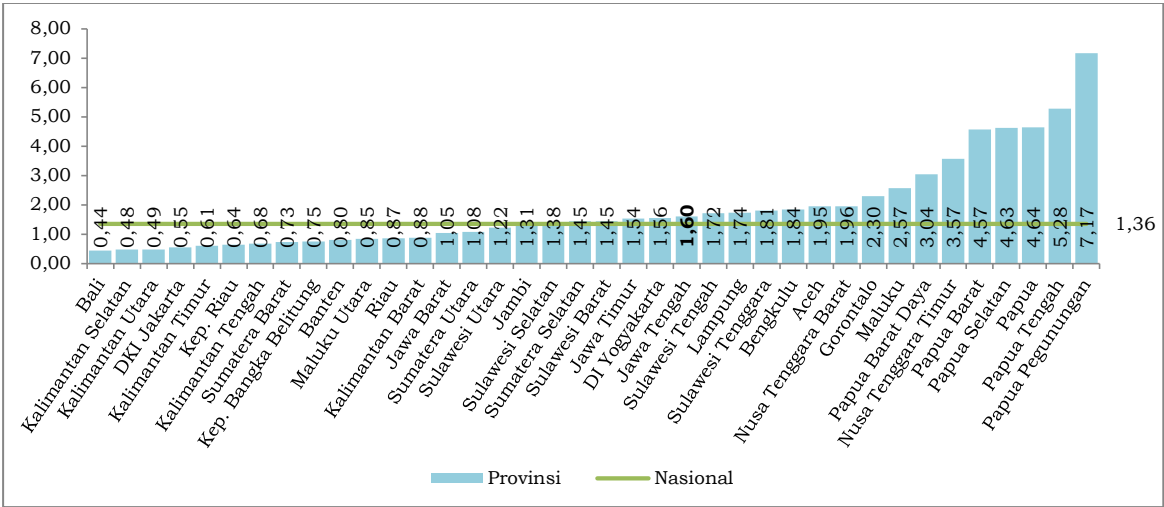


Sumber : BPS 2024, Diolah

Gambar 2.9
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota
Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2024

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan

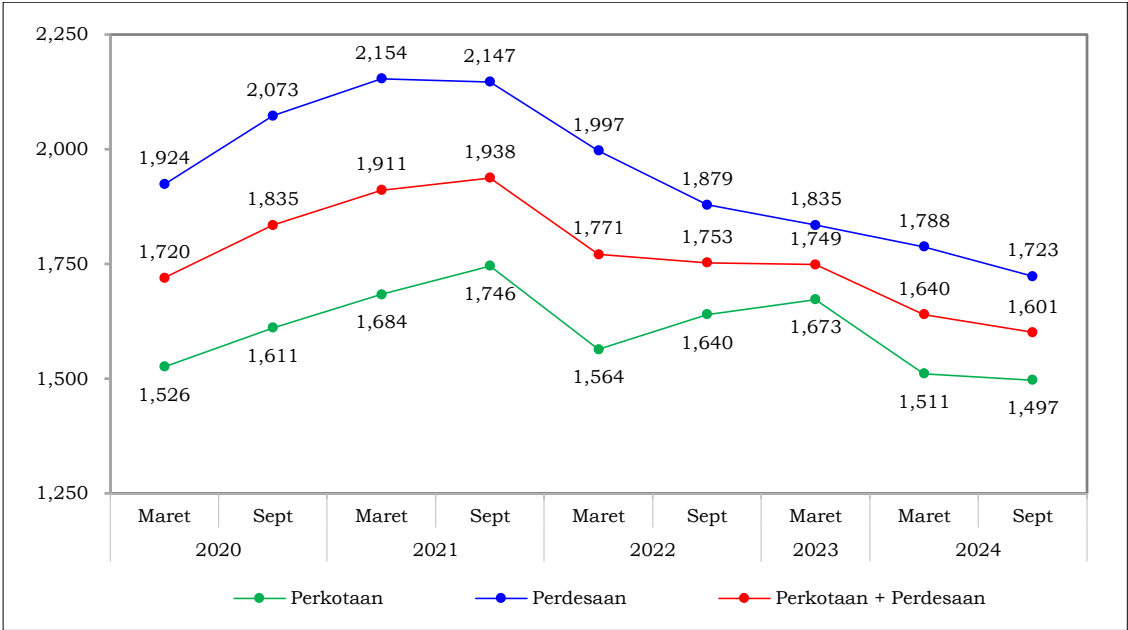
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks (P1) maka semakin tinggi tingkat kedalaman kemiskinan yang dialami penduduk miskin. Hal ini disebabkan semakin jauhnya rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah pada September 2024 sebesar 1,60 lebih tinggi dibandingkan angka Nasional sebesar 1,36, sebagaimana Gambar 2.10 berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik. Tahun 2024, diolah

Gambar 2.10
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Indonesia menurut Provinsi Periode September 2024

Berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Pada September 2024 di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Pada September 2024 P1 untuk daerah perdesaan mencapai sebesar 1,723 sedangkan di perkotaan sebesar 1,497, sebagaimana gambar 2.11 berikut:



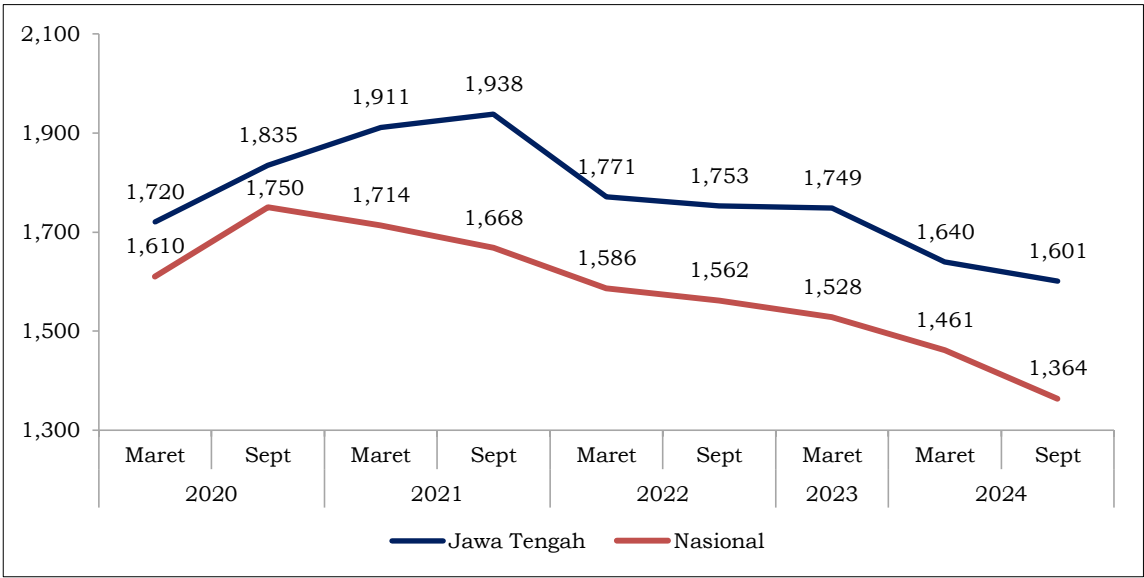
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020-2024

Gambar 2.11
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah menurut Wilayah Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020-2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Jawa Tengah periode September 2020 – September 2021 meningkat dari 1,835 menjadi 1,938, namun pada periode September 2022 turun menjadi 1,753. P1 Jawa Tengah periode September 2024 sebesar 1,601 turun sebesar 0,148 dibandingkan periode Maret 2023 (1,749). Fenomena ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya garis kemiskinan tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya pengeluaran konsumsi kelompok masyarakat miskin;
2. Meningkatnya garis kemiskinan lebih tinggi dibanding dengan peningkatan pengeluaran konsumsi kelompok masyarakat miskin; dan
3. Penurunan pengeluaran konsumsi kelompok masyarakat miskin lebih tajam dibanding peningkatan garis kemiskinan.

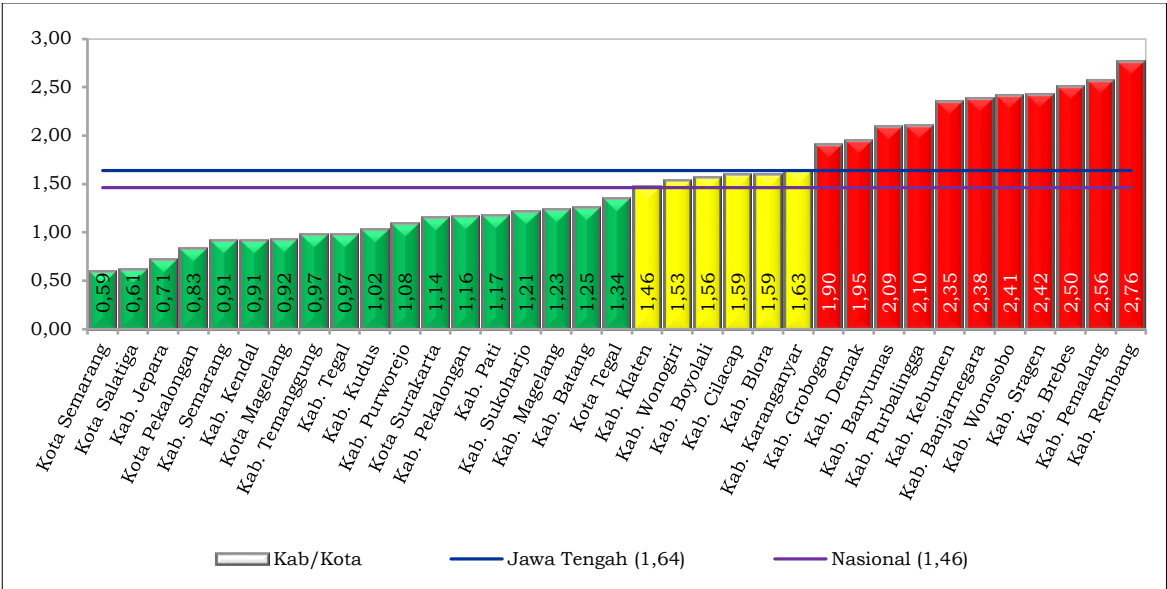
Apabila dianalisis dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih sejalan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan nasional. Jika dilihat dari sisi efektivitas, perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,119 sedangkan nasional sebesar 0,246. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah lebih rendah jika dibandingkan dengan penurunan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di tingkat nasional, sebagaimana Gambar 2.12 berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik. Tahun 2020-2024. diolah

Gambar 2.12
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Berdasarkan wilayah kabupaten/kota, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota pada periode Maret 2024 apabila dibandingkan dengan P1 Provinsi sebesar 1,64 dan P1 Nasional sebesar 1,46 diketahui bahwa Kabupaten Rembang memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 2,76 dan Kota Semarang terendah sebesar 0,59, sebagaimana Gambar 2.13 berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah. 2024

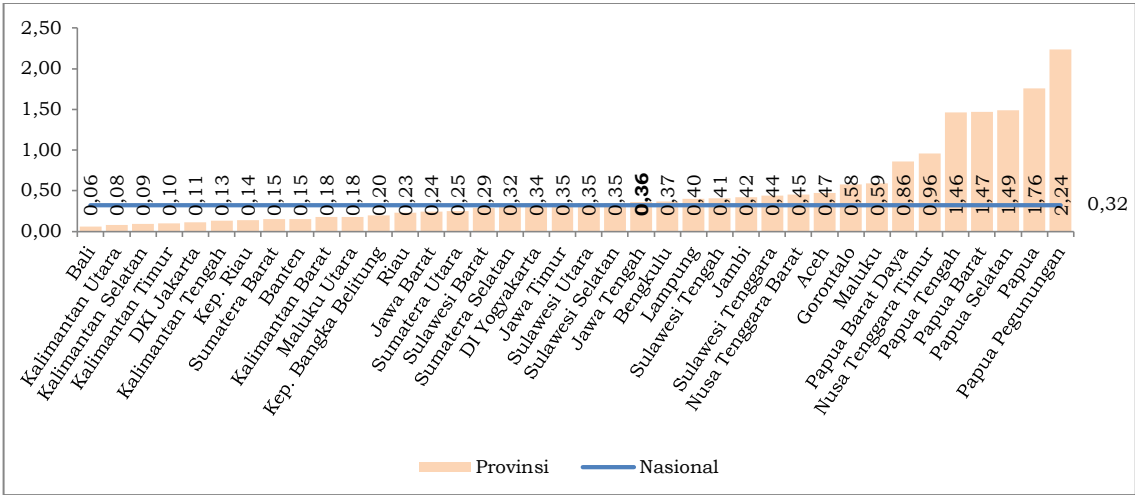
Gambar 2.13
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah
dan Nasional Tahun 2024

Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 di atas provinsi dan nasional, sebanyak 11 kabupaten meliputi Rembang, Pemalang, Brebes, Sragen, Wonosobo, Banjarnegara, Kebumen, Purbalingga, Banyumas, Demak, dan Grobogan;
- 2) Kabupaten Indeks Kedalaman Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 di atas nasional dan di bawah provinsi, sebanyak 6 kabupaten yaitu Kabupaten Karanganyar, Blora, Cilacap, Boyolali, Wonogiri, dan Klaten;
- 3) Indeks Kedalaman Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 18 kabupaten/kota meliputi Kota Tegal, Batang, Magelang, Sukoharjo, Pati, Pekalongan, Kota Surakarta, Purworejo, Kudus, Tegal, Temanggung, Kota Magelang, Kendal, Semarang, Kota Pekalongan, Jepara, Kota Salatiga dan Kota Semarang.

5. Indeks Keparahan Kemiskinan

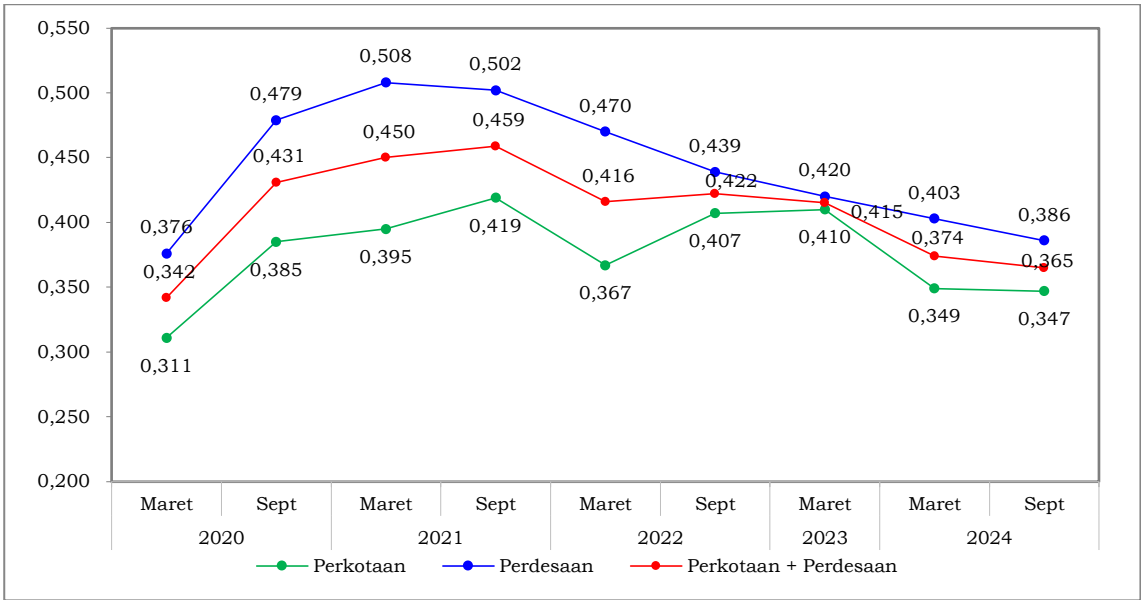
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 maka semakin tinggi penyebaran pengeluaran yang mengakibatkan tingkat ketimpangan pengeluaran semakin tinggi diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah pada September 2024 sebesar 0,36 lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 0,32, sebagaimana Gambar 2.14 berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik. Tahun 2024. diolah

Gambar 2.14
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia menurut Provinsi Periode September 2024

Berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) September 2024 di daerah perdesaan sebesar 0,386 lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan sebesar 0,347. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih lebar dibandingkan perkotaan, sebagaimana Gambar 2.15 berikut:

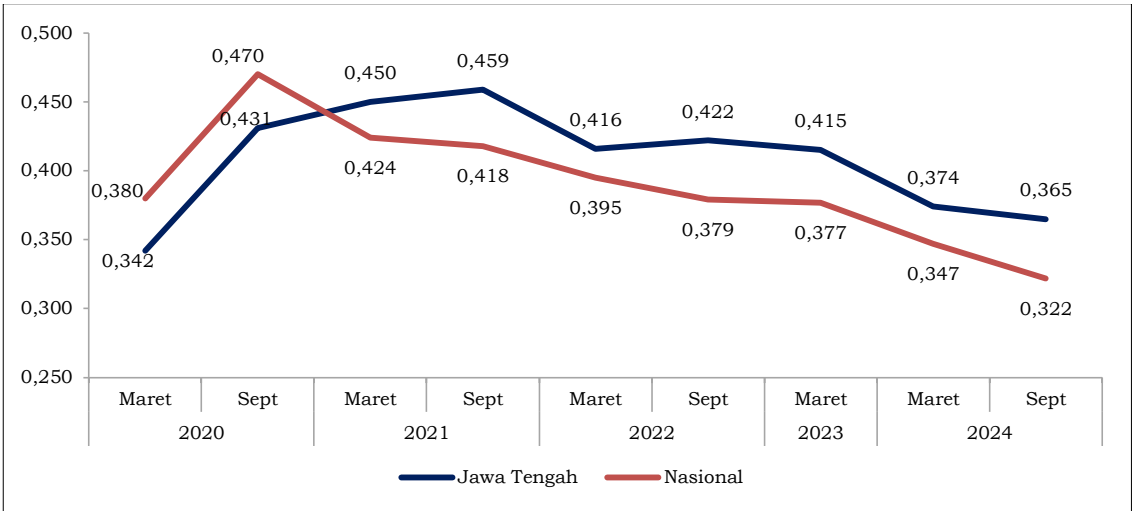


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah. 2020-2024

Gambar 2.15
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Wilayah Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia Tahun 2020-2024

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah pada periode September 2020 – September 2021 meningkat dari 0,431 menjadi 0,459, namun mengalami penurunan pada September 2022 menjadi 0,422. P2 Jawa Tengah periode September 2024 sebesar 0,365 turun sebesar 0,050 dibandingkan Maret 2023 (0,415). Apabila dianalisis dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

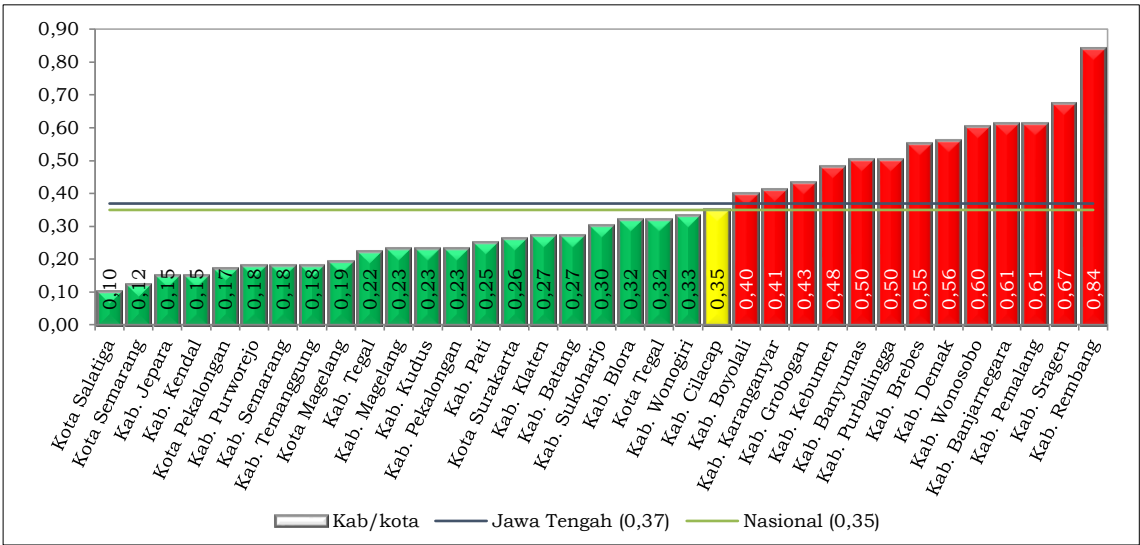
Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejalan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) nasional. Jika dilihat dari sisi efektivitas, perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,023 sedangkan nasional sebesar 0,058. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah lebih rendah jika dibandingkan dengan ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk miskin di tingkat nasional, sebagaimana Gambar 2.16 berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik. Tahun 2020-2024. diolah

Gambar 2.16
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang memiliki indeks tertinggi (0,84) dan Kota Salatiga terendah (0,10), sebagaimana Gambar 2.17 berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah. 2024

Gambar 2.17
Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 (Maret) sebagai berikut:

- 1) Indeks Keparahan Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di atas provinsi dan nasional, sebanyak 13 kabupaten meliputi Kabupaten Rembang, Sragen, Pemalang, Banjarnegara, Wonosobo, Demak, Brebes, Purbalingga, Banyumas, Kebumen, Grobogan, Karanganyar dan Boyolali;
- 2) Indeks Keparahan Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah provinsi dan di atas nasional, sebanyak 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap;
- 3) Indeks Keparahan Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 21 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Wonogiri, Kota Tegal, Blora, Sukoharjo, Batang, Klaten, Kota Surakarta, Pati, Pekalongan, Kudus, Magelang, Tegal, Kota Magelang, Temanggung, Semarang, Purworejo, Kota Pekalongan, Kendal, Jepara, Kota Semarang dan Kota Salatiga.

6. Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) yang fluktuatif memberikan indikasi bahwa kerentanan penduduk miskin Jawa Tengah perlu diwaspadai. Kondisi ini mempertegas bahwa kemiskinan Jawa Tengah merupakan permasalahan mendasar yang secara otomatis perlu menjadi prioritas pembangunan di Jawa Tengah. Tabel 2.4 menunjukkan analisis keterkaitan kondisi kemiskinan jawa tengah tahun 2020-2024.

Tabel 2.4
Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

INDIKATOR	PERSPEKTIF				
	POSISI RELATIF	ANTAR WAKTU	EFEKTIVITAS	RELEVANSI	KETERKAITAN
Persentase Penduduk Miskin (PO)	• Lebih tinggi dari Nasional periode September 2024. • Terdapat 17 kabupaten yang capaiannya di atas provinsi dan nasional.	Tahun 2020-2021 menurun dan terus mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2021-2024.	Lima tahun terakhir menunjukkan perubahan tingkat kemiskinan lebih efektif dibanding nasional.	Lima tahun terakhir sejalan dengan perubahan tingkat kemiskinan nasional	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang fluktuatif. memberikan sinyal bahwa kerentanan penduduk miskin Jawa Tengah masih

INDIKATOR	PERSPEKTIF				
	POSISI RELATIF	ANTAR WAKTU	EFEKTIVITAS	RELEVANSI	KETERKAITAN
Jumlah Penduduk Miskin	Terbesar ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat.	Tahun 2020-2021 menurun dan terus mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2022-2024.	Lima tahun terakhir menunjukkan perubahan tingkat kemiskinan lebih efektif dibanding nasional.	Lima tahun terakhir sejalan dengan perubahan tingkat kemiskinan nasional	perlu diwaspadai. Jumlah penduduk yang berada di sekitar GK sangat banyak. sehingga sangat rentan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	• Lebih tinggi dari Nasional Periode September 2024. • Terdapat 11 kabupaten yang capaiannya di atas provinsi dan nasional.	Tahun 2020-2021 meningkat namun Tahun 2022 menurun dan terus mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2023-2024.	Lima tahun terakhir menunjukkan perubahan P1 lebih rendah dibanding nasional	Lima tahun terakhir sejalan dengan perubahan P1 nasional	dan sensitif terhadap guncangan makro ekonomi.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	• Lebih tinggi dari Nasional Periode September 2024. • Terdapat 13 kabupaten yang capaiannya di atas provinsi dan nasional.	Tahun 2020-2021 meningkat namun Tahun 2022 menurun dan terus mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2023-2024.	Lima tahun terakhir menunjukkan perubahan P2 lebih rendah dibanding nasional	Lima tahun terakhir sejalan dengan perubahan P2 nasional	

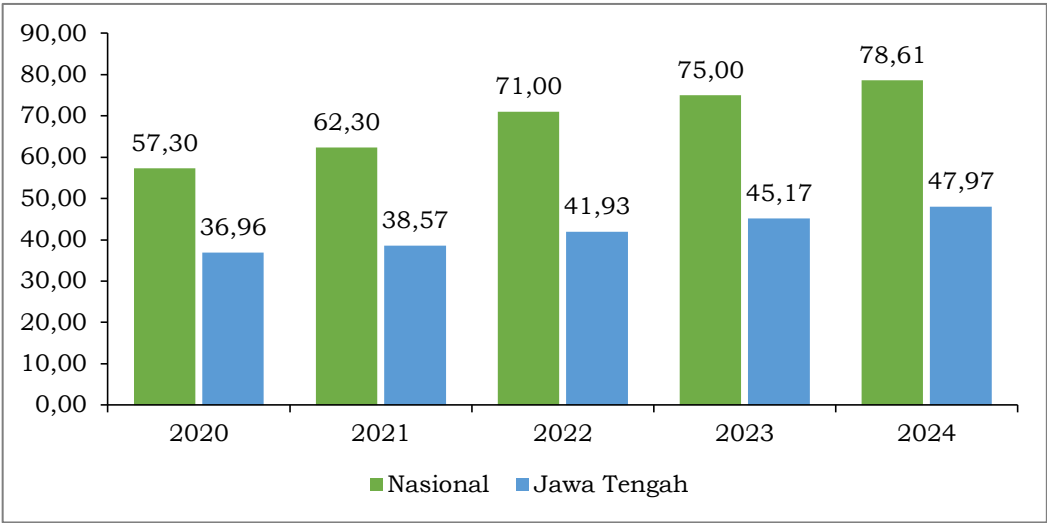
C. KONDISI PEREKONOMIAN DAN KARAKTERISTIK KEWILAYAHAN

1. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian yang berpengaruh terhadap kemiskinan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

Kondisi perekonomian secara makro dapat dilihat dari nilai PDRB yang pada dasarnya mencakup total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu daerah, atau merupakan total nilai dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB per-kapita adalah salah satu ukuran kinerja makro ekonomi yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

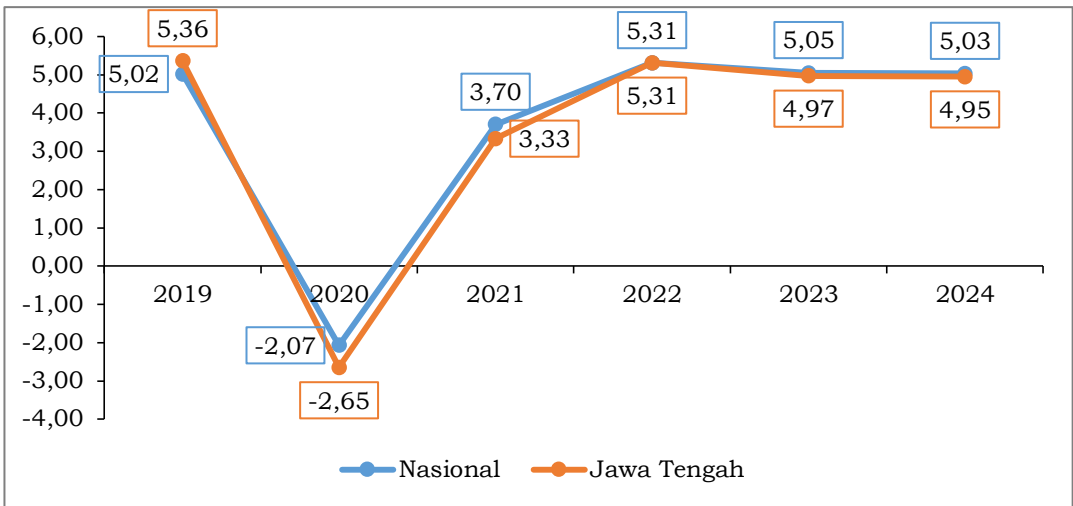
Gambar 2.18
PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

PDRB per-kapita Jawa Tengah dari tahun ke tahun semakin meningkat, meskipun masih lebih rendah dari PDRB per kapita nasional. Tahun 2024 PDRB per-kapita Provinsi Jawa Tengah sebesar 47,97 juta rupiah, meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 36,96 juta rupiah. Stabilitasnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, serta percepatan pemulihan ekonomi Jawa Tengah pasca pandemi Covid-19 berimbas pada kenaikan pendapatan per-kapita Jawa Tengah.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Selain PDRB per-kapita, kondisi perekonomian juga dilihat dari pertumbuhan ekonomi, Ekonomi Jawa Tengah berkontribusi sebesar 14,36 persen terhadap seluruh perekonomian di Pulau Jawa dan penyumbang keempat terbesar pada perekonomian nasional. Struktur ekonomi Jawa Tengah tertinggi dari sisi pengeluaran berasal dari konsumsi rumah tangga, ekspor dan investasi. Sementara dari sisi lapangan usaha, menjadi kontributor tertinggi yang berasal dari sektor industri pengolahan, pertanian,

perdagangan dan konstruksi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dapat dilihat sebagaimana Gambar 2.19 berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

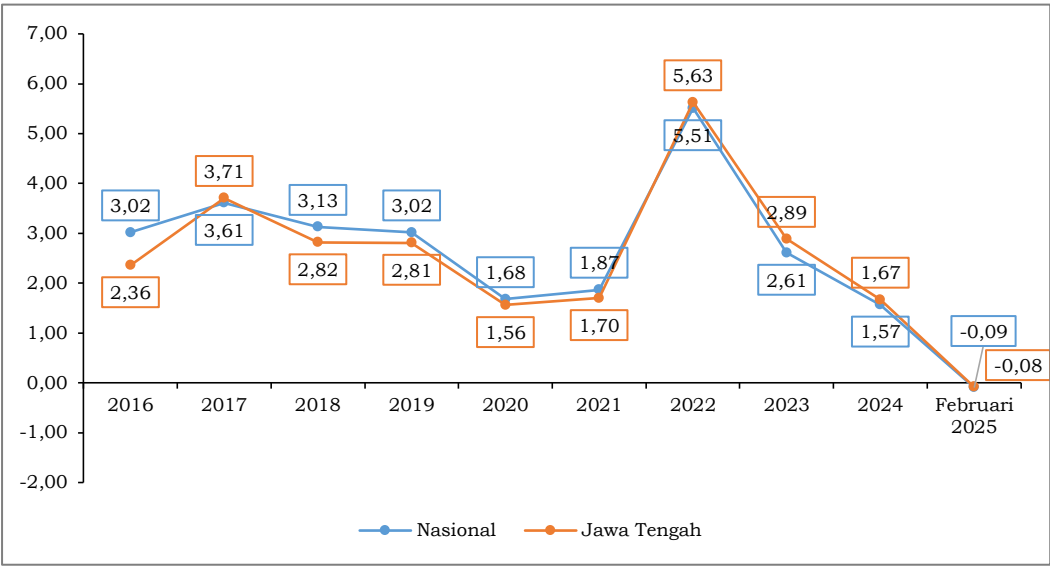
Gambar 2.19
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024 (Persen)

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah yang dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang stabil, tumbuh positif, dan berhasil menghadapi ancaman dan tekanan global, meskipun pada tahun 2020-2021 mengalami kontraksi -2,65 persen dan 3,33 persen akibat terkena dampak pandemi Covid-19. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah telah pulih seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu tumbuh sebesar 4,97 persen, meskipun melambat jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen. Pelambatan ini terjadi dikarenakan adanya pelambatan ekonomi global akibat konflik geopolitik yang belum berakhir dan adanya fenomena el nino yang menyebabkan turunnya beberapa hasil komoditas pertanian. Pada tahun 2024, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,95 persen di tengah ketidakpastian global walaupun masih di bawah nasional sebesar 5,03 persen.

c. Inflasi

Selain PDRB per-kapita dan pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian juga dilihat dari angka inflasi. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 (sembilan) indeks kelompok pengeluaran. Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun mengikuti trend fluktuasi tingkat inflasi nasional dan cenderung terkendali. Kendati demikian, terjadi lonjakan inflasi pada tahun 2022 sebesar 5,63 persen akibat adanya gejolak ekonomi global karena konflik geopolitik dan perang Rusia-Ukraina yang tidak hanya memberikan pengaruh pada inflasi nasional. Kondisi global tersebut menyebabkan gangguan dari sisi supply yang memicu lonjakan harga komoditas secara global. Tahun 2023 dan 2024 inflasi dapat terus terkendali, tercatat pada Bulan Februari 2025

terjadi deflasi sebesar -0,08 persen, sebagaimana Gambar 2.20 berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.20
Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016-Februari 2025 (%)

PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi memiliki peran penting sekaligus saling terkait dalam memengaruhi penurunan kemiskinan di Jawa Tengah. Peningkatan PDRB per kapita menunjukkan kenaikan pendapatan rata-rata masyarakat yang dapat memperkuat daya beli dan menurunkan angka kemiskinan, meskipun dampaknya bergantung pada pemerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga berkontribusi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi, namun tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan apabila hasil pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu. Sementara itu, inflasi memiliki dampak sebaliknya: jika tidak terkendali, inflasi akan menggerus daya beli masyarakat miskin sehingga menghambat efektivitas peningkatan PDRB per kapita maupun pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian, penurunan kemiskinan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila peningkatan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi didukung dengan stabilitas harga dan kebijakan pemerataan.

2. Karakteristik Kewilayahan

Letak wilayah Jawa Tengah yang berada di tengah Pulau Jawa, memiliki peran dan posisi strategis dalam konteks pembangunan nasional maupun regional. Secara makro, peran Pulau Jawa dalam pembangunan nasional adalah sebagai wilayah Megapolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dan Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk menjadi wilayah penumpu ketahanan pangan dan rantai nilai industri nasional untuk 20 tahun

ke depan (RPJPN Tahun 2025-2045). Kebijakan nasional tersebut, dipertegas dalam visi pembangunan Jawa Tengah 20 tahun ke depan yaitu Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan (RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045). Visi Jawa Tengah 20 tahun ke depan tersebut didukung dengan beberapa kondisi antara lain geografi, topografi dan demografi.

a. Kondisi Geografi

Provinsi Jawa Tengah memiliki peran dan posisi strategis dalam pembangunan nasional maupun regional yang diarahkan sebagai wilayah penumpu ketahanan pangan dan rantai nilai industri nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yang selanjutnya dipertegas dalam visi pembangunan Jawa Tengah 20 tahun ke depan yaitu Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan (RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045). Kebijakan tersebut juga sejalan dengan kebijakan pembangunan tata ruang Jawa Tengah yang mengarahkan Jawa Tengah menjadi Provinsi Jawa Tengah yang maju, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir (RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044).

Secara kewilayahan, Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis karena berada di antara dua kutub pintu gerbang ekonomi nasional (Jakarta dan Surabaya). Wilayah Jawa Tengah memiliki prasarana strategis pendukung perekonomian Pulau Jawa bagian utara dan selatan (arteri primer, kereta api, bandara, dan pelabuhan), memiliki tiga Pusat Kegiatan Nasional dan 11 Pusat Kegiatan Wilayah yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, serta memiliki empat sektor strategis yaitu pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. Secara geografi potensi wilayah dari keempat sektor strategis tersebut dapat mendorong perekonomian Jawa Tengah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin.

Kondisi geografis memiliki pengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Kondisi geografi yang memiliki aksesibilitas dan infrastruktur untuk pusat ekonomi cenderung mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Aktivitas ekonomi membuat arus barang dan jasa berjalan dengan baik menjadikan kesempatan ekonomi meningkat. Begitu juga daerah yang memiliki potensi sumber daya, dan dukungan iklim terhadap sektor ekonomi lokal serta tata kelola administrasi memiliki probabilitas peningkatan pendapatan masyarakat meningkat. Wilayah yang strategis dan kaya sumber daya cenderung lebih sejahtera,

sementara daerah terpencil atau minim sumber daya alam (SDA) menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar.

Potensi bagaimana wilayah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sesuai dengan kondisi wilayahnya. Pada wilayah pesisir dan kepulauan memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan perikanan. Ini mendorong pendapatan masyarakat melalui devisa dan ekonomi lokal. Sementara di wilayah dataran tinggi dan subur mendukung pertanian intensif, yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pedesaan. Untuk wilayah terpencil atau minim akses menghadapi tantangan konektivitas, distribusi barang, dan keterbatasan infrastruktur, yang berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat. Terakhir untuk wilayah dengan sumber daya tambang seperti memiliki pendapatan tinggi, namun seringkali tidak merata karena ketimpangan distribusi hasil tambang.

b. Kondisi Topografi

Provinsi Jawa Tengah memiliki topografi yang didominasi oleh dataran rendah, dengan sekitar 53% wilayah berada pada ketinggian 0-99 meter di atas permukaan laut (dpl) yang tersebar hampir di seluruh daerah, sementara dataran tinggi dan pegunungan membujur di bagian tengah provinsi. Kemiringan lereng di wilayah ini bervariasi, dengan lahan berkemiringan 0-2% mencakup 38%, 2-15% sebesar 31%, 15-40% sebesar 19%, dan lebih dari 40% sebesar 12% dari total wilayah. Selain itu, Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan beragam, didukung oleh iklim tropis basah dengan suhu udara rata-rata antara 26,7°C hingga 30,4°C dan curah hujan yang cukup tinggi, yang semuanya berkontribusi pada kesuburan tanah dan menjadi modal penting dalam mengembangkan komoditas unggulan antara lain pertanian dan pariwisata.

Kondisi topografi tersebut menjadikan lahan pertanian (utamanya di wilayah pedesaan) sebagai penggunaan lahan dominan, terutama di dataran rendah yang luasnya mencapai lebih dari setengah wilayah provinsi. Namun, pola pertanian tradisional yang masih banyak diterapkan menyebabkan perkembangan usaha pertanian berjalan lambat dibandingkan usaha lainnya (produktivitas pertanian rendah), serta terbatasnya akses pasar dan harga jual rendah. Padahal sebagian besar masyarakat pedesaan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Jika hasil pertanian rendah atau tidak stabil, pendapatan mereka juga rendah sehingga berpotensi menyebabkan kemiskinan. Secara ringkas, kemiskinan di pedesaan dan kondisi pertanian saling terkait karena kondisi pertanian yang kurang produktif, terbatasnya akses pasar, dan kurangnya dukungan teknologi serta infrastruktur menyebabkan

rendahnya pendapatan petani dan memicu kemiskinan di wilayah pedesaan.

c. Kondisi Demografi

Kondisi demografi dapat dilihat dari jumlah penduduk Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Tahun 2020, jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 36.516.035 jiwa, dan tahun 2024 sebanyak 37.892.283 jiwa atau mengalami penambahan penduduk sebanyak 1.376.248 jiwa atau 3,77 persen. Dari sisi komposisi penduduk, Jawa Tengah masih didominasi penduduk laki-laki dengan rasio kelamin rata-rata diatas 50 persen selama kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan kelompok umur didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif dengan angka ketergantungan mengalami tren meningkat dari 43,16 di tahun 2020 menjadi 44,50 di tahun 2024. Peningkatan angka ketergantungan ini disumbang oleh jumlah penduduk lansia yang semakin meningkat dari 7,72 persen di tahun 2020 menjadi 9,05 persen di tahun 2024. Hal ini seiring dengan membaiknya kualitas hidup masyarakat ditandai dengan usia harapan hidup masyarakat Jawa Tengah yang semakin meningkat dan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk lansia. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa Jawa Tengah ke depan harus mulai mempersiapkan diri untuk memasuki masa transisi menuju *ageing population*.

Selain itu, masalah terkait kependudukan yang dihadapi oleh Indonesia secara umum dan Jawa Tengah khususnya adalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Beberapa wilayah memiliki jumlah penduduk yang besar, sementara wilayah lain memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dan pembangunan wilayah yang dapat berdampak pada tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan menghadapi masalah peningkatan pengangguran jika tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan serta penyediaan lahan pemukiman.

Aspek demografi sangat menentukan kapasitas ekonomi masyarakat. Pendapatan bukan hanya soal angka, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur usia, pendidikan, urbanisasi, dan dinamika rumah tangga. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan profil demografi lokal agar intervensi lebih tepat sasaran. Untuk Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk disuatu wilayah yang memiliki pertumbuhan penduduk tinggi sering menghadapi tekanan terhadap sumber daya dan lapangan kerja. Hal ini akan berdampak pada persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Jika pertumbuhan ekonomi tidak

sebanding, maka pendapatan per kapita bisa stagnan atau menurun. Untuk kondisi struktur Usia Penduduk yang didominasi usia produktif (15–64 tahun) berpotensi meningkatkan pendapatan jika disertai dengan lapangan kerja yang memadai. Sebaliknya, jika banyak penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia), beban ekonomi meningkat dan pendapatan rumah tangga bisa tertekan.

Untuk aspek tingkat pendidikan yang dimiliki oleh warganya akan berpengaruh langsung terhadap kualitas tenaga kerja dan akses terhadap pekerjaan bergaji tinggi. Jika wilayah tersebut dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki pendapatan masyarakat yang lebih rendah dan angka kemiskinan lebih tinggi. Kemudian pengaruh urbanisasi dan migrasi penduduk juga menjadi penting terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Urbanisasi mendorong konsentrasi ekonomi di kota, namun juga bisa menciptakan kantong-kantong kemiskinan jika tidak diimbangi dengan perencanaan sosial. Sementara migrasi dari desa ke kota sering terjadi karena harapan pendapatan lebih tinggi, tetapi bisa menimbulkan ketimpangan dan tekanan sosial.

Untuk komposisi demografi pada rumah tangga maka rumah tangga besar dengan banyak tanggungan cenderung memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah. Pola konsumsi dan ketergantungan antar anggota rumah tangga juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Terakhir terkait dengan aspek Gender dan Partisipasi Angkatan Kerja. Ketimpangan gender dalam akses kerja dan upah masih menjadi isu di beberapa wilayah. Ketimpangan ini tentu akan berdampak pada struktur sosial dan pendapatan di rumah tangga. Peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dapat mendorong pendapatan rumah tangga secara signifikan.

D. ANALISIS KEMISKINAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH DI JAWA TENGAH

Karakteristik wilayah dapat dilihat dari kondisi geografis yang beraneka ragam di setiap kawasan. Menurut Sofianto (Brida Jateng, 2023) setiap kawasan memiliki kondisi dan penyebab kemiskinan yang berbeda. Di daerah pesisir terjadinya air laut pasang menyebabkan lahan produktif tenggelam, selain itu terdapat masalah sosial terkait dengan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Pada kawasan pertanian dataran rendah kemiskinan terjadi karena kelangkaan lapangan pekerjaan dan kurangnya kepemilikan aset, rendahnya kapasitas SDM, Pada kawasan kering secara umum kemiskinan terjadi karena kurangnya aset produksi, lahan kurang subur, kesempatan kerja kurang, jauh dari pusat industri, keterbatasan akses, dan kapasitas SDM rendah. Di kawasan dataran tinggi/perbukitan kemiskinan terjadi karena minimnya lapangan pekerjaan, pendapatan yang rendah, kepemilikan lahan sempit, dan tata kelola tradisional yang

belum menguntungkan. Selain itu, produksi hasil tanaman pertanian dan perkebunan dijual dalam bentuk mentah dan harga rendah serta masih diolah secara tradisional sehingga tidak mencapai skala yang ekonomis. Masalah lain di kawasan perbukitan/dataran tinggi berkaitan dengan pendidikan (anak tidak sekolah/ATS), kesehatan (*stunting*), infrastruktur dasar (sanitasi layak, jamban).

Dari kondisi karakteristik diatas perlu dianalisis secara mendalam untuk memastikan keterkaitan kondisi kawasan dengan kondisi masyarakat miskin. Analisis ini akan menjadi bukti untuk intervensi penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Beberapa kantong kemiskinan di Jawa Tengah berada di kondisi yang bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat miskin. Masyarakat miskin tinggal di daerah - daerah yang membuat pengeluaran mereka menjadi meningkat. Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemetaan terkait karakteristik wilayah yang dapat berdampak dengan penduduk miskin. Analisis berdasarkan kawasan sebagai berikut:

1. Kawasan Pesisir

Pada wilayah pesisir, mayoritas penduduk miskin menggantungkan pada mata pencaharian di sektor perikanan tangkap dan usaha tambak garam. Hal ini menegaskan bahwa kawasan pesisir merupakan sumber utama penghidupan bagi kelompok masyarakat miskin. Oleh karena itu, dinamika perubahan lingkungan maupun intervensi kebijakan pemerintah memiliki implikasi langsung terhadap kondisi sosial-ekonomi.

Selain itu, kondisi wilayah pesisir secara alami mengalami air laut pasang (rob) yang menyebabkan pada tempat tinggal terendam dan menjadi hambatan dalam aktifitas kesehariannya. Selain itu bagi yang memiliki lahan produktif juga tenggelam dan masyarakat tidak dapat memanfaatkannya. Kondisi rob juga berdampak ke beberapa infrastruktur dasar seperti jalan, akses air bersih, sanitasi dan kondisi tempat tinggal. Pengeluaran masyarakat di sekitar pesisir bertambah pada saat terjadinya rob. Pengeluaran untuk mencegah rob masuk atau memperbaiki rumah tinggal menjadi kebutuhan utama. Penghasilan lebih digunakan untuk pengeluaran tersebut sehingga tidak bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Masyarakat miskin pesisir yang berprofesi sebagai nelayan juga memiliki kendala dalam melakukan aktifitas sehari – hari yaitu tidak memanfaatkan subsidi BBM melalui kartu nelayan, hal ini disebabkan jauhnya lokasi mereka dengan pusat pengisian BBM. Permasalahan lain adalah mereka juga harus memiliki uang tunai jika ingin membeli BBM di tempat yang disediakan. Selain itu jenis mesin yang mereka pergunakan juga menggunakan bahan bakar premium bukan biosolar, berbeda dengan jenis mesin kapal kebanyakan. Situasi tersebut menyebabkan mereka lebih memilih membeli BBM di warung dekat rumah daripada di pusat pengisian BBM.

Perubahan kondisi di wilayah pesisir berimplikasi langsung terhadap pola pengeluaran rumah tangga miskin serta berpengaruh pada tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Pemahaman terhadap dinamika ini menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan intervensi yang tepat sasaran dalam kerangka strategi penurunan kemiskinan. Intervensi di wilayah pesisir perlu diarahkan pada penguatan sektor utama mata pencaharian, khususnya nelayan, serta pada pemenuhan kebutuhan anggota rumah tangga terhadap akses layanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan aspek layanan publik lainnya.

2. Kawasan Pertanian

Untuk di Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin yang berprofesi petani, terutama petani gurem/buruh tani. Penduduk miskin yang tinggal di wilayah pertanian menjadi bagian penentu jumlah kemiskinan di pedesaan, mengingat mayoritas profesi di pedesaan adalah petani. Kawasan pertanian akan bergantung pada kondisi cuaca, jenis dan harga komoditas di wilayah tersebut. Perubahan yang terjadi dari cuaca, jenis dan harga komoditas bisa saja berdampak pada kondisi penduduk miskin di sana. Penghasilan penduduk miskin juga akan berdampak yang membuat pengeluaran mereka menjadi tidak menentu. Penduduk miskin di wilayah pertanian memiliki kriteria tersendiri yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca seperti pada saat banjir dan kekeringan akan mengalami kerugian terhadap produk pertaniannya. Masyarakat miskin di sekitar wilayah pertanian dataran rendah ini mengandalkan pekerjaannya dalam proses produksi pertanian. Sebagian besar mereka tidak memiliki lahan dan menjadi buruh tani penggarap lahan. Status pekerjaan mereka sebagai berimplikasi pada jam kerja mereka karena tidak setiap hari ada pekerjaan. Hal ini membuat mereka tidak memiliki pemasukan tidak tetap dan upah yang didapat juga relatif kecil.

Kondisi pendapatan yang rendah menjadi berat pada saat beban anggota rumah tangga tidak memiliki penghasilan. Misalnya mereka memiliki anggota rumah tangga yang tidak bekerja seperti tanggungan lansia, anak dan pasangan yang mengurus rumah tangga. Kebanyakan masyarakat miskin di wilayah pertanian dataran rendah ini tidak berpendidikan tinggi, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih layak. Hanya saja beberapa mereka yang mempunyai sedikit lahan ketika dimanfaatkan seperti untuk peternakan kecil terkendala dengan polusi yang mengganggu lingkungan sekitar. Fenomena lingkaran kemiskinan yang dialami di lingkungan ini seperti kondisi orang tua miskin tidak sekolah, tidak memiliki aset dan modal. Anak mereka juga pendidikannya kurang kemudian bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah.

3. Kawasan Lahan Kering

Kondisi wilayah di kawasan lahan kering secara umum terdiri sebagian besar lahan sawah merupakan tadah hujan. Selain itu juga

agak kesulitan pengairan untuk lahan pertanian, sehingga musim tanam padi hanya 1 kali setahun dan ditanami dengan tanaman sela berupa palawija. Hasil panen langsung dijual dalam bentuk mentah. Untuk kepemilikan lahan relatif kecil sekitar 0,25 Ha dan sebagian lainnya yang tidak memiliki lahan bekerja sebagai buruh tani. Musim tanam yang hanya 1 kali menyebabkan sedikitnya kesempatan kerja buruh tani. Selebihnya mereka bekerja serabutan misalnya buruh konstruksi, bahkan bagi yang berusia tua sering tidak bekerja, memenuhi kebutuhan seadanya atau mengandalkan bantuan anak/orang lain.

Kondisi wilayah lahan kering berimplikasi pada meningkatnya kerentanan pengeluaran rumah tangga miskin. Keterbatasan potensi sumber daya lokal menyebabkan masyarakat miskin di kawasan ini menghadapi hambatan struktural untuk keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif melalui jaminan ketersediaan kebutuhan dasar, khususnya pangan, air bersih, dan sanitasi. Mengingat keterbatasan daya dukung wilayah, pemenuhan kebutuhan tersebut pada umumnya memerlukan suplai dari luar kawasan, sehingga intervensi yang tepat dapat mendorong terjadinya perbaikan kondisi penghidupan masyarakat miskin di wilayah lahan kering

4. Kawasan Dataran Tinggi/Perbukitan

Kondisi wilayah di dataran tinggi/perbukitan, penduduk miskin memiliki lahan yang tidak besar. Lahan ini ditanami sesuai kondisi dan tanaman tersebut tidak ditanam spesifik di petak lahan tertentu tetapi tumpang sari. Hal ini membuat panen juga sedikit kemudian hasil panen dijual dalam bentuk mentah dan harga rendah. Hasil panen tersebut juga didapat sesuai musimnya, ada yang 2-3 bulan sekali, 6 bulan, atau setahun sekali, sehingga hasilnya tidak dirasakan setiap hari. Wilayah di dataran tinggi ini membuat beberapa desa menjadi terpencil. Lokasi yang terpencil juga menyebabkan minimnya kesempatan kerja sektor formal. Tidak ada industri atau usaha yang menyerap banyak tenaga kerja di wilayah tersebut. Untuk mengakses lapangan kerja tersebut mereka harus keluar dari desa. Selain itu terbatasnya akses infrastruktur juga berpengaruh terhadap tingginya kemiskinan. Akses yang ada menjadi salah satu pendorong terhadap kelangsungan kehidupan petani miskin disana. Selain itu juga berdampak pada aktifitas anggota rumah tangga miskin terutama dalam mendapatkan hak dasar bidang pendidikan dan kesehatan serta sosial.

Dari karakteristik kawasan di atas maka permasalahan kemiskinan di Jawa Tengah pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, ketahanan pangan, pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, sosial, pembangunan desa.

E. PERMASALAHAN KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan masih menjadi tantangan besar di Jawa Tengah, terutama di wilayah pedesaan. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya pendapatan, keterbatasan akses infrastruktur dasar, sosial, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, pembangunan desa, ketahanan pangan, pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan. Di pedesaan, kemiskinan umumnya berkaitan erat dengan sektor pertanian yang belum optimal, seperti rendahnya produktivitas, keterbatasan teknologi, serta sulitnya akses pasar. Selain itu, kurangnya infrastruktur dan fasilitas penunjang turut memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan memperkuat lingkaran kemiskinan yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

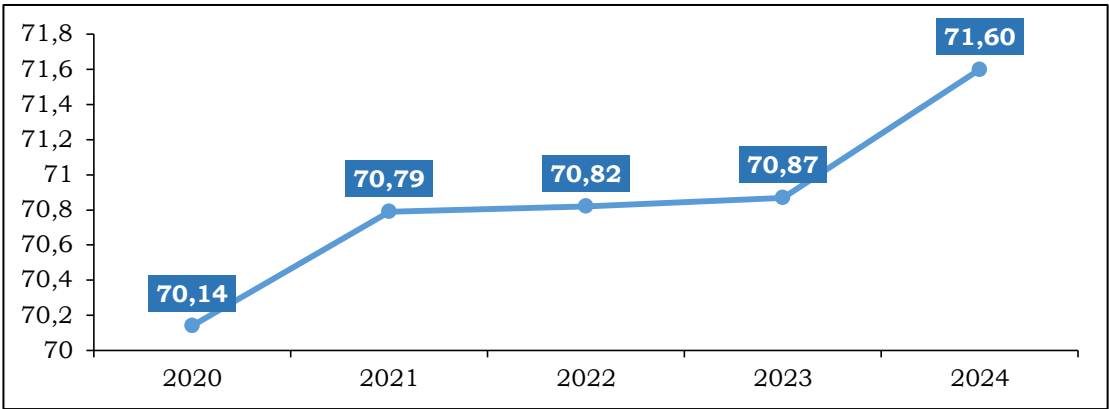
Secara menyeluruh permasalahan kemiskinan tersebut dapat dipetakan dengan menggunakan logika program (*theory of change*) sebagaimana terlampir. *Theory of change* atau ToC adalah kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana suatu kegiatan dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan, dalam penanggulangan kemiskinan ToC digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu program bisa menurunkan angka kemiskinan. Adapun permasalahan kemiskinan yang sudah diidentifikasi berdasarkan akar masalah kemiskinan sebagaimana berikut:

1. Kondisi Pendidikan

Dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, khususnya bagi masyarakat miskin. Salah satu indikator utamanya, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), HLS di Jawa Tengah dari 12,85 tahun pada tahun 2023 menjadi 12,86 tahun pada 2024, hanya meningkat 0,01.

Peningkatan HLS ini merupakan hasil upaya strategis pemerintah untuk lebih pemeratakan akses layanan pendidikan kepada masyarakat, namun selain itu perlu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, Intervensi tersebut berkontribusi pada pengurangan kesenjangan layanan pendidikan sekaligus meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Dilihat dari APS kelompok umur 16-18 tahun selama kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan yaitu 70,14 pada Maret 2020 menjadi 71,6 pada Maret 2024, sebagaimana Gambar 2.21 berikut:

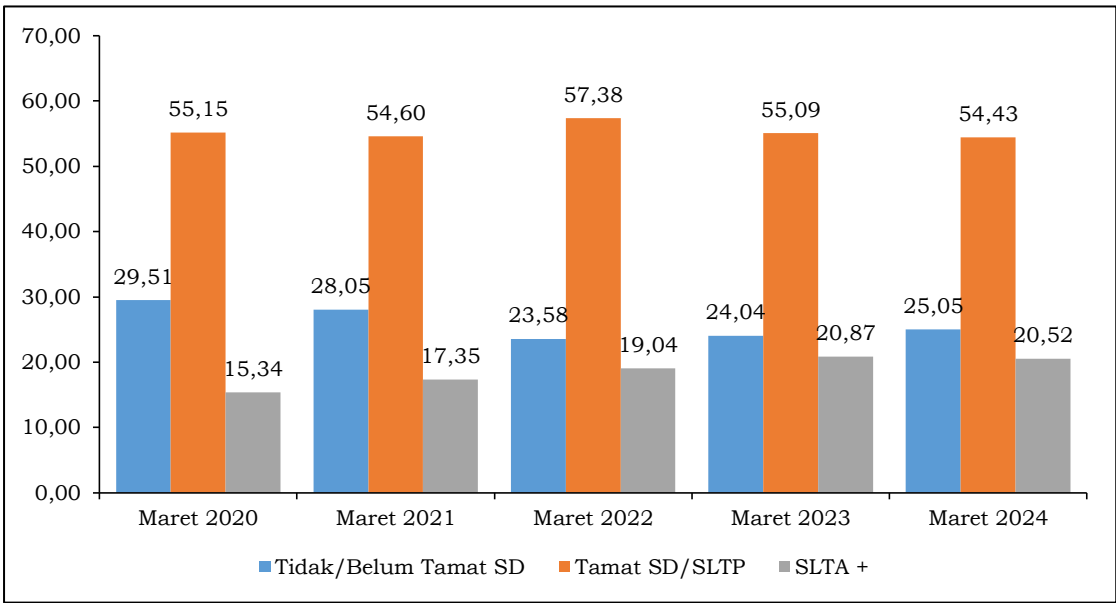


Sumber: BPS, Susenas

Gambar 2.21
Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun 2020-2024

Peningkatan APS sebagaimana gambar diatas didukung oleh peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan dan peningkatan pemerataan pendidikan menengah dan khusus.

Selain itu apabila dilihat dari tingkat pendidikan penduduk miskin usia 15 tahun ketas pada 2020-2024 sebagaimana Gambar 2.22 berikut:



Sumber: BPS, Susenas (Maret 2025)

Gambar 2.22
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Maret 2020-Maret 2024

Berdasarkan gambar diatas, sebagian besar penduduk miskin memilik pendidikan tertinggi setingkat SD/SLTP. Hal tersebut mengindikasikan mayoritas penduduk miskin cenderung tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai dengan angka partisipasi sekolah pendidikan menengah di Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 71,6. Permasalahan tersebut berdampak pada keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan capaian pendidikan di

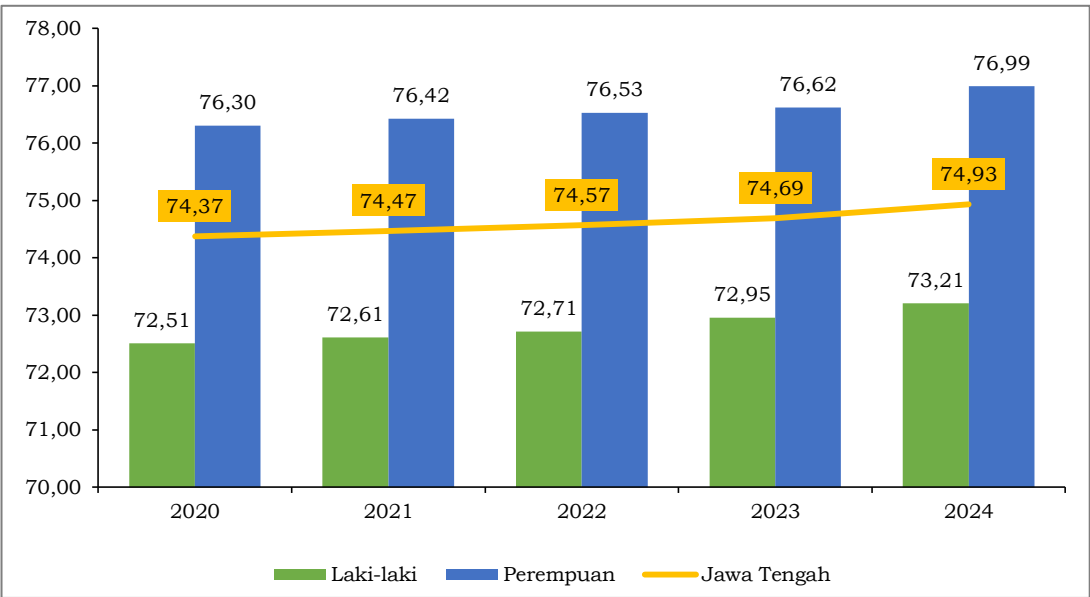
kalangan masyarakat berpenghasilan rendah masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.

Peningkatan ini merefleksikan efektivitas intervensi pemerintah dalam memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meskipun laju peningkatannya relatif lambat. Secara teknokratis, peningkatan APS dan HLS berimplikasi terhadap pengurangan kesenjangan pendidikan antar kelompok sosial, yang pada akhirnya memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan jangka panjang.

Berdasarkan uraian di atas, analisis tingkat pendidikan penduduk miskin menunjukkan bahwa sebagian besar masih berhenti pada jenjang SD dan SLTP. Hal ini menandakan adanya hambatan struktural maupun kultural dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, yang pada gilirannya membatasi akses terhadap lapangan kerja yang lebih produktif dan berpendapatan layak. Dengan demikian, meskipun capaian indikator pendidikan menunjukkan tren positif, tantangan strategis masih terletak pada peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan menengah hingga tinggi bagi rumah tangga miskin.

2. Kondisi Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat di Jawa Tengah diukur dengan kinerja Usia Harapan Hidup (UHH) yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Capaian UHH Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan angka yang terus membaik sebesar 74,93 tahun pada tahun 2024, sebagaimana Gambar 2.23 berikut:



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.23
Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024 (Tahun)

Sedangkan untuk Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Tengah tahun 2024 masih cukup tinggi meskipun angkanya terus menurun. AKI tahun 2024 mengalami tren membaik dari tahun 2021 sebanyak 1.011 kasus menjadi 427 kasus pada tahun 2024. Kasus kematian ibu terbanyak terjadi di Kabupaten Brebes sebanyak 54 kasus, sedangkan kasus terendah di Kota Magelang dan Kota Tegal sebanyak 1 kasus. Penyebab terjadinya kasus kematian ibu antara lain hipertensi, perdarahan, infeksi masa nifas, abortus, jantung, gangguan metabolik, gangguan darah, gangguan elektrolit, CA *Vulva Maligna*, TBC/*Pneumonia*, CA otak, krisis *tyroid*, *shock* septik, gagal ginjal, *diabetes mellitus on pregnancy* 1, *suspect* jantung dengan obesitas 1, sirosis hepatitis, CA *mammae*, komplikasi nonobstetrik, serta nifas *post SC Morbili*.

Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. AKB tahun 2024 sebesar 7,57 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) sebanyak 4.326 kasus menurun dari tahun 2023 sebesar 8,02 per 1.000 KH sebanyak 4.612 kasus. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa kasus kematian bayi di Jawa Tengah tertinggi di Kabupaten Grobogan sebanyak 241 kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 12 kasus. Faktor penyebab kematian bayi antara lain gangguan pernafasan dan jantung, kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan kongenital pada bayi dan komplikasi kehamilan.

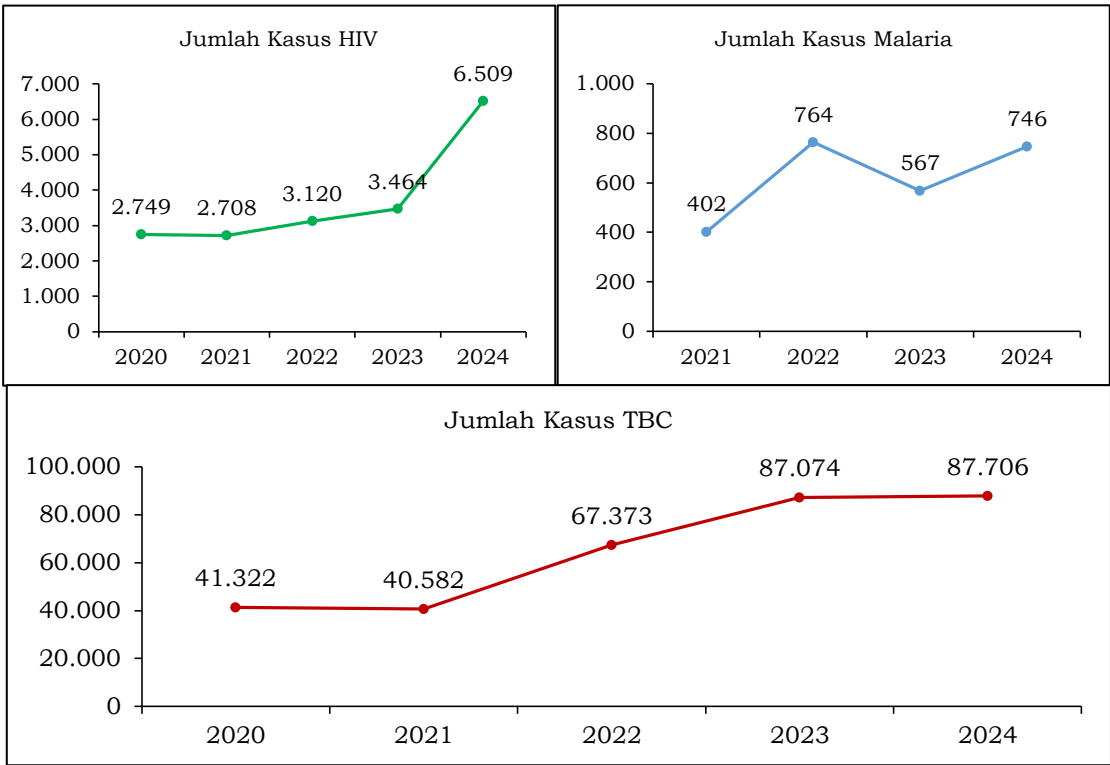
Angka Kematian Balita (AKABA) di Jawa Tengah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sangat fluktuatif. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan tren AKABA dari 8,99 per 1.000 KH pada tahun 2020 menjadi 8,20 per 1.000 KH pada 2022, meningkat menjadi 9,28 per 1.000 KH pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 8,57 per 1.000 KH pada tahun 2024. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa kasus kematian balita di Jawa Tengah sebanyak 4.834 kasus turun menjadi 4.699 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023, meningkat menjadi 5.339 dan turun menjadi 4.898 kasus pada tahun 2024. Kasus tertinggi di Kabupaten Grobogan sebanyak 278 kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 12 kasus. Beberapa penyebab kematian balita antara lain *pneumonia*, penyakit bawaan, diare, cedera, campak dan malaria di daerah endemis. Selain infeksi penyakit, faktor pola asuh juga menjadi faktor penyumbang kasus kematian balita.

Prevalensi balita dengan *stunting* di Jawa Tengah tahun 2023 tercatat juga masih cukup tinggi dan bahkan menjadi salah satu kontributor terbesar kasus *stunting* di tingkat nasional. Prevalensi balita dengan *stunting* di Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 20,7 persen, *underweight* sebesar 14,5 persen, *wasting* sebesar 7,1 persen, dan *overweight* sebesar 4,2 persen. Beberapa faktor yang menjadi penyebab gizi buruk yang berdampak pada kasus *stunting* antara lain masalah ekonomi, sanitasi, pendidikan orang tua, dan perilaku orang

tua. Faktor ekonomi terutama kemiskinan menjadi salah satu determinan yang menjadi akar penyebab ketiadaan pangan, tempat mukim yang yang berjejalan dan tidak sehat, serta ketidakmampuan mengakses fasilitas kesehatan.

Untuk menurunkan prevalensi balita dengan *stunting* dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat salahsatunya dengan memperkuat ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) terus mengalami peningkatan yaitu 82,21 pada tahun 2020 meningkat menjadi 85,34 ditahun 2024, peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dari 82,95 ditahun 2022 menjadi 84,8 tahun 2023 atau meningkat sebesar 1,85. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Selain *prevalensi stunting* Jawa Tengah juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus penyakit menular Jumlah kasus penyakit menular di Jawa Tengah yang meliputi HIV, Malaria dan TBC, sebagaimana Gambar 2.24 berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.24
Penyakit Menular (HIV, Malaria dan TBC) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, tren penyakit menular yang meliputi HIV, malaria, dan tuberkulosis (TBC) pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. HIV cenderung mengalami fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan kasus baru akibat meningkatnya kemampuan deteksi dini dan perluasan cakupan layanan konseling serta tes. Malaria relatif terkendali dengan jumlah kasus yang rendah, sejalan dengan status eliminasi malaria di sebagian besar

kabupaten/kota. Sementara itu, TBC masih menjadi beban kesehatan masyarakat terbesar, ditandai dengan jumlah kasus yang tinggi setiap tahun meskipun program penemuan kasus aktif (*active case finding*) dan pengobatan gratis terus diperkuat.

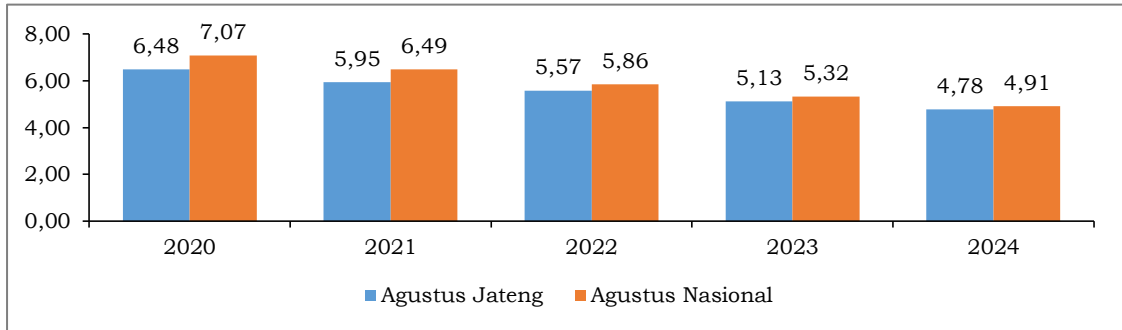
Tantangan utama dalam pengendalian penyakit menular tersebut mencakup keterbatasan cakupan deteksi dini di wilayah pedesaan dan kantong-kantong populasi rentan, keberlanjutan pendanaan program kesehatan, serta masih adanya stigma sosial terutama terhadap penderita HIV dan TBC yang berimplikasi pada rendahnya kepatuhan pengobatan. Selain itu, mobilitas penduduk yang tinggi juga meningkatkan risiko penularan, khususnya di kawasan padat penduduk dan daerah dengan akses sanitasi serta gizi yang belum memadai.

Penyakit menular berpotensi memperburuk kondisi ekonomi keluarga miskin akibat biaya dan hilangnya produktivitas tenaga kerja. Sehingga upaya pengendalian HIV, malaria, dan TBC perlu ditingkatkan.

Dari sisi cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jawa Tengah tahun 2024 mencapai angka 98,83 persen atau sejumlah 37.831.220 peserta. Berdasarkan status kepesertaan, persentase peserta aktif sebesar 73,65 persen atau sejumlah 28.194.196 peserta dan peserta non aktif 74,53 persen atau sejumlah 9.637.024 peserta. Cakupan kepesertaan JKN diharapkan dapat mencakup minimal 95 persen dari total jumlah penduduk yang sifatnya inklusif, untuk semua segmen masyarakat termasuk kelompok disabilitas, kelompok rentan dan kelompok yang terabaikan, tidak bias gender, serta mencakup semua kebutuhan pelayanan dasar yang merata bagi semua individu masyarakat Jawa Tengah.

3. Kondisi Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi yang stabil berpengaruh terhadap menurunnya pengangguran di Jawa Tengah yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kondisi TPT Jawa Tengah sebagaimana Gambar 2.25 berikut:

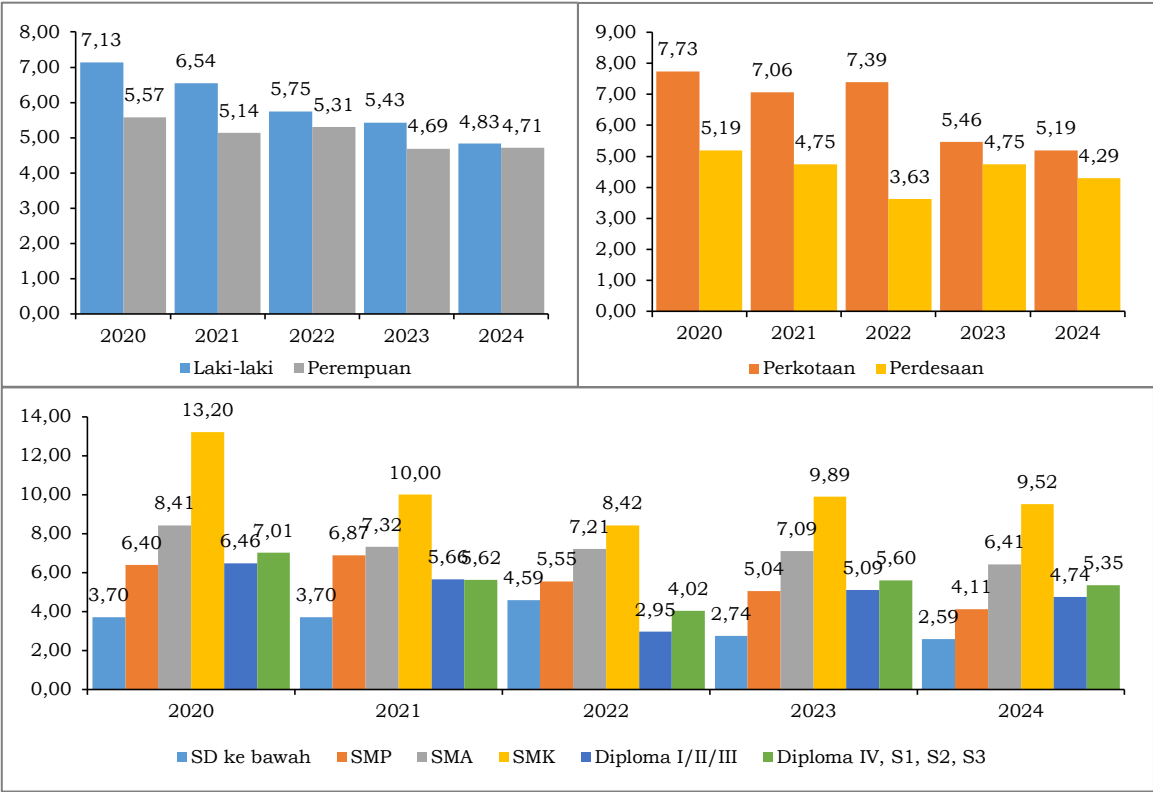


Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.25
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

TPT Jawa Tengah pada bulan Agustus 2024 mencapai angka 4,78 persen yang berarti diantara 100 orang angkatan kerja ditemukan sekitar 4 (empat) orang penganggur. TPT Agustus 2024 turun sebesar 0,35 persen poin dibandingkan Agustus 2023. TPT nasional bulan Agustus 2024 lebih besar dibandingkan Jawa Tengah

Apabila dilihat berdasarkan karakteristik pengangguran (jenis kelamin, tingkat pendidikan serta wilayah) TPT Jawa Tengah sebagaimana Gambar 2.26 berikut:



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.26
Karakteristik Pengangguran Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024 (%)

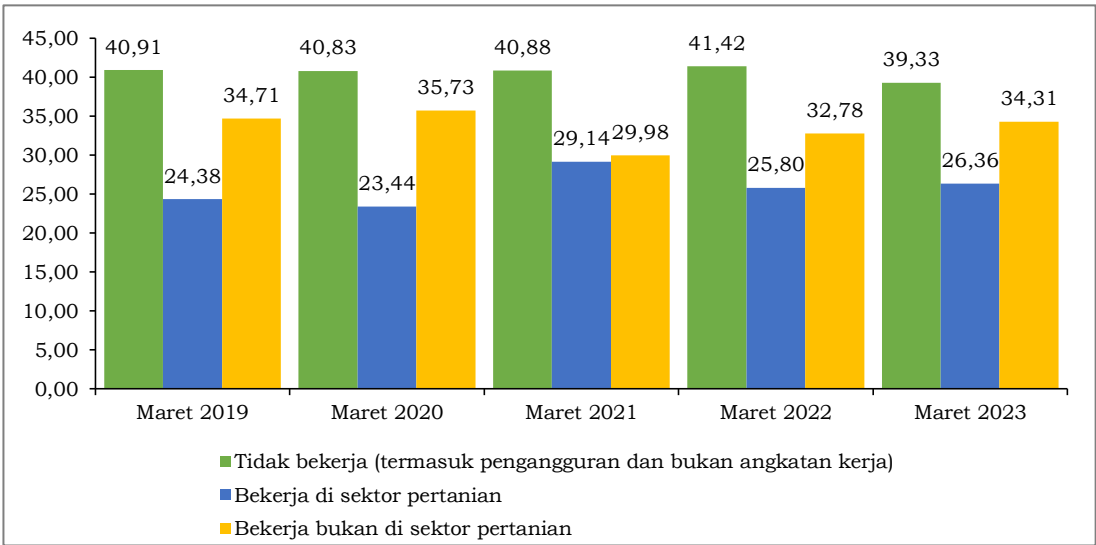
Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 4,83 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,71 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPT laki-laki turun sebesar 0,60 persen poin, sedangkan TPT perempuan naik sebesar 0,02 persen poin. Menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 5,19 persen, lebih tinggi dibanding TPT daerah perdesaan yang sebesar 4,29 persen. Dibandingkan Agustus 2023, baik TPT daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,27 persen poin dan 0,46 persen poin.

TPT menurut kategori pendidikan mempunyai pola yang tidak jauh berbeda, baik pada Agustus 2024 maupun pada periode sebelumnya. Pada Agustus 2024, TPT dari tamatan SMK masih menjadi yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,52 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah tercatat bagi mereka yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 2,59 persen. Pola ini menegaskan adanya persoalan struktural pada transisi lulusan pendidikan vokasi ke pasar

kerja, di mana kompetensi yang dimiliki lulusan SMK belum sepenuhnya terserap oleh kebutuhan industri. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya mismatch antara kurikulum vokasi, keterampilan kerja, dan dinamika permintaan tenaga kerja.

Dalam konteks visi RPJMN yang menekankan “Revitalisasi Vokasi” sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tingginya TPT lulusan SMK menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian khusus. Kegagalan sistem vokasi dalam menjamin *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri tidak hanya berdampak pada meningkatnya pengangguran terbuka, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap kemiskinan transien (rentan miskin). Lulusan SMK yang tidak segera memperoleh pekerjaan cenderung berada pada posisi ekonomi yang rapuh, dengan pendapatan tidak tetap atau pekerjaan informal berupah rendah, sehingga sangat mudah jatuh di bawah garis kemiskinan ketika terjadi guncangan ekonomi. Dengan demikian, tingginya pengangguran terbuka lulusan SMK bukan sekadar persoalan ketenagakerjaan, melainkan menjadi faktor penting yang memperbesar kerentanan kemiskinan dan menunjukkan urgensi percepatan revitalisasi pendidikan vokasi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN.

Dilihat dari Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Maret 2019–Maret 2023, sebagaimana Gambar 2.27 berikut:



Sumber : BPS, 2025

Gambar 2.27
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Maret 2019–Maret 2023

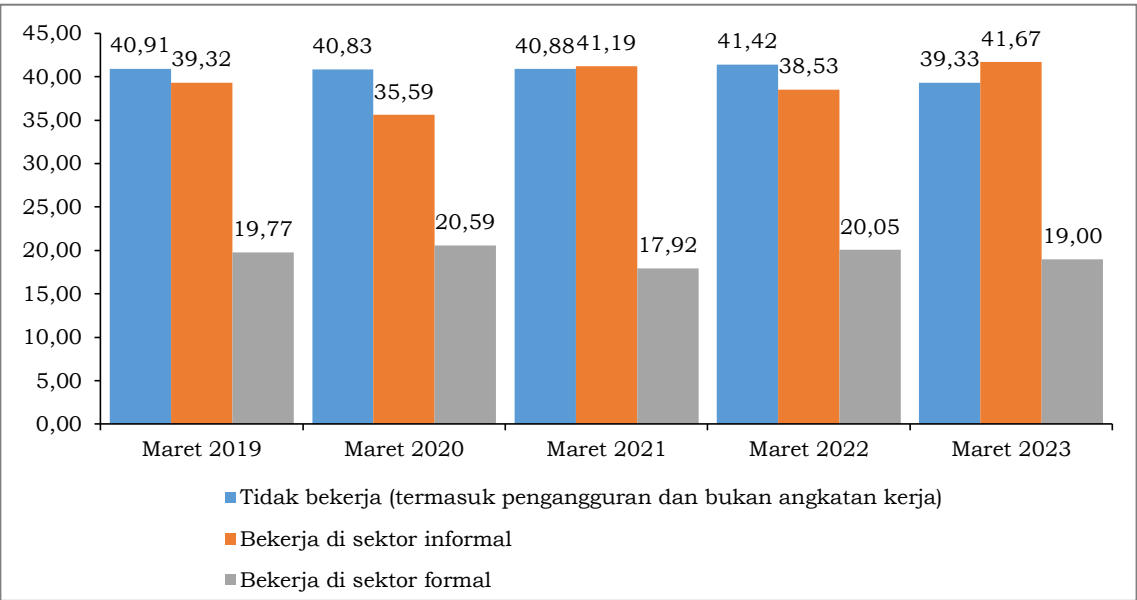
Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Selama lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja (termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja) lebih dari 30 persen. Pada tahun 2023 tercatat sebesar 39,33

persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja. Angka tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 41,42 persen.

Karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor sumber penghasilan utama rumah tangga dan status pekerjaan. Profil penduduk miskin seringkali melekat dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan. Secara umum, rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian (26,36 persen pada Maret 2023).

Ditinjau dari status pekerjaan utama, pada sebagian besar penduduk miskin berstatus sebagai pekerja informal. Pekerja informal merupakan penduduk yang status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar. Sedangkan pekerja formal merupakan penduduk yang status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

Selama periode 2019-2023, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal cenderung mengalami kenaikan. Pada Maret 2019-Maret 2023, persentase yang bekerja di sektor informal meningkat, yaitu sebesar 39,32 persen pada tahun 2019 menjadi 41,67 persen pada Maret 2023, sebagaimana Gambar 2.28 berikut:



Sumber : BPS, 2025

Gambar 2.28
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Formal/Informal, Maret 2019–Maret 2023

Penyelesaian hubungan industrial adalah proses penanganan perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja antara pemberi kerja

dan pekerja/buruh agar tercapai kesepakatan. Penyelesaian hubungan industrial di Jawa Tengah periode tahun 2020 -2024 mengalami fluktuatif, persentase penyelesaian perselisihan tahun 2020 sebesar 90 menurun menjadi 87,74 di tahun 2021 dan kembali mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 sebesar 98,57 atau meningkat sebesar 8,83 walaupun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 98,41 namun di tahun 2024 meningkat kembali pada tahun 2024 sebesar 98,79. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 akibat telah pulihnya dampak pandemi Covid '19. Capaian ini ditopang oleh penguatan peran pemerintah, proses mediasi, serta peningkatan sinergi antara pemerintah dan swasta semakin harmonis.

Disisi lain aspek penciptaan lapangan kerja formal juga menunjukkan tren positif, selama periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari 69,04 di tahun 2020 menjadi 73,66 di tahun 2024 atau meningkat 4,6 persen, walaupun pasca pandemi Covid'19 tahun 2021 sempat mengalami penurunan menjadi 50,63 namun pulih kembali menjadi 70,52 persen di tahun 2022. Perkembangan ini merupakan hasil kolaborasi multipihak antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan kerja dalam mendorong ketenagakerjaan formal.

Untuk peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perluasan tenaga kerja tersertifikasi periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini digambarkan tahun 2020 tenaga kerja tersertifikasi sebesar 0,11 persen meningkat 0,77 persen di tahun 2021 dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 2,45 persen dan sempat terjadi penurunan di tahun 2023 menjadi 2,27 persen namun naik signifikan menjadi 5,1 persen di tahun 2024. Pencapaian tenaga kerja tersertifikasi ini jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja di Jawa Tengah masih relatif rendah (5,1%) oleh karena itu masih diperlukan dukungan pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kompetensi tenaga kerja tersertifikasi agar dapat meningkatkan daya saing dan mobilitas tenaga kerja, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan khususnya bagi warga miskin.

Mendasarkan uraian di atas, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah menunjukkan tren positif dengan menurunnya TPT, meningkatnya proporsi pekerja formal, serta bertambahnya tenaga kerja tersertifikasi. Namun, tantangan struktural masih terlihat dari karakteristik pengangguran yang relatif tinggi pada lulusan SMA Kejuruan, serta tingginya persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja. Selain itu, dominasi rumah tangga miskin di sektor pertanian dengan produktivitas rendah serta keterikatan pada pekerjaan informal yang minim perlindungan sosial memperlihatkan adanya kerentanan struktural yang berkontribusi pada keberlangsungan kemiskinan.

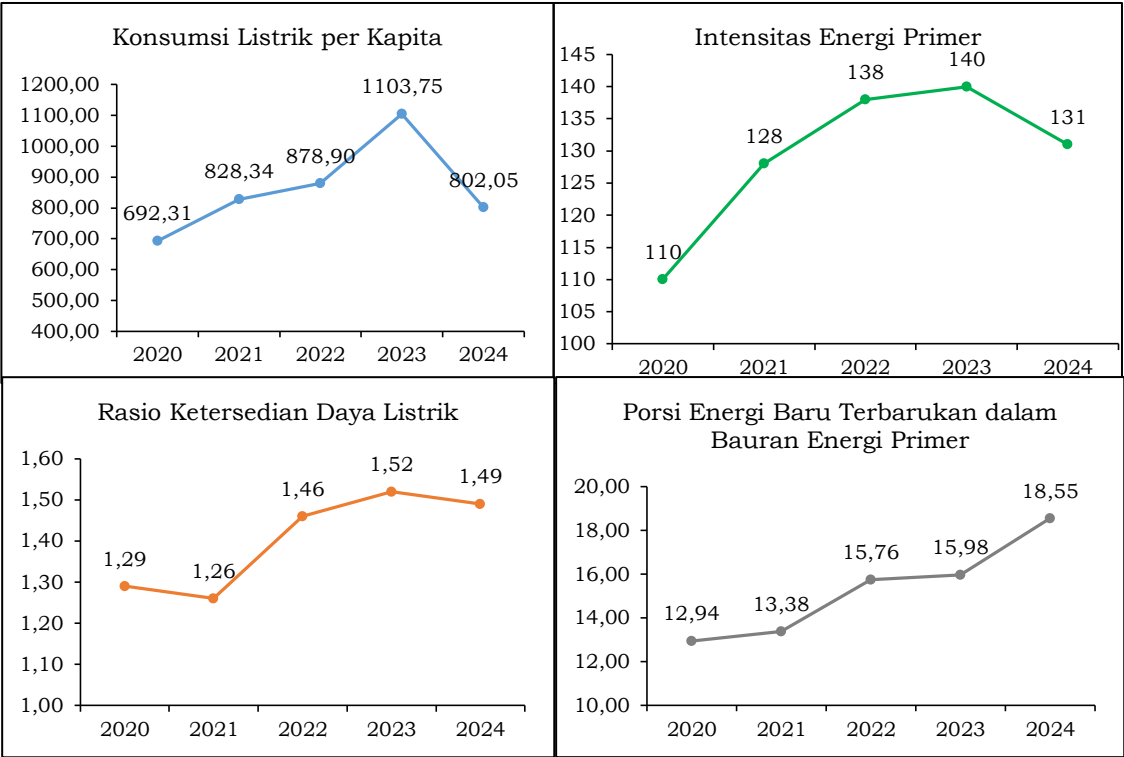
Keterbatasan akses penduduk miskin terhadap pekerjaan formal dan kompetensi yang terstandarisasi menyebabkan rendahnya mobilitas sosial ekonomi. Walaupun iklim hubungan industrial semakin kondusif, manfaat tersebut lebih banyak dirasakan pekerja formal, sementara pekerja miskin di sektor informal tetap rentan. Dengan demikian, percepatan pengurangan kemiskinan perlu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja formal, peningkatan keterampilan dan sertifikasi tenaga kerja, serta penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan pekerja informal, sehingga dapat menciptakan transformasi ketenagakerjaan yang inklusif dan berdaya saing.

4. Kondisi Infrastruktur

Bidang infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Tengah mencakup ketenagalistrikan, infrastruktur dasar permukiman, penyediaan air minum, transportasi, dan jaringan jalan. Pembangunan pada sektor ini diarahkan untuk memperkuat dukungan terhadap aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas antarwilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bidang ketenagalistrikan dilihat dari Rasio ketersediaan daya listrik di Jawa Tengah. Rasio elektrifikasi di Jawa Tengah saat ini telah mendekati 100 persen. Rasio elektrifikasi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Jawa Tengah sudah menikmati layanan energi listrik. Rasio elektrifikasi menggambarkan ketahanan energi yang terjangkau dan inklusif melalui pemerataan dan keterjangkauan akses untuk masyarakat terhadap energi listrik. Tahun 2014 rasio elektrifikasi Jawa Tengah baru mencapai 88,37 persen. Kemudian sampai dengan tahun 2024 rasio elektrifikasi Jawa Tengah telah mencapai 99,99 persen.

Rasio elektrifikasi didukung oleh konsumsi listrik per kapita dan intensitas energi primer dengan indikator sasaran rasio ketersediaan daya listrik dan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer, sebagaimana Gambar 2.29 berikut:



Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.29
Indikator Terkait Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Konsumsi listrik per kapita di Jawa Tengah menunjukkan tren meningkat pada periode 2020–2023, dari 692,31 kWh menjadi 1.103,75 kWh, sebelum menurun ke 802,05 kWh pada 2024. Kenaikan hingga 2023 mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan akses masyarakat terhadap energi listrik, namun penurunan pada 2024 mengindikasikan adanya tekanan terhadap daya beli atau efisiensi konsumsi energi.

Rasio ketersediaan daya listrik menunjukkan peningkatan dari 1,29 (2020) menjadi 1,52 (2023), sebelum sedikit turun ke 1,49 (2024). Angka di atas 1 menandakan kecukupan pasokan daya listrik relatif aman. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan investasi infrastruktur kelistrikan, meskipun tren penurunan pada 2024 perlu diantisipasi agar tidak mengganggu kebutuhan energi jangka panjang.

Intensitas energi primer meningkat dari 110 (2020) menjadi 140 (2023), sebelum turun ke 131 (2024). Kenaikan intensitas energi mengindikasikan kebutuhan energi yang lebih besar per unit PDB, yang bisa menunjukkan masih rendahnya efisiensi energi. Penurunan pada 2024 dapat diartikan sebagai perbaikan efisiensi atau perlambatan aktivitas ekonomi.

Porsi EBT mengalami peningkatan konsisten dari 12,94% (2020) menjadi 18,55% (2024). Hal ini mencerminkan adanya akselerasi dalam pemanfaatan energi ramah lingkungan, sejalan dengan kebijakan nasional transisi energi. Tren ini positif, namun pencapaian tersebut masih di bawah target nasional yang lebih optimis. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara peningkatan konsumsi listrik, kecukupan pasokan daya, efisiensi pemanfaatan

energi, serta percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).

Selain itu, infrastruktur dasar permukiman juga menjadi perhatian Pemerintah Jawa Tengah yaitu rumah tangga dengan akses hunian layak, sebagaimana tabel berikut:

Data asumsi jumlah rumah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 sebanyak 9.261.697 unit dan berdasarkan data BPS tahun 2024 sebesar 71,76 persen rumah tangga yang memiliki akses hunian layak. Capaian ini meningkat 2,91 persen dari tahun 2023 yang sebesar 68,85 persen, sebagaimana Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

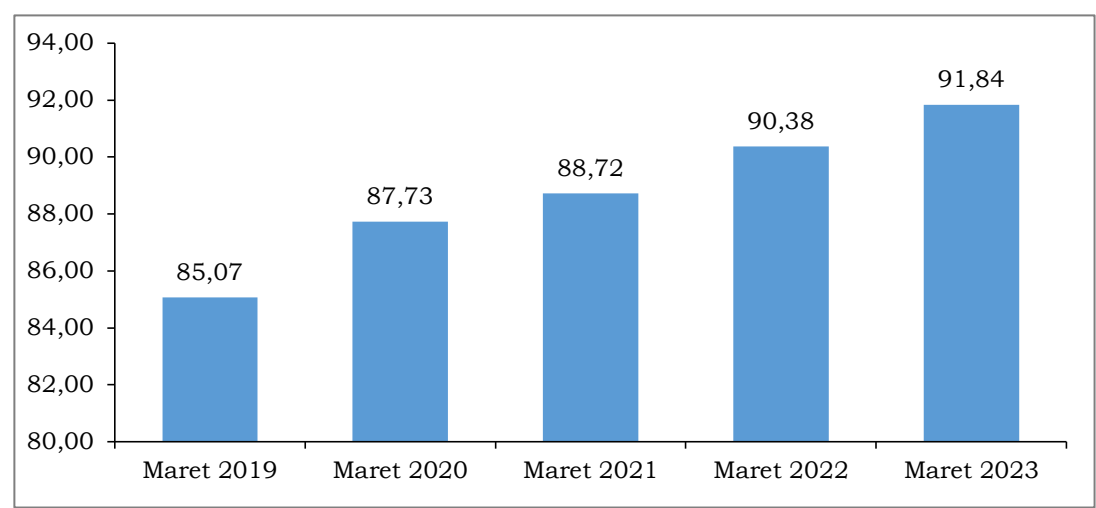
Tahun	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
2020	5.818.483	67,93
2021	5.771.336	66,47
2022	5.847.609	67,02
2023	6.029.999	68,85
2024	6.646.194	71,76

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020–2024. Pada tahun 2020 terdapat 5,82 juta rumah tangga (67,93%) yang menempati hunian layak. Angka ini sempat menurun menjadi 5,77 juta rumah tangga (66,47%) pada 2021, yang dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta keterbatasan pembangunan perumahan. Namun, sejak 2022 tren kembali membaik, dengan peningkatan bertahap hingga mencapai 6,65 juta rumah tangga (71,76%) pada tahun 2024.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah dalam peningkatan akses perumahan layak, baik melalui program kualitas rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas rumah bagi korban bencana dan pembangunan rumah bagi korban bencana serta pembangunan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi dan pembangunan rumah untuk penanganan *backlog* miskin memberikan hasil yang positif. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan penyediaan fasilitas rumah sehat seperti jamban, bagi rumah tangga miskin, baik jamban sendiri, jamban bersama, jamban komunal, jamban umum dan tidak ada jamban. Persentase Rumah

Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.30
Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama, Maret 2019–Maret 2023

Gambar 2.30 menunjukkan perkembangan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri maupun bersama pada periode Maret 2019 hingga Maret 2023. Secara umum, terlihat adanya peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun tidak selalu stabil. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan akses sanitasi bagi rumah tangga miskin, tahun 2019 sebesar 85,07 menjadi 91,84 persen di tahun 2023, artinya terjadi kenaikan sebesar 12,77 persen selama lima tahun terakhir.

Dari sisi konektivitas wilayah, kinerja hubungan antar wilayah yang diukur melalui rasio konektivitas provinsi di Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,25 persen, meningkat menjadi 0,99 persen pada tahun 2022, kemudian mencapai 0,35 persen pada tahun 2023, dan berada pada angka 0,40 persen pada tahun 2024. Meskipun capaian tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya, jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, tingkat keterhubungan antarwilayah masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan perluasan jaringan transportasi antarwilayah secara terencana dan berkelanjutan guna meningkatkan rasio konektivitas provinsi yang lebih luas, sehingga aksesibilitas pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat miskin, dapat semakin optimal.

Dilihat dari kondisi permukaan jalan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Kondisi								Panjang Jalan Provinsi
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	
2020	1.869,69	77,75	312,13	12,98	222,93	9,27	0,000	0,00	2.404,74
2021	1.871,61	77,83	313,45	13,03	219,682	9,14	0,000	0,00	2.404,74
2022	2.010,27	83,60	213,89	8,89	68,33	2,84	112,25	4,67	2.404,74
2023	1.716,04	70,33	487,79	19,99	124,32	5,09	111,97	4,59	2.440,12
2024	1.584,63	64,94	647,33	26,53	131,92	5,41	76,24	3,12	2.440,12

Sumber: Dinas PU BMCK Provinsi Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan Tabel 2.6, total panjang jalan kewenangan provinsi sepanjang 2.440,12 km sesuai SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2 Tahun 2023. Kondisi jalan sesuai standar (lebar 7 meter dengan MST 8 ton) sampai dengan tahun 2024 adalah 47,09 persen. Sementara kondisi permukaan jalan mantap sebesar 91,47 persen yang ditunjukkan dari kondisi permukaan jalan baik 64,94 persen, sedang 26,53 persen, rusak ringan sebesar 5,41 persen, dan rusak berat sebesar 3,12 persen.

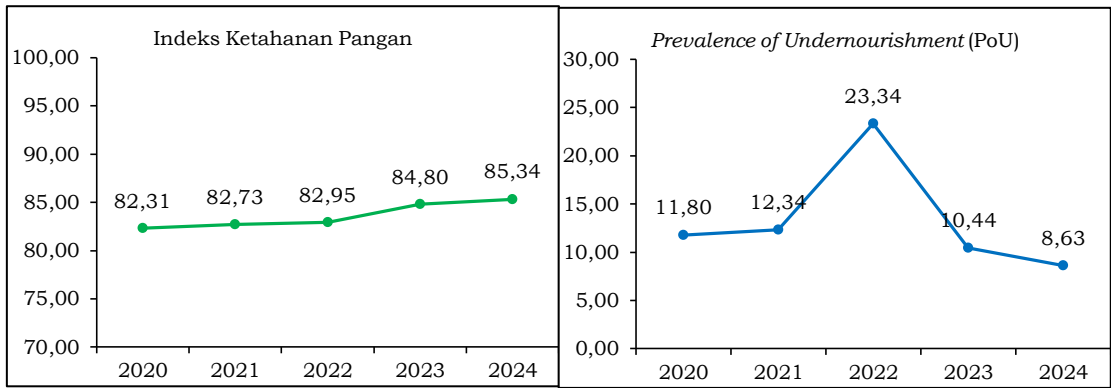
Berdasarkan uraian di atas, perbaikan infrastruktur di Jawa Tengah memiliki kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pengurangan kemiskinan. Kondisi jalan baik dan sedang yang mencapai 91,47 persen pada tahun 2024 memperlancar arus barang, jasa, dan mobilitas tenaga kerja, sehingga menurunkan biaya logistik serta meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar, layanan publik, dan pusat ekonomi. Demikian pula, peningkatan rasio elektrifikasi hingga 99,99 persen dan kenaikan konsumsi listrik per kapita mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus membuka peluang usaha produktif di tingkat rumah tangga maupun UMKM, yang menjadi sumber penghidupan utama bagi kelompok miskin. Akses energi yang lebih merata juga memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin terhadap guncangan, serta mendorong pemerataan kesempatan pembangunan.

Dari sisi hunian dan sanitasi serta kepemilikan jamban sehat di kalangan rumah tangga miskin memperlihatkan adanya perbaikan kualitas lingkungan permukiman. Peningkatan akses hunian layak dan sanitasi berkontribusi terhadap kesehatan, produktivitas, dan pengeluaran rumah tangga miskin, sehingga berdampak pada penurunan kerentanan kemiskinan multidimensi. Sementara itu, konektivitas antarwilayah yang terus meningkat meskipun masih relatif rendah, menjadi prasyarat untuk memperluas pemerataan pembangunan, khususnya dalam menghubungkan wilayah tertinggal dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan, energi, perumahan, sanitasi, dan konektivitas wilayah memiliki keterkaitan erat dengan

percepatan penanggulangan kemiskinan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah.

5. Kondisi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang dilakukan pengukurannya oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional mulai tahun 2020. IKP merupakan indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Sedangkan ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator *Prevalence of Undernourishment* (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur oleh BPS Pusat. IKP dan PoU Jawa Tengah tahun 2020-2024, sebagaimana Gambar 2.31 berikut:

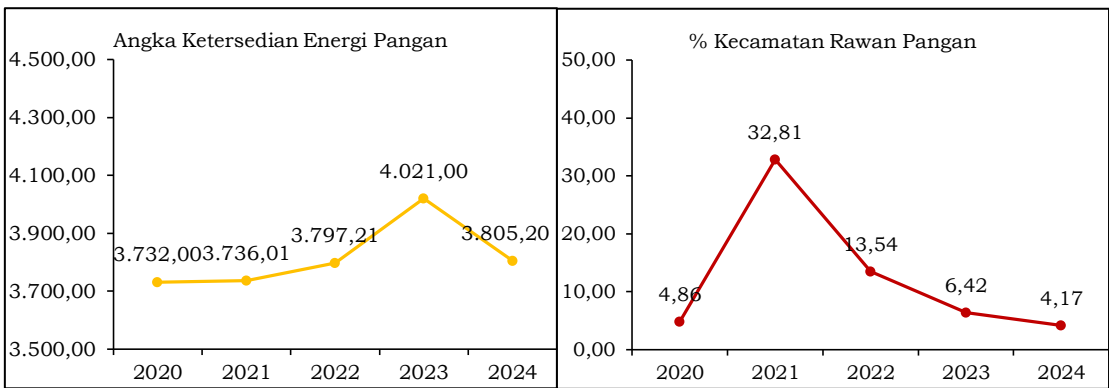


Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.31
Indeks Ketahanan Pangan dan *Prevalence of Undernourishment* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Indeks Ketahanan Pangan di Jawa Tengah mengalami peningkatan secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, IKP tercatat sebesar 82,31, kemudian meningkat menjadi 82,73 pada 2021, 82,95 pada 2022, 84,80 pada 2023, dan mencapai 85,34 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam dimensi ketersediaan pangan, aksesibilitas, serta pemanfaatan pangan di tingkat rumah tangga. Perkembangan ini menunjukkan efektivitas program peningkatan produktivitas pertanian, stabilisasi harga pangan pokok, serta penguatan distribusi pangan antarwilayah. Sedangkan PoU/Prevalensi kekurangan gizi menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun. Pada 2020, PoU berada pada level 11,80%, turun menjadi 12,34% pada 2021, 23,34% pada 2022, 10,44% pada 2023, dan mencapai 8,63% pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan semakin banyak masyarakat yang mampu mengakses pangan bergizi.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan energi pangan dan persentase kecamatan rawan pangan, sebagaimana Gambar 2.32 berikut:



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.32
Angka Ketersediaan Energi Pangan dan Persentase Kecamatan Rawan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Angka ketersediaan energi di Jawa Tengah relatif stabil pada periode 2020–2022, yaitu 3.732,00 (2020), 3.736,01 (2021), dan 3.797,21 (2022). Pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan menjadi 4.021,00, yang mengindikasikan adanya peningkatan pasokan energi, baik melalui optimalisasi infrastruktur maupun diversifikasi sumber energi. Namun pada 2024, angka tersebut menurun kembali ke 3.805,20, menandakan adanya penurunan kapasitas atau tekanan terhadap pasokan energi yang harus diantisipasi agar tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat.

Di sisi lain, persentase kecamatan rawan pangan menunjukkan fluktuasi cukup tajam. Pada 2020, angkanya masih relatif rendah sebesar 4,86%, namun melonjak drastis pada 2021 menjadi 32,81%, yang sangat mungkin dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap distribusi, akses, dan keterjangkauan pangan. Setelah itu, tren menurun cukup signifikan menjadi 13,54% (2022), 6,42% (2023), dan kembali menurun ke level yang lebih rendah yaitu 4,17% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan intervensi pemerintah dalam pengendalian harga pangan, perbaikan distribusi, serta program perlindungan sosial yang memperkuat ketahanan pangan di tingkat kecamatan.

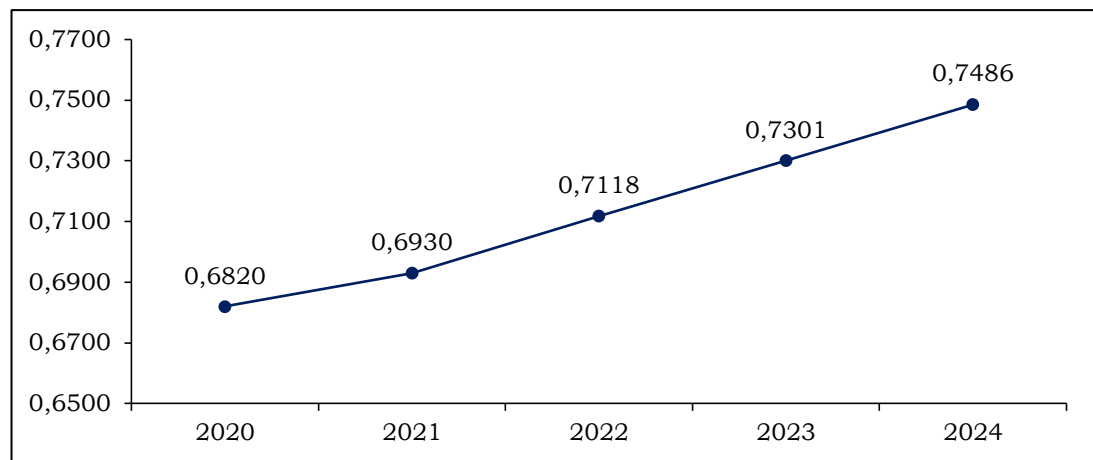
Ketahanan pangan berpengaruh terhadap dinamika kemiskinan di Jawa Tengah, karena peningkatan kualitas ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan berdampak langsung pada kerentanan masyarakat miskin. Perbaikan ketahanan pangan tercermin dari menurunnya prevalensi kekurangan gizi dan semakin kecilnya wilayah yang tergolong rawan pangan, yang mengindikasikan keberhasilan intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga, penguatan distribusi, dan penyediaan program perlindungan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pangan di tingkat makro maupun mikro berkontribusi pada peningkatan daya

beli serta akses gizi rumah tangga miskin, sehingga memperkuat ketahanan mereka terhadap risiko kemiskinan yang bersifat struktural.

6. Kondisi Pembangunan Desa

Dalam kerangka pemerataan pembangunan, penguatan pertumbuhan ekonomi diarahkan tidak hanya pada kawasan perkotaan tetapi juga pada wilayah perdesaan. Pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kemandirian desa dengan sasaran utama terwujudnya Desa Mandiri. Konsep Desa Mandiri dimaknai sebagai kondisi desa yang memiliki kapasitas kelembagaan dan kemampuan dalam mengelola aset serta sumber daya lokal sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya secara berkelanjutan. Pencapaian kemandirian desa tersebut mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkesinambungan.

Tingkat kemandirian desa di Jawa Tengah diukur dengan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024, sebagaimana Gambar 2.33 berikut:



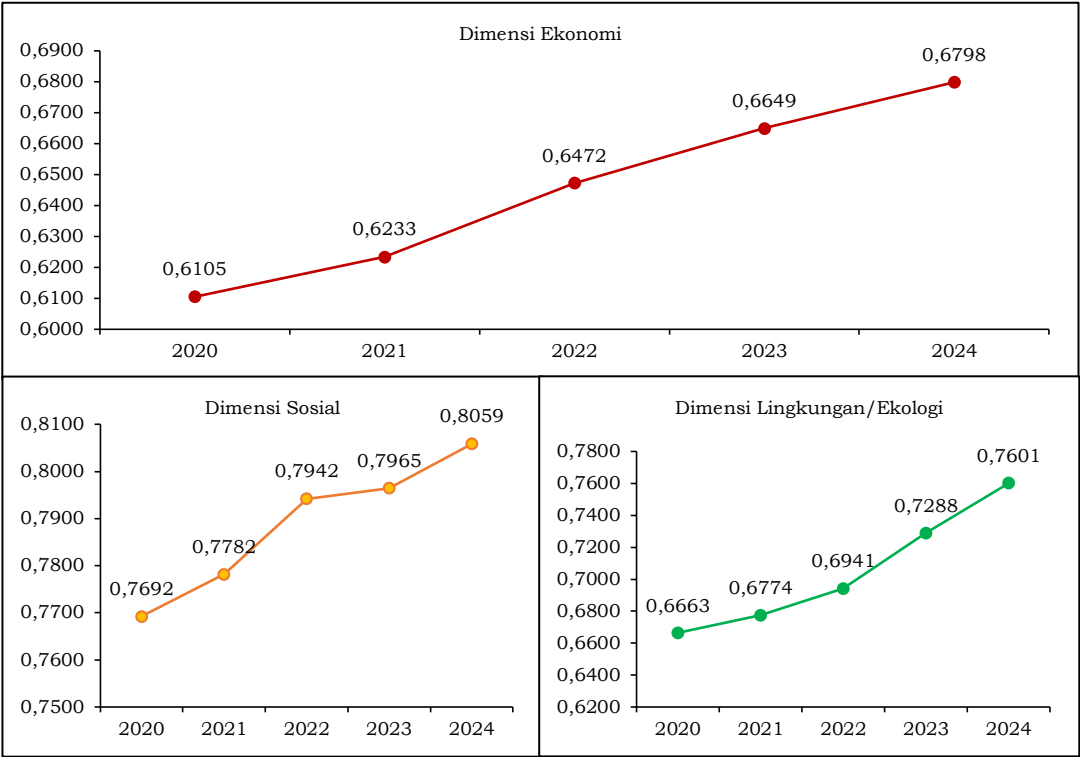
Sumber: Kemendes PDTT, 2024

Gambar 2.33
Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024 (%)

Gambar 2.33 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 nilai IDM tercatat sebesar 0,6820, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,6930. Kenaikan tersebut terus berlanjut hingga meningkat signifikan mencapai 0,7486 pada tahun 2024.

IDM merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian desa secara komprehensif. Pengukuran ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek dimensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi lingkungan (ekologi) serta dimensi sosial masyarakat desa. Ketiga dimensi ini menjadi fondasi utama dalam penilaian IDM, karena keberlanjutan pembangunan desa hanya dapat dicapai apabila pertumbuhan

ekonomi, kelestarian lingkungan, dan ketahanan sosial masyarakat terbangun secara seimbang dan saling mendukung. Dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan/ekologi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024, sebagaimana Gambar 2.34 berikut:



Sumber: Kemendes PDTT, 2024

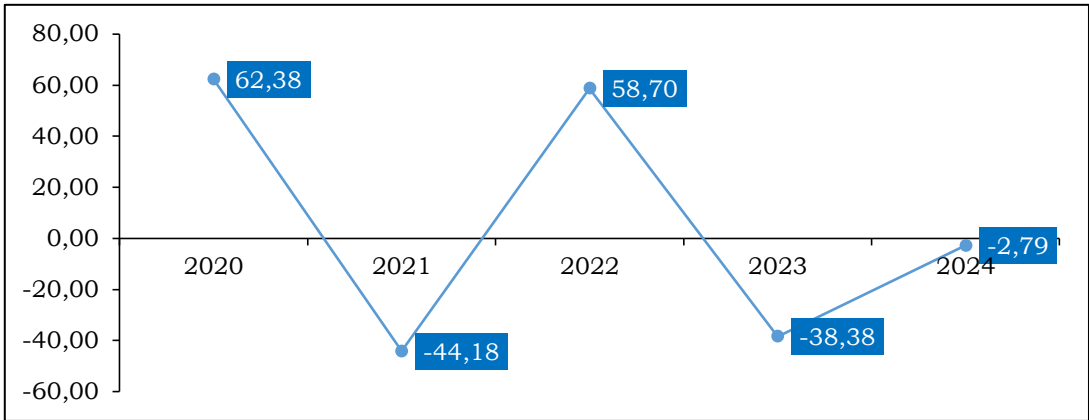
Gambar 2.34
Dimensi Ekonomi, Sosial dan Lingkungan/Ekologi
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (%)

Perkembangan dimensi ekonomi menunjukkan tren peningkatan secara konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat sebesar 0,6105 kemudian meningkat menjadi 0,6233 pada 2021. Kenaikan lebih signifikan terjadi di tahun 2022 dengan capaian 0,6472, yang selanjutnya terus naik menjadi 0,6649 pada 2023, hingga mencapai 0,6798 pada 2024. Perkembangan ini menggambarkan adanya penguatan kapasitas ekonomi desa melalui peningkatan aktivitas produktif, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal, serta perbaikan akses terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Pada dimensi lingkungan, capaian indeks juga memperlihatkan tren positif. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 0,6663, meningkat menjadi 0,6774 pada 2021, dan mencapai 0,6941 pada 2022. Kenaikan signifikan terlihat pada tahun 2023 dengan capaian 0,7288, hingga tahun 2024 mencapai level tertinggi di 0,7601. Perkembangan ini mencerminkan adanya penguatan tata kelola lingkungan, peningkatan kesadaran terhadap pelestarian ekologi, serta penguatan mitigasi dan adaptasi desa terhadap risiko perubahan iklim maupun bencana.

Sedangkan dimensi sosial memperlihatkan capaian yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan dimensi ekonomi dan lingkungan. Pada 2020, indeks tercatat 0,7692, meningkat menjadi 0,7782 pada 2021, dan mencapai 0,7942 pada 2022. Pada 2023, capaian mengalami kenaikan menjadi 0,7965 dan kembali meningkat lebih tinggi pada 2024 dengan nilai 0,8059. Tren ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, akses layanan dasar, serta kondisi sosial masyarakat desa yang semakin kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan capaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang optimal pada ketiga dimensi, diperlukan dukungan anggaran yang memadai sebagai instrumen pembiayaan seluruh operasional pembangunan desa. Pengelolaan anggaran tersebut harus berbasis pada perencanaan pembangunan desa yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Desa (PADes) memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan mandiri yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penguatan kapasitas ekonomi, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas sosial desa. Perkembangan persentase PADes di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2020–2024 sebagaimana Gambar 2.35 berikut:



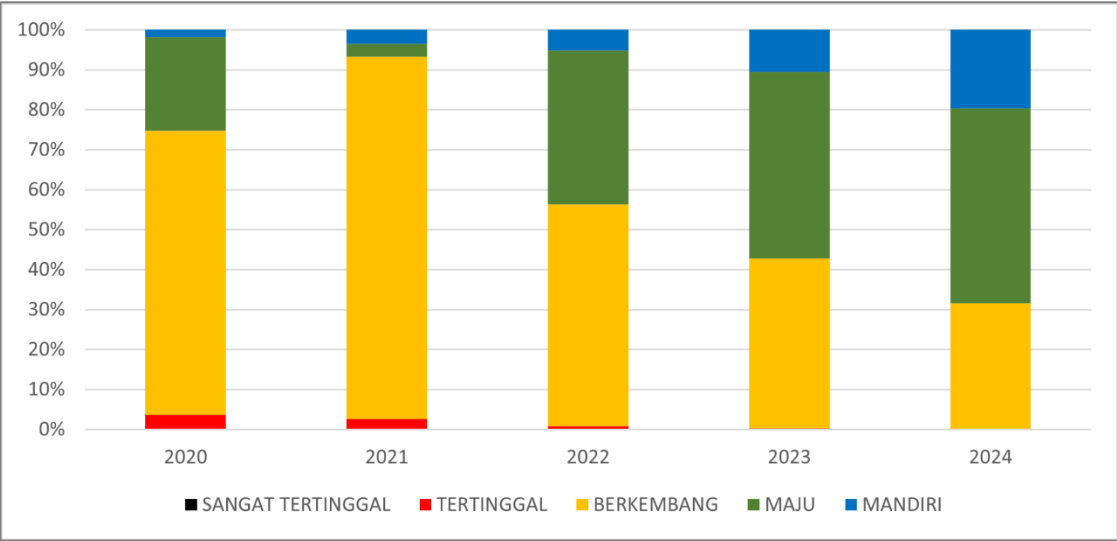
Sumber: Kemendes PDTT, 2024

Gambar 2.35
Perkembangan Persentase PADes Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

Perkembangan PADes di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi yang tajam periode 2020–2024. Pada tahun 2020, pertumbuhan PADes tercatat meningkat signifikan sebesar 62,38 persen, namun tahun 2021 terjadi kontraksi negatif sebesar -44,18 persen, memasuki tahun 2022, capaian kembali menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 58,70 persen, yang mencerminkan adanya pemulihan melalui potensi lokal. Akan tetapi, pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan yang signifikan dengan pertumbuhan negatif -38,38 persen. Selanjutnya, pada tahun 2024, meskipun pertumbuhan masih dalam posisi negatif sebesar -2,79

persen, angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mengarah pada kondisi yang lebih baik.

Dinamika perkembangan PADes yang selaras dengan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi determinan utama pembentukan Indeks Desa Membangun (IDM). Melalui indikator IDM, desa dikategorikan ke dalam lima klasifikasi, yaitu sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Klasifikasi tingkat kemandirian desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagaimana Gambar 2.36 berikut:



Sumber: Kemendes PDTT, 2024

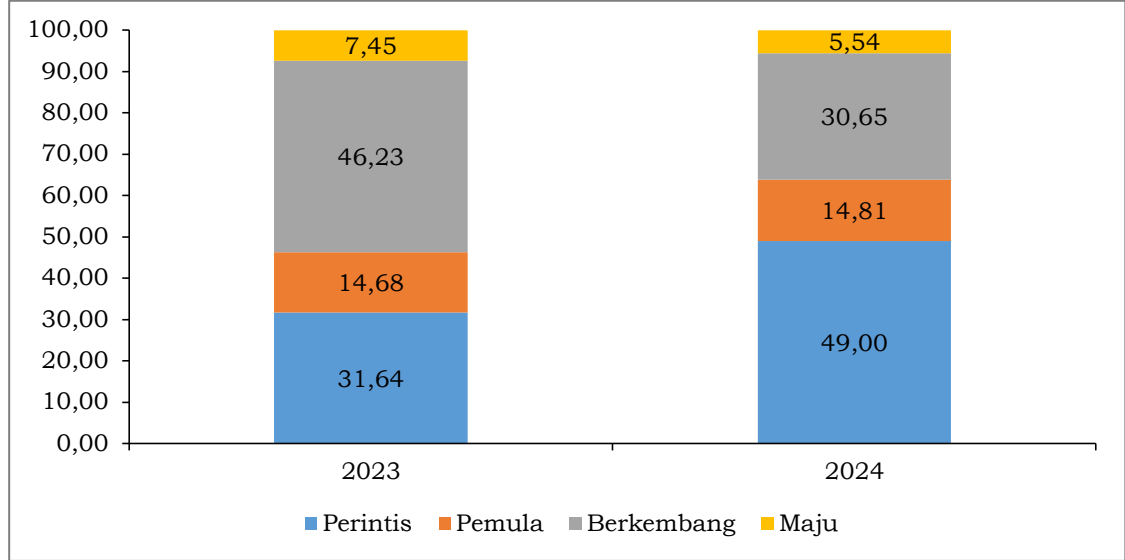
Gambar 2.36
Klasifikasi Tingkat Kemandirian Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (%)

Berdasarkan Gambar 2.36, perkembangan tingkat kemandirian desa Tahun 2020-2024 mengalami kemajuan yang pesat walaupun pada tahun 2021 sempat terjadi penurunan status desa maju akibat dampak pandemi Covid-19. Sampai dengan tahun 2024, terdapat total 1.530 Desa Mandiri (19,59 persen), 3.816 Desa Maju (48,86 persen), 2.456 Desa Berkembang (31,45 persen), dan 8 Desa Tertinggal (0,10 persen).

Beberapa aspek menjadi faktor yang mendorong meningkatnya capaian kemandirian desa di Jawa Tengah, diantaranya adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, peningkatan perekonomian lokal melalui optimalisasi potensi lokal dan penguatan peran lembaga keuangan, peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, peningkatan penyediaan kebutuhan layanan dasar di desa, dan beberapa faktor lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan desa. Kendala yang dihadapi desa-desa tertinggal adalah permasalahan pada kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur pendukung aksesibilitas yang belum optimal.

Selain dengan mengukur tingkat kemandiriannya, dukungan terhadap pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan juga didukung melalui perekonomian desa yang di dalamnya terdapat

upaya peningkatan kualitas hasil produksi desa, penguatan peran lembaga ekonomi desa, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perekonomian desa, dan dukungan pemerintah desa terhadap perkembangan perekonomian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi dan penetapan kebijakan-kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Salah satu faktor yang masih perlu upaya keras dalam peningkatan ekonomi desa adalah peningkatan kualitas lembaga ekonomi desa, yaitu BUMDes yang sampai dengan tahun 2024 capaian perkembangannya masih relatif rendah ditandai dengan mayoritas BUMDes masih ada di kelas berkembang dan perintis, sebagaimana Gambar 2.37 berikut:



Sumber: Dispermasdesdukcapil, 2024

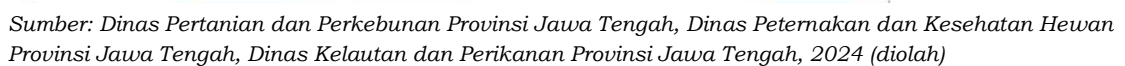
Gambar 2.37
Klasifikasi Perkembangan BUMDes Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023 dan 2024 (%)

Berdasarkan Gambar 2.37, pada tahun 2023, distribusi status desa menunjukkan komposisi terbesar berada pada kategori Berkembang sebesar 46,23 persen, diikuti oleh kategori Perintis sebesar 31,64 persen, kemudian Pemula sebesar 14,68 persen, dan kategori Maju yang relatif kecil yaitu 7,45 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa masih berada pada tahap transisi menuju kemandirian dengan dominasi status berkembang. Memasuki tahun 2024, terjadi perubahan struktur status desa yang cukup signifikan. Proporsi desa Perintis meningkat tajam menjadi 49,00 persen, sementara desa kategori Berkembang menurun menjadi 30,65 persen. Desa kategori Pemula relatif stabil dengan capaian 14,81 persen, sedangkan desa kategori Maju mengalami penurunan menjadi 5,54 persen.

Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika pergeseran status desa yang masih fluktuatif. Peningkatan proporsi desa Perintis menandakan perlu adanya penguatan kapasitas ekonomi, sosial, dan lingkungan agar desa-desa tersebut dapat segera bertransformasi

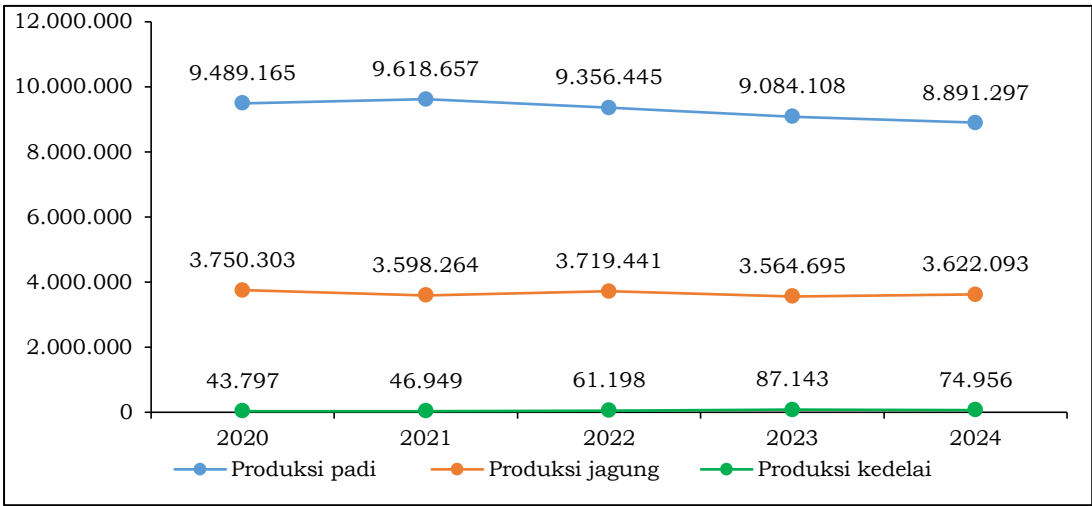
Perkembangan IDM Jawa Tengah 2020-2024 yang menunjukkan tren positif pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan mencerminkan peningkatan kapasitas desa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, fluktuasi PADes dan mayoritas BUMDes yang masih berstatus perintis serta berkembang, menunjukkan keterbatasan finansial desa, sehingga berdampak pada terbatasnya investasi produktif dan pengentasan kemiskinan. Desa dengan kapasitas ekonomi lemah lebih rentan terhadap kemiskinan, sehingga diperlukan intervensi kebijakan berupa penguatan PADes, akselerasi pengembangan BUMDes, dan percepatan infrastruktur dasar agar pertumbuhan ekonomi desa lebih inklusif serta mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

Kondisi pertanian di Jawa Tengah memiliki komoditas unggulan, komoditas tersebut dapat dilihat dari jumlah produksinya, hal ini mendukung visi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dimana komoditas unggulan tersebut dapat diintervensi melalui kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan 20 tahun ke depan yang lebih mengutamakan potensi lokal. Peta potensi pertanian secara geografis di Jawa Tengah pada tahun 2023, sebagaimana Gambar 2.38 berikut:



Komoditas utama sektor pertanian yaitu subsektor tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai). Pada periode tahun 2018-2023, komoditas tanaman pangan cenderung mengalami penurunan. Produksi komoditas padi mengalami penurunan dikarenakan adanya penurunan lahan dan perubahan standar pengukuran produksi

komoditas padi. Produksi komoditas jagung mengalami fluktuasi tergantung pada iklim, ketersediaan air, dan benih. Produksi komoditas kedelai mengalami tren menurun dikarenakan menurunnya minat petani terkait daya saing kedelai di pasar karena adanya kedelai impor sehingga menyebabkan menurunnya luas tanam kedelai, sebagaimana Gambar 2.39 berikut:



Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2025

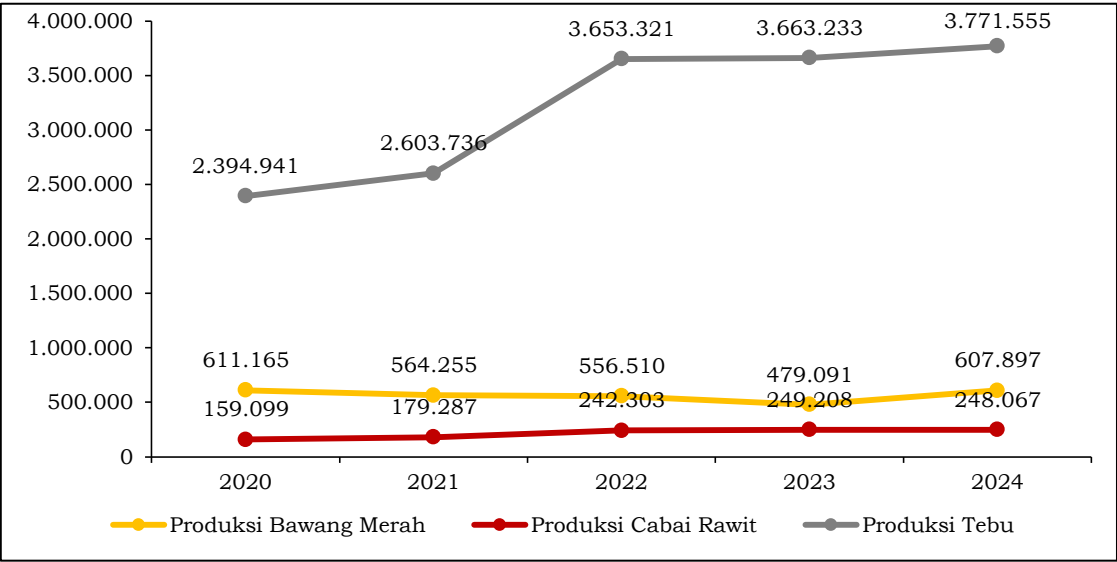
Gambar 2.39
Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

Produksi padi di Jawa Tengah pada periode 2020–2024 menunjukkan tren menurun meskipun tetap mendominasi sebagai komoditas pangan utama. Pada tahun 2020, produksi padi tercatat sebesar 9.489.165 ton dan sempat meningkat pada 2021 menjadi 9.618.657 ton. Namun setelah itu, produksinya terus mengalami penurunan menjadi 9.356.445 ton pada 2022, 9.084.108 ton pada 2023, hingga mencapai 8.891.297 ton pada 2024. Penurunan berkelanjutan ini mencerminkan tekanan struktural yang semakin kuat pada sektor pertanian padi, antara lain akibat degradasi lahan, perubahan iklim, serta keterbatasan produktivitas dan teknologi. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam stabilitas pasokan pangan pokok, tetapi juga memperlemah daya tahan ekonomi rumah tangga petani. Lebih jauh, penurunan produksi padi di Jawa Tengah bukan semata persoalan sektor pertanian, melainkan merupakan ancaman langsung (*direct threat*) terhadap peningkatan Garis Kemiskinan (GK). Selaras dengan RPJMN yang secara tegas menekankan pentingnya kedaulatan pangan sebagai fondasi ketahanan sosial dan ekonomi nasional. Ketika produksi padi menurun dan produktivitas stagnan akibat kegagalan modernisasi pertanian, pendapatan petani yang sebagian besar berada di sekitar garis kemiskinan menjadi semakin rentan. Rendahnya produktivitas menyebabkan biaya produksi tidak sebanding dengan hasil, sehingga penghasilan petani menurun dan mendorong kelompok rentan ini jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, kegagalan transformasi dan modernisasi pertanian tidak hanya berdampak pada aspek produksi pangan, tetapi juga

mempercepat peningkatan kerentanan sosial dan memperlebar risiko kemiskinan di wilayah pedesaan Jawa Tengah.

Selain itu, produksi jagung dalam periode yang sama menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan stabil di kisaran 3,5 hingga 3,7 juta ton. Pada tahun 2020, produksi jagung berada di angka 3.750.303 ton, kemudian menurun menjadi 3.598.264 ton pada 2021. Produksi sempat meningkat menjadi 3.719.441 ton pada 2022, namun kembali turun ke 3.564.695 ton pada 2023, dan sedikit naik menjadi 3.622.093 ton pada 2024. Pola tersebut mengindikasikan bahwa jagung berperan penting sebagai komoditas pangan sekaligus bahan baku industri pakan, tetapi keberlanjutan produksinya masih dipengaruhi faktor produktivitas, akses teknologi, serta stabilitas harga di tingkat petani.

Sementara itu, produksi kedelai relatif rendah dibanding padi dan jagung, namun trennya cenderung meningkat meski masih berfluktuasi. Pada 2020 produksi kedelai tercatat 43.797 ton, naik menjadi 46.949 ton pada 2021, kemudian terus meningkat hingga 61.198 ton pada 2022 dan 87.143 ton pada 2023. Namun pada 2024, produksinya kembali mengalami penurunan menjadi 74.956 ton. Meskipun terjadi peningkatan dibanding awal periode, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan konsumsi domestik, sehingga ketergantungan impor kedelai tetap tinggi. Hal ini menegaskan pentingnya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, serta dukungan kebijakan untuk memperkuat kemandirian produksi kedelai di tingkat nasional maupun daerah.



Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.40
Produksi Bawang Merah, Cabai Rawit dan Tebu
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

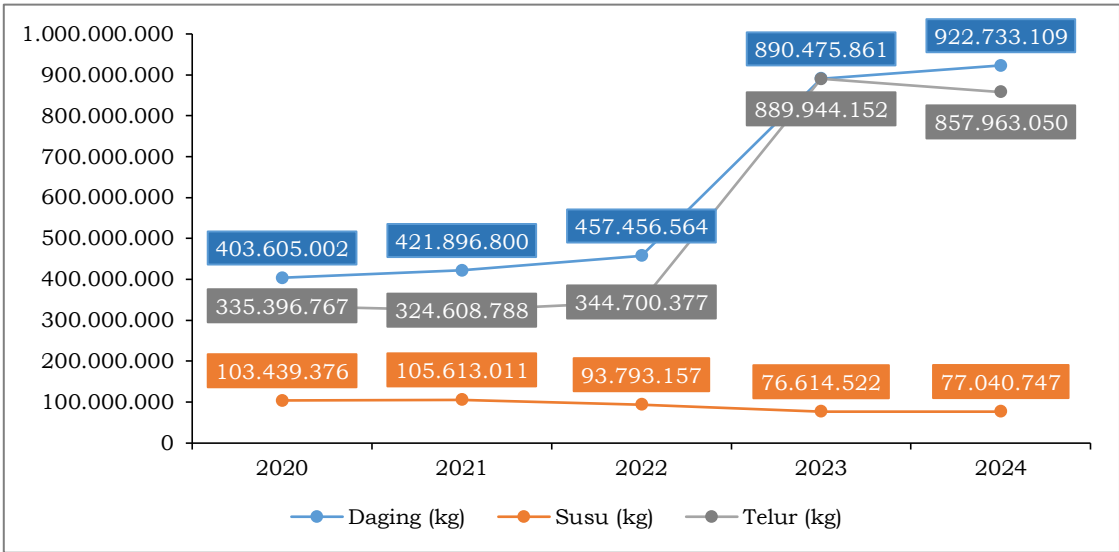
Produksi tebu di Jawa Tengah pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada 2020, produksi tebu tercatat sebesar 2.394.941 ton, kemudian naik menjadi 2.603.736 ton pada 2021. Lonjakan produksi terjadi pada 2022 yang

mencapai 3.653.321 ton, dan relatif stabil pada 2023 sebesar 3.663.233 ton, sebelum kembali meningkat ke level 3.771.555 ton pada 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya penguatan kapasitas produksi, baik melalui perluasan areal tanam maupun perbaikan produktivitas, yang dapat mendukung ketersediaan bahan baku industri gula nasional.

Produksi bawang merah pada periode yang sama cenderung fluktuatif. Tahun 2020 produksinya mencapai 611.165 ton, kemudian menurun menjadi 564.255 ton pada 2021 dan 556.510 ton pada 2022. Penurunan semakin dalam pada 2023 dengan capaian 479.091 ton, sebelum akhirnya kembali meningkat ke 607.897 ton pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan adanya sensitivitas produksi bawang merah terhadap faktor iklim, hama penyakit, serta dinamika harga pasar yang berpengaruh terhadap minat petani dalam mempertahankan luas tanam.

Produksi cabai rawit menunjukkan tren meningkat meskipun masih dalam skala yang jauh lebih kecil dibandingkan tebu maupun bawang merah. Pada 2020 produksi tercatat sebesar 159.099 ton, naik menjadi 179.287 ton pada 2021, dan kembali meningkat signifikan ke 242.303 ton pada 2022. Selanjutnya, produksi sedikit naik pada 2023 sebesar 249.208 ton dan relatif stabil di angka 248.067 ton pada 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya peningkatan permintaan pasar domestik serta dorongan diversifikasi komoditas hortikultura, meskipun tetap menghadapi tantangan dalam hal stabilitas harga dan ketahanan terhadap perubahan cuaca.

Pada sub sektor peternakan fokus pada produksi daging, susu dan telur, sebagaimana Gambar 2.41 berikut:



Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, 2025

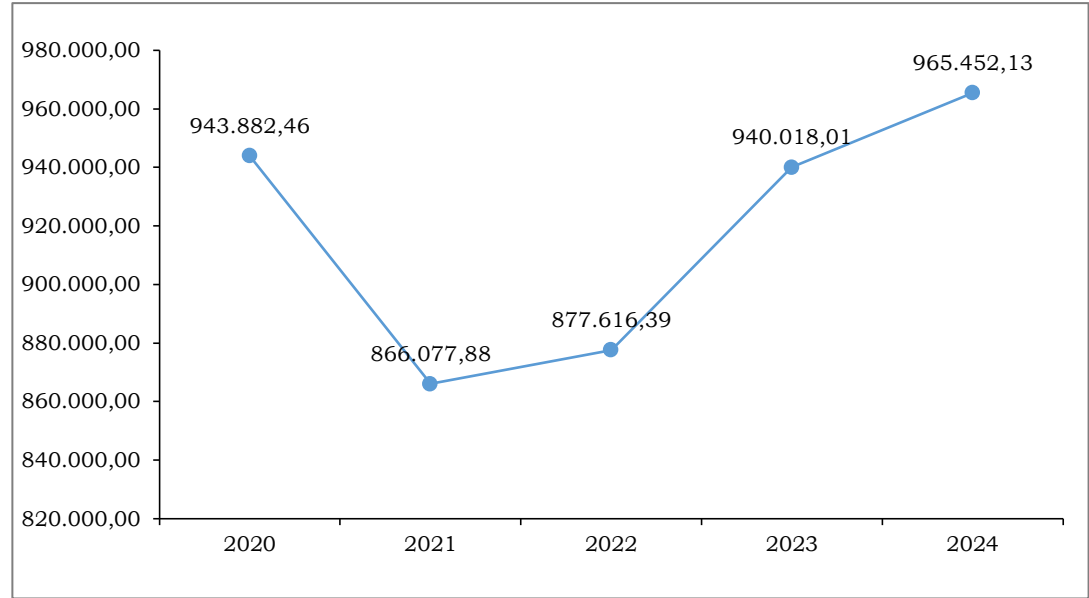
Gambar 2.41
Produksi Daging, Telur, dan Susu Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2024

Produksi daging menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam periode 2020–2024. Pada tahun 2020 produksi tercatat sebesar 403.605.002 kg, naik menjadi 421.896.800 kg pada 2021, dan meningkat lagi ke 457.456.564 kg pada 2022. Lonjakan tajam terjadi pada 2023 dengan jumlah 890.475.861 kg, dan mencapai puncaknya di 922.733.109 kg pada tahun 2024. Data ini memperlihatkan adanya pertumbuhan yang konsisten, terutama setelah tahun 2022.

Untuk produksi susu pada kondisi fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 jumlah produksi susu sebesar 103.439.376 kg, meningkat sedikit menjadi 105.613.011 kg di tahun 2021. Namun, sejak 2022 produksinya menurun menjadi 93.793.157 kg, lalu turun tajam ke 76.614.522 kg pada 2023, dan hanya sedikit naik ke 77.040.747 kg pada 2024. Kondisi ini disebabkan karena adanya penurunan kapasitas produksi susu dalam beberapa tahun terakhir.

Sedangkan produksi telur relatif stabil hingga tahun 2022, kemudian meningkat pesat. Pada tahun 2020 produksinya mencapai 335.396.767 kg, sedikit menurun menjadi 324.608.788 kg di 2021, lalu naik ke 344.700.377 kg pada 2022. Kenaikan signifikan terlihat di tahun 2023 dengan produksi sebesar 889.944.152 kg, meskipun sedikit menurun pada 2024 menjadi 857.963.050 kg. Secara umum, tren produksi telur mengalami akselerasi tajam dalam dua tahun terakhir.

Pada sub sektor perikanan fokus pada akumulasi produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, sebagaimana Gambar 2.42 berikut:



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.42
Produksi Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024 (Ton/Tahun)

Produksi perikanan (yang terdiri atas perikanan tangkap dan perikanan budidaya) pada periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi

dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode. Pada tahun 2020, total produksi tercatat sebesar 943.882,46 ton, namun mengalami penurunan signifikan pada 2021 menjadi 866.077,88 ton, yang menunjukkan adanya tekanan terhadap kapasitas produksi baik dari sisi ekologi maupun sistem budidaya.

Memasuki tahun 2022, produksi perikanan mulai pulih dengan capaian 877.616,39 ton, menunjukkan adanya pemulihan secara bertahap. Tren pemulihan berlanjut lebih kuat pada 2023 dengan produksi mencapai 940.018,01 ton, hampir menyamai capaian tahun 2020. Selanjutnya, pada 2024 produksi perikanan mencapai titik tertinggi dalam periode lima tahun terakhir dengan angka 965.452,13 ton, melampaui capaian tahun awal periode.

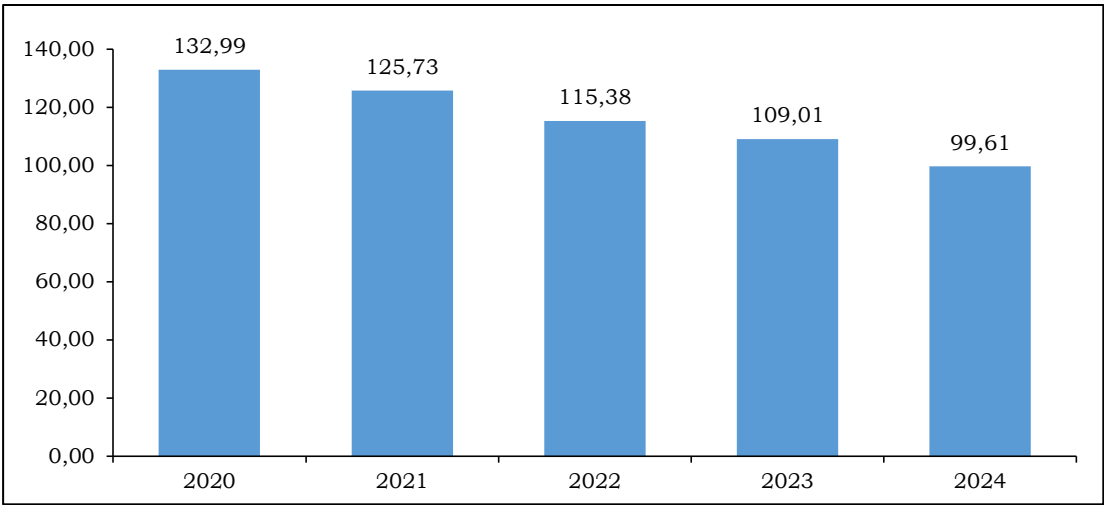
Kondisi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di Jawa Tengah terutama wilayah pedesaan yang masih sangat tergantung pada komoditas primer. Penurunan produksi tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai mencerminkan adanya tekanan struktural pada ketahanan pangan serta pendapatan petani kecil. Kondisi tersebut berimplikasi pada melemahnya daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin dan meningkatnya risiko kerawanan pangan, khususnya ketika pasokan domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi sehingga akan memicu ketergantungan pada impor. Fluktuasi produktivitas akibat faktor iklim, degradasi lahan, serta rendahnya daya saing lokal semakin memperburuk posisi petani dalam rantai ekonomi dan menahan laju penurunan kemiskinan di sektor pertanian.

Sedangkan subsektor hortikultura, peternakan, dan perikanan menunjukkan prospek yang lebih baik, peningkatan produksi komoditas dapat memperluas peluang usaha dan menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi industri pangan. Namun demikian, disparitas produktivitas antar komoditas, penurunan produksi, serta fluktuasi hasil hortikultura akan berpengaruh pada masyarakat utamanya masyarakat miskin.

8. Kondisi Kebencanaan

Sebagian daerah di Jawa Tengah berpotensi rawan bencana. Berdasarkan data sejarah kejadian bencana menunjukkan bahaya yang ada di Jawa Tengah meliputi banjir dan banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, serta epidemi dan wabah penyakit.

Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024, sebagaimana Gambar 2.43 berikut:



Sumber: BNPB, 2025

Gambar 2.43
Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Gambar 2.43 menunjukkan tren penurunan indikator secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 nilai indikator tercatat sebesar 132,99, kemudian menurun menjadi 125,73 pada tahun 2021. Penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai 115,38, dan pada tahun 2023 kembali turun menjadi 109,01. Tren ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan nilai mencapai 99,61. Hal ini menunjukkan tren penurunan yang konsisten, yang menandakan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana.

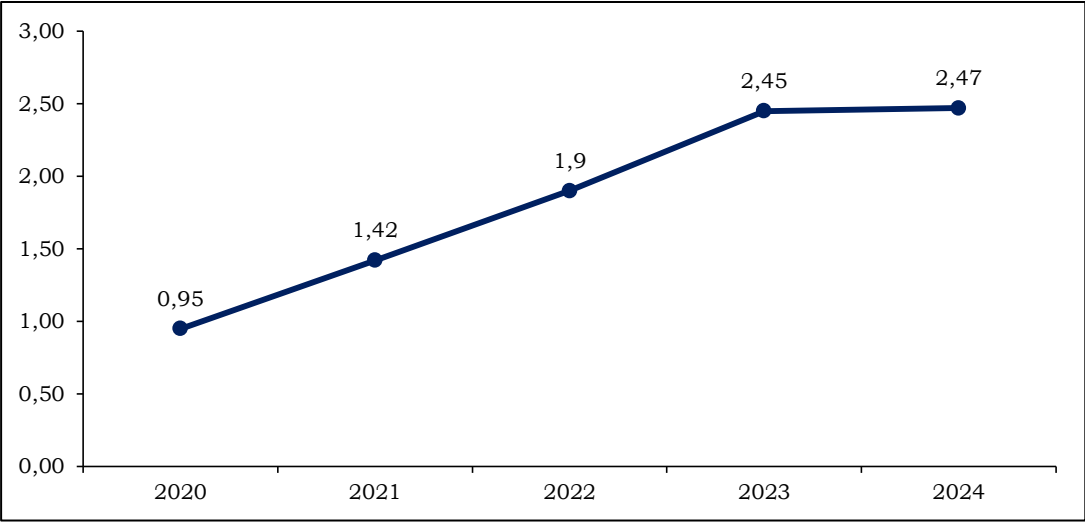
Tren penurunan IRB sejalan dengan meningkatnya kapasitas daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD dihitung berdasarkan 7 prioritas, yakni: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Timbulnya risiko bencana berdampak pada dinamika kehidupan masyarakat baik yang menyangkut kerugian jiwa, kesehatan, harta benda, dan kegiatan masyarakat lainnya yang berakibat melemahnya sendi ekonomi masyarakat utamanya bagi masyarakat miskin. Jika IRB dan IKD dapat dikendalikan dengan baik dengan melakukan peningkatan kapasitas maka potensi kerugian/kemiskinan dapat diantisipasi.

9. Kondisi Perlindungan Sosial

Bidang perlindungan sosial diarahkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial melalui peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan optimalisasi penanganannya secara komprehensif. Upaya ini dilaksanakan dengan pendekatan berbasis kebutuhan, meliputi penyediaan layanan yang terintegrasi, pemberdayaan sosial-ekonomi, serta penguatan akses terhadap program-program perlindungan sosial yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi PPKS dalam pembangunan sosial, sehingga mampu mempercepat penurunan kerentanan dan memperluas dampak kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

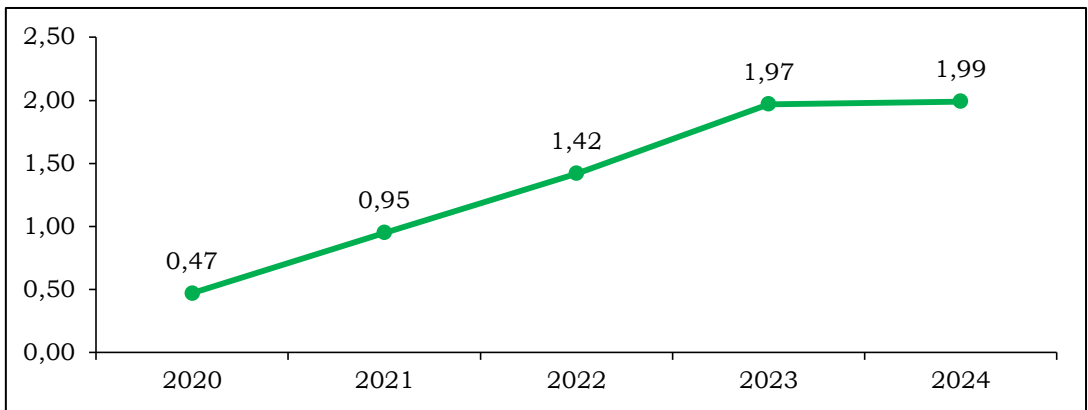
Persentase peningkatan kesejahteraan PPKS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024, sebagaimana Gambar 2.44 berikut:



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.44
Persentase Peningkatan Kesejahteraan PPKS
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Gambar 2.44 menunjukkan perkembangan persentase peningkatan kesejahteraan PPKS dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase peningkatan tercatat sebesar 0,95 persen, kemudian mengalami kenaikan menjadi 1,42 persen pada tahun 2021. Tren positif berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian 1,90 persen, dan meningkat signifikan di tahun 2023 hingga mencapai 2,45 persen. Pada tahun 2024, persentase peningkatan kesejahteraan PPKS kembali bertambah meskipun relatif melambat, yaitu menjadi 2,47 persen. Data ini menggambarkan bahwa secara umum terdapat perbaikan kesejahteraan PPKS dari tahun ke tahun, meskipun laju peningkatan cenderung melandai pada periode terakhir. Sedangkan untuk peningkatan penanganan PPKS Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Gambar 2.45 berikut:



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.45
Persentase Peningkatan Penanganan PPKS
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Gambar 2.45 menunjukkan tren peningkatan penanganan PPKS pada 2020-2024. Pada tahun 2020, persentase tercatat sebesar 0,47 persen, kemudian naik hampir dua kali lipat menjadi 0,95 persen pada tahun 2021. Tren positif berlanjut di tahun 2022 dengan capaian 1,42 persen. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 1,97 persen. Pada tahun 2024, capaian kembali meningkat meskipun relatif melambat, yakni menjadi 1,99 persen. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten setiap tahun, meskipun laju pertumbuhannya mulai melandai pada periode terakhir.

Perkembangan peningkatan kesejahteraan PPKS dan peningkat penanganan PPKS di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2020–2024 menunjukkan tren positif yang konsisten, meskipun pada periode terakhir laju pertumbuhannya mulai melandai. Peningkatan kesejahteraan PPKS yang ditandai dengan perbaikan akses layanan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan kapasitas sosial, berkontribusi langsung terhadap pengurangan kerentanan kelompok miskin. Demikian pula, peningkatan penanganan PPKS sejalan dengan efektivitas program intervensi dalam mengurangi beban sosial dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penguatan perlindungan sosial tidak hanya mendorong peningkatan indikator kesejahteraan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan secara inklusif dan berkelanjutan.

F. ISU STRATEGIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Berdasarkan kondisi kemiskinan daerah dan determinan permasalahan kemiskinan, isu strategis kemiskinan di Jawa Tengah yaitu cukup tingginya angka kemiskinan yang masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada

September 2024 sebesar 9,58 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang sebesar 8,57 persen.

Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Jawa Tengah, tetapi juga ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin. Karakteristik rumah tangga miskin di Jawa Tengah sebagian besar jumlah anggota rumah tangganya rata-rata 4-5 orang, usia kepala rumah tangga rata-rata 53,90 tahun, berpendidikan sampai dengan SD atau tidak tamat SD dan penghasilan utama bersumber dari sektor pertanian.

Selain melihat karakteristik umum, kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan penduduk miskin yang disebabkan belum optimalnya akses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kondisi kemiskinan juga ditandai dengan permasalahan pemenuhan infrastruktur dasar seperti penyediaan rumah yang layak huni, layanan air minum dan sanitasi aman. Di sisi lain, permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesibilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan hingga tingkat kerawanan terhadap bencana. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

G. KONVERGENSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan pendekatan konvergensi antarprogram dan antarperangkat daerah agar intervensi yang dilakukan tidak berjalan secara parsial. Konvergensi dimaknai sebagai penyelarasan sasaran, lokus, waktu, dan jenis intervensi sehingga berbagai program yang memiliki tujuan serupa dapat saling melengkapi dan memperkuat dampak. Tanpa konvergensi, pelaksanaan program berpotensi tumpang tindih pada kelompok tertentu, sementara rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di kantong kemiskinan belum memperoleh dukungan yang komprehensif.

Langkah konvergensi diawali dengan identifikasi sasaran dan lokus yang sama, menggunakan basis data terpadu untuk memastikan rumah tangga miskin dan miskin ekstrem yang menjadi target utama. Selanjutnya dilakukan pemetaan program intervensi lintas sektor, meliputi perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemenuhan layanan dasar.

Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi irisan program, baik dari sisi penerima manfaat maupun wilayah pelaksanaan, sehingga dapat disusun skema intervensi terpadu pada lokasi kantong kemiskinan prioritas.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dilakukan penyelarasan peran dan tahapan intervensi antarprogram. Program perlindungan sosial berfungsi sebagai bantalan ekonomi jangka pendek untuk menjaga daya beli rumah tangga miskin ekstrem, sementara program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produktif rumah tangga sasaran. Pada saat yang sama, pemenuhan layanan dasar seperti sanitasi, air bersih, dan akses pendidikan dan kesehatan memastikan perbaikan kualitas hidup yang berkelanjutan. Dengan demikian, konvergensi program tidak hanya menyasar rumah tangga yang sama, tetapi juga menjawab kebutuhan multidimensi kemiskinan secara terpadu.

H. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan sebagai instrumen fiskal yang berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pembangunan lintas sektor. APBD merupakan dokumen rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah, sekaligus berperan sebagai instrumen akuntabilitas dan komunikasi publik terkait prioritas kebijakan fiskal yang disepakati bersama DPRD.

Struktur APBD secara umum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah.

Selain diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, alokasi ketiga komponen APBD juga dialokasikan untuk upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini tercermin melalui integrasi program berbagai sektor yang fokus pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi kerakyatan, serta perlindungan sosial.

1. Analisis Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah merupakan seluruh hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan lainnya yang sah. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024, sebagaimana Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Uraian	Jumlah (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024*)
PENDAPATAN DAERAH	25.393.735.934	26.633.000.085	24.167.935.634	25.369.733.556	26.378.719.626
PENDAPATAN ASLI DAERAH	13.668.282.278	14.695.474.898	16.264.618.853	17.012.509.421	17.650.936.913
Pajak Daerah	11.139.173.309	11.718.378.320	13.484.851.151	13.976.642.716	14.210.241.533
Retribusi Daerah	93.279.121	91.634.269	115.158.014	139.377.038	2.318.821.514
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	530.091.029	508.263.876	546.717.104	638.482.406	687.813.166
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.905.738.818	2.377.198.431	2.117.892.583	2.258.007.259	434.060.698
PENDAPATAN TRANSFER	11.702.101.655	11.871.796.116	7.810.882.578	8.278.928.086	8.701.438.866
Dana Bagi Hasil Pajak	843.392.119	768.488.755	626.671.963	601.686.290	570.985.609
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	16.888.016	267.356.655	302.028.750	331.425.232	325.246.959
Dana Alokasi Umum	3.438.709.973	3.432.978.859	3.435.718.090	3.558.428.755	3.819.010.791
Dana Alokasi Khusus (fisik)	350.564.240	401.885.567	371.734.785	404.100.292	473.940.472
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	6.983.232.690	6.932.375.674	3.013.508.989	3.296.089.570	3.474.257.466
Dana Insentif Daerah	68.212.455	68.710.605	61.352.500	87.197.945	37.997.568
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.102.159	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.352.000	65.728.851	92.434.201	78.296.049	26.343.846
Pendapatan Hibah	23.352.000	64.882.003	92.161.740	77.972.123	25.600.169
Lain lain pendapatan sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	846.848	272.461	323.925	743.676
Jumlah Pendapatan	25.393.735.934	26.633.000.085	24.167.935.634	25.369.733.556	26.378.719.626

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2023 (audited), *)unaudited

Tabel 2.7 menunjukkan selama periode 2020-2024, realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah berada pada tren yang relatif meningkat meskipun terdapat fluktuasi. Total pendapatan daerah tumbuh dari Rp25,39 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp26,38 triliun pada tahun 2024. PAD Jawa Tengah tahun 2020 sebesar Rp13,66 triliun meningkat menjadi Rp17,65 triliun di tahun 2024. Sedangkan untuk pendapatan transfer pada tahun 2020 sebesar Rp11,70 triliun turun menjadi Rp8,70 triliun pada tahun 2024, sedangkan pendapatan lainnya yang sah tahun 2020 sebesar Rp23,35 milyar naik menjadi Rp26,34 milyar di tahun 2024.

Dari uraian di atas dapat dianalisis selama periode 2020-2024, pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah naik Rp0,99 triliun. Kenaikan ini menunjukkan kemampuan fiskal daerah tetap terjaga meskipun terdapat pergeseran pada komposisi sumber pendapatan.

Secara terperinci komponen PAD mengalami pertumbuhan signifikan dari Rp13,66 triliun pada 2020 menjadi Rp17,65 triliun pada 2024, atau naik Rp3,99 triliun. Peningkatan tersebut mencerminkan hasil dari optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta penguatan kontribusi BUMD. Sebaliknya, pendapatan transfer justru turun dari Rp11,70 triliun menjadi Rp8,70 triliun atau berkurang Rp3,00 triliun, seiring dengan adanya perubahan kebijakan transfer ke daerah yang menekankan efisiensi dan kemandirian fiskal.

Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat dari Rp23,35 miliar menjadi Rp26,34 miliar atau bertambah Rp2,99 miliar, meskipun kontribusinya relatif kecil. Secara keseluruhan, kenaikan PAD mampu mengimbangi penurunan transfer, sehingga tren pendapatan daerah Jawa Tengah tetap positif dan mengarah pada kemandirian keuangan daerah.

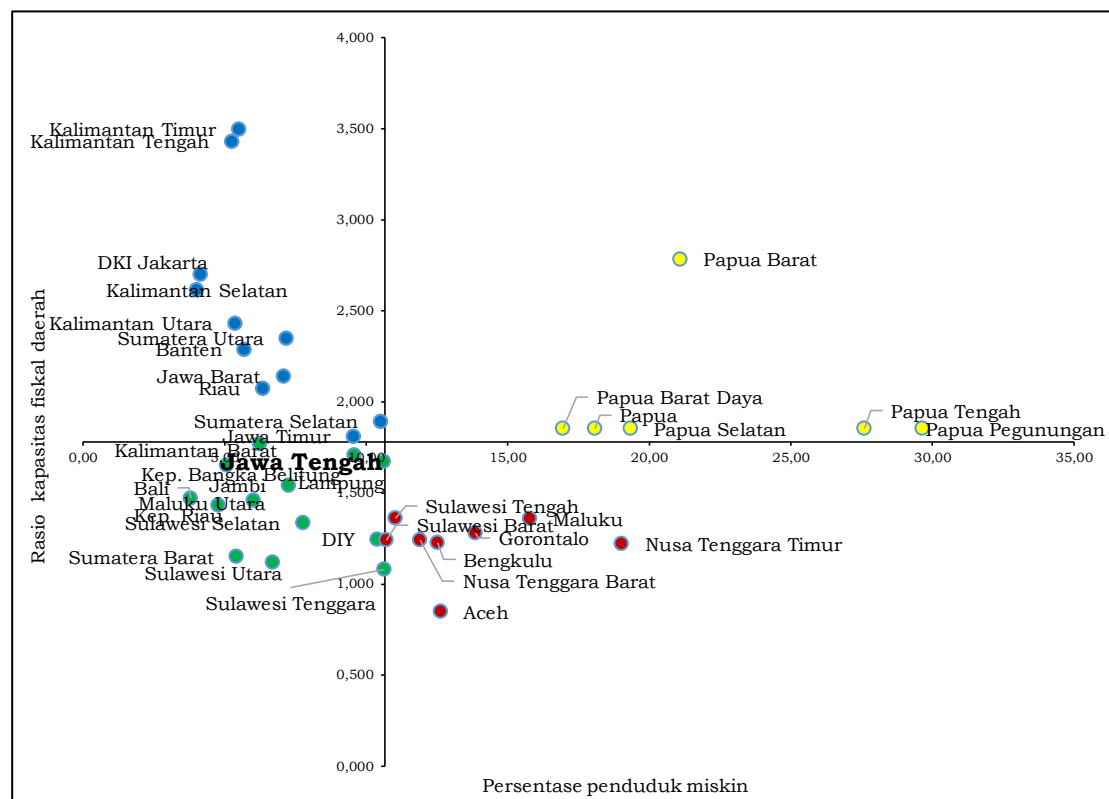
Peningkatan PAD yang signifikan menunjukkan kapasitas fiskal daerah semakin kuat untuk mendukung program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat termasuk masyarakat miskin, seperti penyediaan layanan dasar, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan basis penerimaan yang lebih mandiri, daerah memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan sesuai karakteristik lokal.

Penurunan pendapatan transfer berimplikasi pada menurunnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat, sehingga mendorong daerah untuk mengandalkan potensi PAD. Hal ini menuntut peningkatan efektivitas belanja daerah agar lebih terarah pada program-program strategis termasuk program penanggulangan kemiskinan, sekaligus memperkuat tata kelola pendapatan agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat miskin. Dengan kata lain, penurunan transfer menjadi momentum bagi daerah untuk meningkatkan efisiensi alokasi anggaran dan memperluas basis penerimaan yang inklusif.

Sementara itu, pendapatan lainnya yang sah, meskipun kecil kontribusinya, dapat menjadi sumber tambahan bagi pendanaan kegiatan sosial, kolaborasi dengan pihak swasta, maupun program inovatif pengentasan kemiskinan. Secara keseluruhan, struktur pendapatan daerah yang semakin ditopang oleh PAD menandai pergeseran menuju kemandirian fiskal, yang apabila dikelola dengan tepat dapat memperkuat kapasitas daerah dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Disisi lain kemandirian fiskal jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di satu daerah maka dapat dikelompokkan dalam 4 kuadran yaitu (1) rasio kapasitas fiskal daerah rendah dan persentase penduduk miskin tinggi, (2) rasio kapasitas fiskal daerah tinggi dan persentase penduduk miskin tinggi, (3) rasio kapasitas fiskal daerah rendah dan persentase penduduk miskin rendah, (4) rasio kapasitas fiskal daerah tinggi dan persentase penduduk miskin rendah.

Pengelompokan Provinsi Berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah dan persentase penduduk miskin Tahun 2024, sebagaimana Gambar 2.46 berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 tentang Perubahan Atas PMK No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, diolah

Gambar 2.46
Pengelompokan Provinsi Berdasarkan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2024

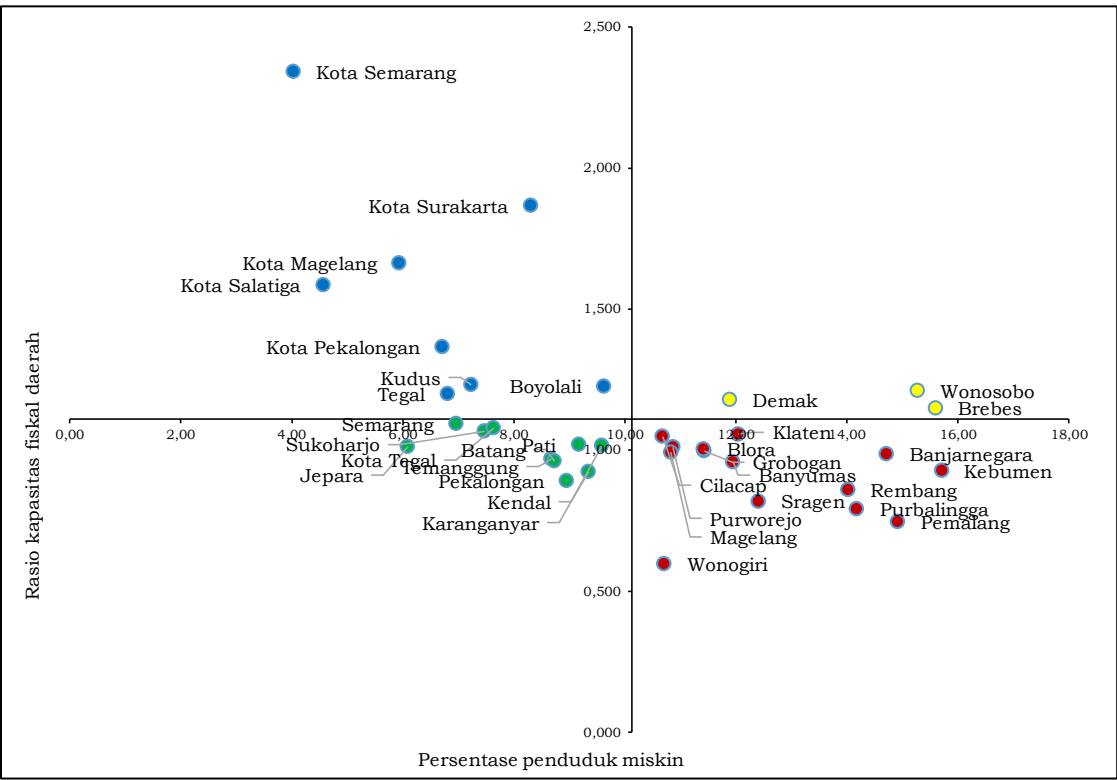
Berdasarkan Gambar 2.46 dapat diketahui bahwa pengelompokan wilayah berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah dan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah berada di kuadran

3 (rasio kapasitas fiskal daerah rendah dan persentase penduduk miskin rendah), secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Pengelompokan Provinsi Berdasarkan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2024

Kuadran I (8 provinsi) (Kapasitas fiskal rendah dan persentase penduduk miskin tinggi)	Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Aceh
Kuadran II (6 provinsi) (Kapasitas fiskal tinggi dan persentase penduduk miskin tinggi)	Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua dan Papua Selatan
Kuadran III (13 provinsi) (Kapasitas fiskal rendah dan persentase penduduk miskin rendah)	Jawa Tengah , Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Lampung, Jambi, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan DIY
Kuadran IV (11 provinsi) (Kapasitas fiskal tinggi dan persentase penduduk miskin rendah)	Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah

Sedangkan pada level kabupaten/kota di Jawa Tengah pengelompokan rasio kapasitas fiskal daerah terhadap persentase penduduk miskin, sebagaimana Gambar 2.47 berikut:



Sumber: Bps Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 tentang Perubahan Atas PMK No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, diolah

Gambar 2.47
Pengelompokan kabupaten/kota Berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2024

Berdasarkan gambar 2.47 dapat diketahui bahwa pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah dan persentase penduduk miskin, sebagaimana Tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9
Pengelompokan Kabupaten/kota Berdasarkan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2024

Kuadran I (14 kabupaten) (Kapasitas fiskal rendah dan persentase penduduk miskin tinggi)	Kebumen, Banjarnegara, Rembang, Purbalingga, Pemalang, Klaten, Blora, Grobogan, Banyumas, Cilacap, Sragen, Purworejo, Magelang dan Wonogiri
Kuadran II (3 kabupaten) (Kapasitas fiskal tinggi dan persentase penduduk miskin tinggi)	Brebes, Wonosobo dan Demak
Kuadran III (10 kabupaten/kota) (Kapasitas fiskal rendah dan persentase penduduk miskin rendah)	Pati, Batang, Temanggung, Pekalongan, Kendal, Karanganyar, Semarang, Sukoharjo, Jepara dan Kota Tegal
Kuadran IV (8 kabupaten/kota) (Kapasitas fiskal tinggi dan persentase penduduk miskin rendah)	Boyolali, Tegal, Kudus, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Pekalongan

Berdasarkan tabel diatas perlu diprioritaskan pada kuadran I yaitu Kabupaten Kebumen, Banjarnegara, Rembang, Purbalingga, Pemalang, Klaten, Blora, Grobogan, Banyumas, Cilacap, Sragen, Purworejo, Magelang, dan Wonogiri yang memiliki karakteristik fiskal daerah rendah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi. Keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan ruang intervensi pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi terbatas, sehingga penurunan kemiskinan berjalan lebih lambat. Kondisi ini menempatkan wilayah-wilayah tersebut sebagai daerah yang memerlukan perhatian khusus dan kebijakan afirmatif dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan alternatif pembiayaan melalui penguatan *collaborative funding*, yaitu sinergi pendanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pelibatan sumber pendanaan non-pemerintah seperti BUMN, BUMD, sektor swasta, dan filantropi. Pendekatan ini diharapkan mampu menutup celah fiskal daerah, memperkuat konvergensi program di lokus kantong kemiskinan, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan intervensi pengentasan kemiskinan di wilayah fiskal rendah dan kemiskinan tinggi.

2. Analisis Belanja Daerah

Belanja daerah Provinsi Jawa Tengah disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta keberlanjutan fiskal. Tujuan utama belanja daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah didesain agar mampu mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah secara berkelanjutan, melalui alokasi yang terukur, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kapasitas fiskal yang tersedia.

Dalam implementasinya, belanja operasi diarahkan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja modal diprioritaskan bagi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta sarana-prasarana pelayanan publik. Belanja tidak terduga disiapkan sebagai instrumen antisipatif dalam menghadapi bencana, keadaan darurat, maupun kebutuhan mendesak yang sulit diprediksi. Sedangkan belanja transfer ditujukan untuk memperkuat pendanaan desa, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah di Jawa Tengah. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024, sebagaimana Tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Uraian	Jumlah (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024*)
BELANJA DAERAH	25.651.740.349	25.843.800.193	23.950.240.497	25.800.341.207	27.187.126.497
BELANJA OPERASI	16.223.988.285	16.826.577.831	13.456.887.671	14.887.780.012	16.083.865.301
Belanja Pegawai	6.483.761.623	5.685.925.255	5.902.903.886	6.362.326.855	7.023.084.524
Belanja Barang dan Jasa	4.104.637.788	5.345.399.454	5.377.369.153	5.791.112.760	6.234.228.358
Belanja Subsidi	-	90.482	4.958.884	5.350.753	1.399.999
Belanja Hibah	5.593.181.623	5.728.982.384	2.092.761.564	2.610.303.175	2.780.143.423
Belanja Bantuan Sosial	42.407.250	66.180.255	78.894.181	118.686.467	45.008.996
BELANJA MODAL	996.994.505	1.447.620.411	1.713.641.630	1.794.862.778	1.733.084.096
Belanja Modal Tanah	14.338.900	79.135.275	17.346.322	67.791.905	12.221.207
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	494.933.371	578.353.949	767.027.589	751.571.586	855.982.713
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.773.603	330.679.148	359.726.308	526.682.150	411.044.257
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	177.713.123	351.328.654	475.441.543	351.052.937	366.478.924
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	113.376.388	108.123.383	94.099.866	97.389.078	86.434.858
Belanja Modal Aset Lainnya	859.119	-	-	375.119	922.135
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.783.884.978	72.303.305	16.545.479	740.000	10.225.800
Belanja Tidak Terduga	1.783.884.978	72.303.305	16.545.479	740.000	10.225.800
BELANJA TRANSFER	6.646.872.581	7.497.298.646	8.763.165.716	9.116.958.416	9.359.951.298
Belanja Bagi Hasil	4.633.245.749	5.735.553.033	6.085.808.822	6.264.046.226	6.334.544.870
Belanja Bantuan Keuangan	2.013.626.831	1.761.745.612	2.677.356.893	2.852.912.190	3.025.406.428
Jumlah Belanja	25.651.740.349	25.843.800.193	23.950.240.497	25.800.341.207	27.187.126.497
Defisit	(1.119.348.228)	(646.492.992)	(1.018.773.865)	(1.330.794.071)	(1.385.358.065)

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2023 (audited), *)unaudited

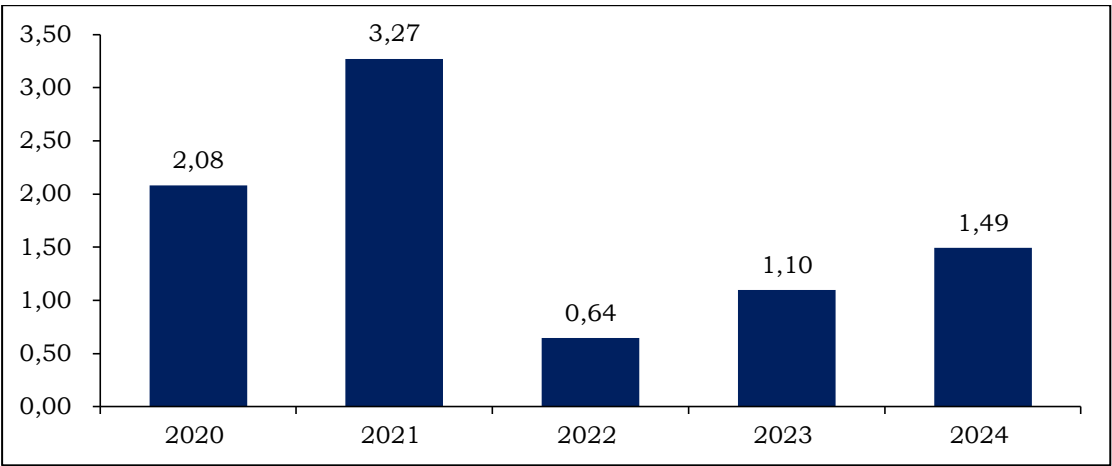
Berdasarkan pada Tabel 2.10 terlihat tren belanja daerah setiap tahunnya meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah mampu mendorong penciptaan ekonomi yang lebih baik. Pengeluaran pemerintah menjadi penting dalam mendorong perekonomian di Jawa Tengah yang menjadi pendukung dari pengeluaran sektor swasta. Peningkatan belanja daerah secara tidak langsung bisa berdampak pada peningkatan belanja untuk penanggulangan kemiskinan. Jika dihitung total belanja daerah terhadap jumlah penduduk miskin, mengalami peningkatan di setiap tahunnya terutama setelah tahun 2022. Pada Tabel 2.11 menjelaskan tentang belanja per kapita untuk kemiskinan dilihat berdasarkan total belanja daerah.

Tabel 2.11
Rekapitulasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Per Kapita Per Tahun (2020-2024)

Keterangan /tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Per kapita (Rp.)	6.443.704	6.288.412	6.250.976	6.804.785	7.339.283

3. Analisis Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2020–2024 disusun dengan mempertimbangkan aspek perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, melalui integrasi program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara umum, dinamika anggaran menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun penyesuaian kebijakan fiskal. Realisasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024, sebagaimana Gambar 2.48 berikut:



Sumber: LP2KD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024, diolah

Gambar 2.48
Realisasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (Triliun)

Gambar 2.48 menunjukkan realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah periode 2020–2024. Pada tahun

2020, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp. 2,08 triliun dan meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp. 3,27 triliun. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan cukup tajam hingga hanya Rp. 0,64 triliun. Penurunan ini terjadi karena adanya beberapa program dan kegiatan yang tidak berkontribusi langsung terhadap penanggulangan kemiskinan meskipun kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung untuk memastikan seluruh kegiatan riil dapat berjalan dengan baik. Kondisi penurunan anggaran tersebut maupun naik pada tahun-tahun berikutnya namun kenaikannya tidak seperti tahun 2020-2021, hal ini juga sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menekankan pemisahan antara anggaran riil dan anggaran proses. Pada tahun 2023, anggaran kembali meningkat menjadi Rp. 1,10 triliun. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan peningkatan menjadi Rp. 1,49 triliun, menunjukkan penguatan kembali komitmen fiskal daerah terhadap agenda penanggulangan kemiskinan.

Ke depan, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu dititikberatkan pada optimalisasi belanja produktif, peningkatan ketepatan sasaran melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DT-SEN), serta penguatan mekanisme monitoring berbasis *outcome* yang menilai keberhasilan dari indikator penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Selain itu, integrasi program lintas OPD serta kesinambungan fiskal jangka menengah menjadi kunci agar alokasi anggaran lebih stabil dan berorientasi pada dampak jangka panjang. Dengan langkah tersebut, komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan kemiskinan tidak hanya tercermin pada besaran anggaran, tetapi juga pada efektivitas kebijakan dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan. Di sisi lain, belanja per kapita untuk penanggulangan kemiskinan dihitung dari realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan terhadap jumlah penduduk miskin, sebagaimana Tabel 2.12 berikut:

Tabel 2.12
Belanja per Kapita untuk Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan /Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja per Kapita (Rp.)	522.991	795.859	168.092	289.094	402.794

Belanja per kapita untuk kemiskinan di Jawa Tengah mengalami fluktuasi karena menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Hanya saja alokasi ini memiliki hasil penurunan jumlah angka kemiskinan di setiap tahunnya. Untuk RPKD tahun 2025-2029 diharapkan alokasi anggaran yang tersedia mampu mendorong percepatan penurunan kemiskinan lebih baik di setiap tahunnya.

I. PEMBIAYAAN NON APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dalam rangka pendukung pembiayaan intervensi penanggulangan kemiskinan, selain bersumber dari APBD juga dimungkinkan bersumber dari non APBD. Pembiayaan yang bersumber dari non APBD merupakan alternatif dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan karena keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD. Pembiayaan ini dapat berasal dari swasta/privat, organisasi/lembaga maupun masyarakat.

Guna efektivitas penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan upaya kolaborasi pembiayaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah dan Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

1. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI JAWA TENGAH

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengemban tugas untuk melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Tidak hanya BAZNAS, disebutkan pula Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat dapat membantu BAZNAS dalam hal pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Pemanfaatan dana ZIS juga perlu disalurkan sesuai dengan kerangka syariah, regulasi dan sesuai dengan kebutuhan Negara Indonesia. Seluruh program yang telah dijalankan oleh lembaga zakat juga mendukung perbaikan-perbaikan dalam permasalahan sosial di masyarakat sebagaimana beririsan dengan tujuan SDGs yang salah satunya adalah kemiskinan.

Penyaluran zakat yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dilakukan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan. Penyaluran zakat yang dilakukan oleh OPZ dibedakan berdasarkan kebutuhan mustahik. Penyaluran zakat untuk yang sifatnya karitatif atau layanan kedaruratan disebut dengan pendistribusian yang mencakup bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kemanusiaan, dan bidang dakwah/advokasi. Sedangkan penyaluran zakat yang sifatnya produktif disebut dengan pendayagunaan mencakup bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Muzakki (orang yang dikenai kewajiban membayar zakat) adalah ASN, Non ASN dan perusahaan.

Dalam rangka intervensi penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, pentasharufan bantuan diarahkan pada penyediaan sarana prasarana layanan dasar (RTLH, jambanisasi), pelatihan dan pemberian modal usaha, bantuan pendidikan, serta layanan kesehatan. Penyaluran tasharuf diprioritaskan bagi masyarakat miskin berdasarkan basis data kemiskinan yang telah diolah oleh TKPK Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial.

2. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP)/ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Untuk memperkuat kehadiran perusahaan dalam kegiatan TJSLP/CSR, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Poin-poin penting dalam Peraturan Daerah antara lain: 1) terjalinnya hubungan baik Pemerintah Daerah dengan Perusahaan serta masyarakat; 2) meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Pemerintah Daerah dan Masyarakat; 3) terarah dan terintegrasinya penyelenggaraan TJSLP/CSR antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah; 4) mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP/CSR. Pelaksanaan kegiatan TJSLP/CSR terdiri atas beberapa bentuk dan ruang lingkup.

Bentuk kegiatan TJSLP/CSR adalah: 1) pemberdayaan masyarakat, bertujuan memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk masyarakat miskin; 2) kemitraan, bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina UMKM dalam kerjasama/kemitraan unit usaha guna mendukung kemandirian masyarakat termasuk masyarakat miskin; 3) bina lingkungan, bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; 4) sumbangan atau donasi, bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali; 5) promosi, bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat; 6) bina lingkungan, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat bidang infrastruktur di permukiman sesuai peraturan perundangan-undangan. Sedangkan ruang lingkup kegiatan TJSLP/CSR : pendidikan; kesehatan; olah raga, seni, budaya dan pariwisata; kesejahteraan sosial; usaha ekonomi rakyat; keagamaan; perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan; energi baru terbarukan; kedaruratan; pendampingan umum; infrastruktur; dan bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat termasuk masyarakat miskin.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Perumusan strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan disusun dengan pendekatan/memperhatikan strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, dokumen penanggulangan kemiskinan nasional (Peta Jalan Pemberantasan Kemiskinan Nasional 2025-2029, Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan 2025-2029), serta hasil analisis terhadap bidang-bidang permasalahan kemiskinan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa strategi yang dirumuskan memiliki konsistensi dengan kebijakan makro, relevansi terhadap konteks daerah, dan responsivitas terhadap akar permasalahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat.

A. HUBUNGAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA DOKUMEN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah selama lima tahun ke depan disusun dengan memperhatikan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Peta Jalan Pemberantasan Kemiskinan Nasional 2025-2029, Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Dalam Dokumen RPJPN Tahun 2025-2045 penanggulangan kemiskinan fokus pada Arah Kebijakan Transformasi Sosial yang diarahkan pada Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah terutama Jawa bagian selatan melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar. Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Kebijakan ini dilaksanakan melalui:

- a. penuntasan kemiskinan dengan satu sistem registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta penentuan target perlindungan sosial dalam mewujudkan integrasi program perlindungan sosial dan pembangunan SDM secara menyeluruh melalui satu data tunggal yang terverifikasi dan tervalidasi secara berkala;
- b. penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang efektif dan mencapai cakupan universal;
- c. pengembangan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim;

- d. integrasi penentuan target, manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat;
- e. peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
- f. peningkatan usia pensiun bertahap sampai dengan usia 65 tahun dengan memastikan kesiapan sosial dan ekonomi melalui perluasan cakupan jaminan pensiun dan hari tua, pendidikan sepanjang hayat, peningkatan kualitas kesehatan, dan pengembangan lingkungan yang ramah lanjut usia;
- g. peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
- h. peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja, antara lain melalui penerapan *care economy*, penguatan norma keluarga, pelayanan ketenagakerjaan yang merata dan inklusif, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan keterampilan;
- i. inovasi pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan integrasi perlindungan sosial yang berkesinambungan utamanya pengembangan *social impact bonds*, *social impact investment*, dan optimalisasi dana jaminan sosial;
- j. penyelarasan peraturan perundang-undangan perlindungan sosial dan penguatan tata kelola data, utamanya penguatan kerangka regulasi sistem registrasi sosial ekonomi (Regsosek), untuk penargetan penerima manfaat program pemerintah; serta
- k. penyempurnaan metodologi penghitungan angka kemiskinan sehingga dapat memastikan pengukuran yang dapat memperlihatkan kondisi kesejahteraan penduduk di lapangan secara absolut yang hasilnya dapat dibandingkan antar waktu dan wilayah.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Dalam Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 penanggulangan kemiskinan diarahkan pada Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5,0%, kemiskinan ekstrem hingga <0,5% pada tahun 2026, serta peningkatan proporsi kelas menengah menjadi 20% dengan strategi:

- a. **Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat** dengan strategi utama a) Penguatan integrasi bantuan sosial dan subsidi; b) Pengembangan dan implementasi perlindungan sosial adaptif; c) Penyaluran bantuan yang terintegrasi dan terdigitalisasi; d) Penguatan manajemen kepesertaan bersama dan pendampingan terintegrasi; serta e) Pengembangan mekanisme graduasi dan integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi;
- b. **Strategi Peningkatan Pendapatan Penduduk dengan Strategi Utama melalui pendekatan penyediaan tenaga kerja terampil dan pengembangan UMKM** antara lain : (a) Penguatan UMKM dan akses permodalan; (b) Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah; c. Pembangunan ekosistem ekonomi kreatif dan digital; d. Peningkatan keterampilan dan ketenagakerjaan;

- c. **Strategi Peningkatan Akses Kualitas Pelayanan dan Infrastruktur Dasar** dengan strategi utama melalui (a) Peningkatan akses dan kualitas fasilitas pendidikan serta kesehatan; (b) Pembangunan dan perbaikan rumah layak huni; c. Penguatan infrastruktur digital dan energi untuk mendukung ekonomi inklusif; d. Peningkatan produktivitas pertanian untuk ketahanan pangan dan penguatan ekonomi desa; serta
- d. **Strategi Peningkatan Inklusivitas bagi Kelompok Rentan**, dengan strategi utama pada isu penyandang disabilitas antara lain :
 - a) Pemenuhan SPM Bidang Sosial untuk penyandang disabilitas;
 - b) Memastikan kebutuhan PD melalui program rehabilitasi sosial;
 - c) Penetapan RAD-PD sebagai komitmen terhadap pemenuhan hak disabilitas;
 - d) Internalisasi isu disabilitas dalam perencanaan dan penanggaran (RPJPD, RKPD, Renja OPD)
 - e) Pelibatan PD dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan daerah. Sedangkan pada isu Lanjut Usia antara lain a) Pemenuhan SPM Bidang Sosial untuk penduduk lanjut usia; b) Penyediaan lingkungan/kawasan ramah lansia; c) Penguatan konsep layanan terintegrasi untuk lansia; d) Internalisasi isu kelanjutusiaan dalam perencanaan dan penanggaran (RPJPD, RKPD, Renja OPD); dan e) Pelibatan lansia dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan daerah

3. Peta Jalan Pemberantasan Kemiskinan 2025-2029 (Bappenas)

Arah Kebijakan dan Strategi Pemberantasan Kemiskinan pada Peta Jalan Pemberantasan Kemiskinan 2025-2029 antara lain:

- a. Penyempurnaan metodologi pengukuran kemiskinan;
- b. Transformasi Data Terpadu melalui Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek);
- c. Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif bagi Masyarakat;
- d. Program kartu Kesejahteraan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- e. Kartu Usaha : Mendorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat;
- f. Sinergi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha untuk Peningkatan Kesejahteraan;
- g. Implementasi Skema Graduasi untuk Kemandirian Penerima Bantuan;
- h. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar;
- i. Optimalisasi Perekonomian Desa;
- j. Peran Desa dalam Swasembada Pangan ;
- k. Kolaborasi Perguruan Tinggi dalam Percepatan Pemberantasan Kemiskinan; serta
- l. Transformasi Perkotaan untuk Pemberantasan Kemiskinan.

4. Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan tahun 2025-2029 (BP Taskin)

Dalam Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan tahun 2025-2029 tahapan dalam arah pengentasan kemiskinan dirancang melalui dua strategi utama yang saling melengkapi, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan pemberdayaan ekonomi yang memerdekakan.

- a. **Strategi pertama bertujuan meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin** melalui penyediaan jaminan sosial yang mencakup perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan, bantuan sosial dalam bentuk tunai maupun non-tunai, subsidi untuk kebutuhan dasar seperti listrik, bahan bakar, dan gas, serta peningkatan akses terhadap layanan dan infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan teknologi informasi. Fokus utama strategi ini adalah memberikan perlindungan yang inklusif dan adaptif agar kelompok rentan memiliki akses memadai terhadap kebutuhan dasar.

Untuk mengoptimalkan strategi ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, inklusif, dan adaptif; pengembangan Sistem Penargetan Nasional; sinergi antar-program dalam proses graduasi pengentasan kemiskinan; serta perbaikan kualitas layanan dan infrastruktur dasar. Diharapkan hasil dari strategi ini adalah peningkatan kepesertaan aktif dalam jaminan sosial, fleksibilitas penyaluran bantuan dan subsidi yang lebih tepat sasaran, tersedianya layanan sosial yang berkualitas dan terjangkau, serta akses yang lebih luas terhadap infrastruktur dasar.

- b. **Strategi kedua adalah pemberdayaan ekonomi yang memerdekakan masyarakat miskin**, yang dirancang untuk mengubah mereka menjadi individu yang berdaya, memiliki keterampilan dan kapasitas ekonomi, serta mampu menjadi pelaku aktif dalam perekonomian. Strategi ini dikembangkan melalui pendekatan ekosistem SCLSC di sembilan sektor prioritas. Masyarakat miskin dilibatkan secara aktif dalam seluruh siklus produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memastikan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan memaksimalkan manfaat ekonomi.

Fitur utama dari strategi pemberdayaan ini mencakup penggunaan kartu usaha, pelatihan dan pendampingan intensif, serta pengembangan. Diharapkan pendekatan ini menciptakan peluang ekonomi baru yang memungkinkan masyarakat keluar dari kemiskinan secara mandiri. Keberhasilan strategi ini akan tercermin dari peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, perluasan akses terhadap pelatihan dan pembiayaan usaha, serta meningkatnya keterlibatan masyarakat miskin dalam rantai pasok perekonomian.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2025-2045

Perlindungan sosial diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah tanpa terkecuali sesuai tingkat kerentanan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. **Perlindungan sosial ditujukan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan.** Kebijakan perlindungan sosial untuk masyarakat Jawa Tengah dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada:

- a. perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan

- masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien;
- b. perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan pemasangan instalasi listrik bersubsidi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal,rentan, dan masyarakat;
 - c. perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat;
 - d. pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan;
 - e. percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi;
 - f. percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; serta
 - g. peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, terutama dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, perumusan strategi dan program pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 diarahkan berbasis pada pengarusutamaan strategi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem). Penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; 3) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi utama tersebut didukung dengan peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan validitas dan reliabilitas data dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta proses pendataan secara *bottom up*. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan melalui pendekatan intervensi berbasis individu dan kelompok. Pendekatan individu menggunakan data mikro yang telah di verifikasi dan validasi serta terintegrasi dalam basis data kemiskinan.

Hubungan strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pada Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

No	Dokumen	Strategi dan Arah Kebijakan	Hubungan Antar Dokumen	Keterangan
1	RPJPN 2025–2045	Transformasi sosial melalui penanggulangan kemiskinan dengan Regsosek, perlindungan sosial adaptif, penguatan SJSN, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan inklusivitas kelompok rentan.	Menjadi payung kebijakan utama (arah jangka panjang) yang dijabarkan dalam RPJMN, Peta Jalan, Rencana Induk, RPJPD, dan RPJMD.	Dokumen ini bersifat makro, mengatur arah pembangunan nasional jangka panjang termasuk integrasi perlindungan sosial, peningkatan SDM, dan pengurangan kemiskinan.
2	RPJMN 2025–2029	Penurunan kemiskinan 4,5–5%, kemiskinan ekstrem <0,5%, serta peningkatan kelas menengah melalui strategi pengurangan beban, peningkatan pendapatan, akses layanan dasar, dan inklusivitas rentan.	Merupakan turunan RPJPN (dok. 1), sejalan dengan Peta Jalan (dok. 3), dan mendukung strategi pengentasan dalam Rencana Induk (dok. 4). Jadi dasar perumusan RPJMD (dok. 6).	RPJMN memecah arah RPJPN ke dalam target jangka menengah dengan indikator kuantitatif dan strategi lebih operasional.

No	Dokumen	Strategi dan Arah Kebijakan	Hubungan Antar Dokumen	Keterangan
3	Peta Jalan Pemberantasan Kemiskinan 2025–2029 (Bappenas)	Fokus pada metodologi pengukuran, Regsosek, perlindungan sosial adaptif, kartu kesejahteraan & usaha, skema graduasi, serta optimalisasi ekonomi desa.	Menguatkan strategi RPJPN (dok. 1) dan RPJMN (dok. 2). Terhubung dengan Rencana Induk (dok. 4) dalam hal graduasi & pemberdayaan ekonomi, serta dengan RPJPD (dok. 5) dalam fokus ekonomi desa.	Dokumen teknis operasional Bappenas sebagai blueprint program untuk memastikan target RPJMN tercapai dengan instrumen spesifik (kartu, graduasi, desa).
4	Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan 2025–2029 (BP Taskin)	Dua strategi utama: (1) Mengurangi beban pengeluaran (jaminan sosial, bantuan, subsidi, layanan dasar), dan (2) Pemberdayaan ekonomi memerdekakan (pelatihan, kartu usaha, integrasi rantai pasok).	Selaras dengan RPJPN (dok. 1), RPJMN (dok. 2), dan Peta Jalan (dok. 3). Menjadi rujukan teknis implementasi di daerah (dok. 5 dan 6).	Dokumen ini menekankan sisi praktis: perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi simultan, dengan fokus graduasi dan partisipasi masyarakat.
5	RPJPD Jawa Tengah 2025–2045	Perlindungan sosial adaptif, inklusif, berbasis Regsosek; perluasan bansos, jaminan sosial, pemberdayaan UMKM, peningkatan layanan dasar (air, sanitasi, rumah layak huni).	Selaras dengan RPJPN (dok. 1) dan mengadopsi prinsip perlindungan sosial adaptif; mendukung RPJMN (dok. 2) dan Peta Jalan (dok. 3); menjadi dasar penyusunan RPJMD (dok. 6).	Dokumen jangka panjang daerah yang mengadopsi arah nasional ke dalam konteks lokal Jawa Tengah, dengan fokus pada layanan dasar dan ekonomi kerakyatan.
6	RPJMD Jawa Tengah 2025–2029	Tiga strategi: (1) Mengurangi beban pengeluaran, (2) Meningkatkan kemampuan & pendapatan, (3) Meminimalkan kantong kemiskinan. Dukungannya melalui validasi data bottom-up dan intervensi individu & kelompok.	Implementasi langsung dari RPJPD (dok. 5) serta berpedoman pada RPJMN (dok. 2) dan Rencana Induk (dok. 4). Keterkaitan erat dengan Regsosek (dok. 1 & 3).	Dokumen ini adalah rencana aksi daerah lima tahunan untuk menurunkan kemiskinan, menyesuaikan dengan kondisi lokal dan target nasional.

Berdasarkan Tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki hubungan hierarkis yang bersifat satu kesatuan dan saling melengkapi. Pada tingkat pusat, dokumen perencanaan berfungsi sebagai payung kebijakan sekaligus arahan strategis bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah menjabarkan strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut ke dalam dokumen perencanaan daerah yang lebih operasional sesuai dengan karakteristik, potensi, dan permasalahan wilayah.

Secara substansi berdasarkan sintesa dari berbagai dokumen perencanaan nasional dan daerah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, disimpulkan kebijakan difokuskan pada tiga substansi utama. **Pertama**, penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif dengan memanfaatkan data terpadu yang terintegrasi untuk penentuan sasaran dan perencanaan berbasis bukti. **Kedua**, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal, penguatan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan keterampilan dan akses permodalan agar masyarakat miskin mampu mandiri secara berkelanjutan. **Ketiga**, perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi yang mendukung penghidupan yang layak.

Selain itu, penguatan tata kelola dan integrasi data kemiskinan menjadi fondasi untuk perencanaan yang akurat dan kebijakan yang efektif. Pelaksanaan strategi ini ditempuh melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam implementasinya upaya penanggulangan kemiskinan mengacu pada amanat Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota yang di dalamnya memuat strategi utama penanggulangan kemiskinan. Strategi utama tersebut yang menjadi acuan pedoman/rujukan untuk diintegrasikan dalam Dokumen RPKD. Strategi utama dan fokus strategi penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem Provinsi Jawa Tengah dijabarkan dalam sub bab strategi utama dan fokus strategi.

B. STRATEGI UTAMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, terutama dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, perumusan strategi utama penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah merupakan elaborasi dari strategi pada Inpres 8 Tahun 2025 dan Permendagri 53 tahun 2020, selain itu strategi utama dirumuskan berdasarkan pada konsideran dokumen perencanaan pusat dan daerah. Strategi utama tersebut diarahkan berbasis pada pengarusutamaan strategi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem). Penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) yang dilaksanakan melalui:

1. **Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin.** Strategi ini diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial yaitu: Bantuan sosial, seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), seragam siswa miskin, Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Kartu Jateng Ngopeni (Kajen), Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas, bantuan instalasi sambungan listrik bagi rumah tangga miskin, bantuan sosial dan jaminan perlindungan sosial adaptif lainnya dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
2. **Meningkatkan Kemampuan Dan Pendapatan Masyarakat Miskin Serta Mengembangkan Dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK).** Strategi ini diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat serta pemberian akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, diantaranya melalui: Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat Karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung akses pekerjaan bagi masyarakat miskin, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan, pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar, pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil, peningkatan akses pembiayaan usaha mikro dan kecil, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu di fokuskan pada pemberdayaan masyarakat menuju Graduasi Bansos. Untuk mendukung efektivitas strategi ini, dilakukan tahapan intervensi yang terarah, meliputi identifikasi sasaran dan jenis intervensi, memastikan perubahan nyata pada kelompok sasaran, serta mendorong terciptanya efek multiplikasi ekonomi di masyarakat di mana keberhasilan penerima manfaat mampu mendorong penguatan ekonomi di lingkungannya. Fokus diarahkan pada penduduk produktif tidak hanya pada masyarakat miskin namun juga difokuskan kepada masyarakat rentan miskin yang memiliki kemauan belajar, dan berpotensi menjadi agen perubahan. Pemilihan kelompok ini dinilai strategis karena mereka berada pada posisi transisi antara miskin dan non-miskin, sehingga intervensi terhadap mereka akan mempercepat penurunan kemiskinan. Penguatan pada kelompok ini diharapkan meningkatkan pendidikan menengah, keterampilan kerja, dan akses permodalan, sehingga mempercepat kemandirian ekonomi serta penurunan kemiskinan di Jawa Tengah.
3. **Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Serta Sinergi Kebijakan Dan Program Penanggulangan Kemiskinan.** Strategi ini adalah sinergi kebijakan untuk pemenuhan infrastruktur dasar mendukung peningkatan produktivitas serta pemberdayaan

masyarakat, diantaranya melalui: Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, infrastruktur sanitasi air minum layak, pemberian stimulan jamban serta penanganan rumah sederhana layak huni bagi masyarakat miskin, peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, seperti sinergitas dari dokumen perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, penguatan database kemiskinan (verifikasi dan validasi database kemiskinan), dan penggunaan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan.

Strategi utama tersebut didukung dengan peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan validitas dan reliabilitas data dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta proses pendataan secara *bottom up*. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan melalui pendekatan intervensi berbasis individu dan kelompok. Pendekatan individu menggunakan data mikro yang telah di verifikasi dan validasi serta terintegrasi dalam basis data kemiskinan.

Sedangkan untuk pendekatan kelompok difokuskan pada manfaat kolektif dengan skala kemanfaatan yang lebih luas yang dampaknya bersifat jangka menengah dan panjang. Fokus pendekatan kelompok antara lain: pengembangan potensi lokal melalui pemberdayaan kelompok usaha, pemberdayaan dan peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur air minum dan sanitasi layak. Intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) tersebut dilaksanakan secara lintas sektor, terfokus, dan konvergen di wilayah dengan potensi dan permasalahan yang telah diidentifikasi.

Strategi utama penanggulangan kemiskinan sebagaimana telah dirumuskan, menjadi landasan operasional dalam penyusunan langkah yang lebih terukur, terfokus, dan sesuai dengan kondisi riil daerah. Elaborasi strategi utama ke dalam langkah implementatif dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap intervensi, baik pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, maupun meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, dapat diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan lintas sektor yang konvergen. Seluruh proses tersebut berbasis data, responsif, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah, yang selanjutnya diturunkan secara lebih aplikatif ke dalam fokus strategi yang merupakan penjabaran dari strategi utama dan analisis bidang-bidang yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan.

C. FOKUS STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Berdasarkan pada konsideran dokumen perencanaan pusat dan daerah diatas, disimpulkan arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan difokuskan pada penguatan perlindungan sosial adaptif,

peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi, serta perluasan akses layanan dasar dan infrastruktur secara inklusif. Upaya tersebut dilaksanakan secara sinergis lintas sektor untuk menurunkan kemiskinan, memperkuat ketahanan masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Selain konsideran tersebut ditentukan melalui analisis terhadap bidang-bidang permasalahan kemiskinan, sehingga fokus strategi penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah dirumuskan:

1. Meningkatkan Kesejahteraan PPKS untuk Mendorong Kemandirian PPKS di Jawa Tengah.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Jawa Tengah diarahkan pada intervensi pemberdayaan yang mampu mendorong kemandirian ekonomi dan sosial. Strategi ini menekankan pada penguatan kapasitas, akses terhadap layanan dasar, serta peningkatan keterampilan kerja dan kewirausahaan bagi kelompok rentan. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan PPKS tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga bertransformasi menjadi individu dan komunitas yang produktif serta mandiri.

Strategi ini secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian **Tujuan: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS**, yang diukur melalui **indikator: Persentase Peningkatan Kesejahteraan PPKS**. Dengan demikian, setiap intervensi yang dijalankan akan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup, mengurangi ketergantungan, serta memperluas akses PPKS terhadap peluang ekonomi dan sosial yang inklusif.

Selain itu dilakukan graduasi bansos, yaitu proses keluarnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari daftar penerima bantuan sosial, baik PKH (Program Keluarga Harapan) maupun BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), karena dinilai sudah mampu mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan tersebut.

Terdapat dua strategi intervensi pasca graduasi yaitu 1) peningkatan akses terhadap aktivitas ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat dengan target Kelompok Penerima Manfaat (KPM) tersebut memiliki pekerjaan dan pendapatan; dan 2) peningkatan akses permodalan melalui sistem keuangan mikro (KUR dll) setelah KPM mandiri untuk meningkatkan skala aktivitas ekonomi.

2. Meningkatkan Akses terhadap Layanan Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Jawa Tengah

Strategi meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin di Jawa Tengah diarahkan pada upaya integratif dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang kesehatan dan pendidikan. Arah kebijakan difokuskan pada meningkatkan Kesehatan ibu dan anak, meningkatkan jaminan pembiayaan Kesehatan serta meningkatkan penemuan, pencegahan dan pengobatan penyakit menular dan penyakit

tidak menular, sehingga mampu mendorong pencapaian **tujuan meningkatnya kualitas kesehatan** dengan indikator **angka harapan hidup**.

Selain itu tujuan yang ingin dicapai adalah **meningkatnya status gizi masyarakat** dalam upaya pemenuhan kesehatan dan gizi masyarakat termasuk pencegahan dan penanganan stunting serta mewujudkan ketahanan daerah. Tujuan ini diukur melalui indikator **prevalensi stunting**. Pada saat yang sama, strategi ini juga ditekankan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, guna mendukung **tujuan meningkatnya akses pendidikan berkualitas bagi semua**, dengan indikator **harapan lama sekolah**. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, tetapi juga menjadi pendorong utama peningkatan kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah secara menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3. Menurunkan Tingkat Pengangguran Masyarakat Miskin

Strategi penurunan tingkat pengangguran masyarakat miskin diarahkan pada penguatan sistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan melalui upaya pencegahan risiko kehilangan pekerjaan, peningkatan penempatan tenaga kerja, pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pelaksanaan strategi ini difokuskan pada penguatan perlindungan ketenagakerjaan, pengembangan layanan pasar kerja yang efektif, serta optimalisasi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan padat karya juga didorong sebagai instrumen penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas. Dengan langkah tersebut, **penurunan tingkat pengangguran masyarakat miskin** diharapkan dapat tercapai secara lebih terarah dan terukur, yang ditunjukkan melalui **indikator tingkat pengangguran terbuka**.

4. Meningkatkan Produktifitas Petani, Peternak, dan Nelayan Miskin untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah

Strategi meningkatkan produktivitas petani, peternak, dan nelayan miskin di Provinsi Jawa Tengah diarahkan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Arah kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan ketersediaan pangan melalui optimalisasi produksi subsektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, sekaligus penanganan wilayah rawan pangan, dengan sasaran terukur berupa **peningkatan Indeks Ketahanan Pangan dan penurunan Prevalence of Undernourishment**.

Selanjutnya, peningkatan produktivitas pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hasil hutan, dan peternakan diarahkan untuk memperkuat kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang bergantung pada sektor ini, dengan indikator kinerja utama berupa

peningkatan PDRB subsektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. Selain itu, penguatan sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi perikanan serta pengelolaan ekosistem laut yang sehat difokuskan untuk mendorong pertumbuhan **PDRB sektor perikanan** sekaligus menjaga kualitas ekosistem. Dengan pendekatan ini, strategi dimaksud menjadi instrumen integratif untuk mencapai ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

5. Meningkatkan Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar bagi Masyarakat Miskin

Strategi peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin merupakan upaya komprehensif yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pertama, peningkatan pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang efektif, efisien, dan berkelanjutan ditujukan untuk menjamin ketersediaan energi, khususnya listrik, bagi rumah tangga miskin. Arah kebijakan ini diukur melalui indikator **konsumsi listrik per kapita** dengan sasaran **meningkatnya akses listrik**, sehingga tidak hanya menjamin keberlanjutan pasokan tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat miskin.

Kedua, peningkatan kualitas permukiman dan agraria dilaksanakan guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Pencapaiannya diukur melalui **persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak**, dengan sasaran **meningkatnya jumlah rumah layak huni**, terutama bagi masyarakat miskin. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk menekan *backlog* perumahan, tetapi juga mendorong terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan berdaya dukung.

Ketiga, peningkatan pelayanan kebinamargaan dan keciptakaryaan diarahkan pada penyediaan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi yang lebih memadai. Indikator yang digunakan adalah **indeks pelayanan keciptakaryaan** dengan sasaran **meningkatnya akses rumah tangga terhadap air minum aman**. Penyediaan akses air minum aman ini diharapkan dapat berkontribusi langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin sekaligus menurunkan beban pengeluaran rumah tangga.

Keempat, peningkatan kualitas layanan transportasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan meningkatkan mobilitas masyarakat, termasuk masyarakat miskin. Melalui indikator **indeks pelayanan transportasi**, sasaran yang ingin dicapai adalah **meningkatnya konektivitas transportasi di Jawa Tengah** yang berimplikasi pada peningkatan aksesibilitas wilayah, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta penurunan biaya transportasi bagi masyarakat termasuk masyarakat miskin.

Kelima, peningkatan kualitas jalan sesuai standar kolektor menjadi prioritas strategis untuk mendukung kelancaran konektivitas dan distribusi barang maupun jasa. Hal ini diukur melalui indikator **persentase panjang jalan provinsi yang sesuai dengan standar kolektor**, dengan sasaran meningkatnya **kualitas jalan provinsi**. Pembangunan dan pemeliharaan jalan ini sekaligus didorong dengan **pendekatan padat karya** sehingga mampu menciptakan lapangan kerja sementara bagi masyarakat miskin serta memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian lokal.

Secara keseluruhan, strategi peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar ini dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui peningkatan akses energi, perumahan layak, air minum aman, layanan transportasi, serta jalan sesuai standar. Dengan capaian indikator yang terukur, strategi ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan secara struktural dan berkelanjutan di Jawa Tengah.

6. Meningkatkan Peran Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan

Strategi **meningkatkan peran desa dalam penanggulangan kemiskinan** diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, tata kelola, serta pemanfaatan potensi desa sebagai basis utama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa diposisikan sebagai aktor kunci yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan penyedia layanan dasar bagi masyarakat. Peningkatan peran desa ini diukur melalui **Indeks Desa**, dengan sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan desa, meningkatnya perekonomian desa, serta meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar dan aksesibilitas desa untuk mendukung mobilitas, keterhubungan wilayah, serta kualitas hidup masyarakat.

Melalui strategi ini, diharapkan desa mampu memperkuat fungsi pelayanan publik, membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menciptakan lapangan kerja dan usaha produktif, serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran desa dalam penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi pelengkap kebijakan pembangunan daerah, tetapi menjadi pilar utama dalam mempercepat pengurangan kemiskinan yang inklusif dan berkeadilan.

7. Sinergi Kebijakan dan Program Lainnya yang Mendukung Penanggulangan Kemiskinan secara Kolaboratif

Fokus strategi penanggulangan kemiskinan melalui sinergi kebijakan dan program diarahkan untuk memperkuat integrasi lintas sektor sehingga intervensi pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan tepat sasaran. Sinergi ini tidak hanya mencakup penyelarasan arah kebijakan dan sinkronisasi pendanaan antarprogram, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas tata kelola data kemiskinan, harmonisasi regulasi, serta penguatan mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan. Melalui pendekatan tersebut,

diharapkan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan kontribusi yang terukur terhadap percepatan pengurangan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, penguatan sinergi penanggulangan kemiskinan juga dilaksanakan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak/pemangku kepentingan (*collaborative governance*) dalam bentuk pembiayaan, inovasi, pendampingan dan peningkatan kapasitas serta dukungan lainnya oleh perguruan tinggi, dunia usaha, Baznas, Filantropi, organisasi masyarakat, LSM serta stakeholder lain yang mendukung penanggulangan kemiskinan. Kolaborasi multipihak tersebut menjadi instrumen strategis dalam memperluas cakupan, meningkatkan efektivitas, dan memastikan keberlanjutan hasil program penanggulangan kemiskinan.

Lebih lanjut, strategi ini juga menekankan pentingnya aspek mitigasi dan adaptasi dalam menjaga kelompok rentan agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan, khususnya akibat guncangan ekonomi, perubahan iklim, maupun bencana alam dan non-alam. Dengan demikian, strategi sinergi kebijakan dan program tidak hanya berorientasi pada percepatan pengentasan kemiskinan, tetapi juga pada penguatan resiliensi sosial dan ekonomi masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko serta dinamika pembangunan yang terus berkembang.

D. PENTAHAPAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pentahapan pembangunan merupakan instrumen penting untuk memastikan arah kebijakan dan strategi dapat diimplementasikan secara sistematis, bertahap, serta selaras dengan fokus pembangunan daerah setiap tahunnya sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Mekanisme pentahapan juga berfungsi sebagai upaya harmonisasi antara rencana pembangunan daerah dengan rencana penanggulangan kemiskinan, sehingga program dan intervensi yang disusun dapat berjalan secara terkoordinasi dan tepat sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan akan lebih terarah, adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah, serta konsisten dalam setiap tahapan implementasi. Penyelarasan pentahapan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 dengan pentahapan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Tahap I (2025) : Penyiapan dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah

Tahun 2025 merupakan fase penyiapan (*baseline*) yang diarahkan pada sinkronisasi arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah dengan kebijakan nasional serta penyusunan fondasi teknokratis pelaksanaan program. Fokus utama tahap ini meliputi pemutakhiran dan validasi basis data kemiskinan, penetapan lokus prioritas kantong kemiskinan, pemetaan irisan program lintas sektor, serta penguatan mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis konvergensi. Pada tahap ini juga dilakukan penyiapan regulasi pendukung, penguatan kapasitas kelembagaan sebagai dasar implementasi pada tahap selanjutnya.

2. Tahap II (2026) : Penguatan Landasan Pembangunan Daerah

Tahap ini diarahkan untuk memperkuat fondasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan tata kelola, konsolidasi kelembagaan, serta penyelarasan arah kebijakan daerah dengan strategi nasional. Fokus utama mencakup penyempurnaan basis data kemiskinan, penyempurnaan sistem informasi terpadu, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta penguatan infrastruktur dasar yang mendukung akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, dan perumahan layak. Selain itu, dilakukan penguatan sistem perlindungan sosial dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program pada tahap selanjutnya.

3. Tahap III (2027): Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah

Difokuskan pada optimalisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan perluasan akses layanan dasar. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan, pendidikan vokasi, dan penguatan keterampilan kerja. Pemerintah daerah memastikan konvergensi pelaksanaan program sosial dan ekonomi agar menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.

4. Tahap IV (2028): Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah

Tahap ini menitikberatkan pada percepatan penurunan kemiskinan melalui penguatan ekonomi produktif. Fokus diarahkan pada peningkatan produktivitas masyarakat, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta perluasan kesempatan kerja. Pemerintah daerah memperkuat kemitraan secara lintas sektor baik CSR, Baznas dan Filantropi untuk meningkatkan pembiayaan program penanggulangan kemiskinan. Sinergi antarwilayah dan antarprogram ditingkatkan guna mempercepat capaian target penurunan kemiskinan secara signifikan.

5. Tahap V (2029): Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah

Difokuskan pada konsolidasi hasil pembangunan yang telah dicapai serta pemantapan sinergi antarwilayah dan sektor. Upaya diarahkan untuk menjaga keberlanjutan capaian penurunan kemiskinan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, penguatan ekonomi lokal, serta penajaman sistem monitoring dan evaluasi berbasis data.

6. Tahap VI (2030): Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan

Tahap akhir merupakan fase konsolidasi dan keberlanjutan pembangunan. Fokus diarahkan pada peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, penguatan usaha mikro dan kecil sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, serta peningkatan pemerataan hasil pembangunan. Pemerintah daerah memastikan keberlanjutan sistem perlindungan sosial dan tata kelola pembangunan yang inklusif untuk mewujudkan Jawa Tengah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan

E. PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029, Gubernur dan Wakil Gubernur menetapkan program prioritas penanggulangan kemiskinan. Seluruh program tersebut juga didukung oleh banyak pihak atau *stakeholders* termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Program tersebut terdiri dari program prioritas, program intervensi, program aksi dan program taktis yang dilaksanakan secara simultan dengan intervensi penanggulangan kemiskinan yang sudah dipetakan melalui analisis bidang kemiskinan. Program tersebut yang diuraikan sebagai berikut:

1. Program Prioritas

Program prioritas merupakan program unggulan yang menjadi penopang utama keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Program prioritas sebagai berikut:

- a. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;
- b. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional;
- c. Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui Mageri Segoro untuk mengamankan garis pantai;
- d. Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin;
- e. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja;
- f. Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi.

2. Program Intervensi

Program Intervensi merupakan program yang melibatkan berbagai organisasi pemerintah daerah (memungkinkan kolaborasi bersama pemerintah pusat) yang memiliki ruang lingkup dan dampak multidimensional sehingga mampu menjadi penopang keberhasilan pembangunan daerah. Program Intervensi meliputi:

- a. Peningkatan Bantuan Keuangan Desa;
- b. Jambanisasi 100%;
- c. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
- d. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida.
- e. Percepatan penanganan *stunting* melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil;
- f. Menyediakan paket pendidikan gratis (seragam, buku pembelajaran, akses internet);

- g. Mendorong pembangunan sistem desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi suplai air bersih dan mengatasi dampak eksploitasi air tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang).

3. Program Aksi

Program Aksi merupakan program strategis untuk menopang keberhasilan program prioritas yang dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, meliputi:

- a. Mendorong pembangunan rumah apung kawasan pesisir;
- b. Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional;
- c. Menyiapkan sistem irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak, Pati);
- d. Penghapusan hutang petani, nelayan, UMKM;
- e. Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp. 1.000 untuk buruh, lansia, veteran, dan pelajar;
- f. Petani milenial gaji;
- g. Penguatan tata kelola CSR untuk pembangunan daerah;
- h. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana;
- i. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak;
- j. Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerja sama dengan pihak sekolah swasta.

4. Program Taktis

Program taktis merupakan bagian dari perencanaan strategis yang lebih rinci, cepat dan jangka pendek, meliputi:

- a. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin;
- b. Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya;
- c. Mendorong pembangunan SPAM Regional dan SPAM Industri untuk penyediaan air bersih;
- d. Pendidikan perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren;
- e. Penguatan BPBD dan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat;
- f. Penataan drainase dan pengendalian banjir terutama di Kota Semarang, Pekalongan, dan Kabupaten Demak;
- g. Fasilitas rumah susun untuk MBR bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan swasta;
- h. BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jawa Tengah);
- i. Subsidi pangan murah.

F. TARGET KEMISKINAN DAERAH

Proyeksi tingkat kemiskinan disusun sebagai instrumen analitis untuk memperkirakan arah perkembangan kondisi kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Proyeksi ini mempertimbangkan dinamika

indikator makroekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, fluktuasi harga pangan dan energi, serta efektivitas program perlindungan sosial. Dengan demikian, proyeksi tingkat kemiskinan menjadi dasar dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan.

Proyeksi tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dihitung dengan menggunakan pendekatan elastisitas (*direct elasticity*) antara tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020-2023 berdasarkan metode Ram (2011). Elastisitas dihitung dari periode 2020-2023 karena periode tersebut merupakan pemulihan pasca pandemi Covid-19, dan menggunakan tingkat kemiskinan September 2024 sebagai *baseline*. Adapun asumsi yang digunakan dalam proyeksi tingkat kemiskinan Tahun 2025-2030 yakni mempertimbangkan beberapa kondisi antara lain kondisi bencana yang terjadi di sejumlah titik di Jawa Tengah, dan kondisi ketenagakerjaan yang masih belum menentu. Kondisi kesejahteraan buruh juga berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, artinya kondisi PHK yang terjadi di Jawa Tengah berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan buruh di Jawa Tengah yang dapat berdampak terhadap kemiskinan.

Ketidakpastian ekonomi masih relatif tinggi, baik yang bersumber dari faktor domestik, khususnya iklim dan cuaca yang memengaruhi hasil panen maupun tingkat harga komoditas, terutama pangan. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap kemiskinan karena semakin tinggi laju inflasi, khususnya inflasi pangan, akan mendorong kenaikan Garis Kemiskinan. Hal ini terjadi karena harga barang dan jasa merupakan salah satu komponen utama dalam penentuan Garis Kemiskinan. Kenaikan inflasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, khususnya pada kelompok berpendapatan rendah, akan menurunkan daya beli masyarakat. Mengingat Garis Kemiskinan dihitung berdasarkan pendekatan pengeluaran atau konsumsi, maka indikator ini sangat sensitif terhadap fluktuasi harga. Adapun proyeksi tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Proyeksi Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2030

Tahun	Proyeksi Tingkat Kemiskinan
2025	9,66-9,00
2026	8,70-8,53
2027	8,51-8,17
2028	8,38-7,81
2029	8,20-7,48
2030	8.00-7,13

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

G. SASARAN INTERVENSI

Sasaran intervensi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada masyarakat yang termasuk dalam kelompok desil 1-5, namun diprioritaskan pada desil 1-3. Kelompok ini merupakan keluarga/individu dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan basis data mikro kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penetapan sasaran ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan, sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.

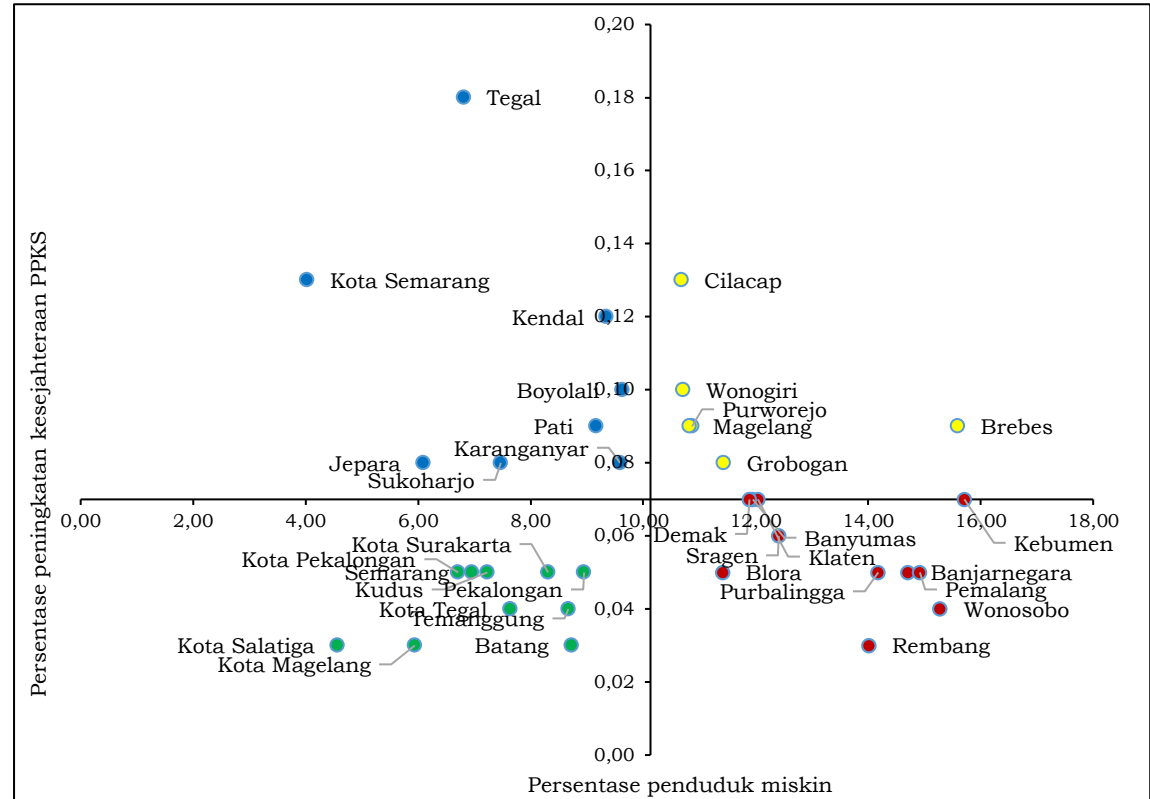
H. PRIORITAS WILAYAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan berbasis analisis wilayah per fokus strategi, sehingga intervensi program dan kegiatan dapat diarahkan secara lebih fokus, terukur, serta sesuai dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Analisis ini disusun untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi pada setiap fokus strategi penanggulangan kemiskinan, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan, sasaran program, serta pengalokasian sumber daya pembangunan secara lebih efektif.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa hasil analisis wilayah tersebut berfungsi sebagai alat referensi (*tools*) dalam mendukung pengambilan keputusan, bukan sebagai penetapan mutlak lokasi prioritas. Penentuan wilayah intervensi secara nyata tetap dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan kondisi faktual, dinamika sosial-ekonomi, serta kapasitas lokal. Prinsip ini dimaksudkan agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tetap fleksibel, responsif terhadap perubahan, dan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan dampak yang optimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Adapun analisis wilayah sesuai fokus strategi penanggulangan kemiskinan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan PPKS untuk Mendorong Kemandirian PPKS di Jawa Tengah

Pemetaan prioritas wilayah pada indikator peningkatan kesejahteraan PPKS didapat dari persandingan indikator Persentase Penduduk Miskin dan Persentase Peningkatan Kesejahteraan PPKS yang menghasilkan 4 kuadran wilayah. Hasil persandingan indikator dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.1 berikut:



Sumber: BPS dan Dinsos Provinsi Jawa Tengah, 2024 diolah

Gambar 3.1
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kesejahteraan PPKS
untuk Mendorong Kemandirian PPKS di Jawa Tengah

Berdasarkan Gambar 3.1, prioritas wilayah dikelompokkan berdasarkan kuadran dalam bentuk tabulasi, sebagaimana Tabel 3.3 berikut:

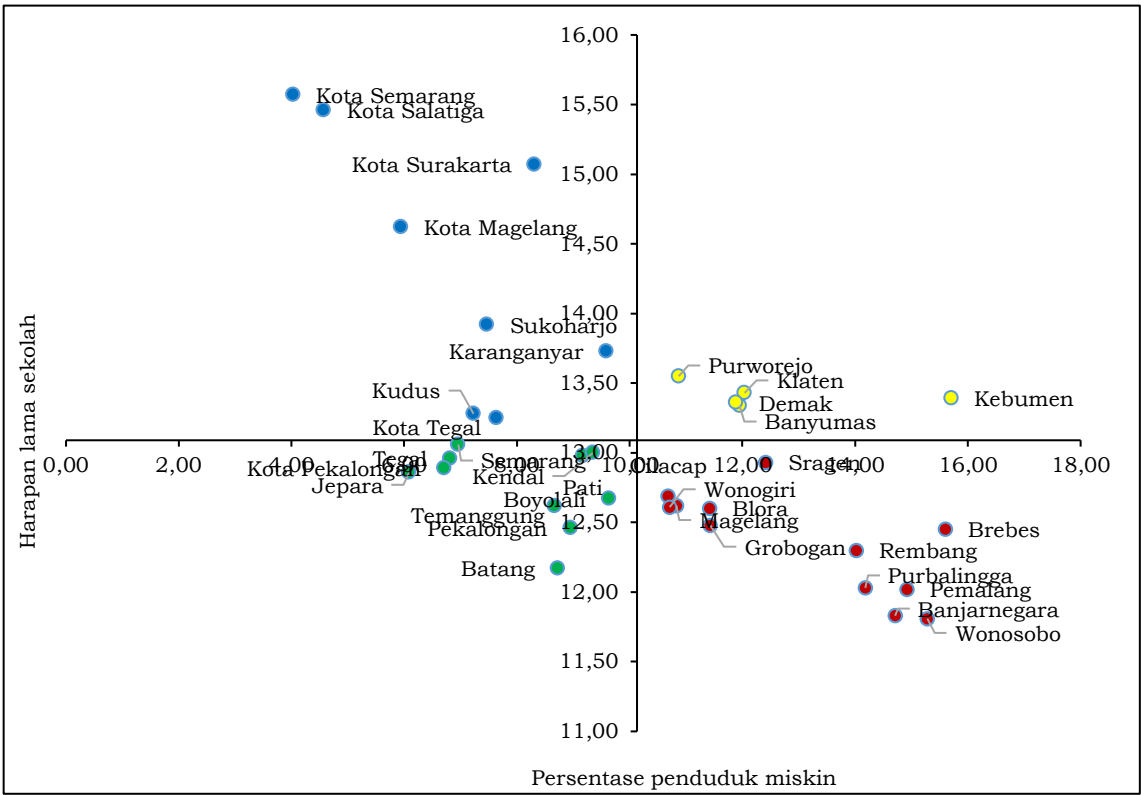
Tabel 3.3
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kesejahteraan PPKS
untuk Mendorong Kemandirian PPKS di Jawa Tengah

Prioritas 1 (11 kabupaten)	:	Kebumen, Wonosobo, Pemalang, Banjarnegara, Rembang, Klaten, Banyumas, Blora, Purbalingga, Sragen dan Demak
Prioritas 2 (6 kabupaten)	:	Brebes, Grobogan, Magelang, Purworejo, Wonogiri dan Cilacap
Prioritas 3 (10 kabupaten/kota)	:	Batang, Temanggung, Pekalongan, Kudus, Semarang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang
Prioritas 4 (8 kabupaten/kota)	:	Boyolali, Kendal, Pati, Karanganyar, Sukoharjo, Jepara, Tegal dan Kota Semarang

2. Meningkatkan Akses terhadap Layanan Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Jawa Tengah

- Pemetaan prioritas wilayah pada indikator meningkatnya akses pendidikan berkualitas bagi semua didapat dari persandingan indikator Persentase Penduduk Miskin dan Harapan Lama Sekolah yang

menghasilkan 4 kuadran wilayah. Hasil persandingan indikator dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.2 berikut:



Sumber: BPS dan Disdik Provinsi Jawa Tengah, 2024 diolah

Gambar 3.2
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Akses Pendidikan Berkualitas bagi Semua

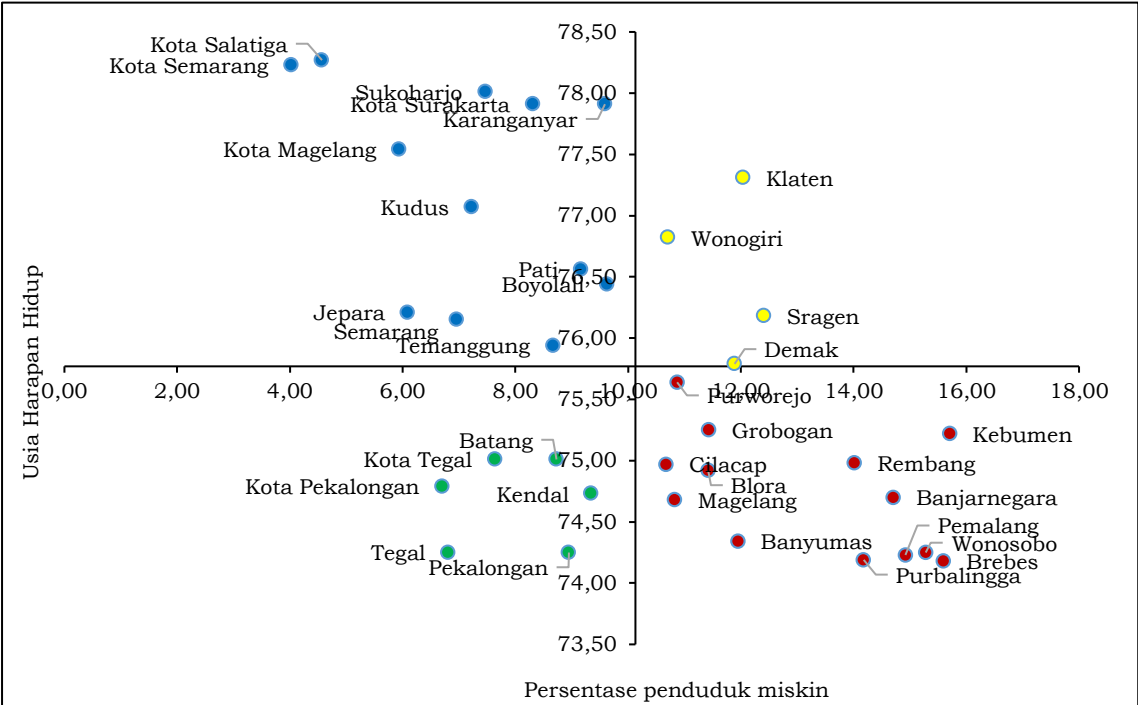
Berdasarkan Gambar 3.2, prioritas wilayah dikelompokkan berdasarkan kuadran dalam bentuk tabulasi, sebagaimana Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Akses Pendidikan Berkualitas bagi Semua

Prioritas 1 (12 kabupaten)	:	Brebes, Wonosobo, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Rembang, Grobogan, Sragen, Magelang, Blora, Wonogiri dan Cilacap
Prioritas 2 (5 kabupaten)	:	Kebumen, Banyumas, Demak, Klaten dan Purworejo
Prioritas 3 (10 kabupaten/kota)	:	Batang, Pekalongan, Temanggung, Boyolali, Pati, Kendal, Semarang, Tegal, Jepara dan Kota Pekalongan
Prioritas 4 (8 kabupaten/kota)	:	Karanganyar, Sukoharjo, Kudus, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Semarang

- b. Pemetaan prioritas wilayah pada indikator meningkatnya kualitas kesehatan didapat dari persandingan indikator Persentase Penduduk

Miskin dan Usia Harapan Hidup yang menghasilkan 4 kuadran wilayah. Hasil persandingan indikator dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.3 berikut:



Sumber: BPS dan Dinkes Provinsi Jawa Tengah, 2024 diolah

Gambar 3.3
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan

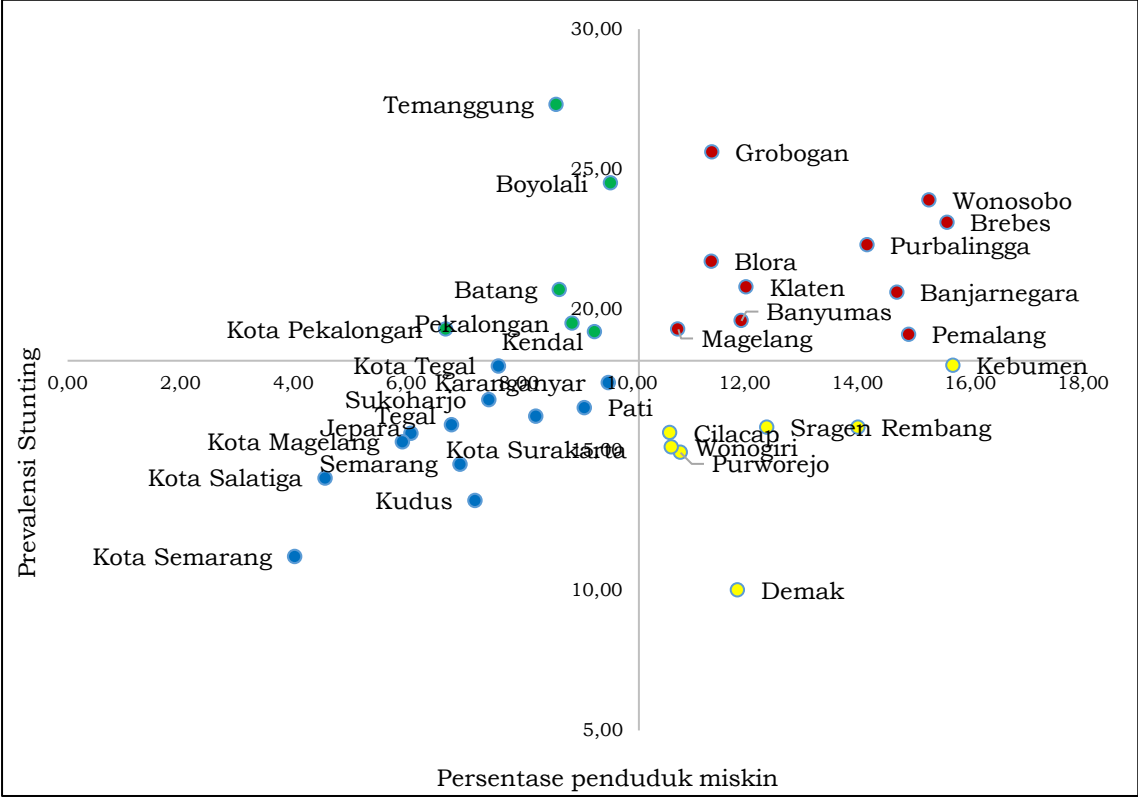
Berdasarkan Gambar 3.3, prioritas wilayah dikelompokkan berdasarkan kuadran dalam bentuk tabulasi, sebagaimana Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan

Prioritas 1 (13 kabupaten)	:	Kebumen, Brebes, Wonosobo, Purbalingga, Pemalang, Banjarnegara, Rembang, Banyumas, Magelang, Blora, Cilacap, Grobogan dan Purworejo
Prioritas 2 (4 kabupaten)	:	Demak, Sragen, Wonogiri dan Klaten
Prioritas 3 (6 kabupaten/kota)	:	Pekalongan, Tegal, Kendal, Batang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal
Prioritas 4 (12 kabupaten/kota)	:	Boyolali, Pati, Karanganyar, Temanggung, Kudus, Semarang, Jepara, Sukoharjo, Kota Surakarta, Kota Magealang, Kota Semarang dan Kota Salatiga

- c. Pemetaan prioritas wilayah pada indikator meningkatnya status gizi didapat dari persandingan indikator Persentase Penduduk Miskin dan Prevalensi Stunting yang menghasilkan 4 kuadran wilayah. Hasil

persandingan indikator dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.4 berikut:



Sumber: BPS dan Dinkes Provinsi Jawa Tengah, 2024 diolah

Gambar 3.4
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Status Gizi

Berdasarkan Gambar 3.4, prioritas wilayah dikelompokkan berdasarkan kuadran dalam bentuk tabulasi, sebagaimana Tabel 3.6 berikut:

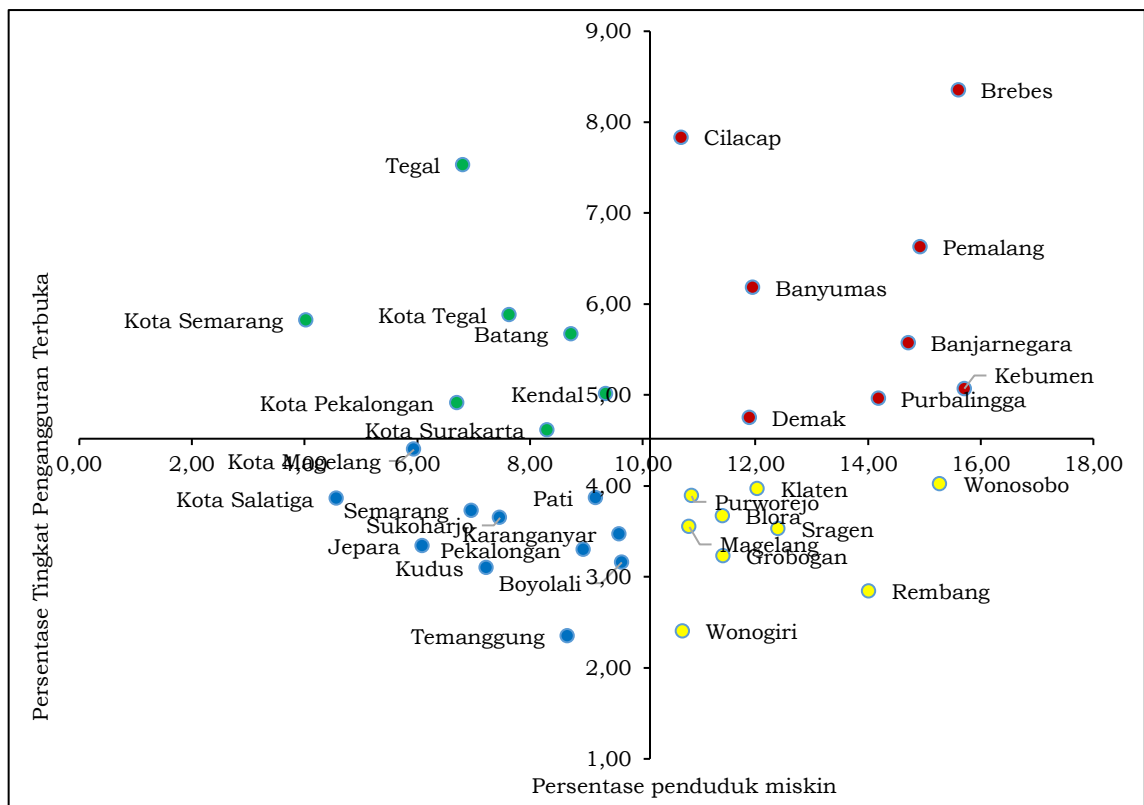
Tabel 3.6
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Status Gizi

Prioritas 1 (10 kabupaten)	:	Brebes, Wonosobo, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Klaten, Magelang, Blora dan Grobogan
Prioritas 2 (7 kabupaten)	:	Kebumen, Rembang, Sragen, Demak, Purworejo, Wonogiri dan Cilacap
Prioritas 3 (6 kabupaten/kota)	:	Boyolali, Kendal, Temanggung, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan
Prioritas 4 (12 kabupaten/kota)	:	Pati, Karanganyar, Sukoharjo, Jepara, Tegal, Kudus, Semarang, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Surakarta dan Kota Semarang

3. Menurunkan Tingkat Pengangguran Masyarakat Miskin

Pemetaan prioritas wilayah pada indikator menurunannya tingkat pengangguran masyarakat miskin didapat dari persandingan indikator Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang menghasilkan 4 kuadran wilayah. Hasil persandingan indikator dapat

dilihat sebagaimana Gambar 3.5 berikut:



Sumber: BPS dan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024 diolah

Gambar 3.5
Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Tingkat Pengangguran Masyarakat Miskin

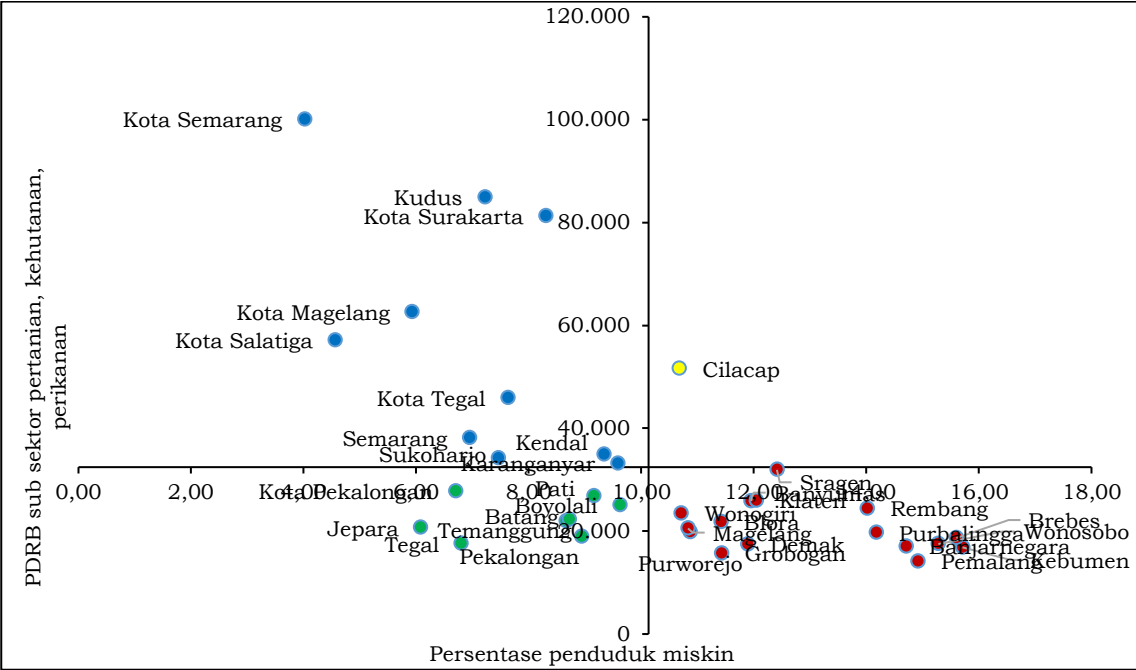
Berdasarkan Gambar 3.5, prioritas wilayah dikelompokkan berdasarkan kuadran dalam bentuk tabulasi, sebagaimana Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Tingkat Pengangguran Masyarakat Miskin

Prioritas 1 (8 kabupaten)	:	Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Kebumen, Purbalingga, Demak, Banyumas dan Cilacap
Prioritas 2 (9 kabupaten)	:	Wonosobo, Rembang, Grobogan, Magelang, Sragen, Blora, Purworejo, Klaten dan Wonogiri
Prioritas 3 (7 kabupaten/kota)	:	Kendal, Batang, Tegal, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Pekalongan dan Kota Semarang
Prioritas 4 (11 kabupaten/kota)	:	Pati, Karanganyar, Pekalongan, Boyolali, Temanggung, Kudus, Jepara, Sukoharjo, Semarang, Kota Magelang dan Kota Salatiga

- 4. Meningkatkan Produktifitas Petani, Peternak, dan Nelayan Miskin untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah**
- a. Pemetaan prioritas wilayah pada indikator meningkatnya pendapatan petani dan peternak miskin didapat dari persandingan indikator

Persentase Penduduk Miskin dan PDRB sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menghasilkan 4 kuadran wilayah. Hasil persandingan indikator dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.6 berikut:



Sumber: BPS dan Distanbun Provinsi Jawa Tengah, 2024 diolah

Gambar 3.6
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Pendapatan Petani dan Peternak Miskin

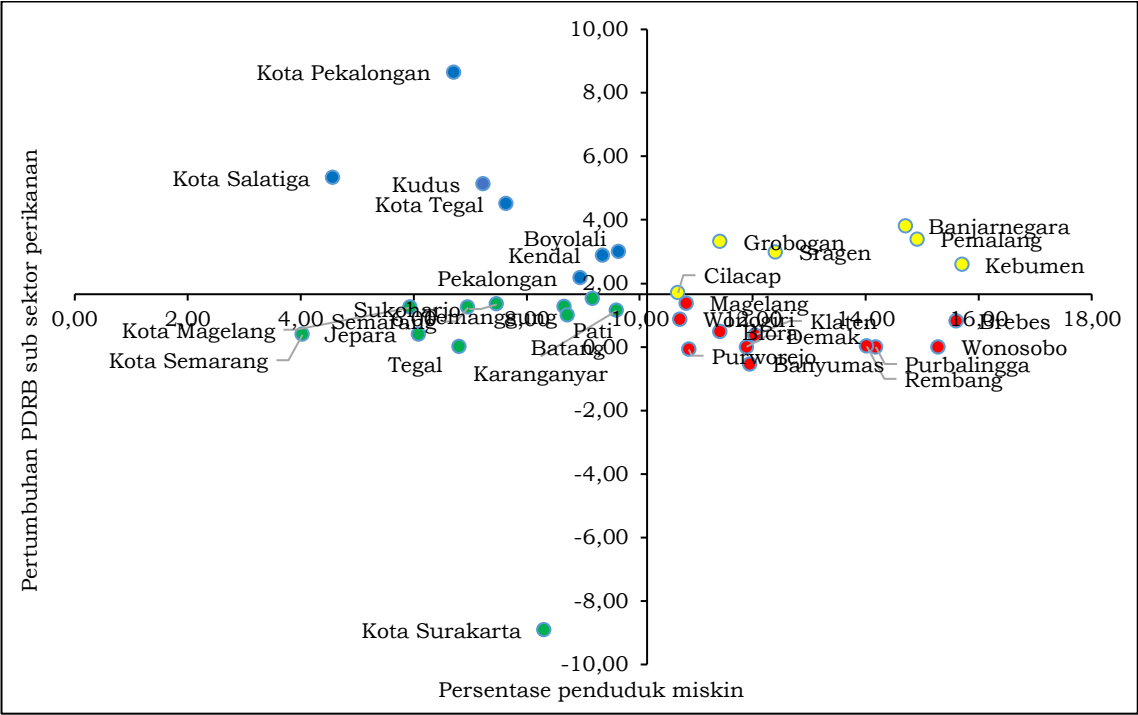
Berdasarkan Gambar 3.6, prioritas wilayah dikelompokkan berdasarkan kuadran dalam bentuk tabulasi, sebagaimana Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Pendapatan Petani dan Peternak Miskin

Prioritas 1 (16 kabupaten)	:	Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Rembang, Grobogan, Demak, Purworejo, Magelang, Blora, Wonogiri, Klaten, Banyumas dan Sragen
Prioritas 2 (1 kabupaten)	:	Cilacap
Prioritas 3 (8 kabupaten/kota)	:	Boyolali, Pati, Pekalongan, Batang, Jepara, Temanggung, Tegal dan Kota Pekalongan
Prioritas 4 (10 kabupaten/kota)	:	Karanganyar, Kendal, Sukoharjo, Semarang, Kudus, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Tegal dan Kota Salatiga

- b. Pemetaan prioritas wilayah pada indikator meningkatnya pertumbuhan PDRB dan kualitas ekosistem kelautan dan perikanan didapat dari persandingan indikator Persentase Penduduk Miskin dan

PDRB Sub Sektor Perikanan yang menghasilkan 4 kuadran wilayah. Hasil persandingan indikator dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.7 berikut:



Sumber: BPS dan DKP Provinsi Jawa Tengah, 2024 diolah

Gambar 3.7
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan

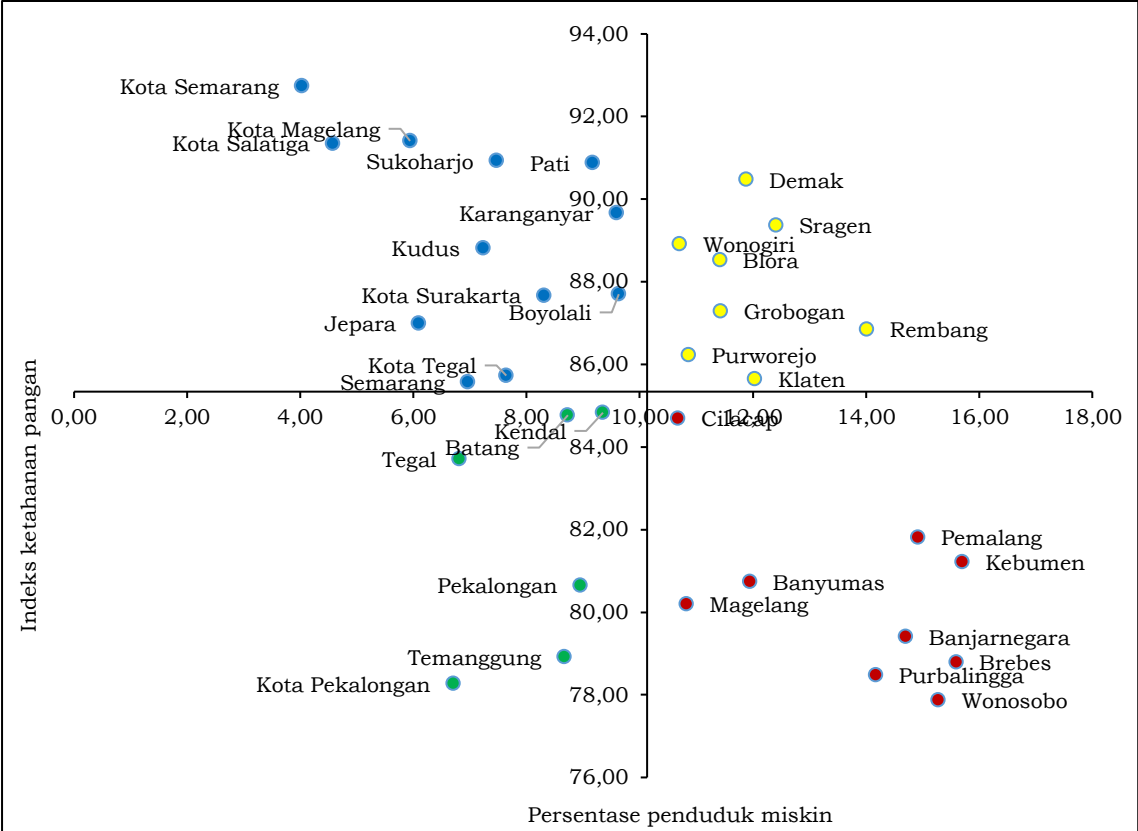
Berdasarkan Gambar 3.7, prioritas wilayah dikelompokkan berdasarkan kuadran dalam bentuk tabulasi, sebagaimana Tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan

Prioritas 1 (11 kabupaten)	:	Brebes, Wonosobo, Purbalingga, Rembang, Banyumas, Purworejo, Klaten, Demak, Blora, Wonogiri dan Magelang
Prioritas 2 (6 kabupaten)	:	Kebumen, Pemalang, Banjarnegara, Sragen, Grobogan dan Cilacap
Prioritas 3 (11 kabupaten/kota)	:	Batang, Karanganyar, Pati, Temanggung, Tegal, Sukoharjo, Semarang, Jepara, Kota Magelang, Kota Semarang dan Kota Surakarta
Prioritas 4 (7 kabupaten/kota)	:	Pekalongan, Kudus, Kendal, Boyolali, Kota Tegal, Kota Pekalongan dan Kota Salatiga

- c. Pemetaan prioritas wilayah pada indikator mewujudkan ketahanan pangan daerah didapat dari persandingan indikator Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Ketahanan Pangan untuk ketersediaan

pangan yang menghasilkan 4 kuadran wilayah. Hasil persandingan indikator dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.8 berikut:



Sumber: BPS dan Dishanpan Provinsi Jawa Tengah, 2024 diolah

Gambar 3.8
Prioritas Wilayah untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah (Ketersediaan Pangan)

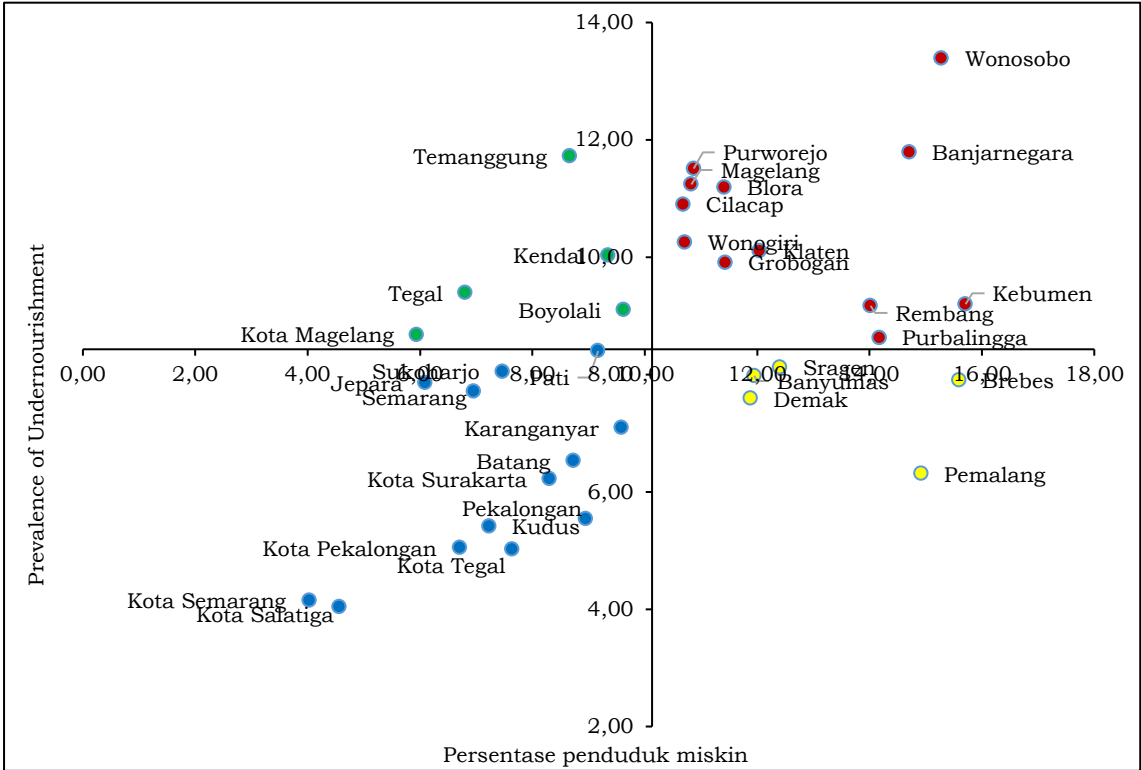
Berdasarkan Gambar 3.8, prioritas wilayah dikelompokkan berdasarkan kuadran dalam bentuk tabulasi, sebagaimana Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Prioritas Wilayah untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah (Ketersediaan Pangan)

Prioritas 1 (9 kabupaten)	:	Brebes, Kebumen, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Banyumas, Magelang dan Cilacap
Prioritas 2 (8 kabupaten)	:	Rembang, Klaten, Sragen, Demak, Wonogiri, Blora, Grobogan dan Purworejo
Prioritas 3 (6 kabupaten/kota)	:	Kendal, Batang, Tegal, Pekalongan, Temanggung dan Kota Pekalongan
Prioritas 4 (12 kabupaten/kota)	:	Boyolali, Karanganyar, Pati, Semarang, Jepara, Kudus, Sukoharjo, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Tegal dan Kota Semarang

- d. Pemetaan prioritas wilayah pada indikator mewujudkan ketahanan pangan daerah didapat dari persandingan indikator Persentase Penduduk Miskin dan *Prevalence of Undernourishment* (PoU) untuk

kerawanan pangan yang menghasilkan 4 kuadran wilayah. Hasil persandingan indikator dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.9 berikut:



Sumber: BPS dan Dishanpan Provinsi Jawa Tengah, 2024 diolah

Gambar 3.9
Prioritas Wilayah untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah (Kerawanan Pangan)

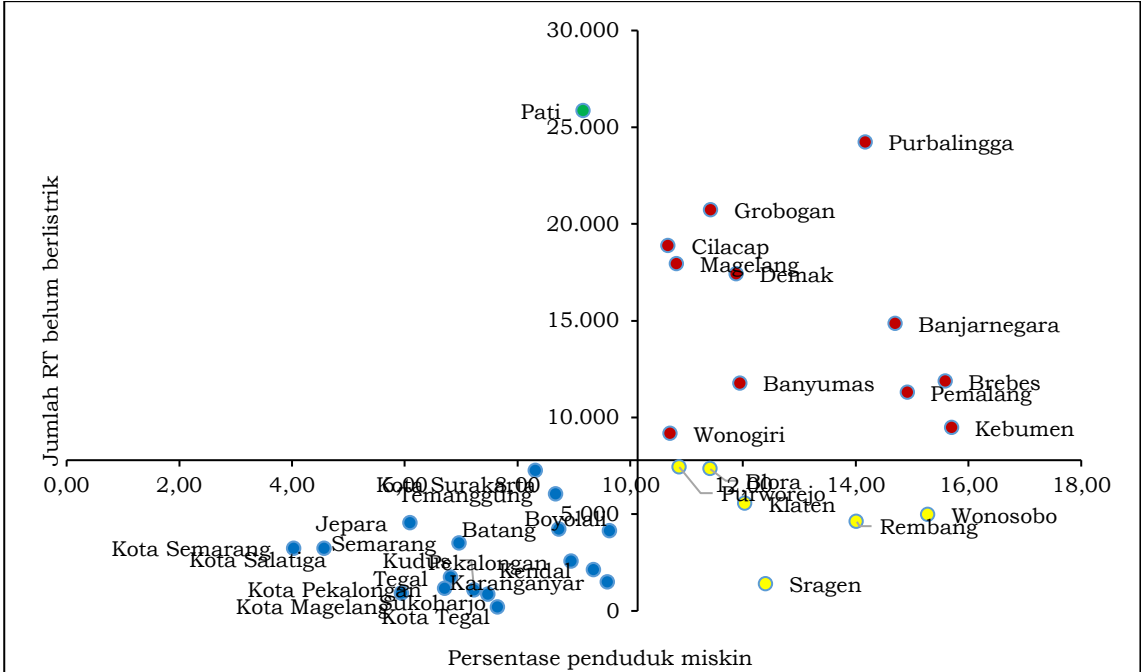
Berdasarkan Gambar 3.9, prioritas wilayah dikelompokkan berdasarkan kuadran dalam bentuk tabulasi, sebagaimana Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Prioritas Wilayah untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah (Kerawanan Pangan)

Prioritas 1 (12 kabupaten)	:	Wonosobo, Banjarnegara, Kebumen, Rembang, Purbalingga, Grobogan, Klaten, Wonogiri, Cilacap, Blora, Magelang dan Purworejo
Prioritas 2 (5 kabupaten)	:	Brebes, Pemalang, Sragen, Banyumas dan Demak
Prioritas 3 (5 kabupaten/kota)	:	Boyolali, Kendal, Temanggung, Tegal dan Kota Magelang
Prioritas 4 (13 kabupaten/kota)	:	Karanganyar, Pati, Batang, Sukoharjo, Jepara, Semarang, Kudus, Pekalongan, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Tegal dan Kota Semarang

5. Meningkatkan Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar bagi Masyarakat Miskin

- a. Pemetaan prioritas wilayah pada indikator meningkatkan pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang efektif, efisien dan berkelanjutan didapat dari persandingan indikator Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Rumah Tangga Belum Berlistrik yang menghasilkan 4 kuadran wilayah. Hasil persandingan indikator dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.10 berikut:



Sumber: BPS dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024 diolah

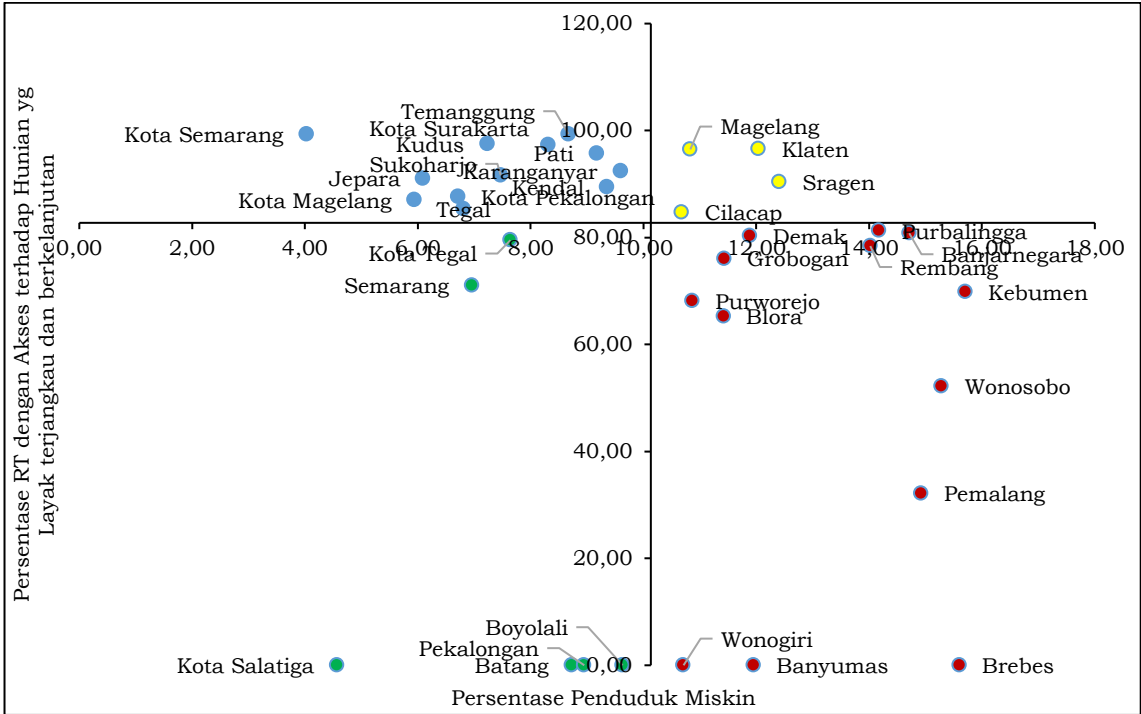
Gambar 3.10
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan

Berdasarkan Gambar 3.10, prioritas wilayah dikelompokkan berdasarkan kuadran dalam bentuk tabulasi, sebagaimana tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan

Prioritas 1 (11 kabupaten)	:	Kebumen, Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Demak, Grobogan, Cilacap, Magelang dan Wonogiri
Prioritas 2 (6 kabupaten)	:	Wonosobo, Rembang, Sragen, Klaten, Purworejo dan Blora
Prioritas 3 (1 kabupaten)	:	Pati
Prioritas 4 (17 kabupaten/kota)	:	Boyolali, Batang, Pekalongan, Kendal, Kudus, Karanganyar, Temanggung, Jepara, Semarang, Tegal, Sukoharjo, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan,

- b. Pemetaan prioritas wilayah pada indikator meningkatkan kualitas permukiman dan agraria bagi masyarakat didapat dari persandingan indikator Persentase Penduduk Miskin dan Persentase Rumah Tangga dengan akses Terhadap Hunian yang Layak terjangkau dan berkelanjutan yang menghasilkan 4 kuadran wilayah. Hasil persandingan indikator dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.11 berikut:



Sumber: BPS dan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, 2024 diolah

Gambar 3.11
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kualitas Permukiman dan Agraria Bagi Masyarakat

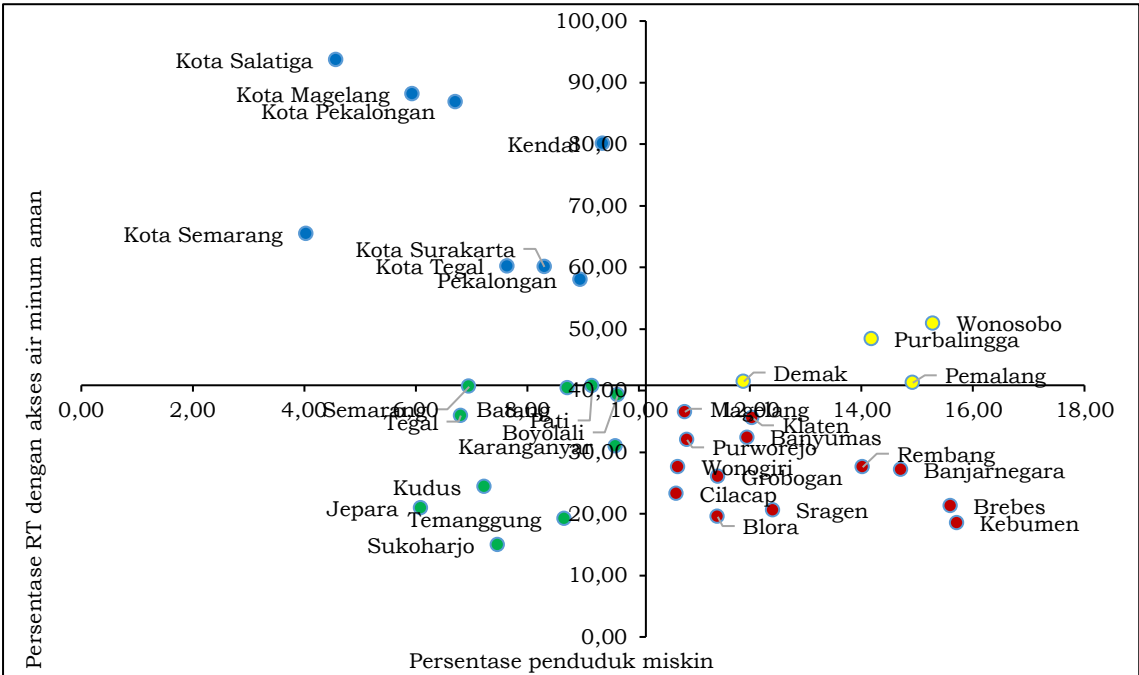
Berdasarkan Gambar 3.11, prioritas wilayah dikelompokkan berdasarkan kuadran dalam bentuk tabulasi, sebagaimana Tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kualitas Permukiman dan Agraria Bagi Masyarakat

Prioritas 1 (13 kabupaten)	:	Kebumen, Wonosobo, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Rembang, Demak, Grobogan, Purworejo, Blora, Brebes, Banyumas dan Wonogiri
Prioritas 2 (4 kabupaten)	:	Magelang, Klaten, Sragen dan Cilacap
Prioritas 3 (6 kabupaten/kota)	:	Semarang, Boyolali, Pekalongan, Batang, Kota Salatiga dan Kota Tegal

Prioritas 4 (12 kabupaten/kota)	:	Pati, Karanganyar, Kendal, Temanggung, Kudus, Sukoharjo, Jepara, Tegal, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Semarang
-------------------------------------	---	--

- c. Pemetaan prioritas wilayah pada indikator meningkatkan pelayanan kebinamargaan dan keciptakaryaannya didapat dari persandingan indikator Persentase Penduduk Miskin dan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman yang menghasilkan 4 kuadran wilayah. Hasil persandingan indikator dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.12 berikut:



Sumber: BPS dan DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah, 2024 diolah

Gambar 3.12
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Pelayanan Kebinamargaan dan Keciptakaryaannya

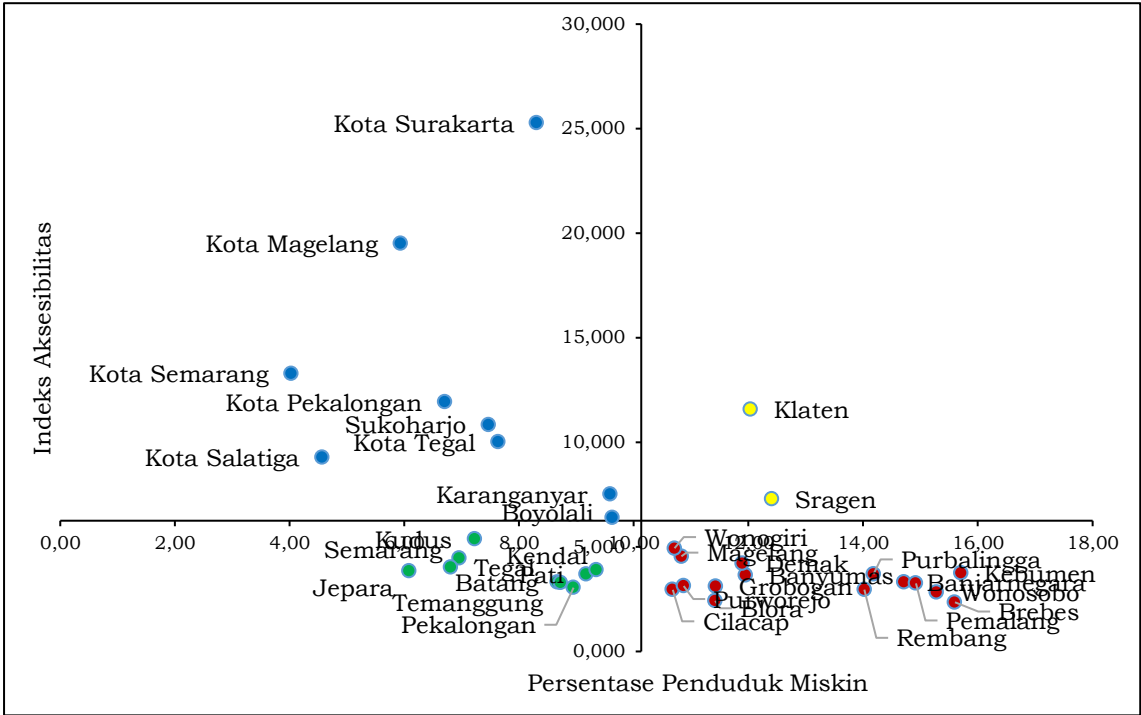
Berdasarkan Gambar 3.12, prioritas wilayah dikelompokkan berdasarkan kuadran dalam bentuk tabulasi, sebagaimana Tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Pelayanan Kebinamargaan dan Keciptakaryaannya

Prioritas 1 (13 kabupaten)	:	Kebumen, Brebes, Banjarnegara, Rembang, Magelang, Klaten, Banyumas, Purworejo, Wonogiri, Grobogan, Cilacap, Sragen dan Blora
Prioritas 2 (4 kabupaten)	:	Pemalang, Wonosobo, Purbalingga dan Demak
Prioritas 3 (10 kabupaten)	:	Karanganyar, Boyolali, Pati, Batang, Semarang, Tegal, Kudus, Jepara, Temanggung dan Sukoharjo

Prioritas 4 (8 kabupaten/kota)	: Pekalongan, Kendal, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Semarang
-----------------------------------	---

- d. Pemetaan prioritas wilayah pada indikator meningkatkan kualitas layanan transportasi didapat dari persandingan indikator Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Aksesibilitas yang menghasilkan 4 kuadran wilayah. Hasil persandingan indikator dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.13 berikut:



Sumber: BPS dan Dishub Provinsi Jawa Tengah, 2024 diolah

Gambar 3.13
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi

Berdasarkan Gambar 3.13, prioritas wilayah dikelompokkan berdasarkan kuadran dalam bentuk tabulasi, sebagaimana Tabel 3.15 berikut:

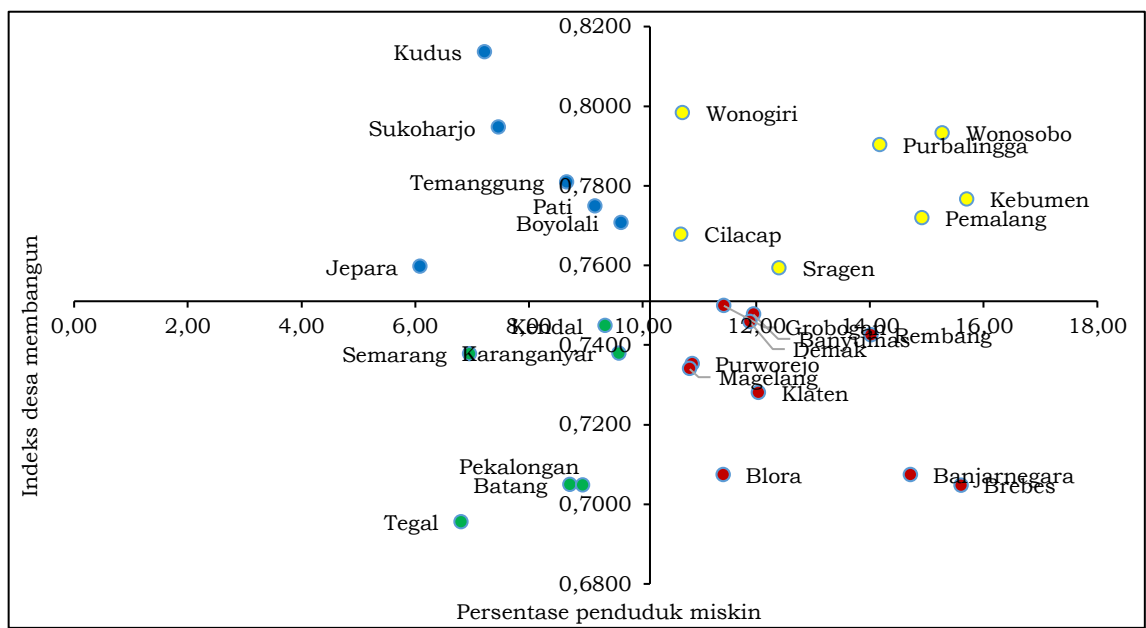
Tabel 3.15
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi

Prioritas 1 (15 kabupaten)	: Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Rembang, Purbalingga, Cilacap, Blora, Purworejo, Grobogan, Banyumas, Demak, Magelang dan Wonogiri
Prioritas 2 (2 kabupaten)	: Klaten dan Sragen
Prioritas 3 (9 kabupaten)	: Pekalongan, Temanggung, Batang, Pati, Tegal, Kendal, Kudus, Semarang dan Jepara

Prioritas 4 (9 kabupaten/kota)	: Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Surakarta
-----------------------------------	---

6. Meningkatkan Peran Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pemetaan prioritas wilayah pada indikator meningkatkan peran desa dalam penanggulangan kemiskinan didapat dari persandingan indikator Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Desa Membangun yang menghasilkan 4 kuadran wilayah. Hasil persandingan indikator dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.14 berikut:



Sumber: BPS dan Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024 diolah

Gambar 3.14
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Peran Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan

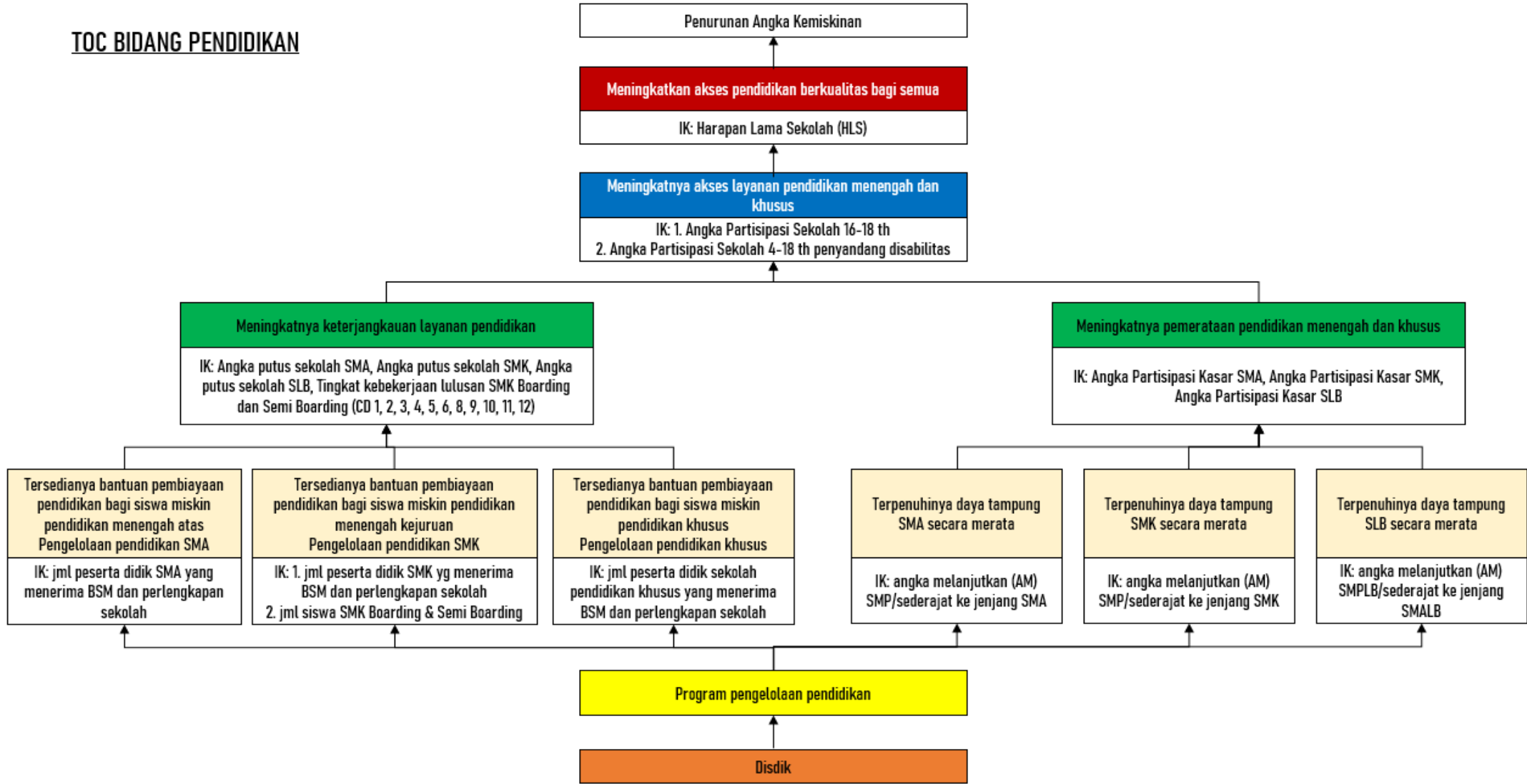
Berdasarkan Gambar 3.14, prioritas wilayah dikelompokkan berdasarkan kuadran dalam bentuk tabulasi, sebagaimana tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.16
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Peran Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan

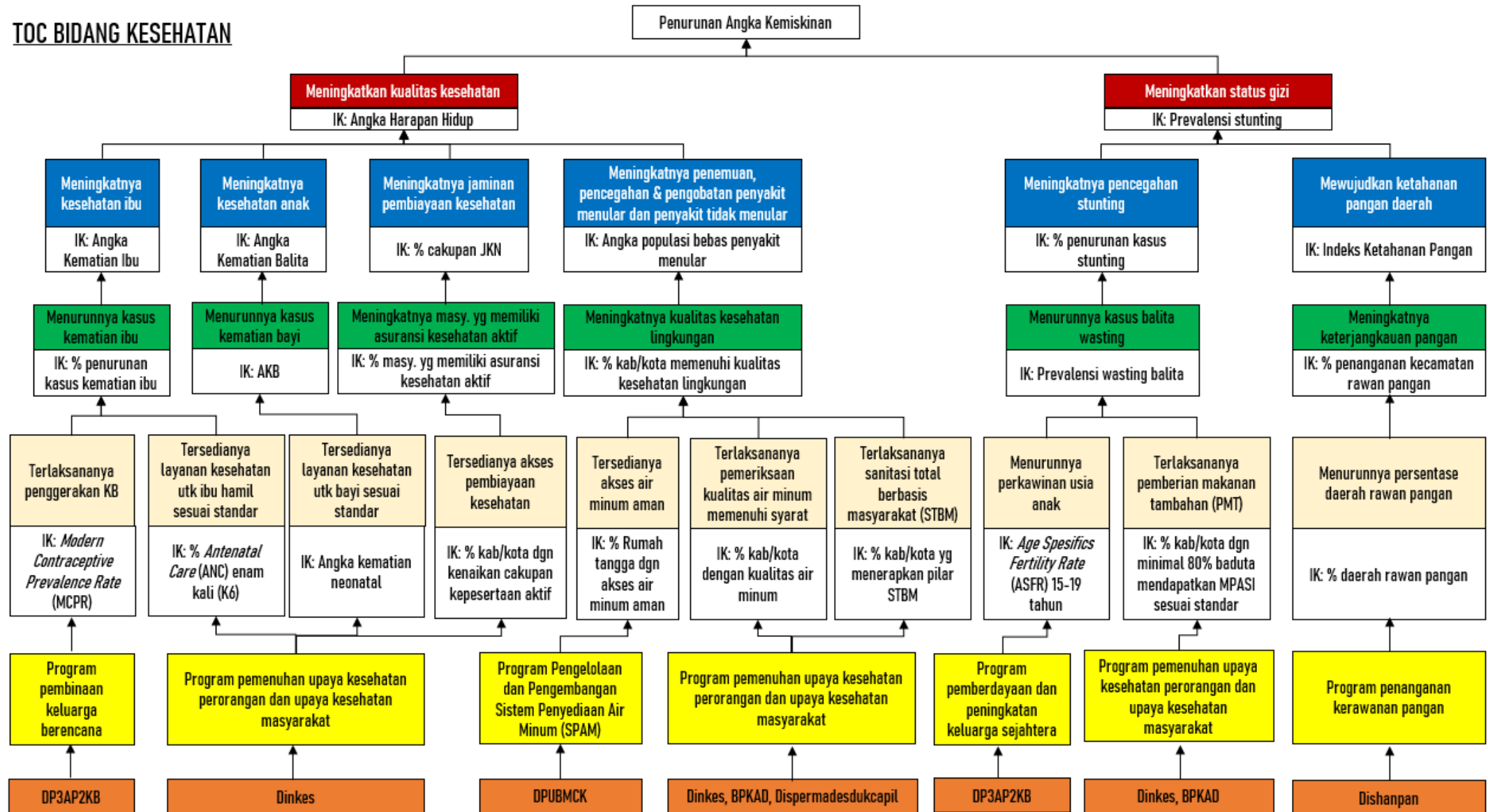
Prioritas 1 (10 kabupaten)	: Banjarnegara, Brebes, Rembang, Grobogan, Banyumas, Demak, Purworejo, Magelang, Klaten dan Blora
Prioritas 2 (7 kabupaten)	: Kebumen, Pemalang, Wonosobo, Purbalingga, Wonogiri, Cilacap dan Sragen
Prioritas 3 (6 kabupaten)	: Kendal, Karanganyar, Semarang, Pekalongan, Batang dan Tegal
Prioritas 4 (6 kabupaten)	: Boyolali, Pati, Temanggung, Sukoharjo, Kudus dan Jepara

I. *Theory of Change (ToC)*

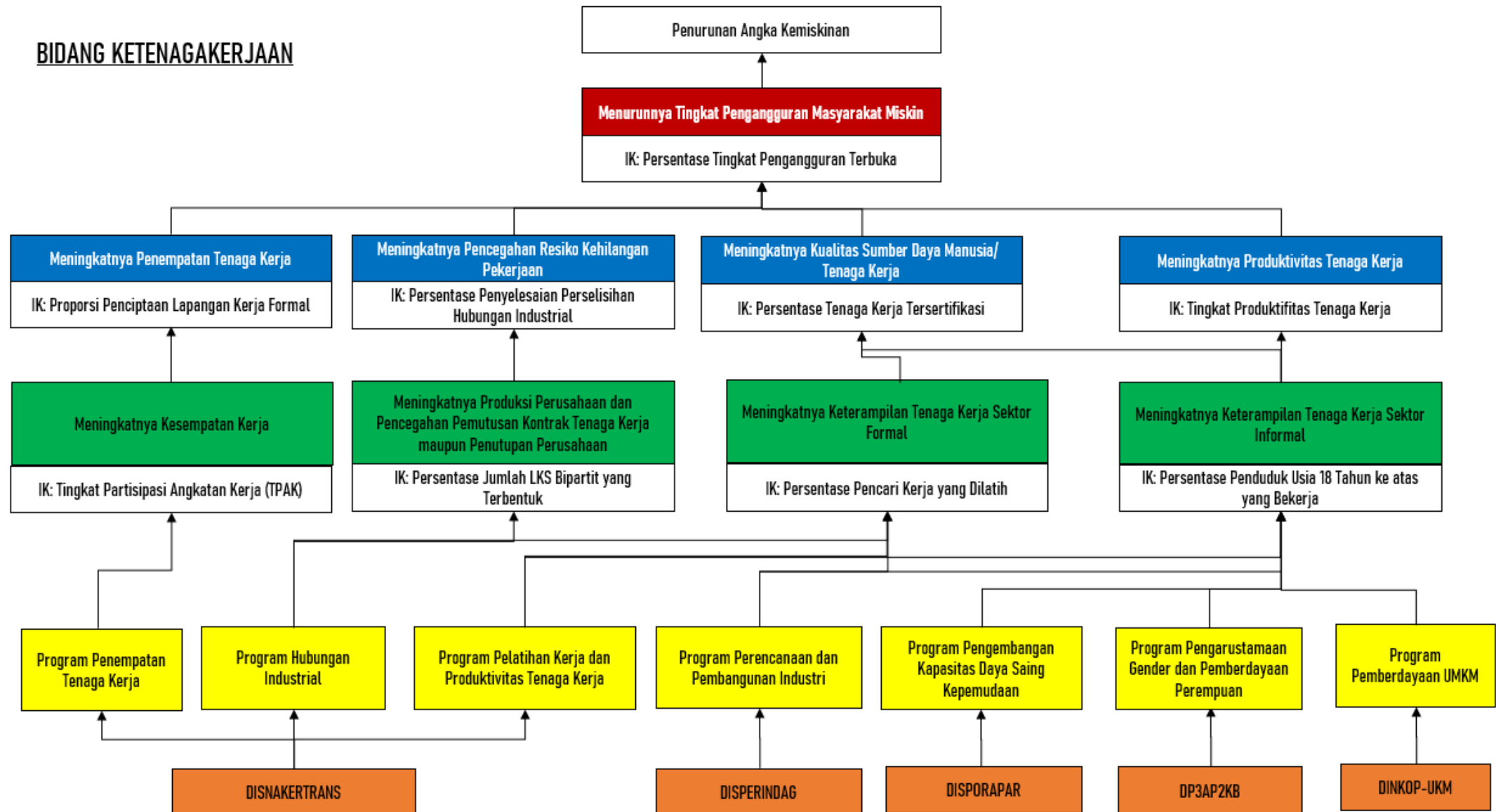
TOC BIDANG PENDIDIKAN



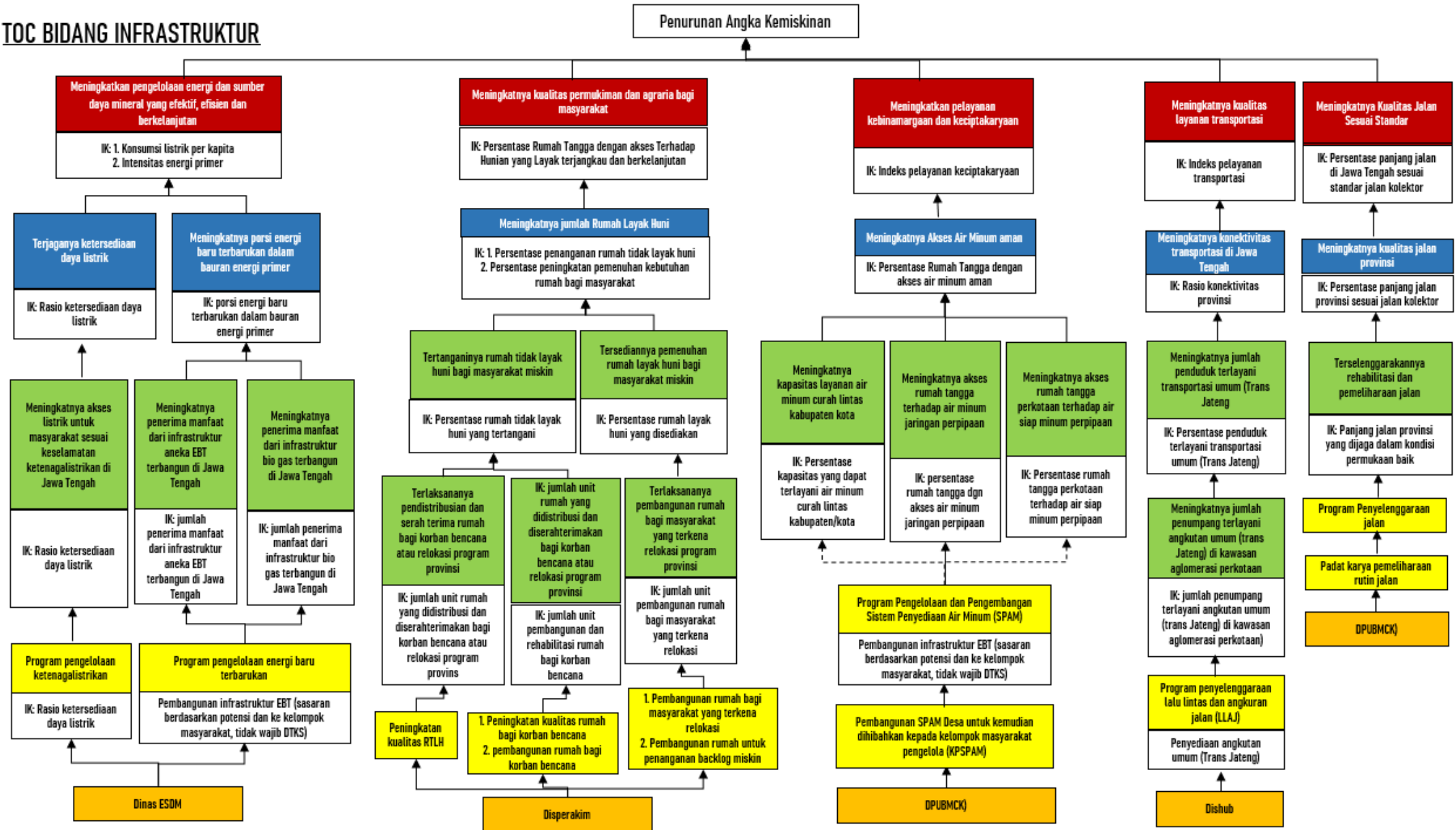
TOC BIDANG KESEHATAN



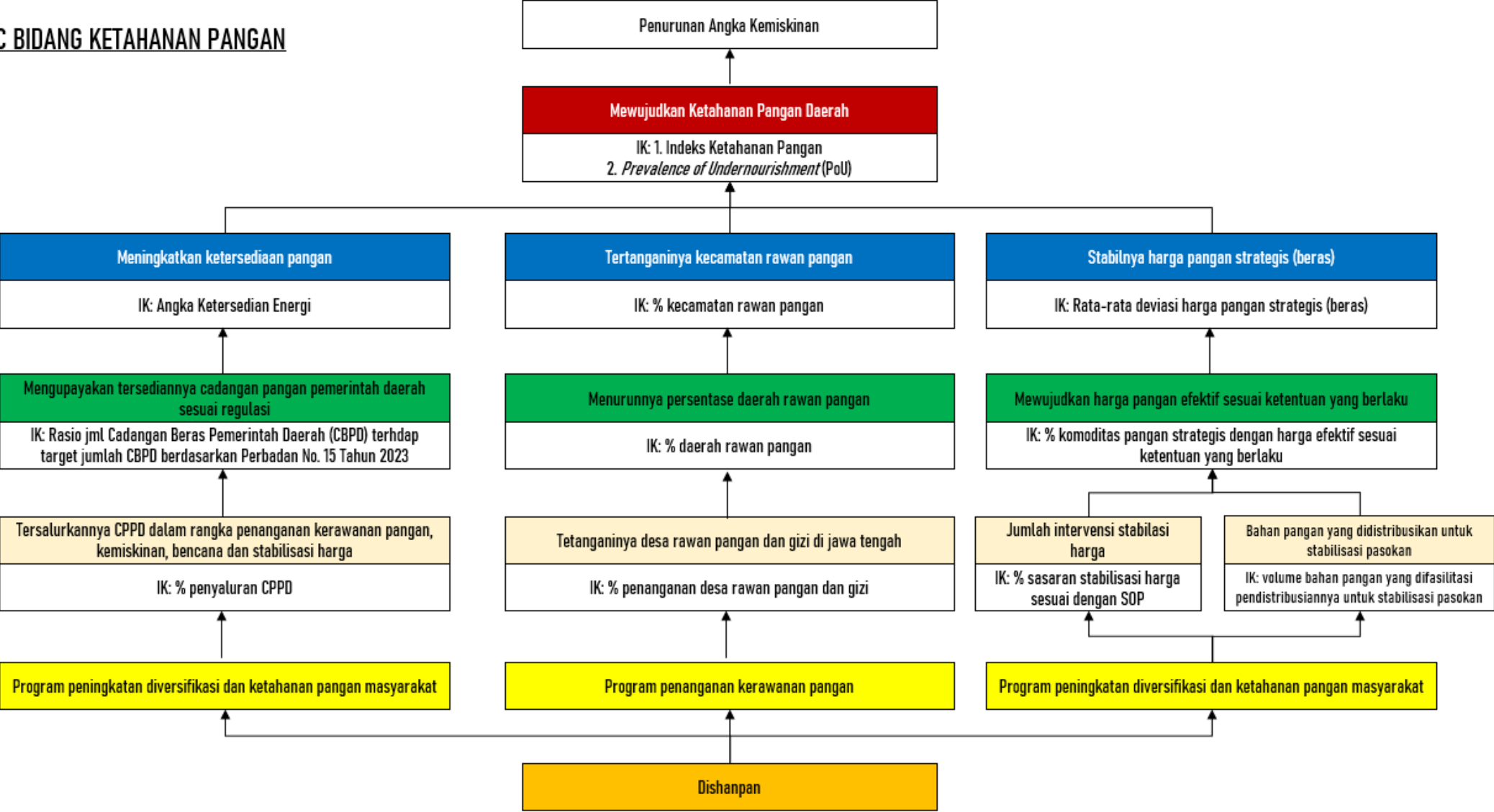
BIDANG KETENAGAKERJAAN



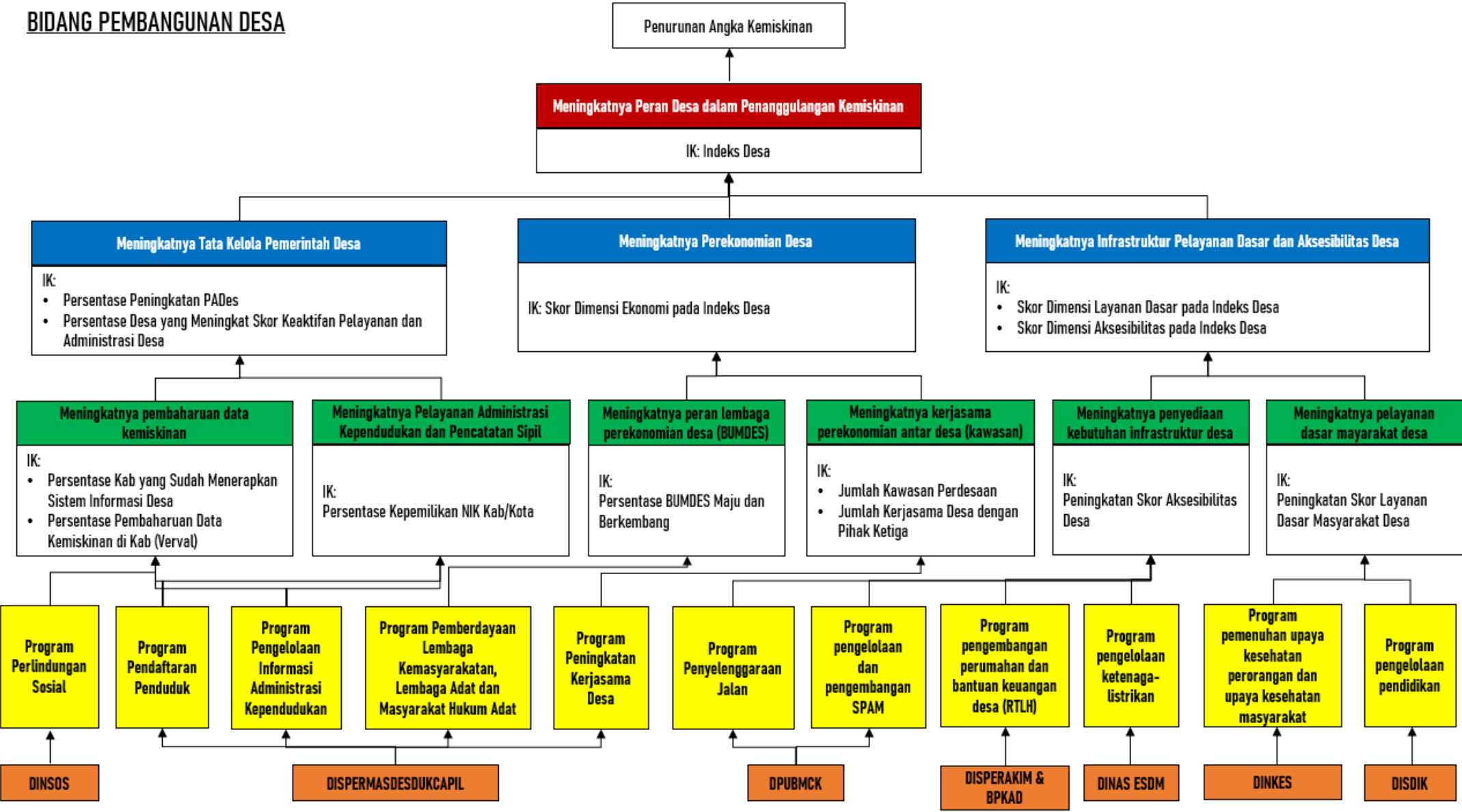
TOC BIDANG INFRASTRUKTUR



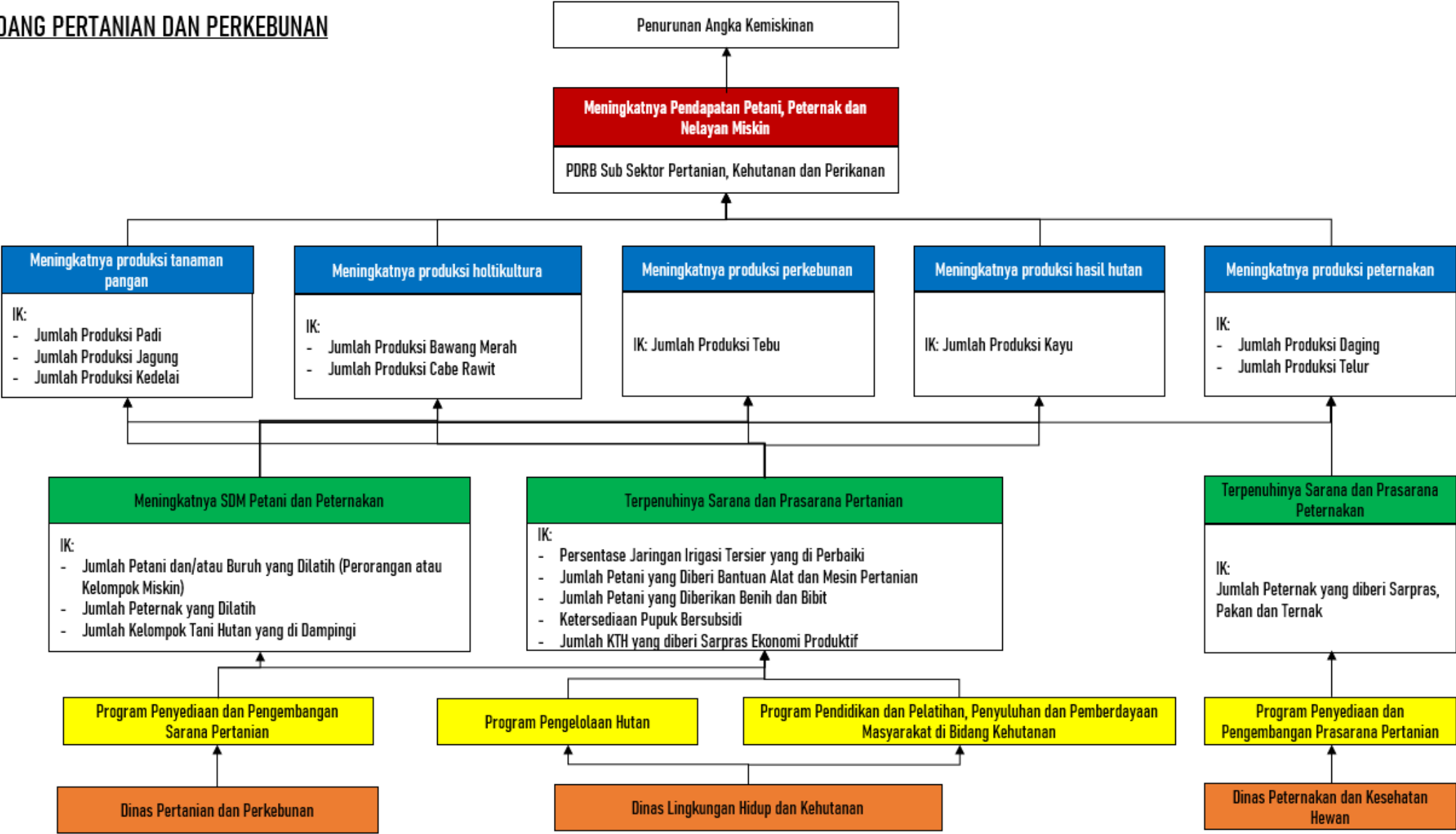
TOC BIDANG KETAHANAN PANGAN



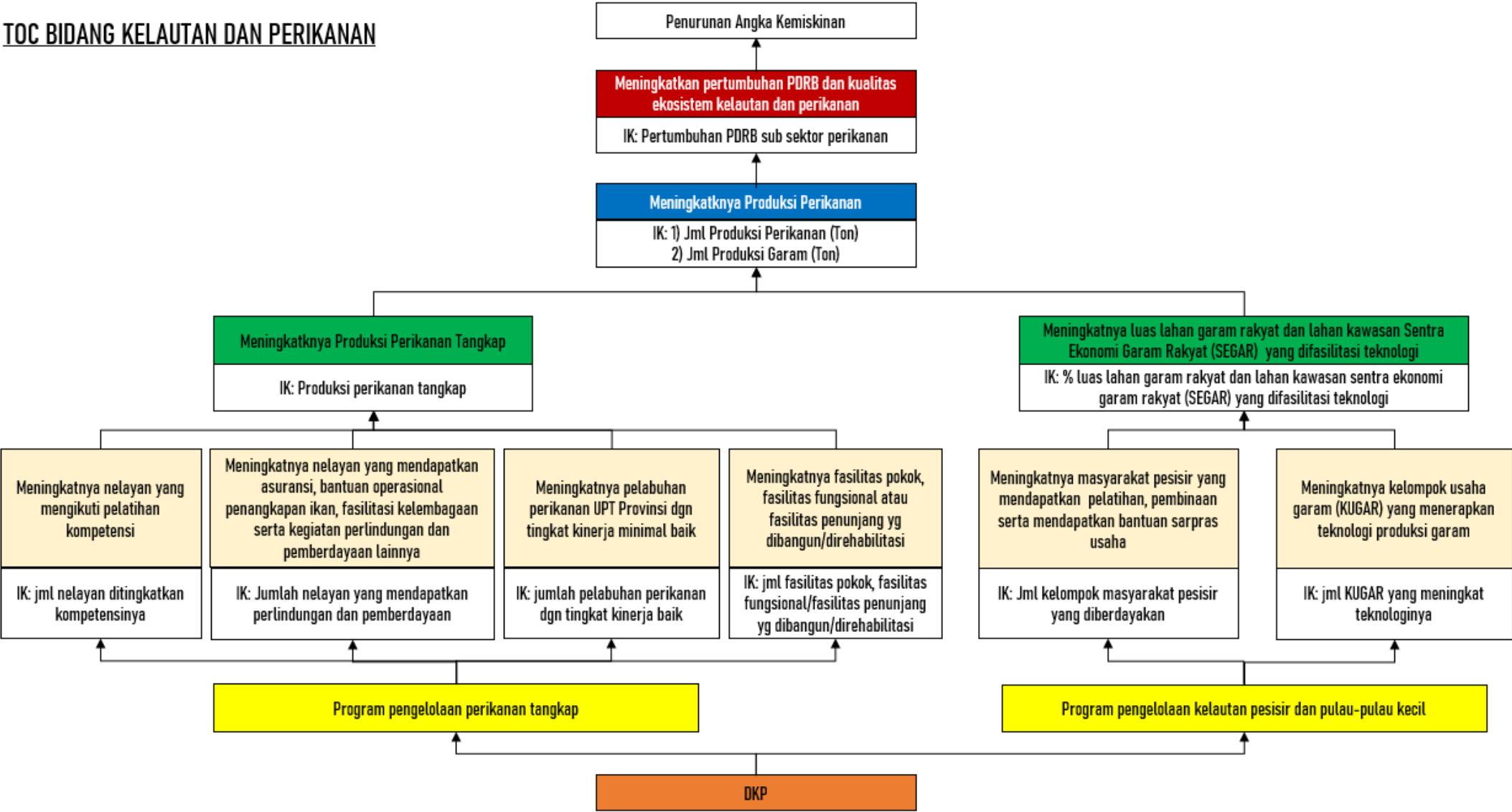
BIDANG PEMBANGUNAN DESA



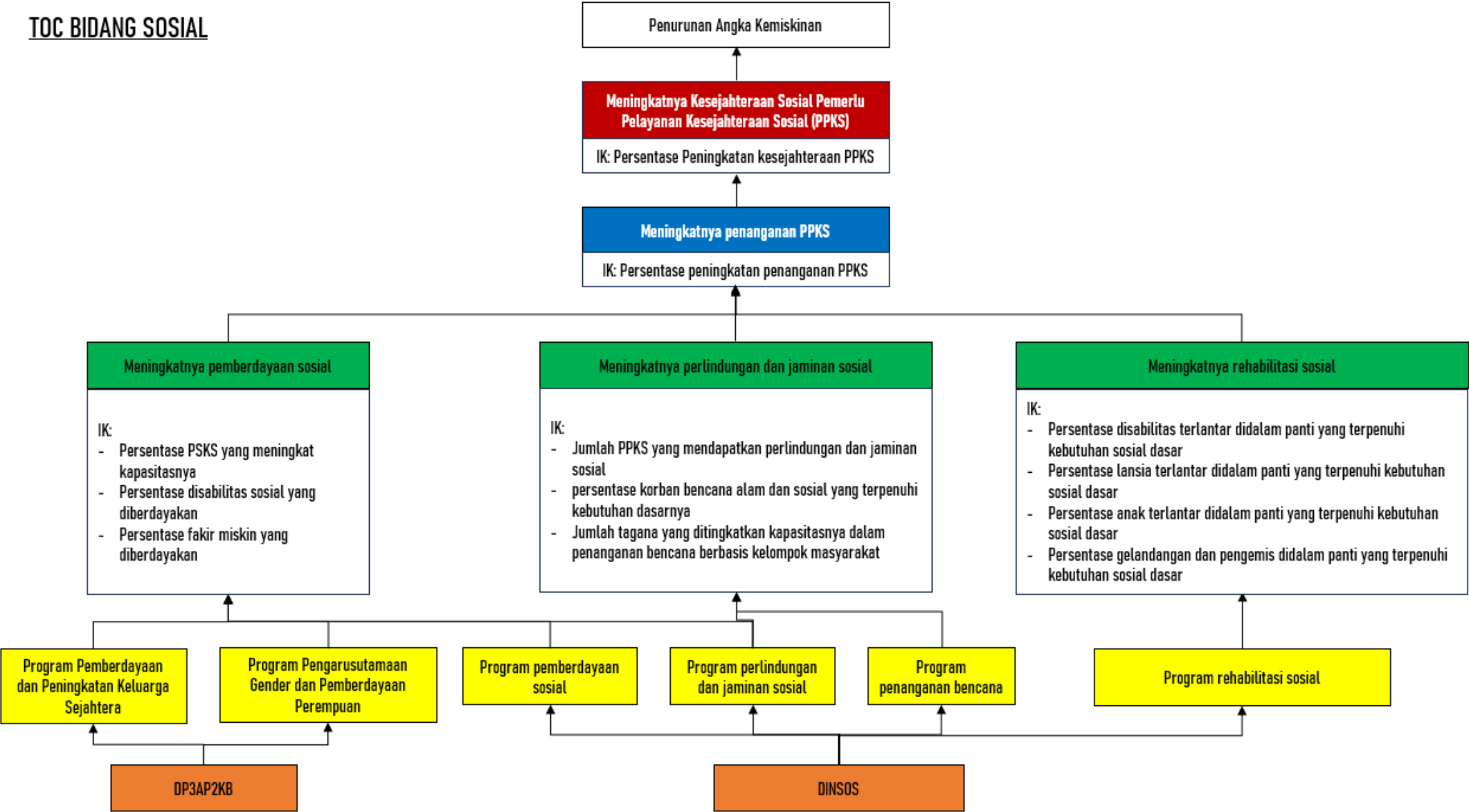
BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN



TOC BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN



TOC BIDANG SOSIAL



BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. REKAPITULASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Intervensi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh 19 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Intervensi tersebut dilaksanakan melalui 3 strategi utama yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Rekapitulasi Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem berdasarkan strategi utama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030, sebagaimana Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rekapitulasi Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Strategi Utama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030

Strategi Utama	Alokasi Anggaran (Rp)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	633.086.592.000	879.957.443.600	882.346.736.600	923.416.379.600	955.192.396.600	1.031.415.356.600
Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	54.766.808.000	79.528.009.150	79.834.862.720	85.345.208.630	98.361.465.750	107.096.612.600
Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	749.764.468.500	691.705.028.460	775.712.277.168	786.148.266.358	707.755.605.079	847.441.030.124
Total	1.437.617.868.500	1.651.190.481.210	1.737.893.876.488	1.794.909.854.588	1.761.309.467.429	1.985.952.999.324

Berdasarkan tabel 4.1, Selama periode 2025–2030, alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan secara bertahap, yang mencerminkan penguatan komitmen fiskal pemerintah dalam mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara terperinci rekapitulasi Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem berdasarkan 3 strategi utama dapat dikelompokkan dalam aktivitas riil yang meliputi aktivitas langsung, tidak langsung dan penunjang. Rekapitulasi Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem berdasarkan aktivitas riil sebagaimana Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Kelompok Aktivitas Langsung, Tidak Langsung dan Penunjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030

Aktivitas Riil	Alokasi Anggaran (Rp)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Langsung	971.807.289.000	1.288.019.970.210	1.288.532.995.488	1.318.707.284.588	1.331.082.342.429	1.399.630.977.324
Tidak Langsung	444.253.757.500	334.399.013.000	420.305.877.000	446.702.754.000	399.970.478.000	554.986.985.000
Penunjang	21.556.822.000	28.771.498.000	29.055.004.000	29.499.816.000	30.256.647.000	31.335.037.000
Total	1.437.617.868.500	1.651.190.481.210	1.737.893.876.488	1.794.909.854.588	1.761.309.467.429	1.985.952.999.324

- Keterangan
- Langsung : Aktivitas kegiatan yang diarahkan langsung bagi masyarakat miskin prioritas (Desil 1-3) berbasis data DTSEN yang terpadankan.
 - Tidak Langsung : Aktivitas kegiatan yang tidak secara langsung dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat namun berdampak pada penurunan kemiskinan. (Contoh: Pemberian modal pada BUMD untuk pemberdayaan masyarakat)
 - Penunjang : Kegiatan lain yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pada aktivitas riil langsung dan tidak langsung. (Contoh: Rapat dan Monev)

Secara rinci Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada Tabel 4.3.

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2025-2030

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas Rill			Alokasi Anggaran (Rp)						Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jmlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Asi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						12	13	14	15	16	17	18
1	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	ESDM - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	3.29.06.1.06.0006	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Instalasi sambungan listrik (secara gratis) sebesar 450 VA 2. Penerbitan sertifikasi layak operasi (SLO) 3. Registrasi ke PLN			61.250.000	65.000.000	325.000.000	520.000.000	455.000.000	780.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	- Kab. Jepara - Kab. Kudus - Kab. Pati	th. 2025 : 50 unit; th. 2026 : 50 unit; th. 2027 : 250 unit; th. 2028 : 400 unit; th. 2029 : 350 unit; th. 2030 : 600 unit	1.300.000 / unit/ KK	Barang	1 BMDA 1 X Pemberian Bantuan
2	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	ESDM - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	3.29.06.1.06.0006	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Instalasi sambungan listrik (secara gratis) sebesar 450 VA 2. Penerbitan sertifikasi layak operasi (SLO) 3. Registrasi ke PLN			122.500.000	130.000.000	390.000.000	845.000.000	910.000.000	1.040.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	- Kab. Rembang - Kab. Blora - Kab. Grobogan	th. 2025 : 100 unit; th. 2026 : 100 unit; th. 2027 : 250 unit; th. 2028 : 650 unit; th. 2029 : 700 unit; th. 2030 : 800 unit	1.300.000 / unit/ KK	Barang	1 BMDA 1 X Pemberian Bantuan
3	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	ESDM - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	3.29.06.1.06.0006	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Instalasi sambungan listrik (secara gratis) sebesar 450 VA 2. Penerbitan sertifikasi layak operasi (SLO) 3. Registrasi ke PLN			122.500.000	130.000.000	325.000.000	910.000.000	845.000.000	1.040.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	- Kab. Boyolali - Kab. Magelang	th. 2025 : 100 unit; th. 2026 : 100 unit; th. 2027 : 250 unit; th. 2028 : 700 unit; th. 2029 : 650 unit; th. 2030 : 800 unit	1.300.000 / unit/ KK	Barang	1 BMDA 1 X Pemberian Bantuan
4	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	ESDM - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang Demak	3.29.06.1.06.0006	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Instalasi sambungan listrik (secara gratis) sebesar 450 VA 2. Penerbitan sertifikasi layak operasi (SLO) 3. Registrasi ke PLN			61.250.000	195.000.000	390.000.000	650.000.000	715.000.000	975.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	- Kab. Demak - Kota Semarang	th. 2025 : 50 unit; th. 2026 : 100 unit; th. 2027 : 300 unit; th. 2028 : 500 unit; th. 2029 : 550 unit; th. 2030 : 750 unit	1.300.000 / unit/ KK	Barang	1 BMDA 1 X Pemberian Bantuan
5	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	ESDM - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	3.29.06.1.06.0006	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Instalasi sambungan listrik (secara gratis) sebesar 450 VA 2. Penerbitan sertifikasi layak operasi (SLO) 3. Registrasi ke PLN			122.500.000	130.000.000	260.000.000	520.000.000	780.000.000	910.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	- Kab. Wonosobo - Kab. Kebumen - Kab. Purworejo	th. 2025 : 100 unit; th. 2026 : 100 unit; th. 2027 : 250 unit; th. 2028 : 400 unit; th. 2029 : 600 unit; th. 2030 : 700 unit	1.300.000 / unit/ KK	Barang	1 BMDA 1 X Pemberian Bantuan
6	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	ESDM - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	3.29.06.1.06.0006	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Instalasi sambungan listrik (secara gratis) sebesar 450 VA 2. Penerbitan sertifikasi layak operasi (SLO) 3. Registrasi ke PLN			122.500.000	130.000.000	390.000.000	910.000.000	780.000.000	975.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	- Kab. Banjarnegara - Kab. Purbalingga	th. 2025 : 100 unit; th. 2026 : 100 unit; th. 2027 : 250 unit; th. 2028 : 700 unit; th. 2029 : 600 unit; th. 2030 : 750 unit	1.300.000 / unit/ KK	Barang	1 BMDA 1 X Pemberian Bantuan
7	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	ESDM - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	3.29.06.1.06.0006	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Instalasi sambungan listrik (secara gratis) sebesar 450 VA 2. Penerbitan sertifikasi layak operasi (SLO) 3. Registrasi ke PLN			183.750.000	130.000.000	357.500.000	520.000.000	715.000.000	975.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	- Kab. Pekalongan - Kab. Batang - Kota Pekalongan - Kab. Sukoharjo	th. 2025 : 150 unit; th. 2026 : 100 unit; th. 2027 : 275 unit; th. 2028 : 400 unit; th. 2029 : 550 unit; th. 2030 : 750 unit	1.300.000 / unit/ KK	Barang	1 BMDA 1 X Pemberian Bantuan
8	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	ESDM - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	3.29.06.1.06.0006	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Instalasi sambungan listrik (secara gratis) sebesar 450 VA 2. Penerbitan sertifikasi layak operasi (SLO) 3. Registrasi ke PLN			122.500.000	130.000.000	292.500.000	650.000.000	780.000.000	1.040.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	- Kab. Banyumas - Kab. Cilacap	th. 2025 : 100 unit; th. 2026 : 100 unit; th. 2027 : 225 unit; th. 2028 : 500 unit; th. 2029 : 600 unit; th. 2030 : 800 unit	1.300.000 / unit/ KK	Barang	1 BMDA 1 X Pemberian Bantuan
9	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	ESDM - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	3.29.06.1.06.0006	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Instalasi sambungan listrik (secara gratis) sebesar 450 VA 2. Penerbitan sertifikasi layak operasi (SLO) 3. Registrasi ke PLN			122.500.000	130.000.000	260.000.000	520.000.000	910.000.000	1.040.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	- Kab. Tegal - Kab. Brebes - Kab. Pemalang	th. 2025 : 100 unit; th. 2026 : 100 unit; th. 2027 : 200 unit; th. 2028 : 400 unit; th. 2029 : 700 unit; th. 2030 : 800 unit	1.300.000 / unit/ KK	Barang	1 BMDA 1 X Pemberian Bantuan
10	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	ESDM - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	3.29.06.1.06.0006	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Instalasi sambungan listrik (secara gratis) sebesar 450 VA 2. Penerbitan sertifikasi layak operasi (SLO) 3. Registrasi ke PLN			183.750.000	195.000.000	260.000.000	455.000.000	390.000.000	715.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	- Kab. Sragen - Kab. Karanganyar - Kota Surakarta - Kab. Semarang - Kab. Temanggung - Kab. Wonogiri - Kab. Sukoharjo	th. 2025 : 150 unit; th. 2026 : 150 unit; th. 2027 : 200 unit; th. 2028 : 350 unit; th. 2029 : 300 unit; th. 2030 : 550 unit	1.300.000 / unit/ KK	Barang	1 BMDA 1 X Pemberian Bantuan
11	Meminimalisir wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas ESDM	3.29.05.1.05.0008	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Pemberian hibah infrastruktur EBT untuk masyarakat (penyediaan Biomassa dan/atau Biogas)			984.000.000	902.000.000	860.000.000	1.740.000.000	2.474.000.000	3.048.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Provinsi Jawa Tengah	th. 2025 : 24 Unit; th. 2026 : 25 Unit; th. 2027 : 25 Unit; th. 2028 : 56 Unit; th. 2029 : 86 Unit; th. 2030 : 110 Unit	Kapasitas: 6 m3 = Rp. 18.000.000, 10 m3 = Rp. 40.000.000, 20 m3 = Rp. 60.000.000	Barang	1 Kelompok Masyarakat 1 kali pemberian bantuan
12	Meminimalisir wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.03.1.01.0014	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Pembangunan Sarpras SPAM Perdesaan dan Desalinasi Air untuk kemudian dibagikan kepada Kelompok Masyarakat Pengelola SPAM Perdesaan (KPSDAMS)			15.128.171.000	3.800.000.000	9.300.000.000	12.600.000.000	15.900.000	15.900.000	APBD	Tidak berkelanjutan	belum ditentukan	th. 2025 : 30 SPAM desa, 3 desalinasi ; th. 2026 : 10 Lokasi; th. 2027 : 18 Lokasi; th. 2028 : 24 Lokasi; th. 2029 : 30 Lokasi; th. 2030 : 30 Lokasi	SPAM Desa @ 500.000.000,- Desalinasi Air @ 300.000.000,-	bantuan barang (hibah fisik SPAM)	1 kali pemberian bantuan
13	Meminimalisir wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	10.1.01.0045	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	Uph Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BRI Wilayah Semarang			2.591.988.000	3.540.461.400,0	3.752.889.084,0	3.978.062.429,0	4.216.746.174,8	4.469.750.945	APBD Prov Jateng	Berkelanjutan	Rias Jalan Provinsi (Kab Semarang, Kota Semarang, Kab.Batang, Kab Demak, Kab Kendal,	th. 2025 : 76 Orang; th. 2026 : 102 Orang; th. 2027 : 102 Orang; th. 2028 : 102 Orang; th. 2029 : 102 Orang; th. 2030 : 102 Orang	Uph berdasarkan UMK	Uang (Uph Pekerja)	1 Tahun
14	Meminimalisir wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	10.1.01.0045	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	Uph Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BRI Wilayah Pati			2.144.975.000	2.252.223.750	2.387.357.175	2.530.598.606	2.682.434.522	2.843.380.593	APBD Prov Jateng	Berkelanjutan	Rias Jalan Provinsi (Kab Jepara, Kudus,Pati, Rembang)	th. 2025 : 72 Orang; th. 2026 : 72 Orang; th. 2027 : 72 Orang; th. 2028 : 72 Orang; th. 2029 : 72 Orang; th. 2030 : 72 Orang	Uph berdasarkan UMK	Uang (Uph Pekerja)	1 Tahun
15	Meminimalisir wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	10.1.01.0045	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	Uph Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BRI Wilayah Ponorogo			1.894.392.000	1.989.111.600	2.108.458.296	2.234.965.794	2.369.063.741	2.511.207.566	APBD Prov Jateng	Berkelanjutan	Rias Jalan Provinsi (Kab Blora, Grobogan,Sragen)	th. 2025 : 72 Orang; th. 2026 : 72 Orang; th. 2027 : 72 Orang; th. 2028 : 72 Orang; th. 2029 : 72 Orang; th. 2030 : 72 Orang	Uph berdasarkan UMK	Uang (Uph Pekerja)	1 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Strategi OP/PP/KE		Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas RIII			Alokasi Anggaran (Rp)						Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Asal Pemberian Bantuan
No	2	3	4	5	6	7	Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029	2030	12	13	14	15	16	17	18
16	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	10.1.01.0045	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (PORKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BRU Wilayah Surakarta			2.858.402.000	3.001.322.100	3.181.401.426	3.372.285.512	3.574.622.642	3.789.100.001	APBD Prov Jateng	Berkelanjutan	Ruas Jalan Provinsi (Kota Surakarta, Kab Sukoharjo, Wonogiri, Boyolali, Karanganyar, Klaten)	th. 2025 : 112 Orang; th. 2026 : 112 Orang; th. 2027 : 112 Orang; th. 2028 : 112 Orang; th. 2029 : 112 Orang; th. 2030 : 112 Orang	Upah berdasarkan UMK	Uang (Upah Pekerja)	1 Tahun
17	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	10.1.01.0045	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (PORKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BRU Wilayah Magelang			2.748.400.000	2.885.820.000	3.058.969.200	3.242.507.352	3.437.057.793	3.643.281.261	APBD Prov Jateng	Berkelanjutan	Ruas Jalan Provinsi (Kab Magelang, Purworejo, Kebumeh)	th. 2025 : 94 Orang; th. 2026 : 94 Orang; th. 2027 : 94 Orang; th. 2028 : 94 Orang; th. 2029 : 94 Orang; th. 2030 : 94 Orang	Upah berdasarkan UMK	Uang (Upah Pekerja)	1 Tahun
18	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	10.1.01.0045	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (PORKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BRU Wilayah Wonosobo			2.336.400.000	2.453.220.000	2.600.413.200	2.756.437.992	2.921.824.272	3.097.133.728	APBD Prov Jateng	Berkelanjutan	Ruas Jalan Provinsi (Kab Wonosobo, Banjarnegara, Temanggung)	th. 2025 : 81 Orang; th. 2026 : 81 Orang; th. 2027 : 81 Orang; th. 2028 : 81 Orang; th. 2029 : 81 Orang; th. 2030 : 81 Orang	Upah berdasarkan UMK	Uang (Upah Pekerja)	1 Tahun
19	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	10.1.01.0045	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (PORKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BRU Wilayah Cilacap			2.408.275.000	1.407.358.050	1.491.799.533	1.581.307.505	1.676.185.955	1.776.757.113	APBD Prov Jateng	Berkelanjutan	Ruas Jalan Provinsi (Kab Cilacap, Purwokerto, Purbalingga)	th. 2025 : 80 Orang; th. 2026 : 80 Orang; th. 2027 : 80 Orang; th. 2028 : 80 Orang; th. 2029 : 80 Orang; th. 2030 : 80 Orang	Upah berdasarkan UMK	Uang (Upah Pekerja)	1 Tahun
20	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	10.1.01.0045	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (PORKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BRU Wilayah Tegal			1.688.850.000	3.683.998.500	3.905.038.410	4.139.340.715	4.387.701.157	4.650.963.227	APBD Prov Jateng	Berkelanjutan	Ruas Jalan Provinsi (Kab Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan)	th. 2025 : 66 Orang; th. 2026 : 124 Orang; th. 2027 : 124 Orang; th. 2028 : 124 Orang; th. 2029 : 124 Orang; th. 2030 : 124 Orang	Upah berdasarkan UMK	Uang (Upah Pekerja)	1 Tahun
21	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	10.1.01.0045	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (PORKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BRU Wilayah Sukoharjo			2.599.600.000	-	-	-	-	-	APBD Prov Jateng	Berkelanjutan	Ruas Jalan Provinsi Kab. Pemalang, Kab Pekalongan, Kab Batang	th. 2025 : 83 Orang; th. 2026 : 124 Orang; th. 2027 : 124 Orang; th. 2028 : 124 Orang; th. 2029 : 124 Orang; th. 2030 : 124 Orang	Upah berdasarkan UMK	Uang (Upah Pekerja)	2 Tahun
22	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.10.1.01.0057	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (PORKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BRU Wilayah Semarang			488.756.000,00	581.481.360	616.370.242	653.352.456	692.553.603	734.106.820	APBD Prov Jateng	Berkelanjutan	Ruas Jalan Provinsi (Kab Semarang, Kota Semarang, Kab Batang, Kab Demak, Kab Kendal,	th. 2025 : 14 Orang; th. 2026 : 16 Orang; th. 2027 : 16 Orang; th. 2028 : 16 Orang; th. 2029 : 16 Orang; th. 2030 : 16 Orang	Upah berdasarkan UMK	Uang (Upah Pekerja)	1 Tahun
23	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.10.1.01.0057	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (PORKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BRU Wilayah Pati			261.620.000,00	277.317.200	293.956.232	311.593.606	330.289.222	350.106.576	APBD Prov Jateng	Berkelanjutan	Ruas Jalan Provinsi (Kab Jepara, Kudus, Pati, Rembang)	th. 2025 : 9 Orang; th. 2026 : 9 Orang; th. 2027 : 9 Orang; th. 2028 : 9 Orang; th. 2029 : 9 Orang; th. 2030 : 9 Orang	Upah berdasarkan UMK	Uang (Upah Pekerja)	1 Tahun
24	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.10.1.01.0057	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (PORKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BRU Wilayah Damar			316.277.000,00	335.253.620	355.368.837	376.690.967	399.292.425	423.249.971	APBD Prov Jateng	Berkelanjutan	Ruas Jalan Provinsi (Kab Blora, Grobogan, Sragen)	th. 2025 : 12 Orang; th. 2026 : 12 Orang; th. 2027 : 12 Orang; th. 2028 : 12 Orang; th. 2029 : 12 Orang; th. 2030 : 12 Orang	Upah berdasarkan UMK	Uang (Upah Pekerja)	1 Tahun
25	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.10.1.01.0057	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (PORKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BRU Wilayah Surakarta			347.660.000,00	368.519.600	390.630.776	414.068.623	438.912.740	465.247.504	APBD Prov Jateng	Berkelanjutan	Ruas Jalan Provinsi (Kota Surakarta, Kab Sukoharjo, Wonogiri, Boyolali, Karanganyar, Klaten)	th. 2025 : 11 Orang; th. 2026 : 11 Orang; th. 2027 : 11 Orang; th. 2028 : 11 Orang; th. 2029 : 11 Orang; th. 2030 : 11 Orang	Upah berdasarkan UMK	Uang (Upah Pekerja)	1 Tahun
26	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.10.1.01.0057	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (PORKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BRU Wilayah Magelang			494.100.000,00	523.746.000	555.170.760	588.481.006	623.789.866	661.217.258	APBD Prov Jateng	Berkelanjutan	Ruas Jalan Provinsi (Kab Magelang, Purworejo, Kebumeh)	th. 2025 : 17 Orang; th. 2026 : 17 Orang; th. 2027 : 17 Orang; th. 2028 : 17 Orang; th. 2029 : 17 Orang; th. 2030 : 17 Orang	Upah berdasarkan UMK	Uang (Upah Pekerja)	1 Tahun
27	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.10.1.01.0057	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (PORKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BRU Wilayah Wonosobo			176.900.000,00	187.514.000	198.764.840	210.690.730	223.332.174	236.732.105	APBD Prov Jateng	Berkelanjutan	Ruas Jalan Provinsi (Kab Wonosobo, Banjarnegara, Temanggung)	th. 2025 : 6 Orang; th. 2026 : 6 Orang; th. 2027 : 6 Orang; th. 2028 : 6 Orang; th. 2029 : 6 Orang; th. 2030 : 6 Orang	Upah berdasarkan UMK	Uang (Upah Pekerja)	1 Tahun
28	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.10.1.01.0057	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (PORKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BRU Wilayah Cilacap			184.438.000,00	195.504.280	207.234.537	219.668.609	232.848.726	246.819.649	APBD Prov Jateng	Berkelanjutan	Ruas Jalan Provinsi (Kab Cilacap, Purwokerto, Purbalingga)	th. 2025 : 6 Orang; th. 2026 : 6 Orang; th. 2027 : 6 Orang; th. 2028 : 6 Orang; th. 2029 : 6 Orang; th. 2030 : 6 Orang	Upah berdasarkan UMK	Uang (Upah Pekerja)	1 Tahun
29	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.10.1.01.0057	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (PORKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BRU Wilayah Tegal			157.950.000,00	294.227.000	311.880.620	330.593.457	350.429.065	371.454.809	APBD Prov Jateng	Berkelanjutan	Ruas Jalan Provinsi (Kab Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan)	th. 2025 : 6 Orang; th. 2026 : 10 Orang; th. 2027 : 10 Orang; th. 2028 : 10 Orang; th. 2029 : 10 Orang; th. 2030 : 10 Orang	Upah berdasarkan UMK	Uang (Upah Pekerja)	1 Tahun
30	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.10.1.01.0026	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (PORKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BRU Wilayah Pekalongan			190.200.000	-	-	-	-	-	APBD Prov Jateng	Berkelanjutan	Ruas Jalan Provinsi Kab. Pemalang, Kab Pekalongan, Kab Batang	th. 2025 : 6 Orang; th. 2026 : 6 Orang; th. 2027 : 6 Orang; th. 2028 : 6 Orang; th. 2029 : 6 Orang; th. 2030 : 6 Orang	Upah berdasarkan UMK	Uang (Upah Pekerja)	2 Tahun
31	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.08.1.01.0019	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	th. 2025 : 0 ; th. 2026 : 0 ; th. 2027 : 0 ; th. 2028 : 0 ; th. 2029 : 0 ; th. 2030 : 0	-	-	-
32	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.03.1.01.0017	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Regional Wosokosok Tahap I melalui Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) (Solo Raya)			10.000.000.000	1.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	30.000.000.000,0	30.000.000.000	APBD Prov Jateng		Solo Raya	th. 2025 : 2 (liter/detik); th. 2026 : 2 (liter/detik); th. 2027 : 25 (liter/detik); th. 2028 : 25 (liter/detik); th. 2029 : 37,5 (liter/detik); th. 2030 : 37,5 (liter/detik)			
33	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.03.1.01.0025	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Inisiasi Pembangunan SPAM Regional Maslancip melalui penyiapan readiness criteria (RC) (Banjumas Raya) -> Penyusunan DED SPAM Regional Maslancip												th. 2025 : dokumen; th. 2026 : dokumen; th. 2027 : dokumen; th. 2028 : dokumen; th. 2029 : dokumen; th. 2030 : dokumen			
34	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.03.1.01.0025	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Inisiasi Pembangunan SPAM Regional Randagunting melalui penyiapan readiness criteria (RC) (Pati Raya)							30.000.000.000	APBD Prov Jateng		th. 2030 : Pati raya	th. 2025 : dokumen atau liter/detik; th. 2026 : dokumen atau liter/detik; th. 2027 : dokumen atau liter/detik; th. 2028 : dokumen atau liter/detik; th. 2029 : dokumen atau liter/detik; th. 2030 : 37,5 dokumen atau liter/detik				
35	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.03.1.01.0025	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Inisiasi Pembangunan SPAM Regional Randagunting melalui penyiapan readiness criteria (RC) (Pati Raya)												th. 2025 : dokumen; th. 2026 : dokumen; th. 2027 : dokumen; th. 2028 : dokumen; th. 2029 : dokumen; th. 2030 : dokumen			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi OPKPKKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas RUII			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jmlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Asai Pemberian Bantuan	
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18	
36	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.03.1.01.0017	Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		Perluasan SPAM Regional Koberjo melalui Pembangunan JDU (Kedu Raya)						8.000.000.000	8.000.000.000	APBD Prov Jateng	th 2029, 2030 : Kebumen dan Purworejo	th 2025 : liter/detik; th. 2026 : liter/detik; th. 2027 : liter/detik; th. 2028 : liter/detik; th. 2029 : 10 liter/detik; th. 2030 : 10 liter/detik				
37	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.03.1.01.0017	Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		Perluasan SPAM Regional Pranglung melalui Pembangunan JDU (Pekalongan Raya)						10.000.000.000		APBD Prov Jateng	th 2030 : Pekalongan raya	th 2025 : liter/detik; th. 2026 : liter/detik; th. 2027 : liter/detik; th. 2028 : liter/detik; th. 2029 : liter/detik; th. 2030 : 13 liter/detik				
38	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.03.1.01.0017	Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	57.300.000.000	Peningkatan dan Perluasan SPAM Regional Bregas melalui Pembangunan JDU		4.000.000.000				8.000.000.000	8.000.000.000	APBD Prov Jateng	th 2025, 2029, 2030 : Kah. Brebes, Kah. Tegal, Kota Tegal	th 2025 : liter/detik; th. 2026 : liter/detik; th. 2027 : liter/detik; th. 2028 : 5 liter/detik; th. 2029 : 10 liter/detik; th. 2030 : 10 liter/detik				
39	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas PUPR	1.03.03.1.01.0025	Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Inisiasi Pembangunan SPAM Regional Jragung melalui penyiptaan readiness criteria (RC) (Semarang Raya) -> Penyusunan FS SPAM Regional Jragung										th 2025 : dokumen; th. 2026 : dokumen; th. 2027 : dokumen; th. 2028 : dokumen; th. 2029 : dokumen; th. 2030 : dokumen				
40	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Dinas PUPR	103021010009	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Puntai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	1.427.540.000			8.350.000.000	4.000.000.000			5.000.000.000	0 APBD	tidak berkelanjutan	th 2025 : Kab/kota Pekalongan th 2026, 2029 : Kab. Kendal	th 2025 : 0,7 kilometer; th. 2026 : 1 kilometer; th. 2027 : 1 kilometer; th. 2028 : 0 kilometer; th. 2029 : 1 kilometer; th. 2030 : 0 kilometer	1 paket	barang/jasa	5 tahun	
41	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Dinas PUPR	103021010079	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Puntai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.395.132.000			0	0	0	0	0	0 APBD	tidak berkelanjutan	th 2025 : Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, kabupaten Kendal	th 2025 : 3,1 kilometer; th. 2026 : 0 kilometer; th. 2027 : 0 kilometer; th. 2028 : 0 kilometer; th. 2029 : 0 kilometer; th. 2030 : 0 kilometer	1 paket	barang/jasa	5 tahun	
42	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Dinas PUPR	103021010107	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Puntai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Teling Sungai	1.420.800.000			0	0	0	0	0	0 APBD	tidak berkelanjutan	th 2025 : Kah. Demak	th 2025 : 1 kilometer; th. 2026 : 0 kilometer; th. 2027 : 0 kilometer; th. 2028 : 0 kilometer; th. 2029 : 0 kilometer; th. 2030 : kilometer	1 paket	barang/jasa	5 tahun	
43	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Dinas PUPR	103021010127	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Puntai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai				10.000.000.000	90.000.000.000	100.000.000.000		0	100.000.000.000	APBD	tidak berkelanjutan	th 2026, 2027, 2028, 2030 : Kah. Demak	th 2025 : kilometer; th. 2026 : 1 kilometer; th. 2027 : 1 kilometer; th. 2028 : 1 kilometer; th. 2029 : 0 kilometer; th. 2030 : 1 kilometer	1 paket	barang/jasa	5 tahun
44	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Dinas PUPR	103021020032	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1490312000			0	0	775.000.000		0	0 APBD	tidak berkelanjutan	th 2025 : Kota Semarang th 2028 : Kab. Pati	th 2025 : 5 Paket; th. 2026 : 0 Paket; th. 2027 : 0 Paket; th. 2028 : 0 Paket; th. 2029 : 0 Paket; th. 2030 : Paket	1 paket	barang/jasa	5 tahun	
45	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Dinas PUPR	103021020014	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	60.739.069.000			14.681.476.000	0	0	0	0	0 APBD	tidak berkelanjutan	- th 2025 : Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kah. Brebes, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kah. Karanganyar, Kah. Kendal, Kah. KlATEN, Kah. Magelang, Kah. Pekalongan, Kah. Pemalang, Kah. Purbalinga, Kab. Purworejo, Kah. Semarang, Kah. Sragen, Kah. Sukoharjo, Kah. Tegal, Kab. Temanggung, Kah. Wonogiri - th 2026 : Kah. Demak, Kab. Purworejo, Kah. Tegal, Kah. Kendal- Kota Semarang, Kab. Semarang, Kah. Banyumas, Kah. Pemalang, Kah. Brebes, Kah. Temanggung, Kah. Rembang, Kah. Pati, Kah. Sragen, Kah. KlATEN, Kah. Boyolali	th 2025 : 13.351 kilometer; th. 2026 : 3.118 kilometer; th. 2027 : 0 kilometer; th. 2028 : 1 kilometer; th. 2029 : 0 kilometer; th. 2030 : 0 kilometer	1 paket	barang/jasa	5 tahun	
46	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Dinas PUPR	103021020021	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.308.671.500			910.000.000	956.000.000	1.005.000.000		1.056.000.000	1.109.000.000	APBD	tidak berkelanjutan	Kah. Demak, Kah. Grobogan, Kah. Pati	th 2025 : 7.985 kilometer; th. 2026 : 132.919 kilometer; th. 2027 : 132.919 kilometer; th. 2028 : 132.919 kilometer; th. 2029 : 132.919 kilometer; th. 2030 : 132,919 kilometer	1 paket	barang/jasa	5 tahun
47	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Dinas PUPR	103021020021	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Puntai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Puntai	1.490.312.000			0	0	0	0	0	0 APBD	tidak berkelanjutan	th 2025 : Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Pemalang	th 2025 : 1 Dokumen; th. 2026 : 0 Dokumen; th. 2027 : 0 Dokumen; th. 2028 : 0 Dokumen; th. 2029 : 0 Dokumen; th. 2030 : 0 Dokumen	1 paket	barang/jasa	5 tahun	
48	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Disperakin	1.04.02.1.03.0008	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi				4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	35 Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah	th 2025 : 100 Unit; th. 2026 : 100 Unit; th. 2027 : 100 Unit; th. 2028 : 100 Unit; th. 2029 : 100 Unit; th. 2030 : 125 Unit	40 juta per unit	Berupa barang	Diberikan dalam 1 tahun
49	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Disperakin	1.04.02.1.03.0009	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi				9.600.000.000	4.000.000.000	4.600.000.000	5.600.000.000	5.000.000.000	5.600.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	35 Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah	th 2025 : 240 Unit; th. 2026 : 100 Unit; th. 2027 : 115 Unit; th. 2028 : 140 Unit; th. 2029 : 125 Unit; th. 2030 : 140 Unit	40 juta per unit	Berupa barang	Diberikan dalam 1 tahun
50	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Disperakin	1.04.02.1.03.0001	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				3.000.000.000	2.500.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	35 Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah	th 2025 : 150 Unit; th. 2026 : 125 Unit; th. 2027 : 120 Unit; th. 2028 : 120 Unit; th. 2029 : 145 Unit; th. 2030 : 145 Unit	20 juta per unit	Berupa barang	Diberikan dalam 1 tahun
51	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Disperakin			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat Miskin yang terdampak Bencana				1.000.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	35 Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah	th 2025 : 20 Unit; th. 2026 : 50 Unit; th. 2027 : 50 Unit; th. 2028 : 50 Unit; th. 2029 : 60 Unit; th. 2030 : 60 Unit	50 juta per unit (rumah tapak) 160 juta per unit (rumah apung)	Berupa barang	Diberikan dalam 1 tahun
52	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Disperakin	1.04.02.1.03.0001	Program Pengembangan Perumahan	Prodistribusi dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				1.969.900.000	2.460.000.000	2.550.000.000	2.550.000.000	2.550.000.000	2.550.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	29 Kabupaten se-Propinsi Jawa Tengah	th 2025 : 17000 Rumah Tangga; th. 2026 : 17000 Rumah Tangga; th. 2027 : 17000 Rumah Tangga; th. 2028 : 17000 Rumah Tangga; th. 2029 : 17000 Rumah Tangga; th. 2030 : 17000 Rumah Tangga	20 Juta per Unit	Berupa barang	Diberikan dalam 1 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi OP/PP/KE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas RUII			Alokasi Anggaran (Rp)						Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Aspek Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
53	Meminimalisir wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Disperakim dan BPKAD		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas RT/LH bagi Masyarakat Miskin		340.000.000.000			340.000.000.000		340.000.000.000		340.000.000.000	340.000.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	29 Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah	th. 2025 : 17000 Rumah Tangga; th. 2026 : 17000 Rumah Tangga; th. 2027 : 17000 Rumah Tangga; th. 2028 : 17000 Rumah Tangga; th. 2029 : 17000 Rumah Tangga; th. 2030 : 17000 Rumah Tangga	20 Juta per Unit	Berupa barang	Diberikan dalam 1 tahun
54	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.04.1.01.0001	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan				1.869.900.000	4.132.500.000	4.132.500.000	4.132.500.000	4.899.000.000	5.282.250.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 2100 Orang; th. 2026 : 2100 Orang; th. 2027 : 2100 Orang; th. 2028 : 2100 Orang; th. 2029 : 2100 Orang; th. 2030 : 2100 Orang	bantuan subsidi SOSH sebesar Rp. 3.500 / org / hari selama 365 hr x 2.100 orang	Barang (Bahan Pangan Natural)	365 hari
55	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.04.1.01.0004	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	350.600.000			200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	500.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 53 Orang; th. 2026 : 20 Orang; th. 2027 : 20 Orang; th. 2028 : 20 Orang; th. 2029 : 20 Orang; th. 2030 : 20 Orang	bantuan kursi roda dan alat kesehatan	Barang (Alat Bantu)	1 kali dalam setahun
56	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.04.1.01.0021	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	206.178.000			200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 4 Dokumen; th. 2026 : 4 Dokumen; th. 2028 : 4 Dokumen; th. 2029 : 4 Dokumen; th. 2030 : 4 Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar	Jasa (Koordinasi dan Sinkronisasi)	12 Bulan
57	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.04.1.02.0015	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	1.539.870.000			3.302.500.000	3.302.500.000	3.302.500.000	3.302.500.000	3.923.000.000	4.233.250.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 1700 Orang; th. 2026 : 1700 Orang; th. 2027 : 1700 Orang; th. 2028 : 1700 Orang; th. 2029 : 1700 Orang; th. 2030 : 1700 Orang	bantuan subsidi SOSH sebesar Rp. 3.500 / org / hari selama 365 hr x 1.700 orang	Barang (Bahan Pangan Natural)	365 hari
58	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.04.1.02.0017	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	150.669.000			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 4 Dokumen; th. 2026 : 4 Dokumen; th. 2027 : 4 Dokumen; th. 2028 : 4 Dokumen; th. 2029 : 4 Dokumen; th. 2030 : 4 Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jasa	12 Bulan
59	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.04.1.03.0001	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	327.600.000			830.000.000	830.000.000	830.000.000	830.000.000	976.000.000	1.049.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 400 Orang; th. 2026 : 400 Orang; th. 2027 : 400 Orang; th. 2028 : 400 Orang; th. 2029 : 400 Orang; th. 2030 : 400 Orang	bantuan subsidi SOSH sebesar Rp. 3.500 / org / hari selama 365 hr x 400 orang	Barang (Bahan Pangan Natural)	365 hari
60	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.04.1.03.0004	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	0			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 20 Orang; th. 2027 : 20 Orang; th. 2028 : 20 Orang; th. 2029 : 20 Orang; th. 2030 : 20 Orang	bantuan kursi roda dan alat kesehatan	Barang (Alat Bantu)	1 kali dalam setahun
61	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.04.1.03.0017	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	0			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 0 Dokumen; th. 2026 : 4 Dokumen; th. 2027 : 4 Dokumen; th. 2028 : 4 Dokumen; th. 2029 : 4 Dokumen; th. 2030 : 4 Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jasa (Koordinasi dan Sinkronisasi)	12 Bulan
62	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.04.1.04.0001	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	277.915.000			556.250.000	556.250.000	556.250.000	556.250.000	647.500.000	693.125.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 250 Orang; th. 2026 : 250 Orang; th. 2027 : 250 Orang; th. 2028 : 250 Orang; th. 2029 : 250 Orang; th. 2030 : 250 Orang	bantuan subsidi SOSH sebesar Rp. 3.500 / org / hari selama 365 hr x 250 orang	Barang (Bahan Pangan Natural)	365 hari
63	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.04.1.04.0011	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	0			300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 0 Dokumen; th. 2026 : 4 Dokumen; th. 2027 : 4 Dokumen; th. 2028 : 4 Dokumen; th. 2029 : 4 Dokumen; th. 2030 : 4 Dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jasa (Koordinasi dan Sinkronisasi)	12 Bulan
64	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05.1.02.0006	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Penyaluran Bantuan Kesejahteraan Keluarga	26.232.720.000			62.700.000.000	68.850.000.000	73.155.000.000	77.460.000.000	81.150.000.000	85.460.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 12764 Orang; th. 2026 : 10250 Orang; th. 2027 : 10250 Orang; th. 2028 : 10250 Orang; th. 2029 : 10250 Orang; th. 2030 : 10250 Orang	Bantuan Sosial Kalkulasi 10.250 Orang x 3 Bulan x Rp.400.000,-	Uang	12 Bulan
65	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.03.1.01.0003	Program Penanganan Warga Negara Migran	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Keberangkatan di Daerah Provinsi untuk dipindahkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Keberangkatan di Daerah Provinsi untuk dipindahkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	25.275.000			200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 100 Orang; th. 2026 : 100 Orang; th. 2027 : 100 Orang; th. 2028 : 100 Orang; th. 2029 : 100 Orang; th. 2030 : 100 Orang	Uang transport dan Uang Saku Fasilitas Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Keberangkatan di Daerah Provinsi untuk dipindahkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal selama 1 tahun	Uang (Fasilitas Penanganan)	12 Bulan
66	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Dinas Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin	1.06.05.1.02.0008	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Penyaluran Bantuan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	22.200.000.000			39.700.000.000	39.700.000.000	39.700.000.000	39.700.000.000	45.700.000.000	45.700.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 10560 Orang; th. 2026 : 10000 Orang; th. 2027 : 10000 Orang; th. 2028 : 10000 Orang; th. 2029 : 10000 Orang; th. 2030 : 10000 Orang	Bantuan Stimulan KUBE dan UEP PPM 10.000 orang x Rp. 3.000.000,- per tahun	Uang dan Barang (Modal Usaha)	1 kali dalam setahun
67	Meminimalisir wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Meningkatkan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Bimtek Pekerja Sosial Masyarakat)	155.940.000			1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 100 Keluarga; th. 2026 : 4600 Keluarga; th. 2027 : 4600 Keluarga; th. 2028 : 4600 Keluarga; th. 2029 : 4600 Keluarga; th. 2030 : 4600 Keluarga	(1) Penyuluhan sosial tng penganggulangan keson bagi PSKS (2) Uang Harian Peserta Kegiatan	Uang Harian dan Jasa (Penyuluhan Sosial)	1 kali dalam setahun
68	Meminimalisir wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	1.06.02.1.02.0004	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Bimtek PSKS Lembaga dan Bantuan Hibah kelembagaan	809.000.000			600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 1000 Lembaga; th. 2026 : 200 Lembaga; th. 2027 : 200 Lembaga; th. 2028 : 200 Lembaga; th. 2029 : 200 Lembaga; th. 2030 : 200 Lembaga	Bimtek PSKS Lembaga dan Bantuan Hibah kelembagaan	Uang (Hibah)	1 kali dalam setahun
69	Meminimalisir wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	1.06.02.1.02.0006	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	0			250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 0 Lembaga; th. 2026 : 50 Lembaga; th. 2027 : 50 Lembaga; th. 2028 : 50 Lembaga; th. 2029 : 50 Lembaga; th. 2030 : 50 Lembaga	Usulan Akreditasi Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jasa (Akreditasi)	1 kali dalam setahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi OPFPPKPE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas Rul			Alokasi Anggaran (Rp)						Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Asal Pemberian Bantuan	
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029	2030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
70	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	1.06.02.1.02.0008	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan/atau TKSK untuk Meningkatkan Kemampuan dalam penyelenggaraan kesos			Bimtek Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial dan/atau TKSK untuk Meningkatkan Kemampuan dalam penyelenggaraan kesos (Paket sembako, perlengkapan peserta kegiatan)	6.879.223.000	7.757.948.000	7.757.948.000	7.757.948.000	7.757.948.000	7.757.948.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 676 Orang; th. 2026 : 1318 Orang; th. 2027 : 1318 Orang; th. 2028 : 1318 Orang; th. 2029 : 1318 Orang; th. 2030 : 1318 Orang	Bimtek Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial dan/atau TKSK untuk Meningkatkan kapasitas dalam penyelenggaraan kesos (Paket sembako, perlengkapan peserta kegiatan)	Jasa (Bimtek)	1 kali dalam setahun	
71	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	1.06.02.1.02.0015	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 0 Badan Usaha; th. 2026 : 60 Badan Usaha; th. 2027 : 60 Badan Usaha; th. 2028 : 60 Badan Usaha; th. 2029 : 60 Badan Usaha; th. 2030 : 60 Badan Usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Jasa (Koordinasi dan Sinkronisasi)	12 Bulan
72	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	1.06.02.1.02.0016	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Facilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Lintas Kabupaten/Kota			Meningkatnya Peran Puskesmas sebagai Layanan Sosial Satu Pintu dan Hub Program Gradiasi	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 0 Lembaga; th. 2026 : 15 Lembaga; th. 2027 : 15 Lembaga; th. 2028 : 15 Lembaga; th. 2029 : 15 Lembaga; th. 2030 : 15 Lembaga	Meningkatnya Peran Puskesmas sebagai Layanan Sosial Satu Pintu dan Hub Program Gradiasi	Jasa (Facilitasi Pengembangan Puskesmas)	12 Bulan
73	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin	1.06.05.1.02.0008	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			Melaksanakan Pengelolaan data hasil verval data oleh Kabupaten/Kota	357.701.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 35 Kab./Kota; th. 2026 : 35 Kab./Kota; th. 2027 : 35 Kab./Kota; th. 2028 : 35 Kab./Kota; th. 2029 : 35 Kab./Kota; th. 2030 : 35 Kab./Kota	(1) Penyediaan honor perugas verval data PPKS tingkat kecamatan (2) Bimbingan Teknis Penguatan Kualitas Data (3) honor perugas pengelola data tingkat kecamatan (4) honor perugas Groundcheck Data	Uang dan Jasa (Bimtek dan Verval)	12 Bulan
74	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.06.1.01.0001	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan			Penanganan korban Bencana pada saat terjadinya bencana (Penyediaan Permakanan)	2.323.560.000	3.417.500.000	3.417.500.000	3.417.500.000	3.417.500.000	3.417.500.000	3.417.500.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 1500 Orang; th. 2026 : 3000 Orang; th. 2027 : 3000 Orang; th. 2028 : 3000 Orang; th. 2029 : 3000 Orang; th. 2030 : 3000 Orang	Penyediaan bahan Pangan Naturu bagi Penanganan Korban Bencana Alam	Barang (Bahan Pangan Naturu)	Saat terjadinya bencana
75	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.06.1.01.00011	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Sandang			Penanganan korban Bencana pada saat terjadinya bencana (Penyediaan Sandang)	388.510.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 1500 Orang; th. 2026 : 3000 Orang; th. 2027 : 3000 Orang; th. 2028 : 3000 Orang; th. 2029 : 3000 Orang; th. 2030 : 3000 Orang	Belanja Penyediaan Kebutuhan Sandang Bagi Korban/Terdampak Bencana Alam (sarung, kaos, celana pendek, pakaian batik, mukena, baju bayi, pampers bayi, pakaian, seragam)	Barang (Sandang)	Saat terjadinya bencana
76	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.06.1.01.00013	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			Penanganan korban Bencana pada saat terjadinya bencana (Tempat Penampungan Pengungsi)	140.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 1500 Orang; th. 2026 : 3000 Orang; th. 2027 : 3000 Orang; th. 2028 : 3000 Orang; th. 2029 : 3000 Orang; th. 2030 : 3000 Orang	Facilitasi penyediaan sarana pendukung penyediaan tempat penampungan pengungsi bagi korban bencana alam (tikar, terpal dan matras)	Barang (Tempat Penampungan Pengungsi)	Saat terjadinya bencana
77	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.06.1.01.0005	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial			Layanan dukungan psikososial korban bencana	84.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 1000 Orang; th. 2026 : 1000 Orang; th. 2027 : 1000 Orang; th. 2028 : 1000 Orang; th. 2029 : 1000 Orang; th. 2030 : 1000 Orang	(1) Belanja Penyediaan Peralatan Pendukung Kegiatan Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Alam (2) Bimbingan teknis dan Pelatihan Layanan dukungan Psikososial (3) Baju Lapangan/Wearpack	Jasa (Layanan Dukungan Psikososial)	Saat terjadinya bencana
78	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.06.1.01.00016	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Peningkatan Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana			Bimtek dan Pengerahan Kompetensi Tagana	0	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 300 Orang; th. 2027 : 300 Orang; th. 2028 : 300 Orang; th. 2029 : 300 Orang; th. 2030 : 300 Orang	Bimtek dan Pengerahan Kompetensi Tagana	Jasa (Bimtek)	12 Bulan
79	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.06.1.01.0004	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			Pengerahan Tagana	337.976.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 1000 Orang; th. 2026 : 300 Orang; th. 2027 : 300 Orang; th. 2028 : 300 Orang; th. 2029 : 300 Orang; th. 2030 : 300 Orang	Pengerahan Tagana	Jasa (Pengerahan Tagana)	Saat terjadinya bencana
80	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.06.1.01.0001	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan			Penanganan korban Bencana Sosial pada saat terjadinya bencana (Penyediaan Permakanan)	140.000.000	468.375.000	468.375.000	468.375.000	468.375.000	468.375.000	468.375.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 250 Orang; th. 2026 : 250 Orang; th. 2027 : 250 Orang; th. 2028 : 250 Orang; th. 2029 : 250 Orang; th. 2030 : 250 Orang	Penyediaan permakanan saat tanggap darurat	Barang (Bahan Pangan Naturu)	Saat terjadinya bencana
81	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.06.1.01.00011	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Sandang			Penanganan korban Bencana Sosial pada saat terjadinya bencana (Penyediaan Sandang)	73.076.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 250 Orang; th. 2026 : 250 Orang; th. 2027 : 250 Orang; th. 2028 : 250 Orang; th. 2029 : 250 Orang; th. 2030 : 250 Orang	Bantuan Pakaian dan Perlengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Penggunaan) dan Pakaian Bencana (sarung, pakaian, selimut, handuk, sabun, penbulet, sikat dan pasta gigi)	Barang (Sandang)	Saat terjadinya bencana
82	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.06.1.01.00013	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			Penanganan korban Bencana Sosial pada saat terjadinya bencana (Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi)	34.875.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 250 Orang; th. 2026 : 250 Orang; th. 2027 : 250 Orang; th. 2028 : 250 Orang; th. 2029 : 250 Orang; th. 2030 : 250 Orang	Penyediaan sarpras pengungsian (tikar, terpal dan matras)	Barang (Tempat Penampungan Pengungsi)	Saat terjadinya bencana
83	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.06.1.01.0005	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial			Layanan dukungan psikososial korban Bencana (Pengerahan Pelopor Perdamiaan)	62.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 500 Orang; th. 2026 : 75 Orang; th. 2027 : 75 Orang; th. 2028 : 75 Orang; th. 2029 : 75 Orang; th. 2030 : 75 Orang	(1) Pengerahan tenaga pelopor perdamiaan (2) Pengerahan Tagana Kegiatan Layanan Dukungan Psikososial	Jasa (Layanan Dukungan Psikososial)	Saat terjadinya bencana
84	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.06.1.01.00022	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamiaan (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam			Bimtek dan Pengerahan Kompetensi Tenaga Pelopor Perdamiaan (Pordam)	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 150 Orang; th. 2027 : 150 Orang; th. 2028 : 150 Orang; th. 2029 : 150 Orang; th. 2030 : 150 Orang	Bimtek dan Pengerahan Kompetensi Pordam	Jasa (Bimtek)	12 Bulan
85	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.06.1.01.0004	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			Pemulangan orang rentan dan keluarga balai ke daerah asal dan pemberi makan	525.550.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	35 Kab./Kota	th. 2025 : 1200 Orang; th. 2026 : 500 Orang; th. 2027 : 500 Orang; th. 2028 : 500 Orang; th. 2029 : 500 Orang; th. 2030 : 500 Orang	Bantuan Pemulangan	Jasa (Pemulangan)	12 Bulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi OPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas RUII			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Asal Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11			12	13	14	15	16	17	18
86	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Terlarang)	1.06.04.1.01.0001	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang di dalam Panti	Penyediaan Permakaman didalam panti dan pemenuhan kebutuhan sosial dalam panti sesuai SPM	18.319.020.000		17.010.000.000		17.010.000.000		17.010.000.000	17.010.000.000	APBD	Berkelanjutan	23 Kab/Kota	th. 2025 : 1655 Orang; th. 2026 : 1680 Orang; th. 2027 : 1680 Orang; th. 2028 : 1680 Orang; th. 2029 : 1680 Orang; th. 2030 : 1680 Orang	Penyediaan pemakaman per orang per hari sebesar Rp. 25.000 per orang per hari kepada 1680 PM	Barang (Barahan Pangan Natural)	12 bulan
87	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Terlarang)	1.06.04.1.01.0002	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang di dalam Panti	Penyediaan sandang dan kebersihan diri PM	2.578.799.000		2.968.297.000		2.968.297.000		2.968.297.000	2.968.297.000	APBD	Berkelanjutan	23 Kab/Kota	th. 2025 : 1655 Orang; th. 2026 : 1680 Orang; th. 2027 : 1680 Orang; th. 2028 : 1680 Orang; th. 2029 : 1680 Orang; th. 2030 : 1680 Orang	Penyediaan sandang dan kebersihan diri kepada 1680 PM senilai 2.968.297.000	Barang (Sandang)	12 bulan
88	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Terlarang)	1.06.04.1.01.0003	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.920.437.000		819.000.000		819.000.000		819.000.000	819.000.000	APBD	Berkelanjutan	23 Kab/Kota	th. 2025 : 1655 Orang; th. 2026 : 1680 Orang; th. 2027 : 1680 Orang; th. 2028 : 1680 Orang; th. 2029 : 1680 Orang; th. 2030 : 1680 Orang	Penyediaan sarpras asrama kepada 1680 PM senilai 819.000.000	Barang (Penyediaan Sarpras Asrama)	12 bulan
89	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Terlarang)	1.06.04.1.01.0004	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu untuk PM	456.699.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	8.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	23 Kab/Kota	th. 2025 : 1655 Orang; th. 2026 : 1680 Orang; th. 2027 : 1680 Orang; th. 2028 : 1680 Orang; th. 2029 : 1680 Orang; th. 2030 : 1680 Orang	Penyediaan Alat Bantu kepada 1680 PM senilai 8.000.000	Barang (Alat Bantu)	12 bulan
90	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Terlarang)	1.06.04.1.01.0005	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang di dalam Panti	Penyediaan fasilitas Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	0		151.200.000		151.200.000		151.200.000	151.200.000	APBD	Berkelanjutan	23 Kab/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 1680 Orang; th. 2027 : 1680 Orang; th. 2028 : 1680 Orang; th. 2029 : 1680 Orang; th. 2030 : 1680 Orang	Penyediaan fasilitas Perbekalan Kesehatan dan Obat-Obatan di dalam Panti kepada 1680 PM senilai 151.200.000	Barang (Obat-Obatan)	12 bulan
91	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Terlarang)	1.06.04.1.01.0006	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	986.880.000		1.008.000.000		1.008.000.000		1.008.000.000	1.008.000.000	APBD	Berkelanjutan	23 Kab/Kota	th. 2025 : 1655 Orang; th. 2026 : 1680 Orang; th. 2027 : 1680 Orang; th. 2028 : 1680 Orang; th. 2029 : 1680 Orang; th. 2030 : 1680 Orang	Penyediaan fasilitas bimbingan fisik mental spiritual dan sosial kepada 1680 PM senilai 1.008.000.000	Jasa (Bimbingan)	12 bulan
92	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Terlarang)	1.06.04.1.01.0007	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	0		151.200.000		151.200.000		151.200.000	151.200.000	APBD	Berkelanjutan	23 Kab/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 1680 Orang; th. 2027 : 1680 Orang; th. 2028 : 1680 Orang; th. 2029 : 1680 Orang; th. 2030 : 1680 Orang	Penyediaan Fasilitas Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari kepada 1680 PM senilai 151.200.000	Jasa (Bimbingan)	12 bulan
93	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Terlarang)	1.06.04.1.01.0009	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	454.188.000		487.200.000		487.200.000		487.200.000	487.200.000	APBD	Berkelanjutan	23 Kab/Kota	th. 2025 : 1655 Orang; th. 2026 : 1680 Orang; th. 2027 : 1680 Orang; th. 2028 : 1680 Orang; th. 2029 : 1680 Orang; th. 2030 : 1680 Orang	Penyediaan pendidikan, pemeriksaan kesehatan, dan rujukan layanan kesehatan kepada 1680 PM senilai 487.200.000	Uang dan Jasa (Pemeriksaan Kesehatan)	12 bulan
94	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Terlarang)	1.06.04.1.01.0010	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	14.750.000		252.000.000		252.000.000		252.000.000	252.000.000	APBD	Berkelanjutan	23 Kab/Kota	th. 2025 : 1655 Orang; th. 2026 : 1680 Orang; th. 2027 : 1680 Orang; th. 2028 : 1680 Orang; th. 2029 : 1680 Orang; th. 2030 : 1680 Orang	penelusuran keluarga kepada 1680 PM senilai 252.000.000	Jasa (Penelusuran Keluarga)	12 bulan
95	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Terlarang)	1.06.04.1.01.0011	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	220.227.000		252.000.000		252.000.000		252.000.000	252.000.000	APBD	Berkelanjutan	23 Kab/Kota	th. 2025 : 1655 Orang; th. 2026 : 1680 Orang; th. 2027 : 1680 Orang; th. 2028 : 1680 Orang; th. 2029 : 1680 Orang; th. 2030 : 1680 Orang	Penyediaan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi kepada 1680 PM senilai 252.000.000	Jasa (Reunifikasi Keluarga)	12 bulan
96	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Terlarang)	1.06.04.1.01.0017	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang di dalam Panti	Facilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	0		21.000.000		21.000.000		21.000.000	21.000.000	APBD	Berkelanjutan	23 Kab/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 1680 Orang; th. 2027 : 1680 Orang; th. 2028 : 1680 Orang; th. 2029 : 1680 Orang; th. 2030 : 1680 Orang	Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas kepada 1680 PM senilai 21.000.000	Jasa (Pendampingan Pembuatan Dokumen Kependudukan)	12 bulan
97	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Terlarang)	1.06.04.1.01.0019	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang di dalam Panti	Pemulasaraan	0		252.000.000		252.000.000		252.000.000	252.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	23 Kab/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 1680 Orang; th. 2027 : 1680 Orang; th. 2028 : 1680 Orang; th. 2029 : 1680 Orang; th. 2030 : 1680 Orang	Penyediaan fasilitas Pemulasaraan bagi PM yang meninggal dunia senilai 252.000.000	Barang (Fasilitas Pemulasaraan) dan Jasa (Pemulasaraan)	12 bulan
98	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Anak Terlarang)	1.06.04.1.02.0001	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarang di dalam Panti	Pengasuhan	0		10.500.000		10.500.000		10.500.000	10.500.000	APBD	Berkelanjutan	18 Kab/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 1110 Orang; th. 2027 : 1110 Orang; th. 2028 : 1110 Orang; th. 2029 : 1110 Orang; th. 2030 : 1110 Orang	Penyediaan Pengasuhan didalam panti dan pemenuhan kebutuhan sosial dalam panti sesuai SPM kepada 1110 PM senilai 10.500.000	Jasa (Pengasuhan)	12 bulan
99	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Anak Terlarang)	1.06.04.1.02.0002	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarang di dalam Panti	Penyediaan Sandang	2.608.253.000		2.848.440.000		2.848.440.000		2.848.440.000	2.848.440.000	APBD	Berkelanjutan	18 Kab/Kota	th. 2025 : 1100 Orang; th. 2026 : 1110 Orang; th. 2027 : 1110 Orang; th. 2028 : 1110 Orang; th. 2029 : 1110 Orang; th. 2030 : 1110 Orang	Penyediaan sandang dan kebersihan diri kepada 1110 PM senilai 2.848.440.000	Barang (Sandang)	12 bulan
100	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Anak Terlarang)	1.06.04.1.02.0003	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarang di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.103.526.000		495.060.000		495.060.000		495.060.000	495.060.000	APBD	Berkelanjutan	18 Kab/Kota	th. 2025 : 1100 Orang; th. 2026 : 1110 Orang; th. 2027 : 1110 Orang; th. 2028 : 1110 Orang; th. 2029 : 1110 Orang; th. 2030 : 1110 Orang	Penyediaan fasilitas sarpras asrama kepada 1110 PM senilai 495.060.000	Barang (Penyediaan Sarpras Asrama)	12 bulan
101	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Anak Terlarang)	1.06.04.1.02.0004	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarang di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	0		11.100.000		11.100.000		11.100.000	11.100.000	APBD	Berkelanjutan	18 Kab/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 1110 Orang; th. 2027 : 1110 Orang; th. 2028 : 1110 Orang; th. 2029 : 1110 Orang; th. 2030 : 1110 Orang	Penyediaan fasilitas Perbekalan Kesehatan dan Obat-Obatan di dalam Panti kepada 1110 PM senilai 11.000.000	Barang (Obat-Obatan)	12 bulan
102	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Anak Terlarang)	1.06.04.1.02.0005	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarang di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	504.680.000		517.600.000		517.600.000		517.600.000	517.600.000	APBD	Berkelanjutan	18 Kab/Kota	th. 2025 : 1100 Orang; th. 2026 : 1110 Orang; th. 2027 : 1110 Orang; th. 2028 : 1110 Orang; th. 2029 : 1110 Orang; th. 2030 : 1110 Orang	penyediaan fasilitas bimbingan fisik mental spiritual dan sosial bagi penerima manfaat	Jasa (Bimbingan)	12 bulan
103	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Anak Terlarang)	1.06.04.1.02.0006	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarang di dalam Panti	Pemberian Fasilitas Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	0		108.000.000		108.000.000		108.000.000	108.000.000	APBD	Berkelanjutan	18 Kab/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 1110 Orang; th. 2027 : 1110 Orang; th. 2028 : 1110 Orang; th. 2029 : 1110 Orang; th. 2030 : 1110 Orang	Penyediaan Fasilitas Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari kepada 1110 PM senilai 108.000.000	Jasa (Bimbingan)	12 bulan
104	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Anak Terlarang)	1.06.04.1.02.0007	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarang di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.002.941.000		5.215.650.000		5.215.650.000		5.215.650.000	5.215.650.000	APBD	Berkelanjutan	18 Kab/Kota	th. 2025 : 1100 Orang; th. 2026 : 1110 Orang; th. 2027 : 1110 Orang; th. 2028 : 1110 Orang; th. 2029 : 1110 Orang; th. 2030 : 1110 Orang	Penyediaan pendidikan, pemeriksaan kesehatan, dan rujukan ke layanan kesehatan lainnya	Uang dan Jasa (Pemeriksaan Kesehatan)	12 bulan
105	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Anak Terlarang)	1.06.04.1.02.0009	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarang di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0		166.500.000		166.500.000		166.500.000	166.500.000	APBD	Berkelanjutan	18 Kab/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 1110 Orang; th. 2027 : 1110 Orang; th. 2028 : 1110 Orang; th. 2029 : 1110 Orang; th. 2030 : 1110 Orang	Penyediaan penelusuran keluarga kepada 1110 PM senilai 166.500.000	Jasa (Penelusuran Keluarga)	12 bulan
106	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Anak Terlarang)	1.06.04.1.02.0010	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarang di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	180.450.000		333.000.000		333.000.000		333.000.000	333.000.000	APBD	Berkelanjutan	18 Kab/Kota	th. 2025 : 1100 Orang; th. 2026 : 1110 Orang; th. 2027 : 1110 Orang; th. 2028 : 1110 Orang; th. 2029 : 1110 Orang; th. 2030 : 1110 Orang	Penyediaan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi kepada 1110 PM senilai 330.000	Jasa (Reunifikasi Keluarga)	12 bulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas Rul			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Asal Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2025	2026	2027	2028	2030	12	13	14	15	16	17	18
107	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Anak Terlantar)	1.06.04.1.02.0011	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permaknaan	Penyediaan Permaknaan didalam panti dan pemenuhan kebutuhan sosial dalam panti sesuai SPM			12.187.229.000	11.534.400.000	11.534.400.000	11.534.400.000	11.534.400.000	APBD	Berkelanjutan	18 Kaly/Kota	th. 2025 : 1100 Orang; th. 2026 : 1110 Orang; th. 2027 : 1110 Orang; th. 2028 : 1110 Orang; th. 2029 : 1110 Orang; th. 2030 : 1110 Orang	Penyediaan permaknaan per orang per hari sebesar Rp. 25.000 per orang per hari kepada 1110 PM senilai 11.534.400.000	Barang (Bahan Pangan Natura)	12 bulan
108	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Anak Terlantar)	1.06.04.1.02.0017	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Anak Terlantar	Penyediaan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Anak Terlantar			0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	APBD	Berkelanjutan	18 Kaly/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 1110 Orang; th. 2027 : 1110 Orang; th. 2028 : 1110 Orang; th. 2029 : 1110 Orang; th. 2030 : 1110 Orang	Penyediaan Pembuatan Dokumen Kependudukan kepada 1110 PM senilai 15.000.000	Jasa (Pendampingan Pembuatan Dokumen Kependudukan)	12 bulan
109	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Anak Terlantar)	1.06.04.1.02.0022	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Penyediaan Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti			0	166.500.000	166.500.000	166.500.000	166.500.000	APBD	Berkelanjutan	18 Kaly/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 1110 Orang; th. 2027 : 1110 Orang; th. 2028 : 1110 Orang; th. 2029 : 1110 Orang; th. 2030 : 1110 Orang	Penyediaan Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti kepada 1110 PM senilai 166.500.000	Jasa (Fasilitasi Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti)	12 bulan
110	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar)	1.06.04.1.03.0001	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permaknaan	Penyediaan Permaknaan didalam panti dan pemenuhan kebutuhan sosial dalam panti sesuai SPM			13.623.581.000	13.448.250.000	13.448.250.000	13.448.250.000	13.448.250.000	APBD	Berkelanjutan	22 Kaly/Kota	th. 2025 : 1285 Orang; th. 2026 : 1290 Orang; th. 2027 : 1290 Orang; th. 2028 : 1290 Orang; th. 2029 : 1290 Orang; th. 2030 : 1290 Orang	Penyediaan permaknaan per orang per hari sebesar Rp. 25.000 per orang per hari kepada 1290 PM senilai 166.500.000	Barang (Bahan Pangan Natura)	12 bulan
111	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar)	1.06.04.1.03.0002	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	Penyediaan sandang dan kebersihan diri PM			2.347.251.000	3.898.380.000	3.898.380.000	3.898.380.000	3.898.380.000	APBD	Berkelanjutan	22 Kaly/Kota	th. 2025 : 1285 Orang; th. 2026 : 1290 Orang; th. 2027 : 1290 Orang; th. 2028 : 1290 Orang; th. 2029 : 1290 Orang; th. 2030 : 1290 Orang	Penyediaan sandang dan kebersihan diri kepada 1290 PM senilai 3.898.380.000	Barang (Sandang)	12 bulan
112	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar)	1.06.04.1.03.0003	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Penyediaan fasilitas sarpras asrama bagi Penerima manfaat			2.001.193.000	637.260.000	637.260.000	637.260.000	637.260.000	APBD	Berkelanjutan	22 Kaly/Kota	th. 2025 : 1285 Orang; th. 2026 : 1290 Orang; th. 2027 : 1290 Orang; th. 2028 : 1290 Orang; th. 2029 : 1290 Orang; th. 2030 : 1290 Orang	Penyediaan sarpras asrama kepada 1290 PM senilai 637.260.000	Barang (Penyediaan Sarpras Asrama)	12 bulan
113	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar)	1.06.04.1.03.0004	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu untuk PM	Penyediaan Alat Bantu untuk PM			90.350.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	22 Kaly/Kota	th. 2025 : 1285 Orang; th. 2026 : 1290 Orang; th. 2027 : 1290 Orang; th. 2028 : 1290 Orang; th. 2029 : 1290 Orang; th. 2030 : 1290 Orang	Penyediaan alat bantu kepada 1290 PM senilai 7.500.000	Barang (Alat Bantu)	12 bulan
114	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar)	1.06.04.1.03.0005	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbaikan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Penyediaan fasilitas Perbaikan Kesehatan di dalam Panti			0	116.100.000	116.100.000	116.100.000	116.100.000	APBD	Berkelanjutan	22 Kaly/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 1290 Orang; th. 2027 : 1290 Orang; th. 2028 : 1290 Orang; th. 2029 : 1290 Orang; th. 2030 : 1290 Orang	Penyediaan fasilitas Perbaikan Kesehatan dan Obat-Obatan di dalam Panti kepada 1290 PM senilai 116.100.000	Barang (Obat-Obatan)	12 bulan
115	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar)	1.06.04.1.03.0006	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	pemberian fasilitas bimbingan fisik mental spiritual dan sosial bagi penerima manfaat	pemberian fasilitas bimbingan fisik mental spiritual dan sosial bagi penerima manfaat			655.511.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	APBD	Berkelanjutan	22 Kaly/Kota	th. 2025 : 1285 Orang; th. 2026 : 1290 Orang; th. 2027 : 1290 Orang; th. 2028 : 1290 Orang; th. 2029 : 1290 Orang; th. 2030 : 1290 Orang	pemberian fasilitas bimbingan fisik mental spiritual dan sosial kepada 1290 PM senilai 1.470.000.000	Jasa (Bimbingan)	12 bulan
116	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar)	1.06.04.1.03.0007	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Penyediaan Fasilitas Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			0	108.000.000	108.000.000	108.000.000	108.000.000	APBD	Berkelanjutan	22 Kaly/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 1290 Orang; th. 2027 : 1290 Orang; th. 2028 : 1290 Orang; th. 2029 : 1290 Orang; th. 2030 : 1290 Orang	Penyediaan Fasilitas Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari kepada 1290 PM senilai 108.000.000	Jasa (Bimbingan)	12 bulan
117	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar)	1.06.04.1.03.0010	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Penyediaan penelusuran keluarga PM			0	193.500.000	193.500.000	193.500.000	193.500.000	APBD	Berkelanjutan	22 Kaly/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 1290 Orang; th. 2027 : 1290 Orang; th. 2028 : 1290 Orang; th. 2029 : 1290 Orang; th. 2030 : 1290 Orang	Penyediaan penelusuran keluarga PM kepada 1290 PM senilai 193.500.000	Jasa (Penelusuran Keluarga)	12 bulan
118	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar)	1.06.04.1.03.0011	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Penyediaan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi			144.194.000	193.500.000	193.500.000	193.500.000	193.500.000	APBD	Berkelanjutan	22 Kaly/Kota	th. 2025 : 1285 Orang; th. 2026 : 1290 Orang; th. 2027 : 1290 Orang; th. 2028 : 1290 Orang; th. 2029 : 1290 Orang; th. 2030 : 1290 Orang	Penyediaan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi kepada 1290 PM senilai 193.500.000	Jasa (Reunifikasi Keluarga)	12 bulan
119	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar)	1.06.04.1.03.0012	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	Penyediaan fasilitas Pemulasaraan bagi PM yang meninggal dunia			454.125.000	290.250.000	290.250.000	290.250.000	290.250.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	22 Kaly/Kota	th. 2025 : 1285 Orang; th. 2026 : 1290 Orang; th. 2027 : 1290 Orang; th. 2028 : 1290 Orang; th. 2029 : 1290 Orang; th. 2030 : 1290 Orang	Penyediaan fasilitas Pemulasaraan bagi PM yang meninggal dunia senilai 290.250.000	Barang (Fasilitas Pemulasaraan) dan Jasa Pemulasaraan	12 bulan
120	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar)	1.06.04.1.03.0015	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Penyediaan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar			0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	APBD	Berkelanjutan	22 Kaly/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 1290 Orang; th. 2027 : 1290 Orang; th. 2028 : 1290 Orang; th. 2029 : 1290 Orang; th. 2030 : 1290 Orang	Penyediaan Pembuatan Dokumen Kependudukan kepada 1290 PM senilai 15.000.000	Jasa (Pendampingan Pembuatan Dokumen Kependudukan)	12 bulan
121	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar)	1.06.04.1.03.0016	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	penyediaan pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan rujukan ke layanan kesehatan lainnya			411.604.000	172.500.000	172.500.000	172.500.000	172.500.000	APBD	Berkelanjutan	22 Kaly/Kota	th. 2025 : 1285 Orang; th. 2026 : 1290 Orang; th. 2027 : 1290 Orang; th. 2028 : 1290 Orang; th. 2029 : 1290 Orang; th. 2030 : 1290 Orang	Penyediaan pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan rujukan layanan kesehatan kepada 1290 PM senilai 172.500.000	Uang dan Jasa (Pemeriksaan Kesehatan)	12 bulan
122	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis)	1.06.04.1.04.0001	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Permaknaan	Penyediaan Permaknaan didalam panti dan pemenuhan kebutuhan sosial dalam panti sesuai SPM			2.273.177.000	2.025.000.000	2.025.000.000	2.025.000.000	2.025.000.000	APBD	Berkelanjutan	3 Kaly/Kota	th. 2025 : 200 Orang; th. 2026 : 200 Orang; th. 2027 : 200 Orang; th. 2028 : 200 Orang; th. 2029 : 200 Orang; th. 2030 : 200 Orang	Penyediaan permaknaan per orang per hari sebesar Rp. 25.000 per orang per hari kepada 200 PM	Barang (Bahan Pangan Natura)	12 bulan
123	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis)	1.06.04.1.04.0002	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Sandang	Penyediaan sandang dan kebersihan diri PM			338.408.000	348.200.000	348.200.000	348.200.000	348.200.000	APBD	Berkelanjutan	3 Kaly/Kota	th. 2025 : 200 Orang; th. 2026 : 200 Orang; th. 2027 : 200 Orang; th. 2028 : 200 Orang; th. 2029 : 200 Orang; th. 2030 : 200 Orang	Penyediaan sandang dan kebersihan diri kepada 200 PM senilai 348.200.000	Barang (Sandang)	12 bulan
124	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis)	1.06.04.1.04.0003	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Penyediaan fasilitas sarpras asrama bagi Penerima manfaat			307.787.000	65.200.000	65.200.000	65.200.000	65.200.000	APBD	Berkelanjutan	3 Kaly/Kota	th. 2025 : 200 Orang; th. 2026 : 200 Orang; th. 2027 : 200 Orang; th. 2028 : 200 Orang; th. 2029 : 200 Orang; th. 2030 : 200 Orang	Penyediaan sarpras asrama kepada 200 PM senilai 65.200.000	Barang (Penyediaan Sarpras Asrama)	12 bulan
125	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis)	1.06.04.1.04.0004	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Perbaikan Kesehatan di dalam Panti	Penyediaan fasilitas Perbaikan Kesehatan di dalam Panti			0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	APBD	Berkelanjutan	3 Kaly/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 200 Orang; th. 2027 : 200 Orang; th. 2028 : 200 Orang; th. 2029 : 200 Orang; th. 2030 : 200 Orang	Penyediaan fasilitas Perbaikan Kesehatan dan Obat-Obatan di dalam Panti sebanyak 200 PM senilai 24.000.000	Barang (Obat-Obatan)	12 bulan
126	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis)	1.06.04.1.04.0005	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	pemberian fasilitas bimbingan fisik mental spiritual dan sosial bagi penerima manfaat			249.812.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	APBD	Berkelanjutan	3 Kaly/Kota	th. 2025 : 200 Orang; th. 2026 : 200 Orang; th. 2027 : 200 Orang; th. 2028 : 200 Orang; th. 2029 : 200 Orang; th. 2030 : 200 Orang	pemberian fasilitas bimbingan fisik mental spiritual dan sosial bagi penerima manfaat 200 PM senilai 21.600.000	Jasa (Bimbingan)	12 bulan
127	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis)	1.06.04.1.04.0006	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Penyediaan Fasilitas Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			0	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	APBD	Berkelanjutan	3 Kaly/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 200 Orang; th. 2027 : 200 Orang; th. 2028 : 200 Orang; th. 2029 : 200 Orang; th. 2030 : 200 Orang	Penyediaan Fasilitas Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari kepada 200 PM senilai 21.600.000	Jasa (Bimbingan)	12 bulan
128	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis)	1.06.04.1.04.0007	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Penyediaan Fasilitas Bimbingan Keterampilan Dasar			0	154.000.000	154.000.000	154.000.000	154.000.000	APBD	Berkelanjutan	3 Kaly/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 200 Orang; th. 2027 : 200 Orang; th. 2028 : 200 Orang; th. 2029 : 200 Orang; th. 2030 : 200 Orang	Penyediaan Fasilitas Bimbingan Keterampilan Dasar kepada 200 PM senilai 154.000.000	Jasa (Bimbingan)	12 bulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi OPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas Rill			Alokasi Anggaran (Rp)						Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jmlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Asal Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
129	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis)	1.06.04.1.04.0009	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	penyediaan pendidikan, pemeriksaan kesehatan, dan rujukan ke layanan kesehatan lainnya			51.446.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	APBD	Berkelanjutan	3 Kab/Kota	th. 2025 : 200 Orang; th. 2026 : 200 Orang; th. 2027 : 200 Orang; th. 2028 : 200 Orang; th. 2029 : 200 Orang; th. 2030 : 200 Orang	Penyediaan pendidikan, pemeriksaan kesehatan, dan rujukan layanan kesehatan 200 PM senilai 10.000.000	Uang dan Jasa (Pemeriksaan Kesehatan)	12 bulan
130	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis)	1.06.04.1.04.0010	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemulangan ke Daerah Asal	Penyediaan pemulangan PM ke daerah asal			29.140.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	3 Kab/Kota	th. 2025 : 200 Orang; th. 2026 : 200 Orang; th. 2027 : 200 Orang; th. 2028 : 200 Orang; th. 2029 : 200 Orang; th. 2030 : 200 Orang	Penyediaan pemulangan PM ke daerah asal 200 PM senilai 30.000.000	Jasa (Pemulangan)	12 bulan
131	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis)	1.06.04.1.04.0013	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Facilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Penyediaan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis			0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	APBD	Berkelanjutan	3 Kab/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 200 Orang; th. 2027 : 200 Orang; th. 2028 : 200 Orang; th. 2029 : 200 Orang; th. 2030 : 200 Orang	Penyediaan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis 200 PM senilai 3.000.000	Jasa (Pendampingan Pembuatan Dokumen Kependudukan)	12 bulan
132	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA)	1.06.04.1.05.0001	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Permaknaan	Penyediaan Permaknaan didalam panti dan pemenuhan kebutuhan sosial dalam panti sesuai SFM			3.215.600.000	3.442.500.000	3.442.500.000	3.442.500.000	3.442.500.000	3.442.500.000	APBD	Berkelanjutan	3 Kab/Kota	th. 2025 : 370 Orang; th. 2026 : 340 Orang; th. 2027 : 340 Orang; th. 2028 : 340 Orang; th. 2029 : 340 Orang; th. 2030 : 340 Orang	Penyediaan Permaknaan per orang per hari sebesar Rp. 25.000 per orang per hari kepada 340 PM	Barang (Bahan Pangan Natur)	12 bulan
133	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA)	1.06.04.1.05.0002	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Sandang	Penyediaan sandang dan kebutuhan diri PM			684.527.000	599.080.000	599.080.000	599.080.000	599.080.000	599.080.000	APBD	Berkelanjutan	3 Kab/Kota	th. 2025 : 370 Orang; th. 2026 : 340 Orang; th. 2027 : 340 Orang; th. 2028 : 340 Orang; th. 2029 : 340 Orang; th. 2030 : 340 Orang	Penyediaan Penyediaan sandang dan kebutuhan diri 340 PM senilai 599.080.000	Barang (Sandang)	12 bulan
134	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA)	1.06.04.1.05.0003	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Penyediaan fasilitas asrama bagi penerima manfaat			194.168.000	151.640.000	151.640.000	151.640.000	151.640.000	151.640.000	APBD	Berkelanjutan	3 Kab/Kota	th. 2025 : 370 Orang; th. 2026 : 340 Orang; th. 2027 : 340 Orang; th. 2028 : 340 Orang; th. 2029 : 340 Orang; th. 2030 : 340 Orang	Penyediaan Asrama kepada 340 PM senilai 151.640.000	Barang (Penyediaan Sarpras Asrama)	12 bulan
135	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA)	1.06.04.1.05.0004	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Penyediaan fasilitas Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			0	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	APBD	Berkelanjutan	3 Kab/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 340 Orang; th. 2027 : 340 Orang; th. 2028 : 340 Orang; th. 2029 : 340 Orang; th. 2030 : 340 Orang	Penyediaan fasilitas Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 340 PM senilai 40.800.000	Barang (Obat-Obatan)	12 bulan
136	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA)	1.06.04.1.05.0005	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	pemberian fasilitas bimbingan fisik mental spiritual dan sosial bagi penerima manfaat			293.721.000	193.000.000	193.000.000	193.000.000	193.000.000	193.000.000	APBD	Berkelanjutan	3 Kab/Kota	th. 2025 : 370 Orang; th. 2026 : 340 Orang; th. 2027 : 340 Orang; th. 2028 : 340 Orang; th. 2029 : 340 Orang; th. 2030 : 340 Orang	pemberian fasilitas bimbingan fisik mental spiritual dan sosial bagi penerima manfaat 340 PM senilai 193.000.000	Jasa (Bimbingan)	12 bulan
137	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA)	1.06.04.1.05.0006	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Penyediaan Fasilitas Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			0	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	APBD	Berkelanjutan	3 Kab/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 340 Orang; th. 2027 : 340 Orang; th. 2028 : 340 Orang; th. 2029 : 340 Orang; th. 2030 : 340 Orang	Penyediaan Fasilitas Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 340 PM senilai 21.600.000	Jasa (Bimbingan)	12 bulan
138	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA)	1.06.04.1.05.0007	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Penyediaan Fasilitas Bimbingan Keterampilan Dasar			0	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	APBD	Berkelanjutan	3 Kab/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 340 Orang; th. 2027 : 340 Orang; th. 2028 : 340 Orang; th. 2029 : 340 Orang; th. 2030 : 340 Orang	Penyediaan Fasilitas Bimbingan Keterampilan Dasar 340 PM senilai 21.600.000	Jasa (Bimbingan)	12 bulan
139	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA)	1.06.04.1.05.0009	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	penyediaan pendidikan, pemeriksaan kesehatan, dan rujukan ke layanan kesehatan lainnya			57.760.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	APBD	Berkelanjutan	3 Kab/Kota	th. 2025 : 370 Orang; th. 2026 : 340 Orang; th. 2027 : 340 Orang; th. 2028 : 340 Orang; th. 2029 : 340 Orang; th. 2030 : 340 Orang	Penyediaan pendidikan, pemeriksaan kesehatan, dan rujukan layanan kesehatan 340 PM senilai 17.000.000	Uang dan Jasa (Pemeriksaan Kesehatan)	12 bulan
140	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA)	1.06.04.1.05.0010	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemulangan ke Daerah Asal	Penyediaan pemulangan PM ke daerah asal			39.750.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	3 Kab/Kota	th. 2025 : 370 Orang; th. 2026 : 340 Orang; th. 2027 : 340 Orang; th. 2028 : 340 Orang; th. 2029 : 340 Orang; th. 2030 : 340 Orang	Penyediaan pemulangan PM ke daerah asal 340 PM senilai 51.000.000	Jasa (Pemulangan)	12 bulan
141	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA)	1.06.04.1.05.0013	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Facilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Penyediaan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis			0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	APBD	Berkelanjutan	3 Kab/Kota	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 340 Orang; th. 2027 : 340 Orang; th. 2028 : 340 Orang; th. 2029 : 340 Orang; th. 2030 : 340 Orang	Penyediaan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial 340 PM senilai 1.500.000	Jasa (Pendampingan Pembuatan Dokumen Kependudukan)	12 bulan
142	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Pakja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	1.02.02.1.02.0003	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				85.000.000	85.000.000	90.000.000	95.000.000	100.000.000	APBD	tidak berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : : th. 2026 : 35 kab/kota ; th. 2027 : 35 kab/kota ; th. 2028 : 35 kab/kota ; th. 2029 : 35 kab/kota ; th. 2030 : 35 kab/kota	besaran manfaat yang diterima oleh peserta berupa makan/minum dan materi	Koordinasi dan fasilitasi dilakukan secara rutin sesuai kebutuhan		
143	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Pakja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	1.02.02.1.02.0003	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				255.193.000	84.000.000	82.000.000	85.000.000	90.000.000	95.000.000	APBD	tidak berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 35 kab/kota ; th. 2026 : 35 kab/kota ; th. 2027 : 35 kab/kota ; th. 2028 : 35 kab/kota ; th. 2029 : 35 kab/kota ; th. 2030 : 35 kab/kota	besaran manfaat yang diterima oleh peserta berupa makan/minum dan materi	Koordinasi dan fasilitasi dilakukan secara rutin sesuai kebutuhan	

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas RUII			Alokasi Anggaran (Rp)						Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Asai Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						12	13	14	15	16	17	18
144	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit - Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.1.02.0008	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1. Koordinasi teknis pelaksanaan Pengawasan kualitas air minum (Zoom meeting) 2. Fasilitasi teknis Pengawasan Kualitas Air Minum ke Kab/Kota	159.584.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	APBD	tidak berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 2 ; th. 2026 :35 kab/kota ; th. 2027 : 35 kab/kota ; th. 2028 : 35 kab/kota ; th. 2029 : 35 kab/kota ; th. 2030 : 35 kab/kota	bersaran manfaat yang diterima oleh peserta berupa makan/minum dan materi		fasilitasi teknis dilaksanakan sekali dalam 1 Tahun, namun koordinasi melalui daring dilaksanakan setiap dibutuhkan
145	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit - Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.1.02.0008	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Fasilitasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		40.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000	APBD	tidak berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 1 ; th. 2026 :35 kab/kota ; th. 2027 : 35 kab/kota ; th. 2028 : 35 kab/kota ; th. 2029 : 35 kab/kota ; th. 2030 : 35 kab/kota	bersaran manfaat yang diterima oleh peserta berupa makan/minum dan materi		fasilitasi teknis dilaksanakan sekali dalam 1 Tahun, namun koordinasi melalui daring dilaksanakan setiap dibutuhkan
146	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Kesehatan/BPKAD	5.02.02.1.05.0008	Pengelolaan Pengeluaran Keuangan Daerah	Pemungjung Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan			Pemberian bantuan jembah untuk masyarakat dalam bentuk bantuan keuangan desa		63.750.000.000	63.750.000.000	63.750.000.000	63.750.000.000	63.750.000.000	APBD	tidak berkelanjutan	35 Kab/Kota	th. 2025 : Unit; th. 2026 :10000 Unit; th. 2027 : 10000 Unit; th. 2028 : 10000 Unit; th. 2029 : 10000 Unit; th. 2030 : 10000 Unit	6.375.000 per unit	Barang dan upah tenaga kerja	1 kali pemberian bantuan
147	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas - Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	1.02.02.1.02.0006	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Konvergensi Penanganan Stunting (PMT) Balita Wasting	605.632.000	632.853.000	695.953.000	725.000.000	755.000.000	800.000.000	APBD	tidak berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 2.875 orang ; th. 2026 :35 kab/kota ; th. 2027 : 35 kab/kota ; th. 2028 : 35 kab/kota ; th. 2029 : 35 kab/kota ; th. 2030 : 35 kab/kota	bersaran manfaat yang diterima oleh peserta berupa makan/minum dan materi		Koordinasi dan fasilitasi dilakukan secara rutin sesuai kebutuhan
148	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Dinas Kesehatan/BPKAD	5.02.02.1.05.0008	Pengelolaan Pengeluaran Keuangan Daerah	Pemungjung Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan			Pemberian PMT Wasting		11.282.871.600	11.282.871.600	11.282.871.600	11.282.871.600	11.282.871.600	APBD	tidak berkelanjutan		th. 2025 : orang; th. 2026 :12211 orang; th. 2027 : 12211 orang; th. 2028 : 12211 orang; th. 2029 : 12211 orang; th. 2030 : 12211 orang	12.211 sasaran x Rp.16.500 x 56 hari	bahan makanan siap makan	56 hari
149	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Dinas Kesehatan/BPKAD	5.02.02.1.05.0008	Pengelolaan Pengeluaran Keuangan Daerah	Pemungjung Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan			Pemberian PKMK Stunting		22.370.400.000	22.370.400.000	22.370.400.000	22.370.400.000	22.370.400.000	APBD	tidak berkelanjutan		th. 2025 : orang; th. 2026 :6214 orang; th. 2027 :6214 orang; th. 2028 : 6214 orang; th. 2029 : 6214 orang; th. 2030 : 6214 orang	6.214 sasaran x Rp.50.000 x 12 minggu (72 hari)	bahan makanan siap makan	12 minggu (72 hari)
150	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Dinas Kesehatan/BPKAD	5.02.02.1.05.0008	Pengelolaan Pengeluaran Keuangan Daerah	Pemungjung Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan			Pemberian PMT Underweight		9.096.780.000	9.096.780.000	9.096.780.000	9.096.780.000	9.096.780.000	APBD	tidak berkelanjutan		th. 2025 : orang; th. 2026 :19690 orang; th. 2027 :19690 orang; th. 2028 : 19690 orang; th. 2029 : 19690 orang; th. 2030 : 19690 orang	19.690 sasaran x Rp.16.500 x 28 hari	bahan makanan siap makan	28 hari
151	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Dinas Kesehatan/BPKAD	5.02.02.1.05.0008	Pengelolaan Pengeluaran Keuangan Daerah	Pemungjung Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan			Pemberian PMT Ibu Hamil SKK		102.636.184.000	102.636.184.000	102.636.184.000	102.636.184.000	102.636.184.000	APBD	tidak berkelanjutan		th. 2025 : orang; th. 2026 :Pen23 orang; th. 2027 :42623 orang; th. 2028 : 42623 orang; th. 2029 : 42623 orang; th. 2030 : 42623 orang	42.623 sasaran x Rp.21.500 x 112 hari	bahan makanan siap makan	112 hari
152	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan - Pokja Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.02.02.1.02.0016	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Pembayaran Penerima Bantuan Iuran	377.615.032.000	400.300.000.000	400.543.000.000	411.954.000.000	412.305.000.000	462.258.000.000	APBD	berkelanjutan sesuai data/hasil verbal penerima manfaat	Jawa Tengah	th. 2025 : PBI = 13.603.580 jiwa PMKS = 11.000 jiwa orang; th. 2026 :PBI = 13.603.580 jiwa PMKS = 11.000 jiwa orang; th. 2027 :PBI = 13.603.580 jiwa PMKS = 11.000 jiwa orang; th. 2028 : PBI = 13.603.580 jiwa PMKS = 11.000 jiwa orang; th. 2029 : PBI = 13.603.580 jiwa PMKS = 11.000 jiwa orang; th. 2030 : PBI = 13.603.580 jiwa PMKS = 11.000 jiwa orang	PBI: Rp. 2.100 PMKS: Rp. 37.800	pembayaran iuran jankes	setiap bulan selama setahun
153	Meminimalikan kantong kemiskinan	Dinas Kesehatan	1.02.02.1.02.0004	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif			1. Pemeriksaan Risiko Remaja Anemia (Ballerama - Rii) 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan usia sekolah, remaja dan skrining layak hamil (Dinkes-Proses) 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah, Remaja, dan Skrining Layak Hamil (Dinkes - Proses)	173.600.000						APBD	tidak berkelanjutan	35 Kab/Kota	th. 2025 : 2.900 orang (kab/kota); th. 2026 : (kab/kota); th. 2027 : (kab/kota); th. 2028 : (kab/kota); th. 2029 : (kab/kota); th. 2030 : (kab/kota)	skrining anemia dan makanan bergizi		satu kali aksi
154	Meminimalikan kantong kemiskinan	Dinas Kesehatan	1.02.02.1.01.0027	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan fasilitas pelayanan sarana dan prasarana Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, maupun di fasilitas kesehatan			Pengadaan Obat Gizi dan Anak	27.464.328.000						APBN (BOK Non Fisik)	tidak berkelanjutan	35 Kab/Kota	th. 2025 : 104.702.300 tablet (paket); th. 2026 : (paket); th. 2027 : (paket); th. 2028 : (paket); th. 2029 : (paket); th. 2030 : (paket)	Pemberian : - Retinol - tablet tambah darah - Suplementasi TTD Mineral Mix	Vitamin dan obat	Balita (2 kali setahun) - Ibu Hamil selama 90 hari - Remaja putri selama 60 hari
155	Meminimalikan kantong kemiskinan	Dinas Kesehatan	1.02.03.1.02.0002	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Prngembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan			Pencapaian SDM Kesehatan, Penguatan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan, fasilitasi pengembangan SDM	308.100.000						APBD	tidak berkelanjutan	35 Kab/Kota	th. 2025 : 3 kegiatan; th. 2026 : kegiatan; th. 2027 : kegiatan; th. 2028 : kegiatan; th. 2029 : kegiatan; th. 2030 : kegiatan			
156	Meminimalikan kantong kemiskinan	Dinas Kesehatan	1.02.03.1.02.0001	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Prngembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM			1. Pelatihan Kewaspadaan kegawatdaruratan maternal dan neonatal bagi bidan di fasyankes primer 2. Pelatihan Skrining Bayi Baru Lahir bagi Dokter, Bidan, dan Perawat di Puskesmas 3. Pelatihan Komunikasi Antar Pihak (KAP) bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas dalam Percepatan Pencegahan Stunting di Indonesia 4. Training Need Assessment (TNA) 5. Workshop Webinar Bidang Kesehatan 6. Pelatihan Edukator Diabetes Nasional Tingkat Dasar Bagi Tenaga Kesehatan (lok) 7. Pelatihan Pengolahan dan Penyalakan Gizi Buruk Pada Balita (DBHCHT) 8. Pelatihan Penyuluhan	649.535.000						APBD, APBN (BOK Non Fisik), DBHCHT	tidak berkelanjutan	35 Kab/Kota	th. 2025 : 7 kegiatan; th. 2026 : kegiatan; th. 2027 : kegiatan; th. 2028 : kegiatan; th. 2029 : kegiatan; th. 2030 : kegiatan			

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi OPPK/PKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas RUII			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Asal Pemberian Bantuan	
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18	
157	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan	Dinas Kesehatan	1.02.02.1.01.0011	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		1. Deteksi Dini Faktor Risiko PTM (risil - Balikesmas) 2. Inisiasi Skrining Keras (risil - Balikesmas) 3. penguatan strategi pelaksanaan program P2PTM dan upaya pemenuhan kasus penyakit menular secara aktif (active case finding) (biaya proses)		525.631.000						APBD	tidak berkelanjutan	35 Kab/Kota	th. 2025 : 4 kegiatan (kab/kota); th. 2026 : (kab/kota); th. 2027 : (kab/kota); th. 2028 : (kab/kota); th. 2029 : (kab/kota); th. 2030 : (kab/kota)	Pemeriksaan kesehatan untuk 3.500 orang		satu kali pemeriksaan
158	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan	Dinas Kesehatan	1.02.02.1.01.0027	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makmin di fasilitas kesehatan		1. Pengadaan Cartridge TCM		1.000.000.000						DH/CHT	tidak berkelanjutan	35 Kab/Kota	th. 2025 : 2013 strip; th. 2026 : strip; th. 2027 : strip; th. 2028 : strip; th. 2029 : strip; th. 2030 : strip	Pemberian Cartridge TCM		satu kali pemeriksaan
159	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan	Dinas Kesehatan	1.02.02.1.02.0001	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi terdampak		Pendampingan Asesment, dan Penguatan Sub Klaster Kesehatan		139.103.000						APBD	tidak berkelanjutan	35 Kab/Kota	th. 2025 : 1 leg (kab/kota); th. 2026 : (kab/kota); th. 2027 : (kab/kota); th. 2028 : (kab/kota); th. 2029 : (kab/kota); th. 2030 : (kab/kota)			
160	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan	Dinas Kesehatan	1.02.02.1.02.0017	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan surveilans kesehatan		Pendampingan Upaya Peningkatan Capaian Program Surveilans dan Insentasi, Verifikasi sinyal/ rumor, P2U/pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB/Wabah, serta P2U penyakit menular lainnya, beracun makanan dan kesehatan lingkungan (bek), Validasi data sasaran/cakupan pemenuhan kasus dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit (bek)		1.073.923.000						APBD	tidak berkelanjutan	35 Kab/Kota	th. 2025 : 3 leg (kab/kota); th. 2026 : (kab/kota); th. 2027 : (kab/kota); th. 2028 : (kab/kota); th. 2029 : (kab/kota); th. 2030 : (kab/kota)			
161	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan	Dinas Kesehatan	1.02.02.1.02.0013	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Penguatan Strategi Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan, Jiwa Dan Napas, Peningkatan Pengupayaan Skrining dan Surveilans Kesehatan Jiwa bagi Pengelola Program dan Pengelola Data Kabupaten/Kota (BOK)		360.470.000						APBD, APBN (BOK Non Fiskal)	tidak berkelanjutan	35 Kab/Kota	th. 2025 : 2 leg (kab/kota); th. 2026 : (kab/kota); th. 2027 : (kab/kota); th. 2028 : (kab/kota); th. 2029 : (kab/kota); th. 2030 : (kab/kota)			
162	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan	Dinas Kesehatan	1.02.05.1.01.0001	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Peningkatan upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi		1. Advokasi dan Skrining Kesehatan (risil - Balikesmas) 2. Fasilitas Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Apresiasi Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP), Evaluasi Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) , Fasilitas Implementasi Strategi Komunikasi dalam rangka Penurunan Stunting di Kabupaten, Koordinasi Forum Komunikasi German Tingkat Provinsi, Monitoring Implementasi ILP di Kab/Kota		1.052.203.000						APBD	tidak berkelanjutan	35 Kab/Kota	th. 2025 : 3850 orang (kab/kota); th. 2026 : (kab/kota); th. 2027 : (kab/kota); th. 2028 : (kab/kota); th. 2029 : (kab/kota); th. 2030 : (kab/kota)	Pemeriksaan Skrining Kesehatan		1 x kegiatan
163	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.	Dishanpan	2.09.04.1.02.0004	Program Pengangan Kerawanan Pangan	Pengangan Kerawanan Pangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengangan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Subsidi harga pangan sumber energi kepada masyarakat rawan pangan dan gizi			4.004.000.000	16.800.000.000	4.004.000.000	4.004.000.000	4.004.000.000	4.004.000.000	APBD	berkelanjutan	Kab. dengan PoU tinggi pada daerah rawan pangan menurut peta FSVA dengan sasaraannya adalah KK miskin sesuai dengan data DTKS	th. 2025 : 30 desa; th. 2026 : 100 desa; th. 2027 : 30 desa; th. 2028 : 30 desa; th. 2029 : 30 desa; th. 2030 : 30 desa	140.000 x 12 (1.680.000) bulan per KK	subsidi bahan pangan energi	12 bulan
164	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.	Dishanpan	2.09.03.1.02.0005	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Penyaluran CPYP pada sesuai dengan kebutuhan			6.858.282.000	5.424.000.000	7.232.000.000	7.232.000.000	7.232.000.000	11.200.000.000	APBD	tidak berkelanjutan	Provinsi Jawa Tengah	th. 2025 : 450 ton; th. 2026 : 450 ton; th. 2027 : 500 ton; th. 2028 : 500 ton; th. 2029 : 500 ton; th. 2030 : 500 ton	1 ton 1 desa barga beras sesuai HPP Rp. 12.000	Barang	menyesuaikan kondisi
165	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.	Dishanpan	2.09.03.1.01.0009	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Subsidi Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen			5.750.000.000	10.000.000.000	9.164.640.000	9.164.640.000	9.945.440.000	12.000.000.000	APBD	tidak berkelanjutan	Provinsi Jawa Tengah	th. 2025 : 1 paket; th. 2026 : 1 paket; th. 2027 : 1 paket; th. 2028 : 1 paket; th. 2029 : 1 paket; th. 2030 : 1 paket	paket subsidi sesuai dengan kondisi inflasi barga pangan	Subsidi harga pangan kepada produsen dan konsumen	menyesuaikan kondisi
166	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.	Dishanpan	2.09.03.1.01.0003	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya	Fasilitas Distribusi Pangan			3.511.200.000	1.797.800.000	3.146.150.000	3.146.150.000	3.146.150.000	3.820.325.000	APBD	tidak berkelanjutan	Provinsi Jawa Tengah	th. 2025 : 1 paket; th. 2026 : 1 paket; th. 2027 : 1 paket; th. 2028 : 1 paket; th. 2029 : 1 paket; th. 2030 : 1 paket	Paket Fasilitas Untuk KPM dan GPM, serta penanganan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan)		menyesuaikan kondisi
167	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Dinas Kelautan dan Perikanan (Bidang KP3K)	3.25.02 3.25.02.1.03 3.25.02.1.03.0001	Program Pemberdayaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pertemuan Perempuan Pesisir		5.425.000	9.525.000	9.525.000	9.525.000	9.525.000	9.525.000	APBD	Berkelanjutan	th.2025 : Kab. Jepara th.2026 : Kab. Pekalongan th.2027 : Kab. Brebes th.2028 : Kab. Demak th.2029 : Kab. Pemalang th.2030 : Kab. Klaten	th. 2025 : 2 kelompok; th. 2026 : 2 kelompok; th. 2027 : 2 kelompok; th. 2028 : 2 kelompok; th. 2029 : 2 kelompok; th. 2030 : 2 kelompok	Besaran manfaat yang diterima peserta yaitu materi literatur, konsumsi selama pertemuan dan uang barisan residence sebesar 2 kelompok (30 orang x @100.000)	Pelatihan	1 kali pertemuan	
168	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Dinas Kelautan dan Perikanan (Bidang Perikanan Tangkap)	3.25.03 3.25.03.1.01 3.25.03.1.01.0010	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sempai Dengan 12 MI	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pemberian bantuan hibah sarana dan prasarana penangkapan ikan untuk nelayan kecil			125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 5 Paket; th. 2026 : 5 Paket; th. 2027 : 5 Paket; th. 2028 : 5 Paket; th. 2029 : 5 Paket; th. 2030 : 5 Paket	Bantuan Mesin Tempel : Rp 25.000.000 Bantuan Alat Tangkap (Jaring/Gillnet PUD) : Rp 25.000.000	Bantuan barang	1 kali bantuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi OPF/PKPE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas Rill			Alokasi Anggaran (Rp)						Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jmlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Asal Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
169	Mengurangi beban pengetahuan masyarakat miskin	Dinas Kelautan dan Perikanan (Bidang Perikanan Tangkap)	3.25.03 3.25.03.1.01 3.25.03.1.02.0002	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sempit Dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pemberian bantuan premi asuransi nelayan selama satu tahun			1.554.075.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 15000 Orang; th. 2026 :10000 Orang; th. 2027 :10000 Orang; th. 2029 : 10000 Orang; th. 2030 : 10000 Orang	Bantuan Pembiayaan Premi sebesar Rp 100.000 per orang per tahun	Bantuan Pembiayaan Premi	Pembiayaan premi asuransi selama satu tahun
170	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Dinas Kelautan dan Perikanan (Bidang KPRK)	3.25.02 3.25.02.1.03 3.25.02.1.03.0001	Program Pemberdayaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Hibah Sarana Usaha Perambah Garam			185.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000	550.000.000	600.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kabupaten Brebes, Demak, Jepara, Pati dan Rembang	th. 2025 : 5 Kelompok; th. 2026 : 8 Kelompok; th. 2027 : 9 Kelompok; th. 2028 : 10 Kelompok; th. 2029 : 11 Kelompok; th. 2030 : 12 Kelompok	Bantuan Geotaster loaning lebih Rp 50.000.000,00 per paket	Bantuan Barang	1 kali bantuan
171	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Dinas Kelautan dan Perikanan (Bidang Perikanan Tangkap)	3.25.03 3.25.03.1.01 3.25.03.1.01.0010	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan & Wilayah Laut Sempit Dengan 12 Mil	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Bimtek Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) bagi Nelayan Kecil			16.350.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Semarang, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan dan Kab. Kendal	th. 2025 : 1 Kali; th. 2026 :180 Kali; th. 2027 :180 Kali; th. 2028 : 180 Kali; th. 2029 : 180 Kali; th. 2030 : 180 Kali	Besaran manfaat yang diterima peserta Bimtek SKN adalah Nelayan memperoleh materi dan praktik serta sertifikat kecakapan nelayan dan UIH 100rb	Pelatihan dan sertifikasi	1 Kali Pertemuan Bimtek
172	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.03 3.25.03.1.01 3.25.03.1.01.0001	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan & Wilayah Laut Sempit Dengan 12 Mil	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pemberian Bantuan GPS Fish Finder			25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 2 unit; th. 2026 : 2 unit; th. 2027 : 2 unit; th. 2028 : 2 unit; th. 2029 : 2 unit; th. 2030 : 2 unit	Bantuan GPS Rp12.500.000 per unit	Bantuan Barang	1 kali bantuan
173	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.02 3.25.02.1.03 3.25.02.1.03.0005	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Pertemuan Pemberdayaan Usaha Perambah Garam Rakyat			14.025.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 120 orang; th. 2026 :30 orang; th. 2027 :30 orang; th. 2028 : 30 orang; th. 2029 : 30 orang; th. 2030 : 30 orang	Besaran manfaat yang diterima peserta yaitu materi bimtek, konsumsi selama pertemuan dan uang bariun residence sebesar 2 kelompok (30 orang x @100.000)	Pertemuan	1 kali pertemuan
174	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.03 3.25.03.1.06 3.25.03.1.01.0001	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemngungan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penentuan Lokasi Pemungutan Pelabuhan Perikanan	Pembangunan Breakwater dan Pengerukan Kolam Pelabuhan/Muara di PPP Tawang			6.394.000.000						APBD	Tidak berkelanjutan	th 2025 : PPP Tawang Kab. Kendal	th. 2025 : 1 Paket; th. 2026 : Paket; th. 2027 : Paket; th. 2028 : Paket; th. 2029 : Paket; th. 2030 : Paket	Normalisasi Bantuan Muara untuk Kapal Tradisional	Normalisasi Bantuan Muara untuk Kapal Tradisional	1 Kali Kegiatan
175	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.03 3.25.03.1.06 3.25.03.1.01.0001	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemngungan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penentuan Lokasi Pemungutan Pelabuhan Perikanan	Pembangunan Breakwater dan Pengerukan Kolam Pelabuhan/Muara di PPP Asadussona			7.803.750.000						APBD	Tidak berkelanjutan	th 2025 : PPP Asendoyong Kab. Pemalang	th. 2025 : 1 Paket; th. 2026 : Paket; th. 2027 : Paket; th. 2028 : Paket; th. 2029 : Paket; th. 2030 : Paket	Normalisasi Bantuan Muara untuk Kapal Tradisional	Normalisasi Bantuan Muara untuk Kapal Tradisional	1 Kali Kegiatan
176	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.03 3.25.03.1.06 3.25.03.1.01.0001	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemngungan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penentuan Lokasi Pemungutan Pelabuhan Perikanan	Pengerukan Kolam Pelabuhan/Muara di PPP Logending			3.880.000.000						APBD	Tidak berkelanjutan	th 2025 : PPP Logending Kab. Kebumen	th. 2025 : 1 Paket; th. 2026 : Paket; th. 2027 : Paket; th. 2028 : Paket; th. 2029 : Paket; th. 2030 : Paket	Normalisasi Bantuan Muara untuk Kapal Tradisional	Normalisasi Bantuan Muara untuk Kapal Tradisional	1 Kali Kegiatan
177	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.03 3.25.03.1.06 3.25.03.1.01.0001	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemngungan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penentuan Lokasi Pemungutan Pelabuhan Perikanan	Pengerukan Kolam Pelabuhan dan Perbaikan Jalan Kowanan di PPP Tegalsari			3.629.800.000						APBD	Tidak berkelanjutan	th 2025 : PPP Tegalsari Kota Tegal	th. 2025 : 1 Paket; th. 2026 : Paket; th. 2027 : Paket; th. 2028 : Paket; th. 2029 : Paket; th. 2030 : Paket	Normalisasi Bantuan Muara untuk Kapal Tradisional	Normalisasi Bantuan Muara untuk Kapal Tradisional	1 Kali Kegiatan
178	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.03 3.25.03.1.06 3.25.03.1.01.0001	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemngungan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penentuan Lokasi Pemungutan Pelabuhan Perikanan	Pembangunan Breakwater dan Pengerukan Kolam Pelabuhan/Muara di PPP Larangan			3.907.000.000						APBD	Tidak berkelanjutan	th 2025 : PPP Larangan Kab.Tegal	th. 2025 : 1 Paket; th. 2026 : Paket; th. 2027 : Paket; th. 2028 : Paket; th. 2029 : Paket; th. 2030 : Paket	Normalisasi Bantuan Muara untuk Kapal Tradisional	Normalisasi Bantuan Muara untuk Kapal Tradisional	1 Kali Kegiatan
179	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.03 3.25.03.1.06 3.25.03.1.01.0001	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemngungan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penentuan Lokasi Pemungutan Pelabuhan Perikanan	Rehabilitasi Dermaga di PPP Bajomulyo			5.949.150.000						APBD	Tidak berkelanjutan	th 2025 : PPP Bajomulyo Kab. Pati	th. 2025 : 1 Paket; th. 2026 : Paket; th. 2027 : Paket; th. 2028 : Paket; th. 2029 : Paket; th. 2030 : Paket	Normalisasi Bantuan Muara untuk Kapal Tradisional	Normalisasi Bantuan Muara untuk Kapal Tradisional	1 Kali Kegiatan
180	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Penta Trans	2.07.04.1.03.0002	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja			320.715.000	426.840.000	469.524.000	516.476.000	568.124.000	624.936.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 100 Orang; th. 2026 :200 Orang; th. 2027 :220 Orang; th. 2028 : 242 Orang; th. 2029 : 266 Orang; th. 2030 :240 Orang	Kegiatan Job Fair yang dilakukan 1 kali setiap tahun	Pemberian informasi lowongan kerja, fasilitas rekrutment dan penempatan	1 kali dalam 1 tahun	
181	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Penta Trans	2.07.04.1.01.0005	Program Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan tenaga kerja lintas daerah kab/kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Kegiatan pemberdayaan, dan padat karya produktif			246.609.000	255.962.000	1.323.193.000	1.455.513.000	1.601.064.000	1.761.170.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 230 Orang; th. 2026 :230 Orang; th. 2027 :250 Orang; th. 2028 : 270 Orang; th. 2029 : 300 Orang; th. 2030 : 330 Orang	sarana usaha, bahan praktek, dan uang bariun peserta	- Tahun 2027 pemberdayaan 11 paket, dan PKP 3 paket - Tahun 2028 pemberdayaan 11 paket, dan PKP 5 paket - Tahun 2029 pemberdayaan 12 paket, dan PKP 6 paket - Tahun 2030 pemberdayaan 13 paket, dan PKP 7 paket	
182	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Penta Trans	2.07.04.1.01.0001	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Peningkatan kompetensi bagi pengantar kerja di dinas kabupaten kota dan petugas antar kerja di bursa kerja khusus di lembaga pelatihan pemerintah dan di lembaga pendidikan			22.150.000	236.355.000	259.990.000	285.989.000	314.588.000	346.047.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 120 Orang; th. 2026 :160 Orang; th. 2027 :160 Orang; th. 2028 : 160 Orang; th. 2029 : 160 Orang; th. 2030 : 160 Orang	Pengantar kerja mendapatkan kompetensi sehingga pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan dapat ditempatkan ke perusahaan sesuai dengan minat dan di lembaga pendidikan	Peningkatan kompetensi bagi pengantar kerja di dinas kabupaten kota dan petugas antar kerja di bursa kerja khusus di lembaga pelatihan pemerintah dan di lembaga pendidikan	1 kali dalam 1 tahun
183	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Penta Trans	2.07.04.1.01.0002	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antar Kerja	Kegiatan koordinasi untuk mendapatkan informasi terkait peluang, mekanisme dan prosedur dalam mendapatkan pekerjaan bagi pencari kerja			297.759.000	313.810.700	345.191.770	379.710.800	417.681.880	459.449.970	APBD	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 400 Orang; th. 2026 :1500 Orang; th. 2027 :1650 Orang; th. 2028 : 1815 Orang; th. 2029 : 1997 Orang; th. 2030 :2196 Orang	Informasi terkait peluang, mekanisme dan prosedur dalam mendapatkan pekerjaan	30 paket dalam 1 tahun	
184	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Penta Trans	2.07.04.1.01.0003	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kegiatan yang dilaksanakan mempersiapkan Pencari Kerja yang akan memasuki dunia kerja			34.465.000	53.136.600	58.450.040	64.295.000	70.724.720	77.797.280	APBD	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 350 Orang; th. 2026 :400 Orang; th. 2027 :440 Orang; th. 2028 : 484 Orang; th. 2029 : 532 Orang; th. 2030 : 586 Orang	Pencari kerja siap dalam memasuki dunia kerja	Memperiapkan Pencari Kerja yang akan memasuki dunia kerja	5 paket
185	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Penta Trans	2.07.04.1.01.0004	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembiinan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Koordinasi stakeholder ketenagakerjaan terkait kebijakan pengurangan pengangguran di Jawa Tengah			6.830.000	86.932.000	95.625.000	105.188.000	115.707.000	127.277.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : Orang; th. 2026 :50 Orang; th. 2027 :55 Orang; th. 2028 : 61 Orang; th. 2029 : 67 Orang; th. 2030 : 73 Orang	Kegiatan sesuai dengan kebutuhan pencari kerja dan pemberi kerja	Koordinasi stakeholder ketenagakerjaan terkait kebijakan pengurangan pengangguran di Jawa Tengah	1 kali 1 tahun
186	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	HL Jamsas	2.07.05.1.01.0003	Program Hubungan Industrial	Pengsahan Peraturan Perusahaan dan Pendafaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendidikan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pembiinan Syarat Kerja dan Jaminan Sosial kepada Perusahaan			12.128.000	215.199.000	236.718.000	260.390.000	286.429.000	315.072.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 140 Orang/Perusahaan; th. 2026 :70 Orang/Perusahaan; th. 2027 :70 Orang/Perusahaan; th. 2028 : 70 Orang/Perusahaan; th. 2029 : 70 Orang/Perusahaan; th. 2030 : 70 Orang/Perusahaan	Pengusaha dapat memahami ketentuan Jaminan Sosial sehingga Hak Pekerja dapat Terpenuhi	Tidak ada	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas RUII			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jmlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Asal Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						12	13	14	15	16	17	18
187	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Hi Jamsos	2.07.05.1.02.0001	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial, Mogik Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi			Pembinaan Pembentukan LKS Bipartit	211.042.000	211.781.000	212.523.000	221.024.000	243.127.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 36 Kasus; th. 2026 : 36 Kasus; th. 2027 : 40 Kasus; th. 2028 : 44 Kasus; th. 2029 : 48 Kasus; th. 2030 : 53 Kasus	Pengusaha dapat memahami terkait LKS Bipartit sehingga Hak Pekerja dapat Terpenuhi	Tidak ada	-
188	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Hi Jamsos	2.07.05.1.02.0005	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial, Mogik Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi			Workshop Sistem Pengupahan, Identifikasi Struktur Skala Upah dan Pembinaan Pengembangan Sistem Pengupahan	26.175.000	143.693.000	144.196.000	144.701.000	150.490.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 50 Perusahaan; th. 2026 : 39 Perusahaan; th. 2027 : 39 Perusahaan; th. 2028 : 40 Perusahaan; th. 2029 : 50 Perusahaan; th. 2030 : 60 Perusahaan	Pengusaha dapat memahami terkait Sistem Pengupahan sehingga Hak Pekerja dapat Terpenuhi	Tidak ada	-
189	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Hi Jamsos	2.07.05.1.03.0001	Program Hubungan Industrial	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)			Rapat Dewan pengupahan terkait UMP	221.210.000	221.210.000	221.985.000	222.762.000	223.542.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 1 Laporan; th. 2026 : 1 Laporan; th. 2027 : 1 Laporan; th. 2028 : 1 Laporan; th. 2029 : 1 Laporan; th. 2030 : 1 Laporan	Mendapatkan hasil terkait UMP	Tidak ada	-
190	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Hi Jamsos	2.07.05.1.03.0003	Program Hubungan Industrial	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK)			Rapat Dewan pengupahan terkait UMK	45.577.000	45.577.000	45.737.000	45.898.000	47.734.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 1 Laporan; th. 2026 : 1 Laporan; th. 2027 : 1 Laporan; th. 2028 : 1 Laporan; th. 2029 : 1 Laporan; th. 2030 : 1 Laporan	Mendapatkan hasil terkait UMK	Tidak ada	-
191	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Hi Jamsos	2.07.05.1.03.0005	Program Hubungan Industrial	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor (UMSK), dan Upah Minimum Sektor (UMSK)	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			Rakor Peningkatan FASKESJA	8.500.000	65.352.000	165.581.000	166.161.000	191.086.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 50 Orang; th. 2026 : 100 Orang; th. 2027 : 260 Orang; th. 2028 : 271 Orang; th. 2029 : 283 Orang; th. 2030 : 296 Orang	Pengusaha dapat memahami terkait FASKESJA sehingga Hak Pekerja dapat Terpenuhi	Tidak ada	-
192	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Lattas	2.07.03.1.01.0001	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pemagangan Dalam dan Luar Negeri , Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Bimtek Pelatihan Berbasis Kompetensi			292.750.000	558.101.250	613.911.090	675.302.370	742.832.550	APBD	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 150 Orang; th. 2026 : 265 Orang; th. 2027 : 292 Orang; th. 2028 : 321 Orang; th. 2029 : 353 Orang; th. 2030 : 388 Orang	Uang Saku, Sertifikat, peserta pemagangan Dalam Negeri mendapat bahan alat peraga	penerima manfaat mendapatkan : Uang harian, Bahan alat peraga (pemagangan dalam negeri), Sertifikat, Asuransi BPJS Ketenagakerjaan, Sna ck dan makan pembekuan dan penutupan	pelatihan dalam negeri selama 38 hari, Pelatihan Bimtek Metodologi (3 hr)
193	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	BLK Cilacap	2.07.03.1.01.0001	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja			1.355.920.000	2.408.406.900	3.180.811.480	3.015.613.060	3.317.174.460	DBHCHT	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 256 Orang; th. 2026 : 540 Orang; th. 2027 : 800 Orang; th. 2028 : 740 Orang; th. 2029 : 860 Orang; th. 2030 : 980 Orang	* LAS 3G SMAW, 1 Paket (81 juta), (g16 Orang) * LAS 3G GMAW, 1 Paket (81 juta), (g16 Orang) * Mesin Bubut, 1 Paket (81 juta), (g16 Orang) * Juru Gambar Bangunan Gedung, 1 Paket (50 juta), (g16 Orang) * Administrasi Perkantoran, 1 Paket (50 juta), (g16 Orang) * Menjahit, 1 Paket (55 juta), (g16 Orang) * P.L.C, 1 Paket (55 juta), (g16 Orang) * Service Sepeda Motor Sistem Injeksi, 1 Paket (65 juta), (g16 Orang) * Pemeliharaan dan Perbaikan AC Untuk Rumah Tangga, 1 Paket (55 juta), (g16 Orang) * Pengembangan Model 3D dengan CAD, 1 Paket (50 juta), (g16 Orang)	penerima manfaat mendapatkan : Uang harian, Bahan Pelatihan, Tool Kit, Sertifikat, atonpac Modul, Asuransi, Snaac k pembekuan dan penutupan, makan harian	Pelatihan 240 Jam Pelajaran (JP) selama 30 Hari
194	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	BPK Trans	2.07.03.1.01.0001	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja			2.452.670.000	4.903.600.000	871.792.000	3.517.592.400	3.620.951.640	APBD	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 628 Orang; th. 2026 : 1440 Orang; th. 2027 : 220 Orang; th. 2028 : 1060 Orang; th. 2029 : 1080 Orang; th. 2030 : 1220 Orang	Uang Saku Peserta, Alat dan Bahan Pelatihan, Konsumsi, Modul, dan Sertifikat	Uang dan Barang	Pelatihan 6-20 hari tergantung jenis pelatihan yang diberikan, diberikan 1 kali dalam 1 tahun
195	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	BLK SMG 1	2.07.3.32.0.00.02.0010	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	-Pelatihan di Bidang Jasa dan Pelatihan bagi calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPM) - Pemberian bantuan alat dan bahan kepada peserta pelatihan agar dapat berwirausaha mandiri - Pemberian uang saku peserta pelatihan - Pemberian Modul Pelatihan - Pemberian Sertifikasi BNSP (Pelatihan Boarding)			2.093.071.000	860.710.000	2.100.000.000	2.187.500.000	2.285.500.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 288 Orang; th. 2026 : 168 Orang; th. 2027 : 320 Orang; th. 2028 : 336 Orang; th. 2029 : 352 Orang; th. 2030 : 352 Orang	Bahan Alat Praktek Pelatihan dipakai saat praktek, Konsumsi, Uji Kompetensi (Pelatihan tertentu), Uang Saku	Uang Saku/ transport , bantuan alat , dan sertifikat BNSP	Pelatihan antara 11 - 30 hari tergantung jenis pelatihan yang diberikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi OPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas Rill			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jmlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Asal Pemberian Bantuan			
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18			
196	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	BLK SMG 2	2.07.03.1.01.0001	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2025 : - Pelatihan kejuruan produktivitas (Pelatihan Peningkatan Produktivitas, Pelatihan Pengukuran Produktivitas SIMPRO, Pelatihan Leadership, Pelatihan TQC, Pelatihan Kaizen) - Pelatihan kejuruan bisnis manajemen (Pelatihan digital marketing, Pelatihan kuliner kreatif) 2026 - 2030 : - Pelatihan kejuruan produktivitas - Pelatihan kejuruan bisnis manajemen			1.383.835.000	1.139.572.700	1.473.857.000		1.621.249.000	1.783.390.000	1.961.715.000	APBD reguler - DBHCHT - Dana mandiri dari perusahaan pemohon pelatihan	- Pelatihan kejuruan produktivitas (tidak berkelanjutan kecuali untuk Pelatihan Kaizen - Program Smart Productivity Agent) - Pelatihan kejuruan bisnis manajemen (Pelatihan digital marketing & Pelatihan kuliner kreatif) tidak berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 839 Orang; th. 2026 : 846 Orang; th. 2027 : 871 Orang; th. 2028 : 896 Orang; th. 2029 : 921 Orang; th. 2030 : 946 Orang	- Pelatihan Peningkatan Produktivitas (1 paket 20 juta rill /25 orang) - Pelatihan Digital Marketing (1 paket 80 juta rill/16 orang) - Pelatihan Leadership, Kaizen dan TQC (1 paket 20 juta rill/25 orang) - Pelatihan Kuliner Kreatif (1 paket 42 juta rill/25 orang)	- Pelatihan kejuruan produktivitas - Pelatihan kejuruan bisnis manajemen (Pelatihan digital marketing & Pelatihan kuliner kreatif) - Pelatihan content (untuk pelatihan digital marketing) - Pelatihan Kuliner Kreatif (untuk pelatihan kuliner kreatif) - Kelengkapan lainnya (uang harian peserta, konsumsi, sertifikat, buku materi)	- Pelatihan 3-5 hari tergantung jenis pelatihan yang diberikan - Dilanjutkan dengan pendampingan 1 bulan untuk rencana Pelatihan Kaizen - Program Smart Productivity Agent)	
197	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Lattas	2.07.03.1.03.0001	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menehng *	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menehng Handycraft				449.075.000	503.650.000	577.500.000	698.775.000	768.652.500	845.517.750	DBHCHT	tidak berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 330 Unit; th. 2026 :560 Unit; th. 2027 :800 Unit; th. 2028 : 880 Unit; th. 2029 : 960 Unit; th. 2030 : 1120 Unit	Pelatihan Tata Boga dan Handycraft dengan mendapatkan : 1. Toolkit (1 Paket Rp 5.700.000 Untuk 30 Orang) Per Orang mendapatkan toolkit dengan nilai Rp. 190.000; 2. Uang Saku (1 Paket Rp 6750.000 per orang mendapatkan Rp. Rp.75.000 per hari; 3. Pelatihan Tata Boga dan Handycraft 1 Paket 4.500.000 untuk bahan praktek]	1. Toolkit/peralatan untuk tata boga dan handycraft; 2. Pelatihan Soft skill seperti penguatan produktifitas, materi training digital marketing dan packaging, perijinan untuk kuliner; 3. Kelengkapan lainnya berupa uang saku, modul pelatihan, konsumsi dan sertifikat			
198	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	2.19.02.1.01.0015	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirasaha Muda Tingkat Provinsi				127.397.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	35 Kab/ Kota (Desa prioritas penanggulangan kemiskinan)	th. 2025 : 100 Orang; th. 2026 :1000 Orang; th. 2027 :1000 Orang; th. 2028 : 1000 Orang; th. 2029 : 1000 Orang; th. 2030 : 1000 Orang	Rencana Alat Peraga, UH	Barang (alat peraga) dan uang harian	1 kali Pelatihan		
199	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	2.19.02.1.01.0013	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				196.001.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	APBD	Berkesnungan	35 Kab/ Kota (Desa prioritas penanggulangan kemiskinan)	th. 2025 : 200 Orang; th. 2026 :300 Orang; th. 2027 :450 Orang; th. 2028 : 600 Orang; th. 2029 : 750 Orang; th. 2030 : 900 Orang	Honorarium PKKP	uang (honorarium)	10 Bulan		
200	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DPA/P2KB	2.08.02.1.02.0009	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Ke Masyarakatan Kewenangan Provinsi	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan Perempuan (PPEP)				113.615.000	120.000.000	120.000.000	130.000.000	130.000.000	150.000.000	APBD	Berkeslungan	4 lokasi kemiskinan, masing-masing lokasi 20 orang.	th. 2025 : 60 Orang; th. 2026 :80 Orang; th. 2027 :80 Orang; th. 2028 : 80 Orang; th. 2029 : 80 Orang; th. 2030 : 80 Orang	Alat Peraga per Kelompok, UH Peserta alat peraga menyerasikan kebutuhan kelompok, ada asesment terlebih dahulu ke penerima manfaat (per org per nominal)	Pelatihan dan Bantuan Barang kelompok	- 4 tahapan pelaksanaan pelatihan (2026-2030) 1. Workshop Need Assessment, Pengelolaan Sumber Daya Lokal dan Kewirausahaan Perempuan. 2. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif dan Teknik/ Desain Pengemasan. 3.Perijinan Usaha, Strategi Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan Usaha 4. Supervisi dan pendampingan usaha dengan stakeholder lokal;		
201	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DPA/P2KB	2.14.04.1.02.0007	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEJAHTERA (KS)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembiinan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Workshop Peningkatan Kapasitas Keluarga dan Usaha Kelompok UPPKA 2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk dan Jaringan Usaha Kelompok UPPKA				20.800.000	110.000.000	115.000.000	120.000.000	125.000.000	130.000.000	APBD Provinsi Jawa Tengah	Berkeslungan	3 lokasi kemiskinan masing-masing lokasi 20 orang	th. 2025 : 40 Orang; th. 2026 :60 Orang; th. 2027 :60 Orang; th. 2028 : 60 Orang; th. 2029 : 60 Orang; th. 2030 : 60 Orang	a. alat praktik pelatihan yang dilakukan asesmen terlebih dahulu b. UH peserta	Pelatihan dan Bantuan Barang kelompok	2 Tahapan pelaksanaan a. asesmen kelompok UPPKA b. kapasitas kelembagaan c. klanbegan teknis d. monitoring dan evaluasi		
202	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	2.17.07.1.01.000.1	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan				40.600.000	109.750.000	109.750.000	109.750.000	109.750.000	109.750.000	APBD	1 kali / tidak berlanjut	kab/kota di jawa tengah	th. 2025 : 25 orang x 2 lokasi = 50 orang ; th. 2026 :50 orang ; th. 2027 :50 orang ; th. 2028 : 50 orang ; th. 2029 : 50 orang ; th. 2030 : 50 orang	2025 : pelatihan = 300 orang ; th. 2026 : th. 2026 s.d 2030 : UH peserta 100.000/hari	Pelatihan	tahun 2025 : 3 hari / kegiatan tahun 2026 s.d 2030 : 5 hari / kegiatan		
203	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	2.17.07.1.01.000.1	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Memumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penguatan Ketahanan				120.300.000	109.750.000	109.750.000	109.750.000	109.750.000	109.750.000	APBD	1 kali / tidak berlanjut	kab/kota di jawa tengah	th. 2025 : 30 orang x 8 lokasi = 240 orang ; th. 2026 :50 orang ; th. 2027 :50 orang ; th. 2028 : 50 orang ; th. 2029 : 50 orang ; th. 2030 : 50 orang	2026 s.d 2030 : UH peserta 100.000/hari	Pelatihan	tahun 2026 s.d 2030 : 5 hari / kegiatan		
204	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah				Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				101.450.000					APBD	1 kali / tidak berlanjut	kab/kota di jawa tengah	th. 2025 : 30 orang x 10 lokasi = 300 orang ; th. 2026 : th. 2027 : th. 2028 : th. 2029 : th. 2030 :	TW I UH peserta : 100rb/hari TW II UH peserta 0 / hari	Sosialisasi	1 hari			
205	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	BIPTAK (Disperindag Prov Jateng)	3.31.02.1.01.0003	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				639.680.000	134.232.000	442.799.340	406.723.000	924.375.000	924.375.000	APBD	Tidak berkelanjutan	BIPTAK	th. 2025 : 250 Orang; th. 2026 :60 Orang; th. 2027 :180 Orang; th. 2028 : 165 Orang; th. 2029 : 375 Orang; th. 2030 : 375 Orang	2,8 juta / orang	jasa (pelatihan)	Diberikan 1 kali per peserta		
206	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	BIPTAK (Disperindag Prov Jateng)	3.31.02.1.01.0003	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				43.200.000	134.232.000	442.799.340	406.723.000	924.375.000	924.375.000	APBD	Tidak berkelanjutan	BIPTAK	th. 2025 : 212,5 Orang; th. 2026 :51,6 Orang; th. 2027 :155 Orang; th. 2028 : 142 Orang; th. 2029 : 323 Orang; th. 2030 : 323 Orang	200 ribu/ orang	jasa (pelatihan)	Diberikan 1 kali per peserta		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi OPF/KPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas RUII			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Asal Pemberian Bantuan		
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
207	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil	BIPTAK (Disperindag Pro Jateng)	3.31.02.1.01.0003	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan SDM Industri Produk Tekstil			882.030.000	303.039.000	490.875.000	561.000.000	2.501.550.000	2.501.550.000	APBD	Tidak berkelanjutan	BIPTAK	th. 2025 : 400 Orang; th. 2026 :120 Orang; th. 2027 :210 Orang; th. 2028 : 240 Orang; th. 2029 : 1080 Orang; th. 2030 : 1080 Orang	2,2 juta/ orang	jasa (pelatihan)	Diberikan 1 kali per peserta	
208	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil	BIPTAK (Disperindag Pro Jateng)	3.31.02.1.01.0003	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Penyusunan Peserta Pelatihan SDM Industri Produk Tekstil			58.000.000	18.000.000	36.000.000	36.000.000	108.000.000	108.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	BIPTAK	th. 2025 : 340 Orang; th. 2026 :103,2 Orang; th. 2027 :181 Orang; th. 2028 : 208 Orang; th. 2029 : 929 Orang; th. 2030 : 929 Orang	200 ribu/ orang	jasa (pelatihan)	Diberikan 1 kali per peserta	
209	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil	Disperindag	3.31.02.1.01.0003	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Bimbingan Teknik Produksi dan Pengelolaan Usaha bagi Wirausaha Baru (WUB)			107.262.000	120.000.000			1.600.000.000	1.600.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Badang Pemberdayaan Industri	th. 2025 : 40 Orang; th. 2026 :60 Orang; th. 2027 : 200 Orang; th. 2028 : 100 Orang; th. 2029 : 460 Orang; th. 2030 : 460 Orang	Uji peserta: 100rb/hari	jasa (pelatihan) dan uang harian	Diberikan 1 kali per peserta	
210	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil	Disperindag	3.31.02.1.01.0004	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Penumbuhan dan Pendampingan Wirausaha Baru Industri Non Agro			52.929.000								Jawa Tengah	th. 2025 : 40 Orang; th. 2026 : 40 Orang; th. 2027 : 181 Orang; th. 2028 : 208 Orang; th. 2029 : 929 Orang; th. 2030 : 929 Orang		jasa (pelatihan) dan uang harian	Diberikan 1 kali per peserta	
211	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil	Disperindag	3.30.05.1.01.0004	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Meet Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Peningkatan Citra Produk Ekspor				80.000.000				400.000.000	400.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 40 Orang; th. 2026 :40 Orang; th. 2027 : 181 Orang; th. 2028 : 208 Orang; th. 2029 : 200 Orang; th. 2030 : 200 Orang	Uji peserta: 100rb/hari	jasa (pelatihan) dan uang harian	Diberikan 1 kali per peserta	
212	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03, 3.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0002		Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat Di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembagian Bibit			207.000.000	350.000.000	376.385.000	500.000.000	514.000.000	600.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Bora, Rembang dan Grobogan	th. 2025 : 9850 batang ; th. 2026 :90 Ha ; th. 2027 :94 Ha ; th. 2028 : 99 Ha ; th. 2029 : 103 Ha ; th. 2030 : 108 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun
213	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan diluar kawasan hutan negara	Pembagian Bibit			118.500.000	200.000.000	241.385.000	400.000.000	400.000.000	500.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Bora, Rembang dan Grobogan	th. 2025 : 4830 batang ; th. 2026 :100 Ha ; th. 2027 :105 Ha ; th. 2028 : 110 Ha ; th. 2029 : 115 Ha ; th. 2030 : 120 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun	
214	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pembagian Bibit (mangrove) dan pemberian upah tanam			52.800.000	40.000.000	65.000.000	200.000.000	200.000.000	400.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Bora, Rembang dan Grobogan	th. 2025 : 22000 batang ; th. 2026 :5 Ha ; th. 2027 :25 Ha; th. 2028 : 5,5 Ha ; th. 2029 : 5,75 Ha ; th. 2030 : 6 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang - Upah tanam : 1000-3000/batang	Barang/ Bibit Tanaman dan upah tanam	1 Tahun	
215	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03, 3.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0002		Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat Di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembagian Bibit			276.550.000	300.000.000	341.385.000	341.385.000	355.385.000	1.000.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Jepara, Demak, Kudus, Pati	th. 2025 : 16000 batang ; th. 2026 :120 Ha ; th. 2027 :126 Ha ; th. 2028 : 132 Ha ; th. 2029 : 138 Ha ; th. 2030 : 144 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun
216	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan diluar kawasan hutan negara	Pembagian Bibit			135.000.000	140.000.000	166.385.000	166.385.000	166.385.000	700.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Jepara, Demak, Kudus, Pati	th. 2025 : 6000 batang ; th. 2026 :95 Ha ; th. 2027 :99 Ha; th. 2028 : 104 Ha ; th. 2029 : 109 Ha ; th. 2030 : 114 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun	
217	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pembagian Bibit (mangrove) dan pemberian upah tanam			492.000.000	50.000.000	60.000.000	100.000.000	100.000.000	625.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Jepara, Demak, Kudus, Pati	th. 2025 : 161000 batang ; th. 2026 :10 Ha ; th. 2027 :10,5 Ha ; th. 2028 : 11 Ha ; th. 2029 : 11,5 Ha ; th. 2030 : 12 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang - Upah tanam : 1000-3000/batang	Barang/ Bibit Tanaman dan upah tanam	1 Tahun	
218	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03, 3.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0002		Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat Di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembagian Bibit			299.000.000	350.000.000	391.385.000	391.385.000	405.385.000	1.000.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kota Semarang, Salatiga, Kab Semarang, Boyolali	th. 2025 : 14000 batang ; th. 2026 :250 Ha ; th. 2027 :262 Ha ; th. 2028 : 275 Ha ; th. 2029 : 287 Ha ; th. 2030 : 300 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun
219	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan diluar kawasan hutan negara	Pembagian Bibit			117.000.000	190.000.000	216.385.000	216.385.000	216.385.000	1.000.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kota Semarang, Salatiga, Kab Semarang, Boyolali	th. 2025 : 7054 batang ; th. 2026 :95 Ha ; th. 2027 :99 Ha; th. 2028 : 104Ha ; th. 2029 : 109 Ha ; th. 2030 : 114 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun	
220	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pembagian Bibit (mangrove) dan pemberian upah tanam			69.920.000	30.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	95.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kota Semarang, Salatiga, Kab Semarang, Boyolali	th. 2025 : 13200 batang ; th. 2026 :0 Ha ; th. 2027 :2 Ha ; th. 2028 :2,2 Ha ; th. 2029 : 2,3 Ha ; th. 2030 : 2,4 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang - Upah tanam : 1000-3000/batang	Barang/ Bibit Tanaman dan upah tanam	1 Tahun	
221	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03, 3.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0002		Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat Di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembagian Bibit			285.100.000	310.000.000	332.770.000	332.770.000	346.770.000	425.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kota Pekalongan, Kab Pekalongan, Kab Kendal, Kab Batang	th. 2025 : 28000 batang ; th. 2026 :100 Ha ; th. 2027 :105 Ha ; th. 2028 : 110 Ha ; th. 2029 : 115 Ha ; th. 2030 : 120 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun
222	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan diluar kawasan hutan negara	Pembagian Bibit			136.500.000	190.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	190.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kota Pekalongan, Kab Pekalongan, Kab Kendal, Kab Batang	th. 2025 : 8100 batang ; th. 2026 :90 Ha ; th. 2027 :94 Ha ; th. 2028 : 99 Ha ; th. 2029 : 103 Ha ; th. 2030 : 108 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun	
223	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pembagian Bibit (mangrove) dan pemberian upah tanam			540.480.000	50.000.000	85.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kota Pekalongan, Kab Pekalongan, Kab Kendal, Kab Batang	th. 2025 : 225160 batang ; th. 2026 :15 Ha ; th. 2027 :15 Ha ; th. 2028 : 16 Ha ; th. 2029 : 17 Ha ; th. 2030 : 18 Ha	Upah Tanam 1000-3000/batang	Barang/ Bibit Tanaman dan upah tanam	1 Tahun	
224	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03, 3.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0002		Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat Di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembagian Bibit			180.700.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	314.000.000	425.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kota Tegal, Kab Tegal, Brebes	th. 2025 : 12000 batang ; th. 2026 :190 Ha ; th. 2027 :199 Ha ; th. 2028 : 209 Ha ; th. 2029 : 219 Ha ; th. 2030 : 228 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun
225	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan diluar kawasan hutan negara	Pembagian Bibit			102.500.000	170.000.000	157.770.000	157.770.000	157.770.000	190.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kota Tegal, Kab Tegal, Brebes	th. 2025 : 5700 batang ; th. 2026 :100 Ha ; th. 2027 :105 Ha ; th. 2028 : 110 Ha ; th. 2029 : 115 Ha ; th. 2030 : 120 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun	
226	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pembagian Bibit (mangrove) dan pemberian upah tanam			933.600.000	90.000.000	60.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kota Tegal, Kab Tegal, Brebes	th. 2025 : 363840 batang ; th. 2026 :20 Ha ; th. 2027 :21 Ha ; th. 2028 : 22 Ha ; th. 2029 : 23 Ha ; th. 2030 : 24 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang - Upah tanam : 1000-3000/batang	Barang/ Bibit Tanaman dan upah tanam	1 Tahun	
227	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03, 3.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0002		Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat Di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembagian Bibit			277.000.000	320.000.000	300.000.000	300.000.000	314.000.000	425.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Banyumas, Cilacap	th. 2025 : 18000 batang ; th. 2026 :240 Ha ; th. 2027 :252 Ha ; th. 2028 : 264 Ha ; th. 2029 : 276 Ha ; th. 2030 : 288 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun
228	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan diluar kawasan hutan negara	Pembagian Bibit			115.600.000	160.000.000	162.770.000	162.770.000	162.770.000	190.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Banyumas, Cilacap	th. 2025 : 10800 batang ; th. 2026 :171 Ha ; th. 2027 :179 Ha ; th. 2028 : 188 Ha ; th. 2029 : 196 Ha ; th. 2030 : 205 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun	
229	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pembagian Bibit (mangrove) dan pemberian upah tanam			216.000.000	50.000.000	60.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Banyumas, Cilacap	th. 2025 : 86400 batang ; th. 2026 :15 Ha ; th. 2027 :15 Ha ; th. 2028 : 16 Ha ; th. 2029 : 17 Ha ; th. 2030 : 18 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang - Upah tanam : 1000-3000/batang	Barang/ Bibit Tanaman dan upah tanam	1 Tahun	
230	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0004		Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat Di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembagian Bibit			230.100.000	280.000.000	300.000.000	300.000.000	314.000.000	425.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga	th. 2025 : 19000 batang ; th. 2026 :95 Ha ; th. 2027 :94 Ha ; th. 2028 : 224 Ha ; th. 2029 : 234 Ha ; th. 2030 : 244 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun
231	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0009			Pembangunan Penghijauan Lingkungan diluar kawasan hutan negara	Pembagian Bibit			84.750.000	126.120.000	157.770.000	157.770.000	157.770.000	190.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga	th. 2025 : 7500 batang ; th. 2026 :41 Ha ; th. 2027 :94 Ha ; th. 2028 : 99 Ha ; th. 2029 : 103 Ha ; th. 2030 : 108 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Strategi OPF/KPKE		Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas RUII			Alokasi Anggaran (Rp)						Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Aspek Pemberian Bantuan
No	2	3	4	5	6	7	Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029	2030	12	13	14	15	16	17	18
232	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.03, 3.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0002	Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat Di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembagian Bibit			225.750.000	300.000.000	342.770.000	342.770.000	356.770.000	425.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Kebumen, Purworejo	th. 2025 : 19000 batang ; th. 2026 : 107 Ha ; th. 2027 : 112 Ha ; th. 2028 : 117 Ha ; th. 2029 : 123 Ha ; th. 2030 : 128 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun
233	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.033.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di luar kawasan hutan negara	Pembagian Bibit			95.500.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	190.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Kebumen, Purworejo	th. 2025 : 7300 batang ; th. 2026 : 90 Ha ; th. 2027 : 94 Ha ; th. 2028 : 99 Ha ; th. 2029 : 103 Ha ; th. 2030 : 108 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun
234	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.033.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pembagian Bibit (mangrove) dan pemberian upah tanam			175.200.000	50.000.000	60.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Kebumen, Purworejo	th. 2025 : 73000 batang ; th. 2026 : 9 Ha ; th. 2027 : 9 Ha ; th. 2028 : 9 Ha ; th. 2029 : 10 Ha ; th. 2030 : 10 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman dan upah tanam	1 Tahun
235	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.033.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0004	Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat Di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembagian Bibit			276.700.000	300.000.000	382.770.000	382.770.000	396.770.000	425.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kota Magelang, Kab Magelang, Temanggung	th. 2025 : 14250 batang ; th. 2026 : 107 Ha ; th. 2027 : 253 Ha ; th. 2028 : 265 Ha ; th. 2029 : 277 Ha ; th. 2030 : 289 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun
236	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.033.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0009			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di luar kawasan hutan negara	Pembagian Bibit			87.900.000	130.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	190.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kota Magelang, Kab Magelang, Temanggung	th. 2025 : 4950 batang ; th. 2026 : 100 Ha ; th. 2027 : 105 Ha ; th. 2028 : 110 Ha ; th. 2029 : 115 Ha ; th. 2030 : 120 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun
237	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.033.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0004	Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat Di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembagian Bibit			236.400.000	280.000.000	261.385.000	261.385.000	275.385.000	425.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kota Surakarta, Sragen, Klaten, Karanganyar	th. 2025 : 9000 batang ; th. 2026 : 140 Ha ; th. 2027 : 147 Ha ; th. 2028 : 154 Ha ; th. 2029 : 161 Ha ; th. 2030 : 168 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun
238	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.033.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0009			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di luar kawasan hutan negara	Pembagian Bibit			148.825.000	170.000.000	171.385.000	171.385.000	171.385.000	190.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kota Surakarta, Sragen, Klaten, Karanganyar	th. 2025 : 5075 batang ; th. 2026 : 130 Ha ; th. 2027 : 157 Ha ; th. 2028 : 165 Ha ; th. 2029 : 172 Ha ; th. 2030 : 180 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun
239	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.033.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0004	Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat Di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembagian Bibit			277.750.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	314.000.000	425.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Wonogiri, Sukoharjo	th. 2025 : 12400 batang ; th. 2026 : 82 Ha ; th. 2027 : 86 Ha ; th. 2028 : 90 Ha ; th. 2029 : 94 Ha ; th. 2030 : 98 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun
240	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.033.28.03.1.04, 3.28.03.1.04.0009			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di luar kawasan hutan negara	Pembagian Bibit			127.200.000	159.823.000	170.000.000	182.770.000	182.770.000	190.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Wonogiri, Purworejo	th. 2025 : 4600 batang ; th. 2026 : 120 Ha ; th. 2027 : 120 Ha ; th. 2028 : 132 Ha ; th. 2029 : 138 Ha ; th. 2030 : 144 Ha	bibit tanaman : 500-1.000/Batang	Barang/ Bibit Tanaman	1 Tahun
241	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	3.28.05, 3.28.05.1.01, 3.28.05.1.01.0002	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Keterbagian Kelompok Tani Hutan			Pembiayaan & Peningkatan Kapasitas Masyarakat Peduli Api	56.815.000	150.000.000	250.000.000	250.000.000	350.000.000	450.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kota Surakarta, Sragen, Klaten, Karanganyar	th. 2025 : 105 Kelompok ; th. 2026 : 105 Kelompok ; th. 2027 : 105 Kelompok ; th. 2028 : 105 Kelompok ; th. 2029 : 105 Kelompok ; th. 2030 : 105 Kelompok	Bantuan Alat pemadam Api untuk Karhutla	1 Tahun	
242	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	2.11.08, 2.11.08.1.01, 2.11.08.1.01.0003	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terseleenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke-Masyarakatatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya jumlah Adiwirata Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, termasuk materi perubahan iklim	Kegiatan sekolah Adiwirata Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah			23.246.000	50.000.000	165.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000	APBD	Apresiasi	Kab/Kota Se Jawa Tengah	th. 2025 : 400 Sekolah ; th. 2026 : 400 Sekolah ; th. 2027 : 400 Sekolah ; th. 2028 : 400 Sekolah ; th. 2029 : 400 Sekolah ; th. 2030 : 400 Sekolah			1 Tahun
243	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	DLHK	2.11.08, 2.11.08.1.01, 2.11.08.1.01.0007	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terseleenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke-Masyarakatatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pengembangan generasi lingkungan melalui Pendidikan, pelatihan, dan pendampingan, pembentukan dan pemberdayaan kader lingkungan, penyuluhan, dan pemberian pelatihan	Kegiatan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Pesantren, termasuk materi perubahan iklim			365.000.000	480.000.000	650.000.000	650.000.000	700.000.000	850.000.000	APBD		Kab/Kota Se Jawa Tengah	th. 2025 : 125 Sekolah ; th. 2026 : 125 Sekolah ; th. 2027 : 125 Sekolah ; th. 2028 : 125 Sekolah ; th. 2029 : 105 Sekolah ; th. 2030 : 105 Sekolah		Pembiayaan Gerakan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah/Pesantren	1 Tahun
244	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Distanak (Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wilayah Surakarta)	3.27.02.1.02.0013	Program Perencanaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perkembangan benih bersertifikat tanaman pangan berbudaya biji /benih	Upah tenaga kerja (warga miskin sekitar kebun benih yang terdaftar dalam DTKS)			200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kebun Benih di Wilayah Balai Surakarta	th. 2025 : 10 orang ; th. 2026 : 10 orang ; th. 2027 : 10 orang ; th. 2028 : 10 orang ; th. 2029 : 10 orang ; th. 2030 : 10 orang	2 juta per orang per bulan	bantuan uang	Diberikan setiap bulan selama 10 bulan
245	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Distanak (Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wilayah Banyumas)	3.27.02.1.02.0007	Program Perencanaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perkembangan benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang	Upah tenaga kerja (warga miskin sekitar kebun benih yang terdaftar dalam DTKS)			200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kebun Benih di Wilayah Balai Banyumas	th. 2025 : 10 orang ; th. 2026 : 10 orang ; th. 2027 : 10 orang ; th. 2028 : 11 orang ; th. 2029 : 10 orang ; th. 2030 : 10 orang	2 juta per orang per bulan	bantuan uang	Diberikan setiap bulan selama 10 bulan
246	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Distanak (Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wilayah Banyumas)		Program Perencanaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perkembangan benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang	Upah tenaga kerja (warga miskin sekitar kebun benih yang terdaftar dalam DTKS)			200.000.000								Kebun Benih di wilayah Balai Perkebunan	th. 2025 : 10 orang ; th. 2026 : orang ; th. 2027 : orang ; th. 2028 : orang ; th. 2029 : orang ; th. 2030 : orang			
247	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Distanak (Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wilayah Semarang)	3.27.02.1.02.0007	Program Perencanaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perkembangan benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang	Upah tenaga kerja (warga miskin sekitar kebun benih yang terdaftar dalam DTKS)			200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kebun Benih di Wilayah Balai Semarang	th. 2025 : 10 orang ; th. 2026 : 10 orang ; th. 2027 : 10 orang ; th. 2028 : 12 orang ; th. 2029 : 10 orang ; th. 2030 : 10 orang	2 juta per orang per bulan	bantuan uang	Diberikan setiap bulan selama 10 bulan
248	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Distanak (Bidang Hortikultura)	3.27.02.1.01.0001	Program Perencanaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Selaran Pupuk, Pestisida, Alat tanam dan Sarana Pendukung Pertanian	Greenhouse dengan penerima kelompok tani yang anggotanya merupakan masyarakat miskin sesuai dengan data DTKS			300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab/Kota di Jawa Tengah	th. 2025 : 2 paket ; th. 2026 : 2 unit ; th. 2027 : 2 unit ; th. 2028 : 2 unit ; th. 2029 : 2 unit ; th. 2030 : 2 unit	2 kelompok tani	Bantuan barang	Diberikan 1 kali dalam 12 bulan
249	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Distanak (Bidang PSP)	3.27.03.1.01.0004	Program Perencanaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pemetaan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani			Bantuan rehab jaringan irigasi tersier (Demak)	1.677.000.000	1.677.000.000	1.677.000.000	1.677.000.000	1.677.000.000	1.677.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	th. 2025 : Kab. Demak	th. 2025 : 10 Paket ; th. 2026 : 10 Paket ; th. 2027 : 10 Paket ; th. 2028 : 10 Paket ; th. 2029 : 10 Paket ; th. 2030 : 10 Paket	1x dibantu fasilitasi pennebusan sertifikat	Bantuan barang	Diberikan 1 kali dalam 12 bulan
250	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Distanak (Bidang PSP)	3.27.03.1.01.0004	Program Perencanaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pemetaan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani			Bantuan rehab jaringan irigasi tersier (Grobogan)	1.677.000.000	1.677.000.000	1.677.000.000	1.677.000.000	1.677.000.000	1.677.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	th. 2025 : Kab. Grobogan	th. 2025 : 10 Paket ; th. 2026 : 10 Paket ; th. 2027 : 10 Paket ; th. 2028 : 10 Paket ; th. 2029 : 10 Paket ; th. 2030 : 10 Paket	1x dibantu fasilitasi pennebusan sertifikat	Bantuan barang	Diberikan 1 kali dalam 12 bulan
251	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Distanak (Bidang PSP)	3.27.03.1.01.0004	Program Perencanaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pemetaan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani			Bantuan rehab jaringan irigasi tersier (Pati)	1.677.000.000	1.677.000.000	1.677.000.000	1.677.000.000	1.677.000.000	1.677.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan		th. 2025 : Paket ; th. 2026 : 10 Paket ; th. 2027 : 10 Paket ; th. 2028 : 10 Paket ; th. 2029 : 10 Paket ; th. 2030 : 10 Paket	1x dibantu fasilitasi pennebusan sertifikat	Bantuan barang	Diberikan 1 kali dalam 12 bulan
252	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Distanak (Bidang PSP)	3.27.03.1.01.0004	Program Perencanaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pemetaan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani			Bantuan irigasi perompaan (Grobogan)	306.000.000	306.000.000	306.000.000	306.000.000	306.000.000	306.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	th. 2025 : Kab. Grobogan	th. 2025 : 2 Paket ; th. 2026 : 2 Paket ; th. 2027 : 2 Paket ; th. 2028 : 2 Paket ; th. 2029 : 2 Paket ; th. 2030 : 2 Paket	1x dibantu fasilitasi pennebusan sertifikat	Bantuan barang	Diberikan 1 kali dalam 12 bulan
253	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Distanak (Bidang PSP)	3.27.03.1.01.0004	Program Perencanaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pemetaan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani			Bantuan irigasi perompaan (Demak)	153.000.000	306.000.000	306.000.000	306.000.000	306.000.000	306.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	th. 2025 : Kab. Demak	th. 2025 : 1 Paket ; th. 2026 : 2 Paket ; th. 2027 : 2 Paket ; th. 2028 : 2 Paket ; th. 2029 : 2 Paket ; th. 2030 : 2 Paket	1x dibantu fasilitasi pennebusan sertifikat	Bantuan barang	Diberikan 1 kali dalam 12 bulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi OPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas Rill			Alokasi Anggaran (Rp)						Sumber Pembiaya	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Asai Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18	
254	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Distannak (Bidang PSP)	3.27.03.1.01.0004	Program Penyelidikan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani			Bantuan irigasi perompangan (Pati)		153.000.000	153.000.000	153.000.000	153.000.000	153.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan		th. 2025 : 1 Paket; th. 2026 : 1 Paket; th. 2027 : 1 Paket; th. 2028 : 1 Paket; th. 2029 : 1 Paket; th. 2030 : 1 Paket	1x dibantu fasilitasi pembukaan sertifikat	Bantuan barang	Diberikan 1 kali dalam 12 bulan
255	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Distannak (Bidang Kelenbagaan)	3.27.07.1.03.0006	Program Penyelidikan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.115.800.000		Identifikasi hutang petani berdasarkan kepemilikan sertifikat	1.115.800.000	1.500.000.000					APBD	Tidak Berkelanjutan	th. 2025 : Pekalongan, Batang, Banjarnegara	th. 2025 : 2027 sertifikat ; th. 2026 : penghapusan hutang dan penyerahan sertifikat oleh presiden ; th. 2027 : th. 2028 : th. 2029 : th. 2030 :	1x dibantu fasilitasi pembukaan sertifikat	fasilitasi	Diberikan 1 kali dalam 12 bulan
256	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Distannak (Bapelitan)	3.27.07.1.02.0002	Program Penyelidikan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	34.700.000		Pemberian stimulan sarana dan prasarana, pelatihan, dan pendampingan bagi petani milenial	34.700.000	150.000.000	210.000.000	240.000.000	300.000.000	360.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	th. 2025, 2026 : Balai Pelatihan Pertanian	th. 2025 : 2 angkatan ; th. 2026 : 5 angkatan ; th. 2027 : 7 angkatan ; th. 2028 : 8 angkatan ; th. 2029 : 10 angkatan ; th. 2030 : 12 angkatan	1x Pelatihan	Bantuan Pelatihan	Diberikan 1 kali dalam 12 bulan
257	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.	Distannak Provinsi Jawa Tengah	3.27.03.1.01.0009	Program Penyelidikan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	4.342.400.000		Pembangunan perkebunan menuju ke bawga maju = BANTER MELAUJ : 1. bantuan ternak ayam 2. Sosialisasi kegiatan dan Binteke budidaya ternak ayam	4.342.400.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kabupaten di Jawa Tengah	th. 2025 : 1.666 orang (1.500 orang bantuan ayam, 100 orang bantuan kambing) ; th. 2026 : 50 orang (bantuan ayam) ; th. 2027 : 50 orang (bantuan ayam) ; th. 2028 : 50 orang (bantuan ayam) ; th. 2029 : 50 orang (bantuan ayam) ; th. 2030 : 50 orang (bantuan ayam)	1 paket (ternak ayam dan kompos) (pendukung) sebesar Rp 2.600.000,-	1 paket (10 ekor ayam, vitamin, pakan, kandang, tempat pakan dan minum)	1 kali pemberian
258	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.	Distannak Provinsi Jawa Tengah	3.27.04.1.03.0001	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Masyarakat	Penerapan persyaratan teknis sertifikasi jasa/kompetensi bebas penyakit dan unit usaha produk hewan	Pemenuhan persyaratan teknis sertifikasi jasa/kompetensi bebas penyakit	53.640.000		Penyediaan protein hewani dalam penanganan Stunting 1. Pemberian Paket Makanan, 2. KIE ASUHI	53.640.000								th. 2025 : Kab. Magelang	th. 2025 : 25 balita; th. 2026 : balita; th. 2027 : balita; th. 2028 : balita; th. 2029 : balita; th. 2030 : balita			
259	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	DISDIK_Bidang SMA	1.01.02.1.01.0038	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4.947.000.000		Pengadaan paket perlengkapan sekolah (Seragam, alat tulis, paket data)	4.947.000.000	13.192.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000	13.192.000.000	13.192.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kabupaten/kota	th. 2025 : 32985 Paket; th. 2026 : 32980 Paket; th. 2027 : 32980 Paket; th. 2028 : 32980 Paket; th. 2029 : 32980 Paket; th. 2030 : 32980 Paket	Per paket perlengkapan sekolah yang terdiri dari seragam sekolah, perlengkapan sekolah tas dan ATK, serta paket data dengan harga paket 300.000	Barang	Diberikan 1 tahun sekali kepada siswa miskin kelas 10 atau 11
260	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	DISDIK_Bidang SMA	1.01.02.1.01.0045	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan biaya personal peserta didik sekolah menengah atas	6.000.000.000		Beasiswa Siswa Miskin (BSM)	6.000.000.000	8.920.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	8.910.000.000	8.910.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kabupaten/kota	th. 2025 : 6000 Peserta Didik; th. 2026 : 6000 Peserta Didik; th. 2027 : 6000 Peserta Didik; th. 2028 : 6000 Peserta Didik; th. 2029 : 6000 Peserta Didik; th. 2030 : 6000 Peserta Didik	Pemberian beasiswa kepada siswa miskin dengan indeks per siswa Rp 1.000.000	Uang	Diberikan 1 tahun sekali kepada siswa miskin kelas 10 atau 11
261	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	DISDIK_Bidang SMK	1.01.02.1.02.0030	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7.537.950.000		Pengadaan paket perlengkapan sekolah (Seragam, alat tulis, paket data)	7.537.950.000	20.101.200.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.101.200.000	20.101.200.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kabupaten/kota	th. 2025 : 50.253 Paket; th. 2026 : 50.253 Paket; th. 2027 : 50.253 Paket; th. 2028 : 50.253 Paket; th. 2029 : 50.253 Paket; th. 2030 : 50.253 Paket	Per paket perlengkapan sekolah yang terdiri dari seragam sekolah, perlengkapan sekolah tas dan ATK, serta paket data dengan harga paket 300.000	Barang	Diberikan 1 tahun sekali kepada siswa miskin kelas 10 atau 11
262	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	DISDIK_Bidang SMK	1.01.02.1.02.0037	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan biaya personal peserta didik sekolah menengah atas	7.000.000.000		Beasiswa Siswa Miskin (BSM)	7.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kabupaten/kota	th. 2025 : 7000 Peserta Didik; th. 2026 : 7000 Peserta Didik; th. 2027 : 7000 Peserta Didik; th. 2028 : 7000 Peserta Didik; th. 2029 : 7000 Peserta Didik; th. 2030 : 7000 Peserta Didik	Pemberian beasiswa kepada siswa miskin dengan indeks per siswa Rp 1.000.000	Uang	Diberikan 1 tahun sekali kepada siswa miskin kelas 10 atau 11
263	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	DISDIK_Bidang Diklus	1.01.02.1.03.0037	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	405.000.000		Pengadaan paket perlengkapan sekolah (Seragam, alat tulis, paket data)	405.000.000	1.080.000.000	800.000.000	800.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kabupaten/kota	th. 2025 : 2.707 Paket; th. 2026 : 2.707 Paket; th. 2027 : 2.707 Paket; th. 2028 : 2.707 Paket; th. 2029 : 2.707 Paket; th. 2030 : 2.707 Paket	Per paket perlengkapan sekolah yang terdiri dari seragam sekolah, perlengkapan sekolah tas dan ATK, serta paket data dengan harga paket 300.000	Barang	Diberikan 1 tahun sekali kepada siswa miskin kelas 10 atau 11
264	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	DISDIK_Bidang Diklus	1.01.02.1.03.0044	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan biaya personal peserta didik sekolah menengah atas	2.000.000.000		Beasiswa Siswa Miskin (BSM)	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	APBD	Berkelanjutan	35 Kabupaten/kota	th. 2025 : 2000 Peserta Didik; th. 2026 : 2000 Peserta Didik; th. 2027 : 2000 Peserta Didik; th. 2028 : 2000 Peserta Didik; th. 2029 : 2000 Peserta Didik; th. 2030 : 2000 Peserta Didik	Pemberian beasiswa kepada siswa miskin dengan indeks per siswa Rp 1.000.000	Uang	Diberikan 1 tahun sekali kepada siswa miskin kelas 10 atau 11
265	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIK_Bidang SMA	1.01.02.1.01.0001	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	16.479.760.000		Pembangunan Unit Sekolah Baru	16.479.760.000	20.000.000.000	18.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	- Banyumas - Wonorejo - Klaten - Pemalang - Tegal	th. 2025 : 5 Unit; th. 2026 : 2 Unit; th. 2027 : 5 Unit; th. 2028 : 6 Unit; th. 2029 : 7 Unit; th. 2030 : 7 Unit	Pembangunan 1 USB kisanan 4 M	Uang	Pembangunan 1 USB dibangun dalam 3 tahapan
266	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIK_Bidang SMK	1.01.02.1.02.0001	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	10.941.000.000		Pembangunan Unit Sekolah Baru	10.941.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	- Kab. Purbalingga (Karangkajene dan Kemangkon) - Kab. Banjarnegara - Kab. Batang	th. 2025 : 3 Unit; th. 2026 : 1 Unit; th. 2027 : 4 Unit; th. 2028 : 4 Unit; th. 2029 : 7 Unit; th. 2030 : 8 Unit	Pembangunan 1 USB kisanan 4 M	Uang	Pembangunan 1 USB dibangun dalam 3 tahapan
267	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIK_Bidang Diklus	1.01.02.1.03.0001	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	3.572.600.000		Pembangunan Unit Sekolah Baru	3.572.600.000	3.500.000.000	3.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Banyumas	th. 2025 : 1 Unit; th. 2026 : 1 Unit; th. 2027 : 1 Unit; th. 2028 : 1 Unit; th. 2029 : 2 Unit; th. 2030 : 2 Unit	Pembangunan 1 USB kisanan 4 M	Uang	Pembangunan 1 USB dibangun dalam 3 tahapan
268	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIK_CARDIN I	1.01.02.1.02.0037	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	1.822.300.000		SMK Semi Boarding Cabdin I	1.822.300.000	1.822.300.000	1.822.300.000	1.822.300.000	1.822.300.000	1.822.300.000	APBD	Berkelanjutan	- Demak (SMKN 1 Demak) - Kota Salatiga - Kota Semarang	th. 2025 : Peserta Didik; th. 2026 : 90 Peserta Didik; th. 2027 : 90 Peserta Didik; th. 2028 : 90 Peserta Didik; th. 2029 : 90 Peserta Didik; th. 2030 : 90 Peserta Didik	Pengelolaan SMK Semi Boarding	Uang	Pemberian biaya pendidikan kepada siswa miskin dengan konsep sekolah asrama gratis dan pembiayaan pendidikan gratis
269	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIK_CARDIN II	1.01.02.1.02.0037	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	10.283.244.000		SMKN Jateng di Semarang	10.283.244.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	APBD	Berkelanjutan	SMKN Jateng di Kota Semarang	th. 2025 : 360 Peserta Didik; th. 2026 : 360 Peserta Didik; th. 2027 : 360 Peserta Didik; th. 2028 : 360 Peserta Didik; th. 2029 : 360 Peserta Didik; th. 2030 : 360 Peserta Didik	Pengelolaan SMK Boarding	Uang	Pemberian biaya pendidikan kepada siswa miskin dengan konsep sekolah asrama gratis dan pembiayaan pendidikan gratis
270	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIK_CARDIN III	1.01.02.1.02.0037	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	6.743.312.000		SMKN Jateng di Pati	6.743.312.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	APBD	Berkelanjutan	SMKN Jateng di Pati	th. 2025 : 216 Peserta Didik; th. 2026 : 216 Peserta Didik; th. 2027 : 216 Peserta Didik; th. 2028 : 216 Peserta Didik; th. 2029 : 216 Peserta Didik; th. 2030 : 216 Peserta Didik	- Jepara - Kudus - Pati	Uang	Pemberian biaya pendidikan kepada siswa miskin dengan konsep sekolah asrama gratis dan pembiayaan pendidikan gratis
271	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIK_CARDIN III	1.01.02.1.02.0038	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.079.600.000		SMKN Jateng di Purbalingga	2.079.600.000	2.079.600.000	2.079.600.000	2.079.600.000	2.079.600.000	2.079.600.000	APBD	Berkelanjutan	SMKN Jateng di Purbalingga	th. 2025 : 96 Peserta Didik; th. 2026 : Peserta Didik; th. 2027 : Peserta Didik; th. 2028 : Peserta Didik; th. 2029 : Peserta Didik; th. 2030 : Peserta Didik			

No	Strategi OPF/PK/KE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas Rul			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jmlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Sal Penerima Manfaat		
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
272	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIR, CABDIN IV	1.01.02.1.02.0037	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	SMK Semi Boarding Cabdin IV			5.466.900.000	5.466.900.000	5.466.900.000		5.466.900.000	5.466.900.000	APBD	Berkelanjutan	SMK N 2 Rembang SMK N 1 Jepen SMK N Wirosoari	th. 2025 : Peserta Didik; th. 2026 :270 Peserta Didik; th. 2027 :270 Peserta Didik; th. 2028 : 270 Peserta Didik; th. 2029 : 270 Peserta Didik; th. 2030 : 270 Peserta Didik	Pengelolaan SMK Semi Boarding	Uang	Pemberian biaya pendidikan kepada siswa miskin dengan konsep sekolah asrama gratis dan pembiayaan pendidikan gratis	
273	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIR, CABDIN V	1.01.02.1.02.0037	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	SMK Semi Boarding Cabdin V			1.822.300.000	1.822.300.000	1.822.300.000		1.822.300.000	1.822.300.000	APBD	Berkelanjutan	SMK N 1 Tulung - Klaten	th. 2025 : Peserta Didik; th. 2026 :90 Peserta Didik; th. 2027 :90 Peserta Didik; th. 2028 : 90 Peserta Didik; th. 2029 : 90 Peserta Didik; th. 2030 : 90 Peserta Didik	Pengelolaan SMK Semi Boarding	Uang	Pemberian biaya pendidikan kepada siswa miskin dengan konsep sekolah asrama gratis dan pembiayaan pendidikan gratis	
274	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIR, CABDIN VI	1.01.02.1.02.0037	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	SMK Semi Boarding Cabdin VI			3.644.600.000	3.644.600.000	3.644.600.000		3.644.600.000	3.644.600.000	APBD	Berkelanjutan	- SMKN Kedawung Sragen - SMKN 2 Wonogiri	th. 2025 : Peserta Didik; th. 2026 :180 Peserta Didik; th. 2027 :180 Peserta Didik; th. 2028 : 180 Peserta Didik; th. 2029 : 180 Peserta Didik; th. 2030 : 180 Peserta Didik	Pengelolaan SMK Semi Boarding	Uang	Pemberian biaya pendidikan kepada siswa miskin dengan konsep sekolah asrama gratis dan pembiayaan pendidikan gratis	
275	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIR, CABDIN IX	1.01.02.1.02.0037	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	SMK Semi Boarding Cabdin IX			7.289.200.000	7.289.200.000	7.289.200.000		7.289.200.000	7.289.200.000	APBD	Berkelanjutan	- SMKN 2 Punggelan Banjarnegara - SMKN 1 Alian Kebumren - SMKN 1 Purworejo - SMKN 2 Wonosobo	th. 2025 : Peserta Didik; th. 2026 :360 Peserta Didik; th. 2027 :360 Peserta Didik; th. 2028 : 360 Peserta Didik; th. 2029 : 360 Peserta Didik; th. 2030 : 360 Peserta Didik	Pengelolaan SMK Semi Boarding	Uang	Pemberian biaya pendidikan kepada siswa miskin dengan konsep sekolah asrama gratis dan pembiayaan pendidikan gratis	
276	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIR, CABDIN X	1.01.02.1.02.0037	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	SMK Boarding dan SMK Semi Boarding			12.644.600.000	12.644.600.000	12.644.600.000		12.644.600.000	12.644.600.000	APBD	Berkelanjutan	- SMKN 1 Kalibaghe Banyumas - SMKN 2 Cilacap - Cilacap - SMKN Jateng Purbalingga	th. 2025 : Peserta Didik; th. 2026 :468 Peserta Didik; th. 2027 :468 Peserta Didik; th. 2028 : 468 Peserta Didik; th. 2029 : 468 Peserta Didik; th. 2030 : 468 Peserta Didik	Pengelolaan SMK Boarding dan SMK Semi Boarding	Uang	Pemberian biaya pendidikan kepada siswa miskin dengan konsep sekolah asrama gratis dan pembiayaan pendidikan gratis	
277	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIR, CABDIN XI	1.01.02.1.02.0037	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	SMK Semi Boarding Cabdin XI			1.822.300.000	1.822.300.000	1.822.300.000		1.822.300.000	1.822.300.000	APBD	Berkelanjutan	SMKN Tanjung Kah. Brebes	th. 2025 : Peserta Didik; th. 2026 :90 Peserta Didik; th. 2027 :90 Peserta Didik; th. 2028 : 90 Peserta Didik; th. 2029 : 90 Peserta Didik; th. 2030 : 90 Peserta Didik	Pengelolaan SMK Semi Boarding	Uang	Pemberian biaya pendidikan kepada siswa miskin dengan konsep sekolah asrama gratis dan pembiayaan pendidikan gratis	
278	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIR, CABDIN XII	1.01.02.1.02.0037	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	SMK Semi Boarding Cabdin XII			1.822.300.000	1.822.300.000	1.822.300.000		1.822.300.000	1.822.300.000	APBD	Berkelanjutan	SMKN Randudongkal Kah. Pemalang	th. 2025 : Peserta Didik; th. 2026 :90 Peserta Didik; th. 2027 :90 Peserta Didik; th. 2028 : 90 Peserta Didik; th. 2029 : 90 Peserta Didik; th. 2030 : 90 Peserta Didik	Pengelolaan SMK Semi Boarding	Uang	Pemberian biaya pendidikan kepada siswa miskin dengan konsep sekolah asrama gratis dan pembiayaan pendidikan gratis	
279	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIR, CABDIN II	1.01.2.1.02.0028	Program pengelolaan pendidikan	Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan mebel sekolah	Pengadaan Mebel SMK Semi Boarding CD II			150.000.000								th. 2025 : SMKN 1 Demak	Unit; th. 2027 : Unit; th. 2028 : Unit; th. 2029 : Unit; th. 2030 : Unit				
280	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIR, CABDIN IV	1.01.2.1.02.0028	Program pengelolaan pendidikan	Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan mebel sekolah	Pengadaan Mebel SMK Semi Boarding CD II			735.000.000								th. 2025 : SMKN Jepang	Unit; th. 2027 : Unit; th. 2028 : Unit; th. 2029 : Unit; th. 2030 : Unit				
281	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIR, CABDIN VI	1.01.2.1.02.0028	Program pengelolaan pendidikan	Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan mebel sekolah	Pengadaan Mebel SMK Semi Boarding CD II			105.000.000								th. 2025 : SMKN Sragen	Unit; th. 2027 : Unit; th. 2028 : Unit; th. 2029 : Unit; th. 2030 : Unit				
282	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIR, CABDIN VIII	1.01.2.1.02.0028	Program pengelolaan pendidikan	Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan mebel sekolah	Pengadaan Mebel SMK Semi Boarding CD II			150.000.000								th. 2025 : SMKN 1 Purworejo	Unit; th. 2027 : Unit; th. 2028 : Unit; th. 2029 : Unit; th. 2030 : Unit				
283	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	DISDIR, CABDIN IX	1.01.2.1.02.0028	Program pengelolaan pendidikan	Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan mebel sekolah	Pengadaan Mebel SMK Semi Boarding CD II			546.000.000								th. 2025 : SMKN Alian, SMKN 2 Wonosobo, SMKN Punggelan	Unit; th. 2027 : Unit; th. 2028 : Unit; th. 2029 : Unit; th. 2030 : Unit				
284	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Bidang Pendidikan Menengah Atas	1.01.02.1.01.0041	Program pengelolaan pendidikan	Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik			400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 4 unit; th. 2026 :4 unit; th. 2027 :4 unit; th. 2028 :4 unit; th. 2029 : 4 unit; th. 2030 : 4 unit	Pengelolaan pendidikan kejuruan	Uang	Pengadaan barang berupa alat praktik dan alat peraga pembelajaran	
285	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0033	Program pengelolaan pendidikan	Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik			71.200.000.000	71.200.000.000	71.200.000.000	71.200.000.000	71.200.000.000	71.200.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 60 unit; th. 2026 :60 unit; th. 2027 : 60 unit; th. 2028 : 60 unit; th. 2029 : 60 unit; th. 2030 : 60 unit	Pengelolaan pendidikan kejuruan	Uang	Pengadaan barang berupa alat praktik dan alat peraga pembelajaran	
286	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	1.01.02.1.02.0056	Program pengelolaan pendidikan	Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK			2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 150 orang; th. 2026 :150 orang; th. 2027 :150 orang; th. 2028 : 150 orang; th. 2029 :150 orang; th. 2030 :150 orang	Pengelolaan pendidikan kejuruan	Fasilitasi kegiatan	Pembayaran pada kegiatan sertifikasi kompetensi pendidik SMK	
287	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Bidang Pendidikan Menengah Atas	1.01.02.1.01.0049	Program pengelolaan pendidikan	Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	APBD	Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : siswa; th. 2026 :120 siswa; th. 2027 :125 siswa; th. 2028 :128 siswa; th. 2029 : 130 siswa; th. 2030 : 132 siswa	Fasilitasi kegiatan siswa untuk kegiatan peningkatan minat, bakat dan kreativitas siswa	Fasilitasi kegiatan	Pembayaran kegiatan	
288	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0041	Program pengelolaan pendidikan	Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			1.406.500.000	5.000.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	APBD	Berkelanjutan	Jawa Tengah	th. 2025 : 50 siswa; th. 2026 :50 siswa; th. 2027 : 50 siswa; th. 2028 : 50 siswa; th. 2029 : 50 siswa; th. 2030 : 50 siswa	Fasilitasi kegiatan siswa untuk kegiatan peningkatan minat, bakat dan kreativitas siswa	Fasilitasi kegiatan	Pembayaran kegiatan	
289	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dispermadesdukcapil	2.2.12.02.1.01.0003	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pemetaan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				0	18.616.000	18.616.000	18.616.000	18.616.000	18.616.000	APBD	Tidak Berkelanjutan		th. 2025 : ; th. 2026 :2 kali pelaksanaan ; th. 2027 :2 kali pelaksanaan ; th. 2028 : 2 kali pelaksanaan ; th. 2029 : 2 kali pelaksanaan ; th. 2030 : 2 kali pelaksanaan	Fasilitasi Pemadanan data dari Kabupaten/Kota termasuk lintas sektor dengan menghasilkan output data yang sudah dipadankan sesuai dengan pengajalan	-	1 tahun	
290	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Dispermadesdukcapil	2.2.12.04.1.03.0001	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pemetaan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	35 kabupaten/Kota	th. 2025 : 4 kali ; th. 2026 :4 kali ; th. 2027 :4 kali ; th. 2028 : 4 kali ; th. 2029 : 4 kali ; th. 2030 : 4 kali	Tersosialisasinya pemahaman data kependudukan	-	1 tahun	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi OPKPKKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas RUII			Alokasi Anggaran (Rp)						Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jmlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Asal Pemberian Bantuan	
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029	2030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
291	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dispermadessdukcapai	2.2.13.05.1.01.0005	Program Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			- Peningkatan kapasitas pengelola BUMDES - Klasifikasi tumbuh - Peningkatan kapasitas pengelola BUMDES - Klasifikasi berkembang	29.000.000	130.200.000	130.200.000		130.200.000	130.200.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	29 Kabupaten	th. 2025 : Pemula: 322 unit BUMDES, berkembang: 344 unit BUMDes ; th. 2026 : unit Bumdes ; th. 2027 : unit bumdes ; th. 2028 : unit bumdes ; th. 2029 : unit bumdes ; th. 2030 :	Meningkatnya kapasitas pengelola BUMDES	-	1 tahun	
292	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dispermadessdukcapai	2.2.13.03.1.01.0003	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		133.345.000		- Bimtek manajemen pengelolaan kawasan perdesaan - Lokakarya penentuan prioritas rencana pembangunan kawasan perdesaan - Workshop PKP	133.345.000	231.482.000	231.482.000	231.482.000	231.482.000	231.482.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	2 Kabupaten di Jawa Tengah	th. 2025 : 140 Orang ; th. 2026 : orang ; th. 2027 : orang ; th. 2028 : orang ; th. 2029 : orang ; th. 2030 :	Terbentuknya kawasan perdesaan prioritas provinsi Meningkatnya kapasitas pengelola BUMDESMA	-	1 tahun	
293	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dispermadessdukcapai	2.2.13.04.1.01.0015	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			- Pengukuran klasifikasi Bumdesma - Bimtek Pengelola BUMDesma		75.000.000	110.000.000		250.000.000	275.000.000	300.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	29 Kabupaten	th. 2025 : unit Bumdesamanya ; th. 2026 : unit Bumdesamanya ; th. 2027 : Unit bumdesamanya ; th. 2028 : Unit bumdesamanya ; th. 2029 : Unit bumdesamanya ; th. 2030 :	Meningkatnya kapasitas pengelola BUMDESMA	-	1 tahun
294	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dispermadessdukcapai	2.2.13.04.1.01.0018	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi pencatatan data dan Informasi mengenai pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota			- Mendukung optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa - Updating SI Desa - Penyusunan Juknis optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	113.389.000	275.000.000	325.000.000	465.000.000	575.000.000	675.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	29 Kabupaten	th. 2025 : 29 Kabupaten ; th. 2026 : 29 Kabupaten ; th. 2027 : 29 Kabupaten ; th. 2028 : 29 Kabupaten ; th. 2029 : 29 Kabupaten ; th. 2030 : 29 Kabupaten		-	1 tahun	
295	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	Dispermadessdukcapai	2.2.13.04.1.01.0012	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis			Facilitasi pencatatan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan	312.796.000	355.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000	600.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	29 Kabupaten	th. 2025 : 29 Kabupaten ; th. 2026 : 29 Kabupaten ; th. 2027 : 29 Kabupaten ; th. 2028 : 29 Kabupaten ; th. 2029 : 29 Kabupaten ; th. 2030 : 29 Kabupaten		-	1 tahun	
296	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.	Dinas Perhubungan	2.15.02 2.15.02.1.08 2.15.02.1.08.0003	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) DaerahProvinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	94.501.102.000		Pemberian tarif khusus pengguna Trans Jateng	94.501.102.000	95.755.751.000	104.035.254.000	126.138.897.000	146.390.664.000	158.951.764.000	APBD	Berkelanjutan	- th. 2025-2026 : Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Purbalingga - th. 2027 : Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Purbalingga, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung th. 2028-2030 : Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Purbalingga, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati	th. 2025 : 115 Unit; th. 2026 : 115 Unit; th. 2027 : 129 Unit; th. 2028 : 157 Unit; th. 2029 : 171 Unit; th. 2030 : 185 Unit	2025 : 62.827.735.838 2026 : 63.197.893.406 2027 : 64.631.696.079 2028 : 70.205.040.112 2029 : 78.227.338.048 2030 : 83.006.715.554	Pemberian tarif khusus yang diatur dalam SK Gubernur No. 100.3.3.1/124 Tahun 2025 tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng tanggal 30 April 2025. Tarif khusus : Rp. 1.000,- (Pelajar, Veteran, Buruh, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas) Tarif Umum : Rp. 5.000,- (Penumpang Umum).	Pelayanan setiap hari / 365 kali (jumlah hari) dalam 1 tahun	
297	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	Dinas Perhubungan	2.15.02 2.15.02.1.08 2.15.02.1.08.0003	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) DaerahProvinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Penyerapan tenaga kerja yang masuk dalam basis data mikro kemiskinan	7.627.620.000	7.627.620.000	8.407.620.000	9.967.620.000	10.747.620.000	11.527.620.000	APBD	berkelanjutan	- th. 2025-2026 : Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Purbalingga - th. 2027 : Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Purbalingga, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati	th. 2025 : 236 Orang; th. 2026 : 236 Orang; th. 2027 : 261 Orang; th. 2028 : 311 Orang; th. 2029 : 336 Orang; th. 2030 : 361 Orang	Besaran gaji perbulan antara 2.900.000 - 3.635.000 sesuai dengan jabatan dan wilayah	Peningkatan Pendapatan (Gaji) Crew Trans Jateng yang masuk dalam basis data mikro kemiskinan dalam 1 Tahun (12 bulan)	Peningkatan pendapatan (Pemberian Gaji) kepada Crew yang masuk dalam basis data mikro kemiskinan dalam 1 Tahun (12 bulan)	
298	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.	Biro Hukum	4.4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	800.000.000		Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan/atau kelompok rentan yang sedang menghadapi permasalahan hukum melalui LBH yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		390.000.000	390.000.000	390.000.000	390.000.000	390.000.000	APBD	tidak berkelanjutan.	35 Kab/Kota	th. 2025 : 320 Perkara; th. 2026 : 260 Perkara; th. 2027 : 260 Perkara; th. 2028 : 260 Perkara; th. 2029 : 260 Perkara; th. 2030 : 260 Perkara	- Tahun 2025: Rp. 2.500.000 (satu) pengurangan perkara menerima bantuan sebesar 2.500.000 - Tahun 2026-2030: Rp. untuk 1 (satu) pengurangan perkara menerima bantuan minimal sebesar 1.500.000	bantuan penanganan perkara di lembaga peradilan	Dalam 1 Tahun diberikan 4 termin setiap triwulan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	sub kegiatan	Aktivitas Rill			Alokasi Anggaran (Rp)						Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jmlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Asai Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						12	13	14	15	16	17	18
299	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	BPKD	1.05.03.1.02.0013	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			Pembentukan Desa Tangguh Bencana	176.493.000	200.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	350.000.000	APBD	tidak berkelanjutan	15 Kab/Kota berdasarkan kajian	th. 2025 : 15 Kawasan (Desa); th. 2026 : 15 Kawasan (Desa); th. 2027 : 20 Kawasan (Desa); th. 2028 : 20 Kawasan (Desa); th. 2029 : 25 Kawasan (Desa); th. 2030 : 25 Kawasan (Desa)	Masyarakat Desa tidak secara langsung menerima besaran manfaat dalam bentuk nominal uang tetapi bentuk kegiatan (sosialisasi, praktek/glati) untuk meningkatkan ketanggahan dalam penanganan bencana	Informasi dan Pelatihan/Glati/Simulasi Bencana	Dalam 1 tahun sebanyak 1 kali kegiatan
300	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	BPKD	1.05.03.1.01.0003	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi			Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana	0	0	0	0	75.000.000	0	APBD	tidak berkelanjutan		th. 2025 : 0 Dokumen; th. 2026 : 0 Dokumen; th. 2027 : 0 Dokumen; th. 2028 : 0 Dokumen; th. 2029 : 1 Dokumen; th. 2030 : 0 Dokumen	memberikan informasi terkait daerah rawan bencana	Informasi Daerah Rawan Bencana	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRIB) disusun 5th sekali
301	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	BPKD	1.05.03.1.02.0026	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana			Penyediaan Early Warning System	569.650.000	800.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	APBD	tidak berkelanjutan	15 kab/kota rawan bencana longsor	th. 2025 : 99 Kegiatan; th. 2026 : 10 Kegiatan; th. 2027 : 15 Kegiatan; th. 2028 : 15 Kegiatan; th. 2029 : 15 Kegiatan; th. 2030 : 15 Kegiatan	1 unit EWS kurang lebih bernilai 65jt dimanfaatkan bersama-sama oleh seluruh masyarakat di daerah rawan bencana	Alat peringatan dini longsor	Dalam 1 tahun sebanyak 1 kali di lokasi yang berbede sesuai kajian rawan bencana longsor
302	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	BPKD	1.05.03.1.02.0030	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	42.115.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD	tidak berkelanjutan	Sekolah rawan bencana di Jawa Tengah	th. 2025 : 99 Orang; th. 2026 : 50 Orang; th. 2027 : 50 Orang; th. 2028 : 50 Orang; th. 2029 : 50 Orang; th. 2030 : 50 Orang		Informasi dan Pelatihan/Glati/Simulasi Bencana	satu kali dalam satu tahun kegiatan
303	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	BPKD	1.05.03.1.03.0026	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi			Pelatihan Belawan Penanggulangan Bencana	0	150.000.000	175.000.000	200.000.000	225.000.000	250.000.000	APBD	tidak berkelanjutan	di Jawa Tengah	th. 2025 : 0 Orang; th. 2026 : 200 Orang; th. 2027 : 200 Orang; th. 2028 : 200 Orang; th. 2029 : 200 Orang; th. 2030 : 200 Orang	-	Informasi dan Pelatihan	Dalam 1 tahun sebanyak 1 kali kegiatan
304	Meminimalikan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	BPKD	1.05.03.1.03.0028	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Penyediaan logistik untuk penyelamatan dan evakuasi pada saat bencana	1.190.110.000	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.125.000.000	2.550.000.000	APBD	tidak berkelanjutan	35 Kab/Kota	th. 2025 : 5000 Orang; th. 2026 : 5000 Orang; th. 2027 : 6500 Orang; th. 2028 : 6500 Orang; th. 2029 : 6500 Orang; th. 2030 : 6500 Orang	setiap orang menerima kurang lebih 100.000 dalam bentuk bantuan logistik bencana	Logistik bencana	sebanyak satu kali dalam satu kejadian bencana
Total										1.437.617.868.500	1.681.190.481.210	1.737.893.876.488	1.794.909.884.588	1.761.309.467.429	1.985.962.999.324							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V

PENUTUP

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak, memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Langkah-langkah tersebut harus ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, serta diarahkan pula untuk peningkatan pendapatan.

Dalam rangka penurunan angka kemiskinan sesuai target Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung penanggulangan kemiskinan adalah menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen strategis kebijakan di daerah, yaitu Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat dilihat bahwa RPKD dapat mengisi, memperkaya dan memperkuat proses penyusunan, dan substansi dari setiap dokumen perencanaan dan pembangunan daerah, baik dokumen 5 tahunan yakni RPJMD dan Renstra-OPD, dan dokumen tahunan RKPD dan Renja SKPD.

Hal lain yang membuat RPKD perlu adalah karena masalah kemiskinan merupakan masalah khas lokal (*local specific*), sehingga tiap daerah memerlukan kebijakan yang berbeda, maka RPKD diperlukan untuk menjabarkan strategi dasar ke dalam konteks masalah lokal. Proses ini menjadi sangat strategis, mengingat dokumen RPKD bukanlah dokumen yang eksklusif, tetapi seharusnya inklusif. RPKD harus mengisi, memperkaya dan memperkuat proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran reguler di daerah. Hal ini sejalan dan sesuai dengan semangat otonomi daerah yang sedang berjalan menuju arah perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001